

Blueprint

Pembangunan Kependudukan INDONESIA 2045





Blueprint

**Pembangunan
Kependudukan
INDONESIA
2045**



Tim Penyusun

PELINDUNG

Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)
(Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si, M.Eng
(Deputi Bidang Pengendalian Penduduk)

PENGARAH

Ir. Milarahmawati, MS
(Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk)

PENYUSUN

Ir. Milarahmawati, MS
(Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk)

Dr. Munawar Asikin, S.Si, MSE
(Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk)

Dr. Edi Setiawan, S.Si, M.Sc, MSE
(Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan)

Dr. Faharuddin, SST, M.Si
(Direktur Analisis Dampak Kependudukan)

Rikhaparamita Siregar, S.Psi, MSR

Dody Setyawan Purwantoro, SE

KONTRIBUTOR

Prof. Dr. Sukamdi, M.Sc

Prof. Omas Bulan Samosir, Ph.D

Prof. Turro S. Wongkaren, Ph.D

Ir. Zainul Hidayat, Msi

Sunarto, MPA, Ph.D

Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M. Sc, Dip.Com

Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial – KemenPPN/Bappenas

Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Kependudukan dan KB – Kemenko PMK

Dirjen Dukcapil & SUPD IV - Kementerian Dalam Negeri

Badan Pusat Statistik

EDITOR

Komunitas Homerus Indonesia (KHI)

DESAIN & TATA LETAK

Subhan Subiyakto

PENERBIT

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Tahun 2024
Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk



Cover Story



Pembangunan kependudukan sejatinya bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia berkualitas yang hidup dalam negara yang merdeka, berdaulat, aman, damai, sejahtera, berbudaya dan beragama yang menjadi tujuan dari Visi Indonesia Emas 2045. Bertekad bersama dalam perbedaan untuk mewujudkan cita-cita bangsa menyambut Indonesia Emas 2045.



Daftar Isi

vi

DAFTAR GRAFIK

viii

DAFTAR TABEL

ix

DAFTAR GAMBAR

x

DAFTAR SINGKATAN

xii

KATA PENGANTAR

xiv

SAMBUTAN

xviii

PERSPEKTIF

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	2
1.2	Urgensi Penyusunan <i>Blueprint</i> Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045	9
1.2.1	Pilar Pembangunan Kependudukan	11
1.3	Tujuan Penyusunan <i>Blueprint</i> Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045	15
1.4	Metode Penyusunan <i>Blueprint</i> Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045	16

17

BAB II ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN INDONESIA SAAT INI

2.1	Pengendalian Kuantitas Penduduk	18
2.1.1	Jumlah Penduduk	18
2.1.2	Komposisi Penduduk	19
2.1.3	Sex Ratio	19
2.1.4	Kelahiran/Fertilitas	20
2.1.5	Rasio Ketergantungan	27
2.1.6	Bonus Demografi	30
2.1.7	Transisi Demografi	32
2.1.8	Mortalitas	34
2.2	Peningkatan Kualitas Penduduk	41
2.2.1	Kesehatan	41
2.2.2	Pendidikan	45
2.2.3	Revolusi Mental	53
2.2.4	Indeks Pembangunan Pemuda	54
2.2.5	Indeks Pembangunan Manusia	56
2.2.6	Usia Harapan Hidup	56
2.3	Pembangunan Keluarga	61



2.3.1 Ketahanan Fisik _____	62
2.3.2 Ketahanan Ekonomi _____	66
2.3.3 Ketahanan Psikososial _____	69
2.3.4 Ketahanan Sosial Budaya _____	76
2.4 Persebaran dan Mobilitas Penduduk _____	86
2.4.1 Persebaran Penduduk _____	86
2.4.2 Migrasi _____	88
2.4.3 Mobilitas Non Permanen _____	91
2.4.4 Pekerjaan _____	93
2.4.5 Infrastruktur _____	99
2.4.6 Perkembangan Status Pembangunan Desa _____	101
2.4.7 Bencana _____	103
2.4.8 Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara _____	106
2.5 Penataan Administrasi Kependudukan _____	109
2.5.1 Pemanfaatan Data Kependudukan _____	110

115

BAB III ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

3.1 Tantangan Kependudukan Global _____	116
3.2 Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Indonesia Menuju 2045 _____	124
3.2.1 Isu Terkait Kuantitas Penduduk _____	127
3.2.2 Isu Terkait Peningkatan Kualitas Penduduk _____	132
3.2.3 Isu Terkait Pembangunan Keluarga _____	140
3.2.4 Isu Terkait Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk _____	150
3.2.5 Isu Terkait Penguatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan dan <i>Database</i> Kependudukan _____	154

159

BAB IV PRINSIP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

4.1 Pembangunan Berwawasan Kependudukan _____	161
4.2 Pembangunan Berkelanjutan _____	163
4.3 Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia _____	166
4.4 Pembangunan Berwawasan Bhinneka Tunggal Ika (Multikulturalisme) _____	170
4.5 Pembangunan Berwawasan Global (Berbasis Responsif) _____	177

181

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN Kependudukan MENUJU INDONESIA EMAS 2045

5.1 Visi dan Misi Pembangunan Kependudukan 2045 _____	182
5.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045 _____	186
5.3 Roadmap Pembangunan Kependudukan Menuju Indonesia Emas 2045 _____	199
5.3.1 Pilar Pengendalian Kuantitas Penduduk _____	203
5.3.2 Pilar Peningkatan Kualitas Penduduk _____	208
5.3.3 Pilar Pembangunan Keluarga _____	215
5.3.4 Pilar Mobilitas dan Penataan Persebaran Penduduk _____	221
5.3.5 Pilar Tata Kelola Administrasi dan <i>Database</i> Kependudukan _____	225
DAFTAR PUSTAKA _____	229



Daftar Grafik

Grafik x.1	5 Rasionalitas <i>Blueprint</i> Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045	xxiii
Grafik 1.1.	Lima pilar strategi pembangunan kependudukan	6
Grafik 1.2.	Tujuan penyusunan <i>Blueprint</i> Pembangunan Kependudukan Indonesia	15
Grafik 2.1.	Jumlah penduduk hasil sensus	18
Grafik 2.2.	Piramida penduduk Indonesia 2010 dan 2020	19
Grafik 2.3.	Angka kelahiran total (TFR)	21
Grafik 2.4.	Angka kelahiran total berdasarkan pulau tahun 2020	21
Grafik 2.5.	Angka kelahiran menurut kelompok umur (ASFR)	22
Grafik 2.6.	ASFR 15-19 tahun menurut provinsi	24
Grafik 2.7.	Angka kelahiran pada usia 15-19 tahun menurut daerah tempat tinggal	25
Grafik 2.8.	Struktur penduduk dan rasio ketergantungan Indonesia 1971-2020	27
Grafik 2.9.	Angka ketergantungan penduduk Indonesia 2020-2050	28
Grafik 2.10.	Rasio ketergantungan menurut provinsi	29
Grafik 2.11.	Rasio ketergantungan Indonesia	30
Grafik 2.12.	Piramida penduduk Indonesia tahun 2020	32
Grafik 2.13.	Angka kematian ibu (AKI)	35
Grafik 2.14.	Angka kematian bayi (AKB)	38
Grafik 2.15.	Angka kematian bayi di Indonesia tahun 2022 hasil <i>Long Form</i> SP2020	40
Grafik 2.16.	Angka prevalensi stunting tingkat nasional	43
Grafik 2.17.	Prevalensi balita stunted berdasarkan provinsi, SSGI 2022	44
Grafik 2.18.	Angka Partisipasi Sekolah (SPSS) menurut kelompok umur tahun 2020-2022	46
Grafik 2.19.	Perbandingan anggaran dan pengeluaran pendidikan Indonesia dan OECD	50
Grafik 2.20.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2010-2022	56
Grafik 2.21.	Usia harapan hidup Indonesia 2010-2022	57
Grafik 2.22.	Asumsi UHH saat lahir Indonesia menurut skenario tren, 2020-2050	58
Grafik 2.23.	Usia Harapan Hidup setiap provinsi 2021-2022	59
Grafik 2.24.	Presentase merokok pada umur ≥ 15 tahun, Indonesia 2015-2021	63
Grafik 2.25.	Jumlah dan presentsae penduduk miskin Indonesia 2002-2022	66
Grafik 2.26.	Pertumbuhan dan kontribusi PDRB menurut wilayah	68
Grafik 2.27.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2021 dan 2022	69
Grafik 2.28.	Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2010-2022	70
Grafik 2.29.	Persentase keterlibatan perempuan di parlemen menurut provinsi tahun 2022	71
Grafik 2.30.	Proyeksi komponen IDG sampai 2024	72
Grafik 2.31.	Indeks pemulihan hak anak tahun 2020	74
Grafik 2.32.	Prevalensi disabilitas umur 5 tahun ke atas di Indonesia tahun 2020	75
Grafik 2.33.	Persentase penduduk dengan disabilitas menurut jenis kesulitan dan jenis kelamin di Indonesia tahun 2020	75



Grafik 2.34.	Provinsi dengan struktur penduduk tua tahun 2021 _____	76
Grafik 2.35.	Perkembangan rasio ketergantungan penduduk lanjut usia 2017-2021 _____	77
Grafik 2.36.	Angka perceraian di Indonesia 2014-2022 _____	80
Grafik 2.37.	ASFR 15-19 menurut provinsi hasil LF SP 2020 _____	82
Grafik 2.38.	Angka kelahiran pad usia 15-19 tahun _____	83
Grafik 2.39.	Tren ASFR 15-19 Indonesia dari SP 1971 sampai LF SP 2020 _____	84
Grafik 2.40.	Persebaran penduduk Indonesia 1971-2010 _____	86
Grafik 2.41.	Peta persebaran penduduk Indonesia tahun 2020 _____	87
Grafik 2.42.	Jumlah penduduk menurut provinsi di Indonesia _____	88
Grafik 2.43.	Tren angka migrasi risen antar provinsi secara nasional SP 1980-SP 2020 _____	89
Grafik 2.44.	Angka migrasi masuk dan angka migrasi keluar risen, SP 2020 _____	90
Grafik 2.45.	Migrasi internasional masuk, keluar dan netto, Supas 2015 _____	91
Grafik 2.46.	Penempatan pekerja migran Indonesia 2019-2023 _____	92
Grafik 2.47.	Tingkat Partisipasi Angka Kerja (TPAK) nasional 2018-2022 _____	95
Grafik 2.48.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan _____	96
Grafik 2.49.	Kemantapan jalan nasional tahun 2020 _____	99
Grafik 2.50.	Tren indeks desa membangun 2020-2022 _____	101
Grafik 2.51.	Desa membangun tahun 2020-2022 menurut provinsi _____	102
Grafik 2.52.	Peta indeks resiko bencana tingkat provinsi bencana tingkat provinsi tahun 2022 _____	104
Grafik 2.53.	Cakupan wilayah kawasan IKN _____	107
Grafik 2.54.	Persentase penduduk memiliki KTP tahun 2022 _____	112
Grafik 2.55.	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun menurut provinsi tahun 2022 _____	113
Grafik 2.56.	Cakupan kartu identitas anak tahun 2022 _____	114
Grafik 3.1	Masalah sosial yang muncul dari penggunaan internet _____	119
Grafik 3.2	Proyeksi penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk 2020 _____	126
Grafik 3.3	Data korban kekerasan berbasis gender terhadap perempuan tahun 2021 _____	139
Grafik 3.4	Proporsi penduduk 65+ setiap provinsi di tahun 2024 _____	142
Grafik 3.5	Kabupaten/kota yang memasuki <i>aging population</i> _____	143
Grafik 4.1	Ragam suku di Indonesia, 2010 _____	171
Grafik 5.1	Hubungan antara dinamika penduduk dan SDGs _____	187
Grafik 5.2	Kebijakan pembangunan manusia dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif _____	190
Grafik 5.3	<i>Roadmap</i> pembangunan kependudukan Indonesia _____	201
Grafik 5.4	Kebijakan Keluarga Berencana di era <i>replacement level</i> _____	207
Grafik 5.5	Pentingnya menjaga TFR 2,0 dan NRR 1 _____	208



Daftar Tabel

Tabel 2.1	Angka kelahiran total / <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) menurut provinsi, 1971-2020	- 20
Tabel 2.2	Angka kelahiran menurut kelompok umur ibu (<i>Age Spesific Fertility Rate/ASFR</i>) dan provinsi tahun 2020	23
Tabel 2.3	Klasifikasi transisi demografi	33
Tabel 2.4	Angka Kematian Ibu (AKI) menurut provinsi berdasarkan LF SP2020	36
Tabel 2.5	Indikator kesehatan ibu dan neonatal	37
Tabel 2.6	Angka Kematian Bayi/AKB (<i>Infant Mortality Rate/IMR</i>) menurut provinsi tahun 2020	39
Tabel 2.7	Angka partisipasi sekolah di Indonesia tahun 2019, 2020, 2021	45
Tabel 2.8	Rata-rata lama sekolah di Indonesia, tahun 2020-2021-2022	47
Tabel 2.9	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki menurut provinsi	48
Tabel 2.10	Tingkat penyelesaian pendidikan menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin	49
Tabel 2.11	Persentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah ke atas	52
Tabel 2.12	Indikator penyusun Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indonesia, 2021	55
Tabel 2.13	Usia harapan hidup menurut jenis kelamin	60
Tabel 2.14	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun menurut provinsi	64
Tabel 2.15	Indeks pembangunan keluarga per provinsi tahun 2022	79
Tabel 2.16	Kasus perceraian per provinsi, 2020-2022	81
Tabel 2.17	Jumlah perceraian menurut faktor tahun 2020	82
Tabel 2.18	Persentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah ke atas	94
Tabel 2.19	Penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kegiatan selama seminggu yang lalu	94
Tabel 2.20	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	95
Tabel 2.21	Perkembangan remitansi 2011-2018	97
Tabel 2.22	Kemantapan jalan nasional tahun 2020-2021	100
Tabel 2.23	Indeks risiko bencana 2015-2021	103
Tabel 2.24	Jumlah kejadian bencana 2015-2021	104
Tabel 2.25	Indeks risiko bencana provinsi tahun 2022	105
Tabel 3.1	Proyeksi penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk 2020	126
Tabel 4.1	Sebaran suku di tujuh wilayah utama di Indonesia tahun 2000 dan 2010	173



Tabel 5.1	<i>Roadmap</i> pengendalian kuantitas penduduk tahun 2022-2045	207
Tabel 5.2	<i>Roadmap</i> peningkatan kualitas penduduk (pendidikan) tahun 2022-2045	209
Tabel 5.3	<i>Roadmap</i> peningkatan kualitas penduduk (kesehatan) tahun 2022-2045	213
Tabel 5.4	<i>Roadmap</i> peningkatan kualitas penduduk (ekonomi) tahun 2022-2045	214
Tabel 5.5	<i>Roadmap</i> pembangunan keluarga 2022-2045	217
Tabel 5.6	Indikator persebaran penduduk	221
Tabel 5.7	<i>Roadmap</i> tata kelola administrasi kependudukan dan database kependudukan tahun 2022-2045	226

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Menjaga kuantitas dan kualitas penduduk	9
Gambar 1.2	Pendataan penduduk lanjut usia	12
Gambar 2.1	Menjaga tumbuh kembang anak agar terhindar dari <i>stunting</i>	42
Gambar 2.2	Keluarga berkualitas	61
Gambar 2.3	Desain maket Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara	108
Gambar 2.4	Pendataan penduduk diperlukan untuk pelayanan kesehatan	109
Gambar 3.1	Peningkatan populasi	128
Gambar 3.2	Peran penting orangtua terhadap pendidikan anak	141
Gambar 3.3	Keterbatasan kesempatan bekerja mendorong penduduk bermigrasi	151
Gambar 3.4	Pendataan dan pelayanan kesehatan pada balita	155
Gambar 4.1	Mendidik anak mencintai bangsa melalui sejarah	160
Gambar 4.2	Memberikan literasi dan mengasah keterampilan digital pada anak	179



Daftar Singkatan

AHH	: Angka Harapan Hidup
AKB	: Angka Kematian Bayi
AKI	: Angka Kematian Ibu
AKN	: Angka Kematian Neonatal
AKPSH	: Administrasi Kependudukan dan Pengembangan Statistik Hayati
ANC	: <i>Antenatal Care</i>
APD	: Alat Pelindung Diri
APM	: Angka Partisipasi Murni
APS	: Angka Partisipasi Sekolah
ASFR	: <i>Age Spesific Fertility Rate</i>
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BKR	: Bina Keluarga Remaja
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPS	: Badan Pusat Statistik
CDR	: <i>Crude Death Rate</i>
Covid	: <i>Coronavirus Disease</i>
CPR/mCPR	: <i>Contraceptive Prevalence Rate/modern Contraceptive Prevalence Rate</i>
Disdukcapil	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DJSN	: Dewan Jaminan Sosial Nasional
DR	: <i>Dependency Ratio</i> atau rasio ketergantungan
DTPK	: Daerah Tertinggal Perbatasan Kepulauan
GNLD	: Gerakan Nasional Literasi Digital
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
FKTP	: Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
FKTL	: Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut
GDPK	: <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan
GenRe	: Generasi Berencana
GNRM	: Gerakan Nasional Revolusi Mental
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LF SP2020	: <i>Long Form Sensus Penduduk 2020</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
iBangga	: Indeks Pembangunan Keluarga
IDM	: Indeks Desa Membangun
IMR	: <i>Infant Mortality Rate</i>
Inpres	: Instruksi Presiden
IPCC	: <i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i>
IPG	: Indeks Pembangunan Gender
IPHA	: Indeks Pemenuhan Hak Anak
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IPP	: Indeks Pembangunan Pemuda
IRBI	: Indeks Risiko Bencana Indonesia
IRBN	: Indeks Rawan Bencana Nasional
IPB	: Indeks Pembangunan Manusia
IPP	: Indeks Pembangunan Pemuda



Iptek	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
K1, K4, K6	: Kunjungan ke-1, Kunjungan ke-4, Kunjungan ke-6
KB	: Keluarga Berencana
Kemendes	: Kementerian Kesehatan
KIA	: Kartu Identitas Anak
KK	: Kartu Keluarga
MDG's	: <i>Millenium Development Goals</i>
MMR	: <i>Maternal Mortality Rate</i>
MUKP	: Median Usia Kawin Pertama
NGO	: <i>Non Governmental Organization</i>
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
P3KE	: Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
PAU D-HI	: Pendidikan Anak Usia Dini–Holistik Integratif
PBI	: Penerima Bantuan Iuran
PDB	: Produk Domestik Bruto
Perpres	: Peraturan Presiden
PIK-RM	: Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa
PP	: Peraturan Pemerintah
PKS	: Perjanjian Kerja Sama
PPKM	: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
PSR	: <i>Pressure, State, Respond</i>
RI	: Republik Indonesia
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Sakernas	: Survei Angkatan Kerja Nasional
SDG's	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDKI	: Survei Demografi Kesehatan Indonesia
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKRT	: Survei Kesehatan Rumah Tangga
Sismonev	: Sistem Monitoring dan Evaluasi Jaminan Sosial
Stranas	: Strategi Nasional
SUPAS	: Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)
TFR	: <i>Total Fertility Rate</i>
TN2PK	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TTD	: Tablet Tambah Darah
UHH	: Usia Harapan Hidup
UHHS	: Usia Harapan Hidup Sehat
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
Unesco	: <i>United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization</i>
UNFPA	: <i>United Nations Population Fund</i>
WCED	: <i>World Commision on Environment and Development</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>



Kata Pengantar



Dr. Bonivasius Prasetya
Ichtiarto, S.Si., M.Eng

Pemerintah RI telah menetapkan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tahun 2011 - 2035 melalui Peraturan Presiden RI No. 153 Tahun 2014. Dalam 10 tahun terakhir ini telah terjadi banyak capaian dan perubahan yang tergambar dalam berbagai data kependudukan, baik yang dihasilkan oleh sensus, registrasi serta sejumlah survei.

Dalam rangka penyempurnaan GDPK serta *updating* berbagai data kependudukan Indonesia 2045. Diharapkan dokumen ini menjadi panduan bagi Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas – 100 Tahun Indonesia Merdeka – tahun 2045.

Sebagai dokumen perencanaan, dalam buku ini disajikan dan dianalisis sejumlah data dan informasi kependudukan terkini maupun prakiraan di masa yang akan datang, diharapkan dapat dipergunakan

menjadi dasar dalam penetapan kebijakan pembangunan yang akurat. Selain data jumlah penduduk, parameter demografi seperti struktur penduduk menurut umur, tingkat kelahiran, tingkat kematian, angka harapan hidup dan sejumlah data tentang kualitas dan mobilitas/persebaran penduduk, juga disajikan dalam buku ini untuk menunjang proses perencanaan pembangunan yang terus akan kita lanjutkan. Tentu saja data tersebut perlu secara berkelanjutan kita lengkapi dan perbaharui sesuai dengan hasil sensus, penelitian dan survei yang ada.



Penyusunan buku *Blueprint* Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045 ini dilakukan dengan memperhatikan arahan dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas serta kerja sama berbagai Kementerian dan Lembaga yang merupakan anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Nasional seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta melibatkan pakar demografi/kependudukan dari berbagai perguruan tinggi. Perhitungan secara teknis dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik.

Dengan diterbitkannya buku *Blueprint* Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045 ini, diharapkan akan mendorong para pihak terkait dalam mengimplementasikan pembangunan yang telah ditetapkan dalam GDPK dan menggerakkan Tim Koordinasi GDPK di semua tingkatan lebih pro aktif dan berkualitas melaksanakan tugas-fungsinya.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah bekerja keras membantu penyusunan hingga penerbitan buku *Blueprint* Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045 ini kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberi kita kekuatan dan kemampuan dalam melaksanakan amanah ini.

Jakarta, Juli 2023

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng



Sambutan



Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Bismillahirrahmanirrahim.



Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga secara tegas mengamanatkan pentingnya Pembangunan kependudukan di Indonesia harus dilaksanakan secara terpadu, komprehensif, terintegrasi dan sinergi yang melibatkan semua pihak dan mengatur tentang mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup.

Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, maka Presiden Republik Indonesia telah menjabarkan amanat tersebut dengan menerbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 153 tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan

Kependudukan. Di dalam Perpres tersebut pembangunan terdiri dari lima pilar yaitu pilar pengendalian kuantitas penduduk, pilar peningkatan kualitas penduduk, pilar pembangunan keluarga, pilar penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk serta pilar pembangunan *database* kependudukan.



Agar Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 yang telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 153 tahun 2014 dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka perlu diikuti dengan pedoman teknis operasional dalam bentuk *Blueprint* Pembangunan Kependudukan. Di dalam *BluePrint* diatur tentang tujuan pembangunan kependudukan, azas kependudukan, kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan serta saran yang akan dicapai pada tahun 2045 sesuai dengan visi Presiden Indonesia Emas tahun 2045.

Diharapkan dengan tersusunnya *Blueprint* Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045, Kementerian Lembaga dan pemerintah terkait dapat melaksanakan Pembangunan kependudukan tersebut dengan baik sesuai dengan kewenangan masing-masing. Selain itu, *Blueprint* Pembangunan Kependudukan ini diharapkan menjadi pedoman operasional bagi para pihak baik di tingkat nasional maupun daerah sehingga mencapai hasil yang maksimal, sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Saya mengapresiasi atas tersusun buku pedoman dalam bentuk *Blueprint* Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045 kepada para pihak terkait yang telah menyiapkan, semoga jerih payah yang terlibat dalam membuat buku ini mendapatkan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Juli 2023

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan Republik Indonesia

Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP



Sambutan

Puji dan syukur kami sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas restu dan ridho-Nya selama penyusunan *Blueprint* Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045. Dokumen ini disusun dengan melibatkan berbagai sektor Kementerian/Lembaga yang terlibat langsung dalam pembangunan bidang kependudukan.

Kependudukan sebagai modal pembangunan, merupakan bagian penting dalam perencanaan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, saya menyambut dengan baik terbitnya buku ini yang memuat landasan pemikiran terkait kondisi pembangunan kependudukan di Indonesia secara khusus dan dunia pada umumnya. Buku ini juga menyediakan acuan bagi pembangunan kependudukan menuju Indonesia Emas 2045.



Dr. Ir. H. Suharso Monoarfa, M.A

Keberhasilan Indonesia dalam menurunkan angka kelahiran dan meningkatkan taraf hidup telah mengubah struktur penduduk Indonesia. Struktur penduduk yang dua dekade lalu masih terkonsentrasi pada usia muda kini perlahan beralih menjadi terkonsentrasi pada penduduk usia produktif. Perubahan struktur penduduk ini memberikan peluang dan tantangan bagi pembangunan Indonesia.

Melimpahnya penduduk usia produktif memberikan kesempatan untuk merasakan manfaat dari Bonus Demografi. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu mempersiapkan penuaan penduduk seiring dengan bertambahnya penduduk lanjut usia. Bagian terpenting dari perubahan struktur penduduk adalah bagaimana Indonesia menyiapkan kebijakan untuk menghadapi dan mengoptimalkan perubahan ini.



Dalam Visi Indonesia Emas 2045, pembangunan kependudukan tertuang dalam Pilar Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Penduduk juga menjadi dasar penyusunan dan penentuan keberhasilan pembangunan di pilar-pilar lainnya. Semangat yang tertuang dalam Visi Indonesia Emas 2045 harus diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada seluruh tingkatan, mulai dari nasional, hingga desa. Visi ini menjadi landasan untuk pemaduan kebijakan pembangunan antar sektor yang harus kita kawal bersama.

Buku *Blueprint* Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045 dapat dijadikan pedoman penyusunan dan pemaduan kebijakan kependudukan karena menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh para pengambil kebijakan, praktisi hingga akademisi. Uraian kondisi kependudukan Indonesia, tantangan dari dunia internasional, serta strategi pembangunan dalam buku ini memberikan gambaran terintegrasi mengenai arah kependudukan Indonesia menuju 2045.

Semoga buku ini memberikan daya ungkit yang optimal bagi para pengambil kebijakan publik dan bermanfaat bagi pembangunan kependudukan menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta, Juli 2023

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencana Pembangunan Nasional

Dr. Ir. H. Suharso Monoarfa, M.A



Perspektif

“Menutup mata terhadap masalah kependudukan, tidak akan menghilangkannya. Sudah waktunya kita harus bertindak untuk menyelamatkan masa kini dan masa depan”

(World Population Day’2021)



Dr. (H.C.) Hasto Wardoyo, Sp. OG(K)

Sejatinya pesan sarat makna dari quote di atas, bukan sebatas renungan tetapi lebih merupakan peringatan untuk tidak menganggap sederhana apa lagi langkah mengelola pembangunan kependudukan. Menyikapi kata bijak Hari Kependudukan Dunia 2021, satu langkah strategis telah dilakukan oleh BKKBN dengan menerbitkan buku *Blueprint Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045*.

Indonesia telah lama melaksanakan pembangunan sejak merdeka 17 Agustus 1945. Visi Presiden Jokowi pada 2045 adalah menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi kelima terbesar dunia dengan penduduk sebesar 324 juta jiwa. Disamping itu *Smart Government* yang telah dilakukan oleh K/L merupakan jawaban atas telah bergulirnya Revolusi Industri 4.0 yang memungkinkan percepatan kinerja pemerintah dalam meningkatkan efisiesi dan efektivitas serta penguatan terhadap peningkatan kinerja pemerintah untuk pembangunan nasional. Visi Presiden ini disebut Indonesia Emas 2045.



Menelusuri perjalanan perkembangan kependudukan di Indonesia dari masa ke masa, ibarat mengurai benang panjang. Penuh dinamika, yang sudah dimulai pada era kolonialisme, saat bangsa Nusantara, cikal bakal lahirnya bangsa Indonesia, berada dalam cengkeraman pejajahan Belanda.

Kala itu persoalan kependudukan di Nusantara telah dihadapi oleh Belanda. Satu di antaranya padatnya penduduk di Pulau Jawa. Meski semata demi memenuhi kebutuhan tenaga kerja, perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dan beberapa pulau lainnya di Nusantara masa itu menandai telah terjadinya program transmigrasi.

Program transmigrasi menjadi sebuah program yang semakin didorong oleh pemerintahan era Orde Baru di periode 1970-2008. Tujuannya, pemerataan persebaran penduduk agar Pulau Jawa tidak terlalu padat.

Atas komitmen yang tinggi dalam penanganan persoalan kependudukan tersebut, sebuah pengakuan prestisius dari lembaga dunia atas komitmen Indonesia dalam program pembangunan kependudukan, maka Presiden kedua RI, Soeharto dianugerahi penghargaan *Population Award* dari Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1989. Pemerintah pun semakin gencar mengintensifkan program Kependudukan, khususnya Keluarga Berencana (KB).

Hasilnya, sederet indikator kependudukan berhasil ditekan. Sebut saja dua indikator utama, yakni Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan *Total Fertility Rate* (TFR). Pada 2022, LPP Indonesia berada pada level 1,12 persen (LF SP2020). Dengan LPP sebesar itu, populasi di Indonesia bertambah sekitar 275 juta jiwa pada tahun 2022 (LF SP2020). Pertambahan penduduk sebesar ini memunculkan persoalan tersendiri. Apalagi mayoritas penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa. Maka, permasalahan kependudukan berdampak pada pembangunan Indonesia di antaranya, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, penyempitan lahan dan lingkungan.

Selain permasalahan kependudukan yang fundamental berkaitan dengan kuantitas, kualitas dan persebaran berikut dampaknya juga muncul, seperti kematian ibu ketika melahirkan yang masih tinggi, usia kawin pertama yang masih di bawah usia sesuai ketentuan undang-undang, *stunting* yang masih banyak dan lain sebagainya di Indonesia. Persoalan ini menuntut keseriusan dan kerja keras untuk mengatasinya.

Seiring dengan permasalahan kependudukan tersebut, di masa yang akan datang pembangunan kependudukan Indonesia juga memerlukan perhatian yang tidak kalah



penting sejalan dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu mengenai nilai-nilai dan atau pola hubungan kehidupan umat manusia di planet bumi. Termasuk di dalamnya adanya kegiatan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari daerah Jakarta ke Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam perspektif kependudukan menyangkut persebaran penduduk dari daerah padat penduduk ke wilayah kurang penduduk, keberadaan IKN baru Nusantara akan mendorong terjadinya konsentrasi penduduk di wilayah sekitar dimana lokasi IKN dibangun. Sudah dapat dipastikan implikasinya akan ada kegiatan perekonomian, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya selain aktivitas pemerintahan.

Tentunya menjadi harapan semua pihak bahwa pemindahan IKN ke wilayah Kalimantan Timur dapat memberi nilai tambah khususnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan “*happines index*” di Indonesia. Dalam hal ini BKKBN bersama sama sektor lainnya berupaya mengkondisikan gaya hidup (*lifestyle*) masyarakat yang bersih dan sehat serta ramah lingkungan. Perubahan perilaku masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan melalui seperangkat program dan kegiatan pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera menuju era baru keluarga Indonesia maju tahun 2045. BKKBN menginisiasi pendekatan kependudukan dengan mengusulkan IKN sebagai: 1) Wajah ideal kependudukan Indonesia, 2) Miniatur Indonesia dari sisi etnis dan budaya.

Elemen Kependudukan, Pembangunan dan Interaksinya

Penduduk dan pembangunan bersifat saling memengaruhi. Keterkaitan penduduk dan pembangunan terkait dengan proses pembangunan dan proses kependudukan sehingga menghasilkan *outcome* pembangunan dan kependudukan. Proses kependudukan terkait dengan fertilitas, mortalitas dan migrasi akan berpengaruh terhadap penduduk yang mencakup jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur umur dan sebaran penduduk.

Outcome ini selanjutnya berpengaruh terhadap proses pembangunan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Pengaruh kependudukan terhadap pembangunan dapat dilihat dari meningkatnya *output* pembangunan, yang diperlihatkan oleh konsumsi barang dan jasa, tabungan masyarakat, pemanfaatan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam, dan pemanfaatan teknologi. Melalui proses pembangunan yang telah dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan akan berpengaruh terhadap distribusi pendapatan, lapangan pekerjaan, status pendidikan, status kesehatan dan kualitas lingkungan.

Ekonomi dan Pengendalian Penduduk

Selama 76 tahun Indonesia merdeka, pembangunan telah menunjukkan kemajuan baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam bidang ekonomi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara rata-rata selama kurun waktu 2015-2019 atau 5 tahun terakhir mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 5,1% per tahun.

Meskipun sejak pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi menjadi -5,1% (BPS, 2020). Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh sumbangan pada konsumsi rumah tangga yang telah mencapai 64% pada tahun 2019. Ini berarti pembangunan keluarga sedikit banyak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di sisi lain, rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,25% pada tahun 2010-2020 (BPS, 2020) sesungguhnya memperlihatkan tingginya perhatian pemerintah terhadap pembangunan kependudukan yang pada awalnya fokus pada pengendalian penduduk. Konferensi ICPD 1994 mengamatkan bahwa “pembangunan kependudukan tidak sebatas hanya pada pengendalian penduduk namun pembangunan kependudukan juga terkait dengan bagaimana pemerintah mampu meningkatkan kualitas penduduk, mobilitas dan persebaran penduduk, pembangunan keluarga, serta administrasi kependudukan.”

Dalam konteks pengendalian kuantitas penduduk, Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kelahiran hingga mendekati *replacement rates* dan berpotensi mencapai penduduk tumbuh seimbang dengan mengendalikan TFR sebesar 2,1 dan mempertahankan *replacement rates* sebesar 1. Dalam program peningkatan kualitas penduduk, pemerintah juga berhasil meningkatkan kualitas kesehatan penduduk dengan meningkatnya rata-rata lama hidup penduduk Indonesia serta meningkatkan kualitas pendidikan penduduk Indonesia.

Perlu Revitalisasi Kebijakan Pembangunan Kependudukan

Kebijakan untuk mengintegrasikan pembangunan kependudukan dan perencanaan pembangunan telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 153 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) pada tahun 2014. Tujuan dari Perpres ini untuk membantu daerah agar mampu menyusun GDPK yang mengintegrasikan pembangunan dan kependudukan pada *level* pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.



Namun, pelaksanaan penyusunan GDPK yang telah dilakukan masih dirasa belum optimal dengan kondisi-kondisi sebagai berikut. *Pertama*, keterbatasan kemampuan pemerintah daerah untuk menyusun secara lengkap dengan kelima pilarnya.

Kedua, *output* GDPK seperti visi misi rencana strategis dan *roadmap* pembangunan kependudukan berkelanjutan masih belum mampu didefinisikan dengan baik dalam dokumen GDPK daerah.

Ketiga, kemampuan pemerintah daerah dalam berkolaborasi lintas sektor untuk menyusun GDPK yang lengkap (5 pilar) juga menjadi tantangan hingga saat ini. Kolaborasi yang mampu menyeimbangkan antara memecahkan masalah dengan cara yang benar dan memecahkan masalah yang sebenarnya (*solving the problem right dan solving the right problem*) masih menjadi kendala dalam proses kolaborasi dalam kementerian lembaga dan pemerintah daerah.

Keempat, pada umumnya Pemerintah Daerah sudah menyusun GDPK namun demikian dokumen tersebut belum digunakan untuk dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

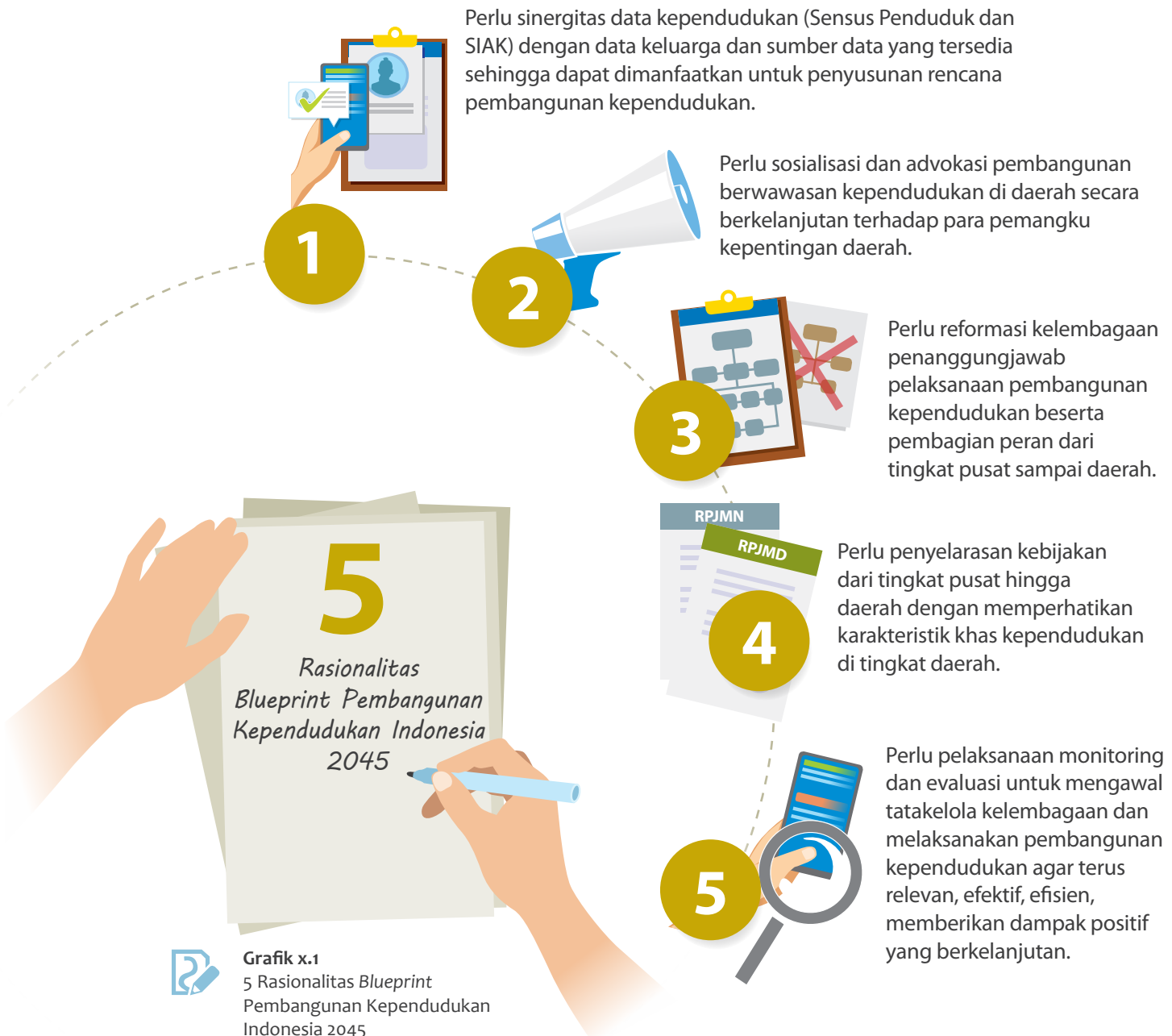
Pengintegrasian Pembangunan Kependudukan

Tantangan lain dari perkembangan GDPK telah dievaluasi oleh Bappenas. Ada respon positif terhadap GDPK berdasarkan temuan evaluasi oleh Bappenas, di antaranya adalah laju pertumbuhan penduduk terkoreksi yang berimplikasi terhadap komposisi penduduk.

Namun respon positif tersebut dari sisi ruang lingkup kebermanfaatan GDPK masih sebatas pada pengendalian kuantitas penduduk dengan terkoreksinya laju pertumbuhan penduduk. Padahal, GDPK seyogyanya mencakup manfaat pada dimensi peningkatan kualitas penduduk, mobilitas penduduk, administrasi kependudukan dan pembangunan keluarga.

Respon negatif terhadap keberadaan GDPK berdasarkan evaluasi Bappenas adalah penganggaran yang tidak menunjang, respon dari pemangku legislatif yang kurang memuaskan meskipun pihak eksekutif sudah mengusulkan, tindak lanjut yang kurang jelas merupakan salah satu respon negatif.

Rekomendasi dari hasil evaluasi GDPK dan potensi pengintegrasian pembangunan kependudukan di daerah mencakup 5 (lima) hal penting:



Grafik x.1
5 Rasionalitas Blueprint
Pembangunan Kependudukan
Indonesia 2045



Untuk menjawab tantangan dan mempermudah pelaksanaan GDPK, diperlukan adanya *Blueprint* yang dapat memandu para pihak terkait dalam melaksanakan 5 pilar pembangunan kependudukan sesuai dengan fungsi masing-masing sebagai berikut.

1. Mandat yang tertuang di dalam regulasi di Indonesia tentang kebijakan kependudukan masih berserak dan diperlukan suatu dokumen yang dapat mengintegrasikannya.
2. Mandat untuk menyusun pembangunan kependudukan secara komprehensif dan integral sangat diperlukan agar dapat dijadikan rujukan bagi penyusunan kebijakan kependudukan di Indonesia.
3. Sejalan dengan perubahan konstelasi global, pemahaman tentang apa yang disebut dengan kebijakan kependudukan juga berubah, diperlukan konsep ideal pembangunan kependudukan sesuai dengan konteks Indonesia, khususnya menuju Indonesia Emas.
4. Untuk merumuskan arah pembangunan kependudukan Indonesia tahun 2045 diperlukan pemahaman *state of the art* kependudukan, termasuk di antaranya variasi antar wilayah (provinsi dan kabupaten/kota).

Mewujudkan Indonesia merdeka yang dinyatakan oleh para pendiri bangsa tentunya menjadi tinta emas dari generasi ke generasi. Oleh karenanya arah tujuan pembangunan kependudukan dua puluh lima tahun ke depan wajib dirumuskan secara seksama, dipedomani dan diimplementasikan dengan sungguh-sungguh secara berkesinambungan/berkelanjutan. Sehingga pada tahun 2045, ketika 100 tahun Indonesia merdeka, akan tumbuh generasi emas yang terdiri dari keluarga keluarga Indonesia maju.

Jakarta, Juli 2023

Kepala Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional



Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K)



Blueprint
**Pembangunan
Kependudukan**
INDONESIA 2045

I

PENDAHULUAN





1.1

Latar Belakang

Kependudukan dengan segala matra dan perspektifnya memiliki arti sangat penting serta strategis untuk membangun suatu bangsa dan negara. Kependudukan memiliki dimensi dan spektrum yang sangat luas serta kompleks dalam konstelasi tata kelola pembangunan. Kedudukan dan peranan kependudukan sangat tergantung dengan cara pandang dan keyakinan dari penyelenggara pemerintahan dalam memaknai serta memanfaatkan dinamika kependudukan.

Perlu dipahami serta diyakini bahwa setiap langkah pengambilan kebijakan dalam menangani atau mengatasi pokok permasalahan kependudukan dapat menimbulkan implikasi dengan berbagai konsekuensi tertentu terhadap jalannya penyelenggaraan pembangunan. Dinamika kependudukan juga dapat mengancam keutuhan suatu wilayah dalam satu negara (disintegrasi) maupun eksistensi bangsa dan negara. Oleh karena itu, isu dan permasalahan kependudukan perlu mendapatkan perhatian serius, saksama, komprehensif dan kolaboratif. Instrumen kebijakan pengelolaan kependudukan harus didukung legitimasi yang berkekuatan hukum.

Dewasa ini terdapat dua arus utama dalam memandang persoalan

kependudukan di Indonesia. *Pertama*, persoalan kependudukan di Indonesia semata mata hanya terkait dengan fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian yang tinggi, dan dinamika persebaran penduduk atau migrasi.

Kedua, persoalan kependudukan adalah hubungan resiprokal antara dinamika penduduk dengan berbagai permasalahan pembangunan termasuk di dalamnya aspek politik, ekonomi, lingkungan, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Perspektif pertama mengacu pada perspektif kependudukan yang sempit. Sementara pandangan yang kedua melihat hubungan kependudukan dan pembangunan secara luas dan komprehensif.

Dalam konteks pembangunan kependudukan di Indonesia, perspektif kedua harus dijadikan landasan berpikir, yaitu dengan meletakkan hubungan antara kependudukan dan pembangunan secara komprehensif.

Mewujudkan kebijakan kependudukan yang komprehensif, terintegrasi dan konvergen menjadi persoalan tersendiri. Hal ini terjadi karena pada era globalisasi, demokrasi, dan desentralisasi telah memunculkan disinsentif dalam kebijakan-kebijakan kependudukan sebagai suatu



isu kebijakan yang strategis. Seringkali terjadi ketidak selarasan kebijakan kependudukan antar sektor dan tingkat, namun jarang sekali adanya kebijakan yang dapat memengaruhi karakteristik kependudukan suatu masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya disinsentif bagi kebijakan ini:

1. Kebijakan kependudukan biasanya muncul untuk merespon suatu kejadian dengan pertimbangan jangka pendek, namun hasilnya akan terlihat dalam jangka panjang;
2. Kriteria keberhasilan suatu kebijakan kependudukan seringkali ambigu (misalnya menekan pertumbuhan penduduk menyebabkan berkurangnya penduduk usia produktif dan masalah kelompok penduduk usia lanjut seperti di Jepang);
3. Intervensi kependudukan didesain untuk mengubah perilaku individual, namun evaluasi dampaknya diukur secara nasional. Seringkali biaya dan manfaat politik dari kebijakan kependudukan dilihatnya tidak sepadan;
4. Permasalahan konsistensi dalam kebijakan kependudukan mengingat isu kependudukan sering kali bukan suatu isu yang dapat membangun dukungan politik;
5. Kelompok-kelompok target dalam intervensi kependudukan seringkali merupakan kelompok yang sulit untuk dimobilisasi.

Penting untuk memahami argumentasi terkait urgensi pembangunan kependudukan di Indonesia. *Pertama* adalah argumentasi mengintegrasikan penduduk dalam pembangunan. *Kedua*, isu terkait mandat yang diamanatkan oleh regulasi. *Ketiga*, kebutuhan untuk merumuskan acuan kebijakan pembangunan kependudukan yang terintegrasi dalam konteks pembangunan nasional Indonesia.

Integrasi data penduduk merupakan komponen yang harus dipenuhi dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan untuk memastikan berbagai kegiatan yang akan dilakukan telah sesuai dengan situasi dan kondisi kependudukan. Secara konseptual, prinsip tersebut meletakkan penduduk sebagai subjek dan objek pembangunan.

Terdapat dua mekanisme dalam melakukan integrasi penduduk dalam pembangunan. *Pertama*, menjadikan kependudukan sebagai basis dalam merumuskan tujuan pembangunan. Dalam konteks ini, variabel kependudukan diperlakukan sebagai variabel independen yang diasumsikan bahwa setiap perubahan pada variabel kependudukan akan memiliki dampak terhadap tercapainya tujuan kebijakan pembangunan.

Kedua, memperlakukan variabel kependudukan sebagai sasaran yang akan diubah melalui pembangunan sosial, budaya dan ekonomi. Sebuah dampak dari pembangunan akan menuntut perubahan variabel kependudukan agar sejalan dengan kinerja pembangunan.



Pembangunan harus dikembangkan melalui perhitungan kemampuan penduduk agar seluruh komponen masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut. Sebaliknya, pembangunan baru bisa dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas.

Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan untuk menjawab pertanyaan mengapa diperlukan integrasi penduduk dan pembangunan.¹ *Pertama*, dari sisi yang paling esensial terdapat suatu prinsip bahwa di dalam konsep integrasi penduduk dan pembangunan, penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai “objek” akan tetapi juga “subjek” pembangunan atau *people center development*.

Paradigma lama yang meletakkan penduduk hanya sebagai objek pembangunan telah mengeliminir atau bahkan menafikan partisipasi penduduk dalam pembangunan. Penduduk dianggap tidak memahami pembangunan dan mereka tinggal menerima atau menikmati saja hasil pembangunan. Hal semacam ini jelas menggambarkan proses pembuatan kebijakan yang “*top down*” dan akan mengakibatkan persoalan di kemudian hari. Pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan, perubahan sosial yang mensyaratkan adanya keterlibatan aktif masyarakat

dalam setiap proses pembangunan, baik dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan hingga evaluasi terhadap suatu proses pembangunan.

Kedua, ketika penduduk memegang peran sebagai subjek pembangunan maka diperlukan pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk serta meningkatkan kapasitasnya melalui pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya mempersiapkan manusia yang berkualitas dalam rangka mengembangkan mekanisme “*bottom up*” dalam perencanaan pembangunan. Penduduk harus berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat juga sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Secara konseptual Indonesia telah melakukan kebijakan yang disesuaikan dengan Deklarasi Bali dan juga *Programme of Action of the International Conference on Population and Development* tahun 1994 (UNFPA, 1995). Fokus pembangunan kependudukan telah bergeser dari pendekatan yang sangat sempit, yaitu pendekatan klinis kesehatan ibu dan anak ke pendekatan demografis dengan cakupan yang lebih luas yaitu pembangunan penduduk dan keluarga.

¹ Pembahasan ini dikutip dari Laporan Penelitian Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Tahun 2014, oleh BKKBN Pusat dan PSKK-UGM.



Pergeseran juga terjadi dalam perubahan sikap terhadap isu kesehatan reproduksi (misalnya tidak memberikan pelayanan kontrasepsi kepada remaja yang belum menikah atau tidak melegalkan aborsi), kualitas pelayanan untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Namun sampai sejauh ini, hasil yang diperoleh masih belum memuaskan, karena masih banyak agenda yang harus diselesaikan menyangkut integrasi penduduk dan pembangunan.

Ketiga, jika variabel penduduk diabaikan dalam perencanaan pembangunan maka sangat mustahil pembangunan berkelanjutan dapat dicapai (Rogers dkk, 2012). Contoh yang paling sederhana adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan jumlah penduduk. Ketika jumlah penduduk sudah terlalu banyak atau *overpopulation* (melebihi kapasitas daya dukung dan tampung lingkungan) dan tidak ada kebijakan untuk mengendalikannya, maka degradasi lingkungan akan terjadi, sumber daya alam akan rusak dan generasi berikutnya akan dirugikan (Shostak, 2013).

Pada tataran teknis seperti pada kegiatan perencanaan sektoral, variabel penduduk berfungsi untuk memudahkan proses perencanaan dan perhitungan ketersediaan pasokan (*supply*) dan permintaan/kebutuhan (*demand*) yang memiliki kecenderungan keterkaitan dengan sumber daya.

Sebagai contoh dalam perencanaan pembangunan pendidikan, penentuan

pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dengan perhitungan berapa penduduk usia sekolah yang akan ditampung dan menggunakan sarana prasarana pendidikan tersebut. Perencanaan kesempatan kerja membutuhkan data jumlah angkatan kerja yang hanya dapat diperkirakan apabila tersedia perkiraan jumlah penduduk menurut kelompok umur. Demikian juga halnya dengan perencanaan kesehatan, perkiraan jumlah sarana dan prasarana kesehatan hanya dapat dilakukan jika perkiraan jumlah penduduk mempunyai akuntabilitas serta presisi yang tinggi.

Di Indonesia, upaya mengintegrasikan kependudukan dalam kebijakan pembangunan tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa dua di antara tujuh prinsip pembangunan kependudukan merupakan adopsi terhadap konvensi internasional yang telah disebut sebelumnya. Dua prinsip tersebut adalah, (a) kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan; dan (b) pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan dan perencanaan kependudukan harus diintegrasikan ke dalam pembangunan nasional.

Dalam rangka meningkatkan sinergitas, integrasi dan konvergensi pembangunan kependudukan, maka pada tahun 2014 dikeluarkan Peraturan Presiden



1

Pengendalian
kuantitas penduduk



2

Peningkatan
kualitas penduduk



3

Pembangunan
keluarga

5 PILAR STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN



5

Peningkatan tata kelola
data dan informasi
kependudukan

4
Penataan persebaran
dan pengarahannya
mobilitas penduduk



Grafik 1.1
5 Pilar Strategi
Pembangunan
Kependudukan

(Perpres) Nomor 153 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang secara operasional membagi strategi pembangunan kependudukan melalui 5 pilar.

Peraturan Pemerintah (PP) No 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, pasal 5 menyebutkan bahwa arah kebijakan nasional perkembangan kependudukan adalah (a) menjamin tercapainya bonus demografi; (b) meningkatkan kualitas penduduk untuk memanfaatkan

bonus demografi; (c) memberdayakan penerapan fungsi-fungsi keluarga; dan (d) memperkuat semangat gotong royong berbasis keluarga. Keempat arah kebijakan nasional tersebut secara eksplisit maupun implisit menunjukkan bahwa kebijakan kependudukan bukan variabel yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan erat dengan sektor yang lain.

Pencapaian bonus demografi, misalnya tidak hanya berhenti pada menurunnya angka ketergantungan, sebagai salah satu indikator bonus demografi, tetapi juga bagaimana memanfaatkan bonus



demografi agar dapat secara optimal memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Pemanfaatan bonus demografi sangat terkait dengan arah yang ke-2 yaitu peningkatan kualitas penduduk agar penduduk usia produktif dapat memperoleh pekerjaan dengan upah yang layak.

Isu mengenai bonus demografi merupakan isu strategis yang secara langsung menghubungkan antara kebijakan kependudukan dan kebijakan pembangunan pada umumnya. Pencapaian bonus demografi akan menjadi salah satu fondasi dalam mengembangkan kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Hal ini merupakan argumentasi penting mengapa dibutuhkan *Blueprint* Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045.

Isu penting lainnya adalah ada indikasi bahwa pembangunan kependudukan tidak selalu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi. Sebagai contoh, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kinerja pembangunan kependudukan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas yang sangat baik. Angka kelahiran total mencapai *replacement level*, angka harapan hidup tertinggi di Indonesia, indeks pembangunan manusia termasuk tinggi, tetapi angka kemiskinan lebih tinggi dibandingkan Indonesia dan tertinggi di Jawa, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa per September 2022, mencapai 11,49 persen (BPS 2023). Fakta ini menunjukkan terjadinya

paradox pembangunan yang tidak tertutup kemungkinan karena tidak sinergi antara pembangunan kependudukan dan ekonomi. Harus ada mekanisme yang dapat menjamin bahwa kebijakan kependudukan memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan pembangunan. Dalam konteks inilah *Blueprint* diperlukan.

Terdapat dua isu lain yang perlu diperhatikan. *Pertama* adalah mengenai cakupan kebijakan kependudukan yang telah dilakukan di Indonesia. Apakah kebijakan yang telah dilakukan selama ini telah “cukup” atau diperlukan kebijakan baru yang konsisten dengan konsep ideal pembangunan kependudukan sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya. *Kedua* adalah pertanyaan yang menyangkut *positioning* regulasi yang sudah ada. Terjadi *overlap* antara regulasi yang satu dengan yang lain. Di lain pihak ada kekosongan yang belum terisi oleh peraturan yang ada. Intinya adalah belum ada sinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur pembangunan atau kebijakan kependudukan di Indonesia.

Untuk itu penyusunan *Blueprint* Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045 membutuhkan dasar pijakan yang jelas, bukan hanya apa yang sudah dan belum dilakukan, tetapi juga arah dan tujuan pembangunan kependudukan jangka panjang. Untuk itu diperlukan *setting* perkembangan dan kondisi saat ini sebagai hasil kebijakan kependudukan selama 50 tahun terakhir.



Dengan jangkauan waktu hingga tahun 2045 dalam rangka mencapai Visi Indonesia Emas 2045, negara yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Negara Nusantara yaitu negara yang mampu memanfaatkan potensi negara kepulauan untuk ketangguhan geopolitik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan budaya/peradaban bahari. Berdaulat dalam ketahanan, kesatuan, mandiri, aman, tangguh. Maju artinya berdaya, modern, tangguh, unggul, inovatif, adil dan berkelanjutan yaitu lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 153 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan telah berhasil menginisiasi sebuah kesadaran tentang upaya melakukan sinergitas, integrasi dan konvergensi kebijakan

pembangunan kependudukan. Namun demikian, secara operasional GDPK yang telah disusun di tingkat daerah belum memenuhi kondisi ideal seperti yang seharusnya, yaitu sinkron dengan GDPK secara vertikal maupun horizontal, dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lain.

Sementara itu, seiring perubahan lingkungan strategis serta dinamika kependudukan yang berlangsung, penting untuk melakukan revitalisasi terhadap pelaksanaan Perpres Nomor 153 tentang GDPK agar lebih implementatif serta mempunyai daya imperatif yang mengikat para pihak terkait terhadap *stakeholder* pelaksanaannya melalui sebuah *Blueprint* Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045, dengan jangkauan waktu hingga tahun 2045 dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas 2045.

1.2

Urgensi Penyusunan *Blueprint* Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045

Pembangunan kependudukan menjadi bagian dari empat pilar yang tertuang dalam visi Indonesia Emas 2045 yaitu pilar pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan demografis di Indonesia akan memengaruhi bentuk dan struktur penduduk sehingga menjadi tantangan bagi pembangunan.

Penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 324,05 juta jiwa pada tahun 2045. Angka migrasi netto internasional

para tahun 2045 diperkirakan sebesar -0,09 per 1000 penduduk dengan penduduk lansia (65+) mencapai 14,61 persen pada tahun 2045 (Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 dengan Skenario Tren). Jumlah penduduk yang besar tersebut akan memberikan tantangan bagi pembangunan dalam pemenuhan kebutuhan serta upaya peningkatan taraf hidup.

Jika tidak diantisipasi dengan baik, maka akan menimbulkan banyak masalah



Gambar 1.1
Menjaga kuantitas dan kualitas penduduk



baik secara ekonomi seperti kemiskinan maupun kesehatan (kematian maternal, bayi dan balita), degradasi lingkungan dan juga sosial (konflik). Persoalan lainnya adalah ketahanan pangan dan energi. Indonesia perlu menjaga pertumbuhan penduduk agar stabil dalam waktu yang panjang. Menciptakan penduduk tumbuh seimbang merupakan upaya untuk menjaga jumlah dan proporsi penduduk usia produktif. Upaya ini bertujuan untuk memelihara kesinambungan antara jumlah penduduk usia produktif dengan kapasitas fiskal.

Dengan menerapkan kebijakan luar biasa terhadap penurunan angka kematian bayi dan menjaga tingkat fertilitas, Indonesia dapat mempertahankan jumlah penduduk usia produktif dan menciptakan penduduk tumbuh seimbang untuk mempertahankan kapasitas fiskal per jumlah penduduk produktif. Dalam hal ini, pemerintah perlu membuat strategi baik dalam menyeimbangkan kuantitas maupun kualitas penduduk.

Pertumbuhan penduduk yang seimbang dapat ditandai antara lain oleh dua indikator. Pertama adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dalam jangka panjang perlu dijaga untuk tidak mencapai negatif. Menurut pengalaman negara maju yang telah mengalami penuaan dengan jumlah anak yang sedikit, pertumbuhan mereka sudah mencapai negatif, seperti halnya Korea Selatan. Sementara negara maju lain sudah sangat bergantung pada pendatang untuk menjalankan roda ekonomi. Dengan menjaga jumlah anak pada tingkat *replacement rate*, pertumbuhan

penduduk dapat dijaga stabil.

Sementara itu, apabila jumlah anak terus menurun, jumlah penduduk usia muda akan berkurang dan penduduk akan mengalami penuaan. Untuk itu, pertimbangan dalam kebijakan kependudukan akan sangat memengaruhi masa depan Indonesia.

Perubahan struktur penduduk di Indonesia memungkinkan terciptanya bonus demografi. Bonus demografi bisa dimanfaatkan agar berdampak luas pada pertumbuhan ekonomi dan bersifat jangka panjang, di antaranya melalui investasi sumber daya manusia yang berkualitas dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut serta mempertimbangkan variasi transisi demografi di tingkat daerah dan pertumbuhan penduduk lanjut usia (*population aging*), kebijakan harus diarahkan dengan tepat untuk meraih bonus demografi.

Secara bersamaan, perubahan struktur penduduk juga membawa pengaruh terutama dengan capaian *demographic dividend* atau yang disebut dengan bonus demografi. Indonesia akan masuk ke dalam tahap dua bonus demografi. Tahap pertama bonus demografi terjadi ketika jumlah penduduk usia muda dan lansia yang lebih sedikit daripada jumlah penduduk usia produktif sehingga negara dapat fokus pada investasi sumber daya manusia yang produktif, kompetitif, dan berdaya saing. Penduduk usia kerja yang tumbuh lebih cepat daripada penduduk yang bergantung padanya menciptakan jendela kesempatan (*windows of opportunity*) untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan



kesejahteraan keluarga. Periode bonus demografi masih dapat berlanjut pada tahap kedua dimana jumlah penduduk non produktif lebih banyak disumbang oleh penduduk lansia yang jumlahnya semakin meningkat. Penduduk usia kerja yang lebih tua dan menghadapi masa pensiun yang diperpanjang memiliki insentif yang kuat untuk mengakumulasi aset untuk menghidupi diri mereka sendiri. Aset ini biasanya diinvestasikan baik dalam sarana investasi domestik maupun internasional dan akan menambah pendapatan nasional suatu negara. Peningkatan pendapatan nasional ini disebut sebagai dividen kedua yang akan terus diperoleh tanpa batasan waktu tertentu.

Isu kependudukan berikutnya adalah pola mobilitas yang memengaruhi persebaran penduduk. Kepadatan penduduk yang sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk akan

berkaitan dengan urbanisasi. Dalam konteks peningkatan kepadatan akibat pertambahan jumlah penduduk maka akan terjadi urbanisasi. Urbanisasi merupakan proses pengkotaan yang ditandai dengan bertambahnya proporsi jumlah penduduk kota sehingga perubahan kawasan perdesaan menjadi kawasan perkotaan.

Tujuan migrasi risen masih didominasi oleh wilayah barat Indonesia, meskipun dengan persentase yang terus turun. Namun, tujuan migrasi masih akan didominasi oleh wilayah Barat Indonesia hingga waktu yang sangat lama. Arah dan arus migrasi juga akan dipengaruhi dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur. Sebaliknya, mobilitas penduduk juga berkurang karena peningkatan teknologi informasi dimana penduduk menjadi lebih global secara akses tanpa memengaruhi keberadaan secara fisik.

1.2.1 Pilar Pembangunan Kependudukan

Untuk mewujudkan Indonesia maju di 2045 beberapa pilar pembangunan harus menjadi perhatian dan fokus kerja. Ada 4 (empat) Pilar Pembangunan Indonesia 2045 yang menjadi fokus pemerintahan saat ini:

1. Pembangunan manusia dan penguasaan Iptek,
2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan,
3. Pemerataan pembangunan hingga ke daerah terpencil, dan
4. Ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Empat pilar ini, terutama pilar ketiga, menguatkan pendapat bahwa arah

pembangunan Indonesia adalah pembangunan yang inklusif yang bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antarwilayah, pemerataan infrastruktur sehingga kemiskinan ekstrem berhasil diatasi.

Kuncinya, adalah bagaimana terwujudnya pembangunan yang berorientasi pada penduduk. Karena kependudukan adalah faktor penentu keberhasilan pembangunan.

Selain tantangan dalam memanfaatkan situasi dan dinamika kependudukan, dalam pengelolaannya juga masih akan dihadapkan dengan tantangan



Gambar 1.2
Pendataan
penduduk lanjut
usia

sinkronisasi serta koordinasi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Masih terdapat perbedaan cara pandang dan interpretasi pemerintah kabupaten/kota terhadap isu maupun masalah kependudukan. Hal ini perlu diatasi, karena dapat mengurangi efektivitas kebijakan nasional dalam pembangunan kependudukan.

Pembangunan kependudukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan secara keseluruhan dan pelaksanaannya berada pada semua tingkatan yang merupakan satu kesatuan yang saling mendukung.

Tantangan pengelolaan kependudukan di Indonesia ke depan adalah proses pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*). Konsep ini mengandung pengertian bahwa setiap kebijakan kependudukan harus dibuat atau disusun berdasarkan pada bukti yang ada. Bukti yang dimaksud adalah data yang berasal dari berbagai sumber baik dari data primer maupun sekunder.

Visi Indonesia 2045 dilihat dari konteks pembangunan kependudukan, sudah mencakup aspek penduduk sebagai subjek yang dapat dilihat pada pilar pertama dan ketiga.

Aspek kebijakan pembangunan pada pilar kedua dan tentunya penduduk sebagai objek tercermin pada Visi Indonesia 2045 yaitu: Rakyat Indonesia yang lebih sejahtera dengan kualitas manusia yang lebih tinggi, dalam negara dengan pendapatan tinggi dan maju serta salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia, dengan pemerataan yang berkeadilan di semua bidang pembangunan serta dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dan demokratis.

Pilar kesatu telah dicantumkan pada Visi Indonesia 2045 yaitu kualitas manusia Indonesia yang meningkat dengan:

- Pendidikan yang semakin tinggi dan merata; kebudayaan yang kuat;



- Derajat kesehatan, usia harapan hidup, dan kualitas hidup yang semakin baik;
- Produktivitas yang tinggi; serta
- Kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas.

Visi tersebut menegaskan, penduduk ditempatkan sebagai modal pembangunan. Proporsi penduduk usia produktif yang tinggi menjadi modal pembangunan. Pertumbuhan penduduk harus dijaga pada tingkat fertilitas ideal. Persebaran penduduk yang seimbang harus dilakukan melalui pengendalian urbanisasi dan migrasi. Penduduk usia produktif harus mempunyai daya saing dengan partisipasi tenaga kerja yang tinggi, baik laki-laki maupun perempuan.

Visi Indonesia 2045 merupakan rencana pembangunan yang mensinkronkan penduduk sebagai subjek dan objek pembangunan. Oleh sebab itu strategi kependudukan harus dibentuk agar dapat menjadi bagian yang mendukung dan menjadi bagian dari pencapaian tujuan pembangunan pada tahun 2045.

Strategi kependudukan menjadi penting untuk dikembangkan dan senantiasa saling berinteraksi dan bahkan menjadi bagian dari proses keberhasilan di bidang pembangunan lainnya. Pengelolaan pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas dan penataan kembali distribusinya diperlukan dalam strategi pembangunan kependudukan. Begitu juga strategi pembangunan ekonomi, diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan ekonomi seimbang dan pertumbuhan yang berkelanjutan

untuk meningkatkan industri dan produksi pangan serta meningkatkan pendapatan individu. Pertumbuhan penduduk harus dikelola agar selaras dengan pertumbuhan ekonomi. Investasi harus ditingkatkan untuk peningkatan kualitas penduduk melalui pendidikan, kesehatan, investasi keuangan dan peningkatan standar kehidupan.

Kebijakan otonomi daerah harus mengarah pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan kependudukan yang menjadi modal sangat strategis dalam pembangunan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota hingga desa/kelurahan. Perbedaan situasi sosial ekonomi di tiap wilayah harus dijadikan titik tolak untuk mengembangkan kebijakan pembangunan kependudukan yang bermanfaat bagi tiap wilayah namun juga sumbangannya pada pencapaian di tingkat nasional.

Untuk memastikan bahwa kebijakan kependudukan responsif dan antisipatif terhadap kebijakan pembangunan jangka panjang atau Visi Indonesia 2045, perkembangan situasi global, regional, spesifik daerah dan berkembangnya peluang serta memastikan terjadinya proses yang harmonis antara tingkat nasional dan daerah, maka diperlukan kebijakan kependudukan dalam bentuk *Blueprint* yang akan menjadi acuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Mendasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai urgensi dilakukannya penyusunan *Blueprint* Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045, sebagai berikut:



1. Diperlukan optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga beserta dengan seluruh peraturan perundangan turunannya terhadap berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kependudukan di Indonesia 2045.
2. Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 153 tahun 2014 tentang GDPK masih belum optimal terutama dalam hal sinergitas, integrasi dan konvergensi pembangunan kependudukan nasional dan daerah.
3. Diperlukan kebijakan kependudukan yang komprehensif untuk mengarahkan penduduk sebagai aset pembangunan. Karena itu diperlukan regulasi yang mampu menjadi pedoman penyusunan kebijakan kependudukan pada tingkat nasional maupun daerah.
4. Diperlukan suatu kebijakan kependudukan yang mampu merespon dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi Indonesia dengan sinergitas, integrasi dan konvergensi untuk mengatasi permasalahan yang muncul.
5. Diperlukan pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis mengenai perlunya pengaturan sinergitas, integrasi dan konvergensi pembangunan kependudukan menuju Indonesia Emas 2045.
6. Diperlukan sasaran, jangkauan, ruang lingkup dan pengaturannya dari integrasi kependudukan dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.




1.3

Tujuan Penyusunan *Blueprint* Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045

Tujuan penyusunan *Blueprint* Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045 adalah sebagai berikut:

-  **1** Menjabarkan situasi megatren dunia dan nasional terkini, permasalahan maupun analisis kependudukan yang dihadapi dunia maupun Indonesia. 
-  **2** Mengetahui landasan teoritis dan perkembangannya sebagai dasar pengaturan sinergitas, integrasi dan konvergensi pembangunan kependudukan menuju Indonesia Emas 2045. 
-  **3** Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan pengaturan sinergitas, integrasi dan konvergensi pembangunan kependudukan menuju Indonesia Emas 2045. 
-  **4** Menyusun dasar regulasi untuk merancang strategi integrasi kependudukan dalam perencanaan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. 


Grafik 1.2
Tujuan penyusunan *Blueprint* Pembangunan Kependudukan Indonesia



1.4

Metode Penyusunan *Blueprint* Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045

Metode yang digunakan dalam menyusun *Blueprint* Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045 sebagai berikut:

1. *Desk Review*

Penyusunan *Blueprint* Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045 dimulai dengan penelusuran informasi buku, jurnal ilmiah maupun preprint melalui studi pustaka. Penelitian secara empiris juga dilakukan dalam rangka menggali sebanyak mungkin aspirasi para pakar kependudukan tentang berbagai isu kependudukan di tingkat global, nasional maupun lokal.

Selain itu, inventarisasi masalah juga dilakukan melalui seminar-seminar kependudukan dari berbagai sudut pandang dengan melibatkan praktisi dan akademisi multidisipliner meliputi ideologi, politik, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan. *Output* dari tahap ini adalah sebuah dokumen yang berisi identifikasi permasalahan kependudukan yang harus direspon dan diantisipasi sampai dengan tahun 2045.

2. *Penajaman Isu*

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh *input* dari berbagai pihak terkait yang dapat digunakan untuk menyempurnakan dokumen yang telah disusun pada tahap pertama. Cara yang dilakukan adalah dengan melaksanakan *workshop*, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan lembaga terkait, baik ditingkat pusat maupun daerah.

3. *Finalisasi Naskah Dokumen Blueprint Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045*

Pembahasan penyusunan *Blueprint* Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045 dilakukan secara partisipatif melalui proses teknokratis dan politik yang diformulasikan guna mendapatkan dukungan dari semua pemangku kebijakan. Proses teknokratis dilakukan melalui kajian yang melibatkan seluruh pemangku kebijakan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan berjalan dan aspirasi masyarakat. Pembahasan dengan para praktisi dan akademisi di bidang kependudukan serta *stakeholder* pembangunan kependudukan (kementerian maupun lembaga pemerintah non kementerian dan LSM/NGO) terkait.

Blueprint
**Pembangunan
Kependudukan**
INDONESIA 2045

II

**ANALISIS SITUASI
KEPENDUDUKAN
INDONESIA SAAT INI**





2.1

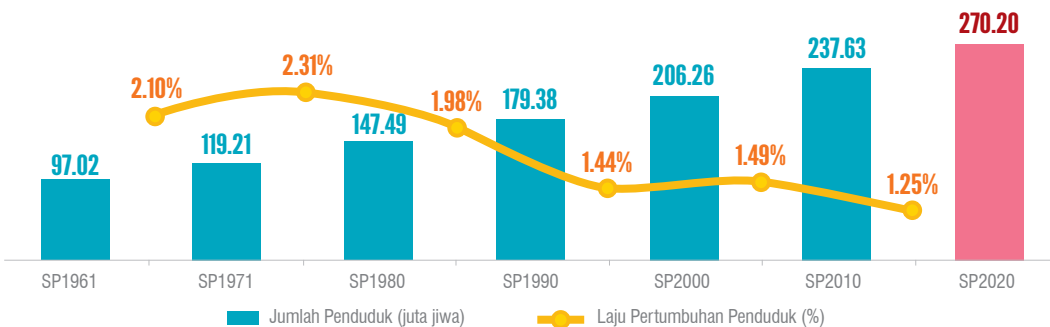
Pengendalian Kuantitas Penduduk

2.1.1 Jumlah Penduduk

Indonesia merupakan negara keempat dengan jumlah penduduk terbanyak setelah negara China, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 mencapai angka sebesar 270,20 juta jiwa. Angka tersebut bertambah sebanyak 32,56 juta jiwa bila dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 lalu. Hal tersebut menandakan adanya penambahan jumlah penduduk rata-rata sebanyak 3,26 juta jiwa setiap tahunnya (BPS, 2021).

Laju pertumbuhan per tahunnya mengalami penurunan dari 1,49% pada tahun 2000-2010 menjadi 1,25% pada tahun 2010-2020 (BPS, 2021). Indonesia merupakan negara yang padat penduduk, dengan luas daratan 1,9 juta km² di dalamnya dihuni 141 jiwa per km² (BPS, 2021). Walau demikian, penduduk Indonesia masih sangat terkonsentrasi pada Pulau Jawa (56,10%) dibandingkan pulau-pulau lainnya (BPS, 2021). Jumlah penduduk cenderung meningkat sejak tahun 1971 sampai tahun 2020.

JUMLAH PENDUDUK HASIL SENSUS (JUTA JIWA)



Grafik 2.1
Jumlah penduduk hasil sensus (juta jiwa)

Sumber : Hasil Sensus Penduduk 2020

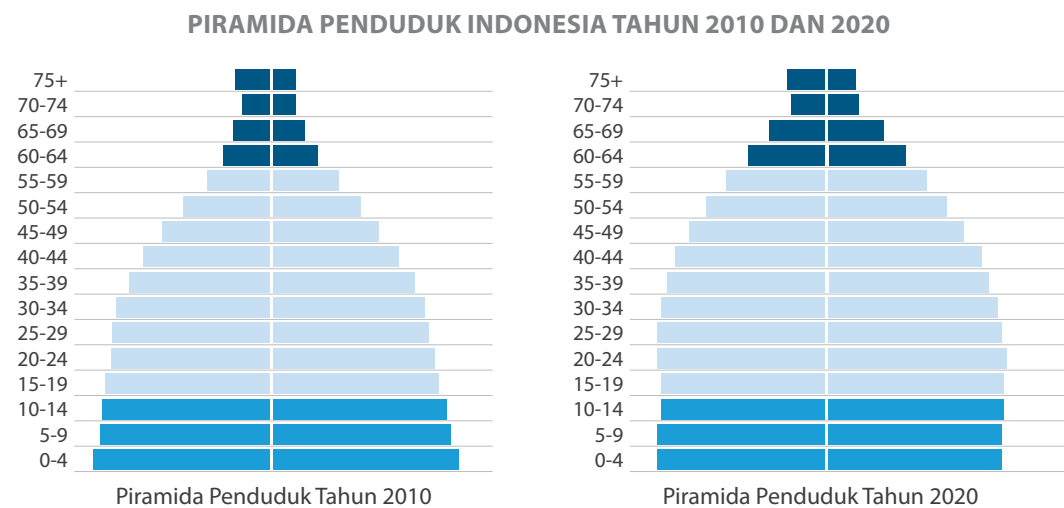
- Berdasarkan SP2020, jumlah penduduk Indonesia September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa.
- Dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta km², maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per km².
- Selama 2010-2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25 persen.

2.1.2 Komposisi Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk, piramida penduduk Indonesia mengalami pergeseran dari ekspansif menjadi stasioner selama dua dekade terakhir. Secara keseluruhan, struktur penduduk Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan. Komposisi penduduk kelompok usia produktif (15-64 tahun) meningkat cukup pesat. Sensus Penduduk 2020 mencatat rasio ketergantungan sebesar 44,3 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun) menanggung 44 penduduk usia 0–14 dan 65+ tahun pada tahun 2020. Nilai rasio ketergantungan Indonesia pada tahun 2020 sedikit lebih rendah dibandingkan nilai tahun 2015 (46,3).

Melalui penduduk tumbuh seimbang maka akan lebih banyak sumber daya yang dapat dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan maupun upaya peningkatan kualitas penduduk antara lain dengan pembangunan sekolah, pelatihan guru, peningkatan akses kelayakan kesehatan, termasuk perawatan prenatal, imunisasi, dan perawatan kesehatan primer lainnya. Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang seimbang, negara dapat lebih mudah mengelola urbanisasi dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Infrastruktur seperti perumahan, transportasi, dan fasilitas umum lainnya dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk.

Grafik 2.2
Piramida penduduk Indonesia 2010 dan 2020



2.1.3 Sex Ratio

Bila dilihat dari jenis kelamin, komposisi penduduk Indonesia cukupimbang antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020, jumlah penduduk laki-laki di Indonesia ada sebanyak 136,66 juta orang (50,58%) sedangkan jumlah penduduk perempuan

di Indonesia sebanyak 133,54 juta orang (49,42%). Dengan angka tersebut, nampak bahwa rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk Indonesia adalah sekitar 102, yang berarti terdapat 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Indonesia pada 2020 (BPS, 2021).



2.1.4 Kelahiran/Fertilitas

Tingkat fertilitas di Indonesia selama beberapa dekade terakhir telah mengalami penurunan yang signifikan dengan adanya program Keluarga Berencana

(KB). Pada tahun 1971, angka kelahiran total atau *Total Fertility Rate* (TFR) Indonesia sangat tinggi hingga mencapai angka sebesar 5,61 anak per wanita usia

PROVINSI	Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate					
	SP1971	SP1980	SP1990	SP2000	SP2010	LF SP2020
Aceh	6,27	5,24	4,37	2,81	2,79	2,42
Sumatera Utara	7,20	5,94	4,29	3,10	3,01	2,48
Sumatera Barat	6,18	5,76	3,89	3,06	2,91	2,46
Riau	5,94	5,44	4,09	2,77	2,82	2,28
Jambi	6,39	5,57	3,76	2,67	2,51	2,28
Sumatera Selatan	6,33	5,59	4,22	2,88	2,56	2,23
Bengkulu	6,72	6,20	3,97	2,68	2,51	2,30
Lampung	6,36	5,75	4,05	2,65	2,45	2,28
Kep. Bangka Belitung	-	-	-	2,60	2,54	2,24
Kepulauan Riau	-	-	-	-	2,38	2,21
DKI Jakarta	5,18	3,99	2,33	1,63	1,82	1,75
Jawa Barat	6,34	5,07	3,47	2,51	2,43	2,11
Jawa Tengah	5,33	4,37	3,05	2,06	2,20	2,09
DI Yogyakarta	4,76	3,42	2,08	1,44	1,94	1,89
Jawa Timur	4,72	3,56	2,46	1,71	2,00	1,98
Banten	-	-	-	2,72	2,35	2,01
Bali	5,96	3,97	2,28	1,89	2,13	2,04
Nusa Tenggara Barat	6,66	6,49	4,98	2,92	2,59	2,43
Nusa Tenggara Timur	5,96	5,54	4,61	3,37	3,82	2,79
Kalimantan Barat	6,27	5,52	4,44	2,99	2,64	2,33
Kalimantan Tengah	6,83	5,87	4,03	2,74	2,56	2,31
Kalimantan Selatan	5,43	4,60	3,24	2,33	2,35	2,31
Kalimantan Timur	5,41	4,99	3,28	2,50	2,61	2,18
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	2,35
Sulawesi Utara	6,79	4,91	2,69	2,13	2,43	2,10
Sulawesi Tengah	6,53	5,90	3,85	2,75	2,94	2,32
Sulawesi Selatan	5,71	4,88	3,54	2,56	2,55	2,22
Sulawesi Tenggara	6,45	5,82	4,91	3,31	3,20	2,57
Gorontalo	-	-	-	2,70	2,76	2,30
Sulawesi Barat	-	-	-	-	3,33	2,58
Maluku	6,89	6,16	4,59	3,39	3,56	2,52
Maluku Utara	-	-	-	3,18	3,35	2,47
Papua Barat	-	-	-	-	3,18	2,66
Papua	7,20	5,35	4,70	3,28	2,87	2,76
INDONESIA	5,61	4,68	3,33	2,34	2,41	2,18

Sumber : Sensus Penduduk (SP) dan Long Form SP2020, BPS



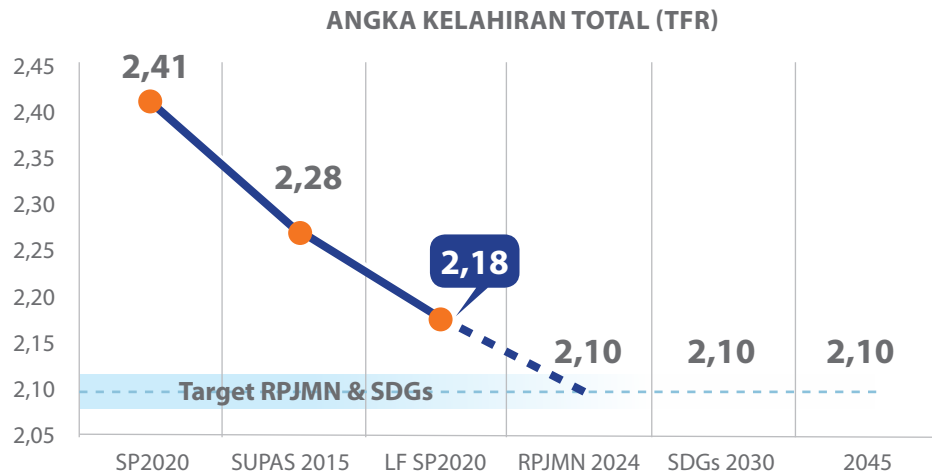
Tabel 2.1
Angka kelahiran total / Total Fertility Rate (TFR) menurut provinsi tahun 1971-2020

subur (usia 15-49 tahun). Angka tersebut kemudian mengalami penurunan yang cukup besar hingga menjadi 2,18 anak per wanita usia subur pada tahun 2020 (LF SP2020) yang telah sesuai dengan

target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Kendati terdapat variasi capaian angka TFR, namun masih dalam batas toleransi yang perlu dikelola dengan baik.



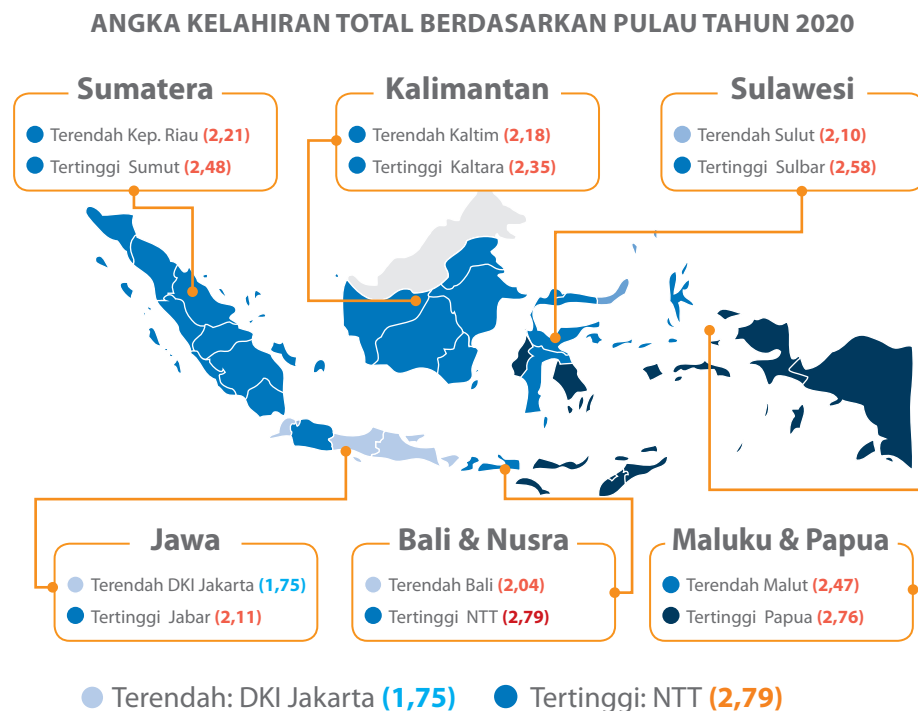
Grafik 2.3
Angka kelahiran total (TFR)



Sumber: Long Form SP2020, BPS



Grafik 2.4
Angka kelahiran total berdasarkan pulau tahun 2020



Sumber: Long Form SP2020, BPS



Disparitas angka kelahiran total tersebut disebabkan oleh kondisi geografis (akses), tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan masyarakat maupun kebijakan pada setiap kabupaten dan kota yang dapat menentukan keberhasilan pengendalian kuantitas penduduk.

Fertilitas di Indonesia dikelola melalui Program KB. Walaupun keberhasilannya sangat signifikan, namun untuk menyelaraskan dengan pembangunan ekonomi, masih dihadapi tantangan baik pada masa kini maupun masa datang. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program KB adalah:

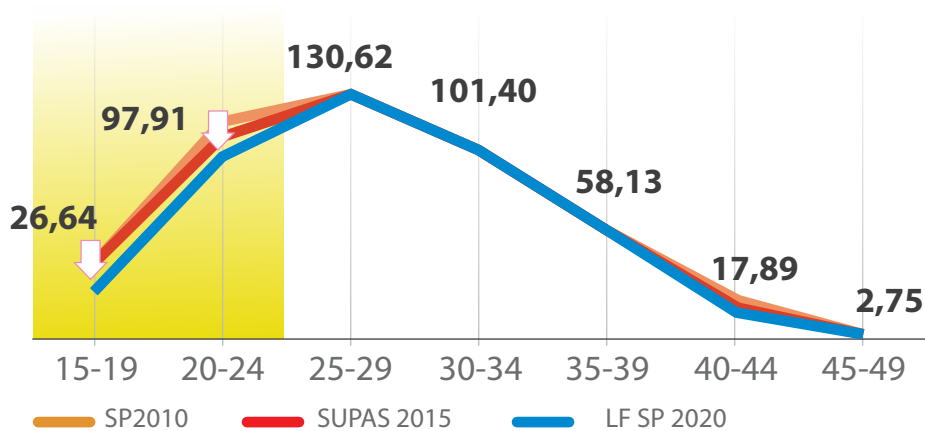
(1) Pendewasaan Usia Kawin

Mayoritas perempuan Indonesia menikah pada usia 19-24 tahun. Pada tahun 2020, sebanyak 48,59% perempuan di Indonesia menikah pertama di usia tersebut. Sebanyak 26,55% perempuan Indonesia melaku-

kukan perkawinan pertamanya pada usia 16-18 tahun dan 16,67% perempuan yang pertama menikah di usia lebih dari 25 tahun.² Jika melihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan perempuan sudah berumur 19 tahun.

Di lain pihak perkawinan anak di Indonesia juga masih tinggi. Perkawinan anak adalah perkawinan formal atau informal di mana salah satu atau kedua pihak berusia di bawah 18 tahun (BPS & UNICEF). Berdasarkan data BPS 2021, pada tahun 2020 angka perkawinan anak adalah 10,35% dan pada tahun 2021 menurun menjadi 9,23%. Sebanyak 22 dari 34 provinsi di Indonesia memiliki angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

ANGKA KELAHIRAN MENURUT KELOMPOK UMUR (ASFR)



Grafik 2.5
Angka kelahiran menurut kelompok umur (ASFR)

Sumber: Long Form SP2020, BPS

² BPS. Susenas Kor. 2020.

ANGKA KELAHIRAN MENURUT KELOMPOK UMUR IBU (AGE SPESIFIC
FERTILITY RATE/ASFR) DAN PROVINSI TAHUN 2020

Provinsi	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
Aceh	16,4	96,9	151,0	118,9	76,0	22,7	3,1
Sumatera Utara	21,3	106,9	159,5	120,5	67,5	17,5	2,6
Sumatera Barat	14,2	85,6	163,0	129,3	75,3	22,4	2,2
Riau	25,5	101,3	139,0	107,4	59,4	21,0	3,4
Jambi	50,5	101,4	130,5	99,3	52,3	18,3	3,0
Sumatera Selatan	36,5	101,6	136,6	95,9	55,7	17,3	2,3
Bengkulu	38,2	106,5	143,5	96,8	56,6	16,2	2,5
Lampung	34,5	108,3	135,7	99,3	59,5	15,9	3,3
Bangka Belitung	37,0	112,3	130,4	97,7	55,9	12,4	2,6
Kepulauan Riau	13,0	75,8	151,8	117,8	63,3	18,1	2,1
DKI Jakarta	7,9	59,8	117,6	93,6	54,0	14,8	1,5
Jawa Barat	24,5	94,3	125,4	98,2	58,7	18,2	2,5
Jawa Tengah	23,1	98,5	130,9	97,5	52,4	14,7	1,7
DI Yogyakarta	11,5	71,1	124,1	99,9	55,2	15,2	1,1
Jawa Timur	31,3	101,6	113,2	87,6	46,1	13,3	2,4
Banten	18,2	82,3	122,2	98,2	57,7	19,9	2,8
Bali	19,8	96,5	140,5	90,8	46,2	13,4	1,4
Nusa Tenggara Barat	46,9	107,0	134,1	104,6	66,2	23,0	4,4
Nusa Tenggara Timur	27,9	109,2	148,0	143,2	88,8	33,5	6,5
Kalimantan Barat	42,7	105,7	133,0	101,7	59,8	19,7	4,2
Kalimantan Tengah	63,1	114,8	113,1	87,4	54,6	23,9	5,2
Kalimantan Selatan	45,1	108,5	129,0	99,7	58,0	19,7	2,3
Kalimantan Timur	22,3	92,1	134,6	104,2	61,0	18,6	3,1
Kalimantan Utara	33,9	94,3	134,0	112,9	68,0	23,5	4,2
Sulawesi Utara	42,8	97,3	115,6	88,0	53,4	19,0	3,3
Sulawesi Tengah	38,8	109,0	127,7	100,6	61,2	22,7	4,1
Sulawesi Selatan	29,5	94,3	127,2	103,2	64,9	21,6	3,3
Sulawesi Tenggara	34,5	110,7	142,8	119,7	76,5	25,6	4,3
Gorontalo	46,3	110,8	130,0	91,9	53,5	24,8	2,8
Sulawesi Barat	43,5	120,0	139,6	110,5	72,4	23,7	5,3
Maluku	25,0	95,3	134,2	122,5	84,1	33,8	8,8
Maluku Utara	42,4	103,8	133,6	101,4	73,4	32,8	6,1
Papua Barat	37,5	109,0	130,5	126,4	81,7	38,3	9,6
Papua	59,0	135,0	134,4	99,8	66,7	41,0	16,9
INDONESIA	26,6	97,9	130,6	101,4	58,1	17,9	2,8

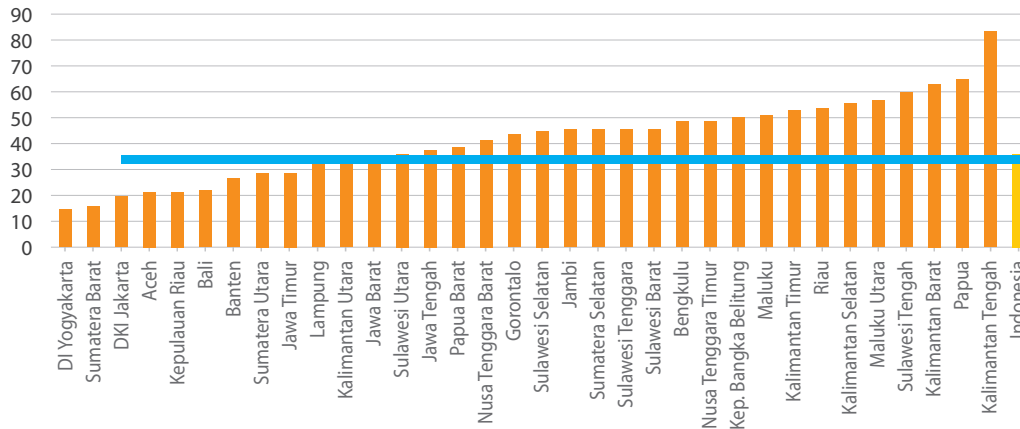


Tabel 2.2
Angka kelahiran menurut kelompok umur ibu (Age Spesific Fertility Rate/ASFR) dan provinsi tahun 2020

Sumber: BPS, Long Form SP2020



ASFR 15 - 19 MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2017



Grafik 2.6
ASFR 15 - 19
tahun menurut
provinsi 2017

Sumber: SDKI 2017

Selain dampak ekonomi, perkawinan anak ini sebenarnya akan berdampak multi-dimensional, karena dapat membawa implikasi besar terhadap pembangunan, khususnya terkait kualitas dan daya saing sumber daya manusia kaum muda di masa mendatang. Perkawinan anak juga memiliki dampak multidimensional dan memengaruhi kualitas penduduk usia muda dan daya saing sumber daya manusia di masa depan.

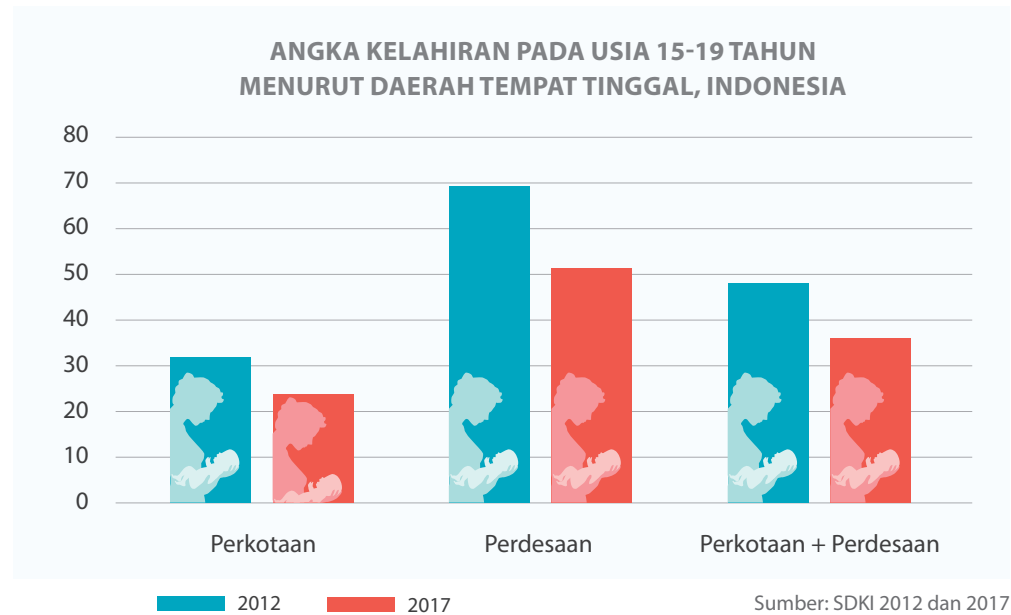
Grafik di atas menunjukkan kondisi *Age Specific Fertility Rate* (ASFR 15-19 tahun) menurut provinsi. Provinsi yang memiliki ASFR (15-19) di atas rata-rata nasional ada sebanyak 23 wilayah yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo,

Sulawesi Selatan, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Maluku, Kalimantan Timur, Riau, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Kalimantan Tengah.

ASFR 15-19 tahun cenderung menurun dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. ASFR 15-19 tahun lebih tinggi di perdesaan dibandingkan dengan di wilayah perkotaan. Perkawinan anak merupakan salah satu penyebab terjadinya *stunting*. Selain itu, sebetulnya mereka belum siap untuk menikah, hamil dan melahirkan serta mengasuh anak secara fisik dan mental.



Grafik 2.7
Angka kelahiran pada usia 15-19 tahun menurut daerah tempat tinggal, Indonesia



Untuk mengatasi perkawinan anak, pemerintah telah menerbitkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak pada tahun 2022. Selain itu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* juga mempunyai komponen pencegahan kawin anak melalui sasaran pendampingan keluarga termasuk remaja. Perpres ini mendukung terciptanya keluarga yang berkualitas guna mendukung Indonesia Emas 2045.

Pada tahun 2022 pemerintah menerbitkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. Langkah ini merupakan upaya untuk menurunkan angka perkawinan anak yang menimbulkan dampak negatif yang luas. Hal ini merupakan tantangan bagi Indonesia di tengah gencarnya

upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui RPJMN 2020-2024, yang menargetkan angka perkawinan anak turun menjadi 8,74%.

(2) Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi

Pemakaian kontrasepsi masih perlu ditingkatkan. Dengan menggunakan hasil pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 (termasuk Provinsi DKI Jakarta) diproyeksikan bahwa prevalensi pemakaian kontrasepsi sebesar 62,92% pada tahun 2023, meningkat menjadi 63,41% pada tahun 2024 dan 64,32% pada tahun 2024.

Prevalensi pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) berdasarkan hasil Pendataan Keluarga Tahun 2022 berada pada angka 22,20 dan hasil PK 2023 di angka 23,6 persen.



(3) Masih Tingginya *Unmet Need*

Meskipun capaian KB sudah tinggi, namun demikian masih menyisakan *unmet need* yang tinggi. Berdasarkan hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2023 masih berada di angka 11,5 persen. Angka ini menunjukkan masih tingginya orang yang seharusnya ikut KB, namun tidak terlayani dengan berbagai alasan yaitu:

- Ingin hamil/anak,
- Tidak tahu tentang KB,
- Alasan kesehatan,
- Efek samping,
- Tempat pelayanan jauh,
- Alat/obat/cara KB tidak tersedia,
- Biaya mahal,
- Tidak ada alat/obat/cara KB yang cocok,
- Suami/keluarga menolak,
- Alasan agama,
- Suami tinggal jauh/jarang berhubungan,
- Tidak ada petugas pelayanan KB,
- Infertilitas/*menopause*.

(4) Masih Tingginya *Drop Out KB*

Selain masih tingginya *unmet need* juga masih tinggi *drop out KB*. Angka *drop out KB* telah mengalami penurunan dari 21,6 persen pada tahun 2022 menjadi 20,3 persen pada tahun 2023 (Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2022 dan 2023). Hal ini disebabkan oleh

berbagai faktor, misalnya masih rendahnya pemakaian alkon MKJP, masih tinggi pemakaian alkon jangka pendek. Bila dibandingkan dengan sasaran target renstra BKKB tahun 2020-2024, maka capaian kesertaan KB masih perlu ditingkatkan sampai mendekati target yang ditetapkan

Dengan perhitungan di atas maka prevalensi kontrasepsi diharapkan akan menghasilkan tingkat *replacement level* pertumbuhan penduduk pada tahun 2025. Tingkat pertumbuhan penduduk harus dipertahankan agar pembangunan di sektor lain akan memberikan dampak yang maksimal.

Untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan penduduk yang ideal diperlukan peningkatan pelayanan KB hingga menjangkau daerah-daerah yang masih rendah pelayanannya. Pelayanan pada daerah padat penduduk juga harus terus ditingkatkan agar pertumbuhan penduduk tetap terkendali sebagai upaya untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian semua bentuk pelayanan dan edukasi masih harus ditingkatkan untuk menjamin bahwa pertumbuhan penduduk berada pada tingkat yang seimbang dengan pertumbuhan ekonomi.

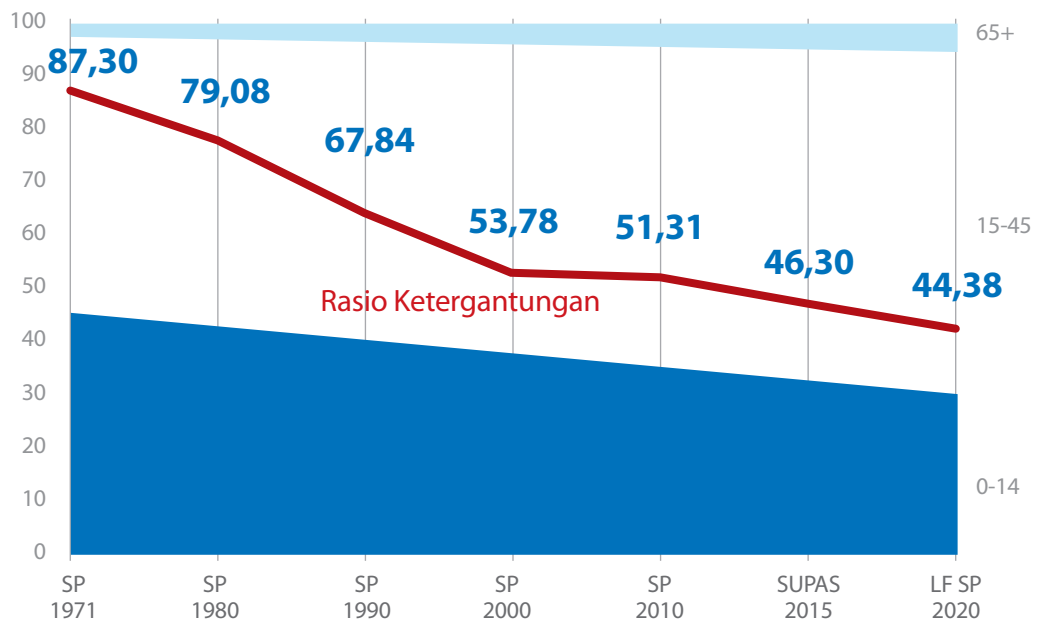
2.1.5 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan dipengaruhi oleh perubahan struktur penduduk. Rasio ketergantungan Indonesia pada tahun 2020 yaitu 44,3 per 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun) menanggung 44 orang usia 0–14 tahun dan 65 tahun atau lebih pada tahun 2020. Setelah itu, rasio ketergantungan kembali meningkat, diproyeksikan pada tahun 2050 menjadi 54,13. Dengan tingkat fertilitas dan usia harapan hidup yang berubah lebih cepat dari yang diperkirakan pada tahun 2010 dan 2015, Indonesia diperkirakan sedang mengalami puncak bonus demografi.

Usia harapan hidup penduduk Indonesia terus meningkat dari 69,8 tahun pada tahun 2010 menjadi 73,4 tahun pada tahun 2020 dan ditargetkan mencapai 80 tahun pada 2045.

Pemerintah sering menggunakan rasio ketergantungan penduduk sebagai salah satu faktor dalam perencanaan kebijakan, terutama dalam hal pembangunan ekonomi, pensiun, dan sistem kesehatan untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan dalam penyediaan layanan dan manfaat bagi seluruh populasi.

STRUKTUR PENDUDUK DAN RASIO KETERGANTUNGAN
INDONESIA 1971-2020

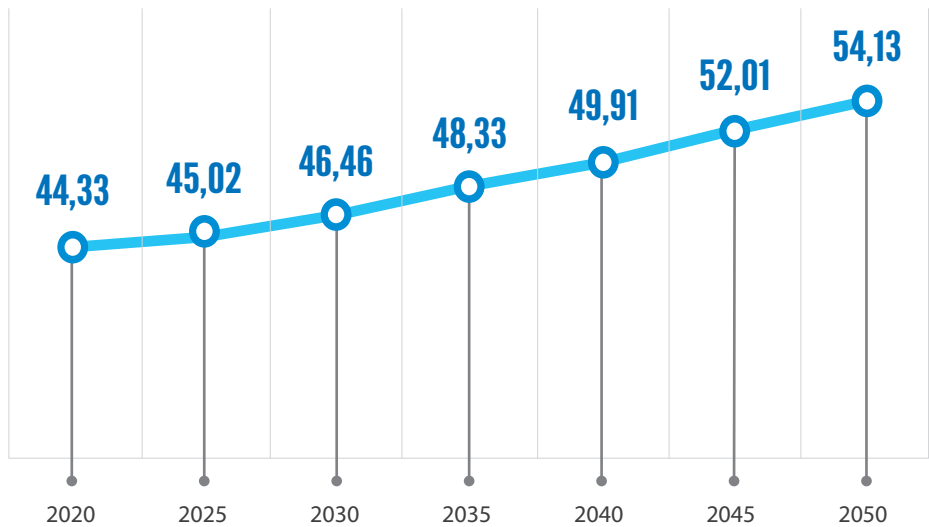


Grafik 2.8
Struktur penduduk
dan rasio
ketergantungan
Indonesia 1971-
2020

Sumber: Hasil Pengolahan Data dari Hasil SP, SUPAS, LF SP



ANGKA KETERGANTUNGAN PENDUDUK INDONESIA 2020 - 2050



Grafik 2.9
Angka ketergantungan penduduk Indonesia 2020 - 2050

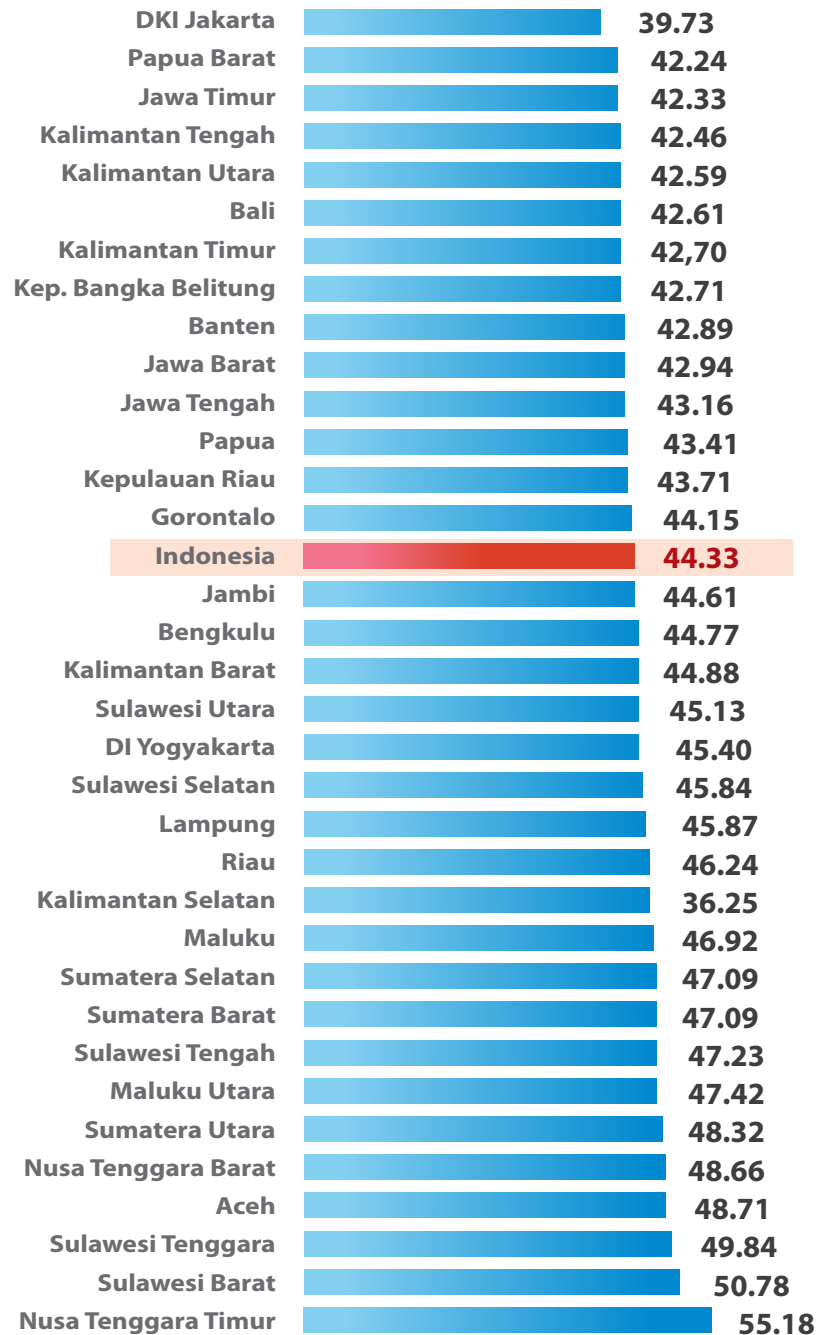
Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 menggunakan skenario tren /business as usual

Pada tahun 2020, secara nasional dependency ratio yang terendah yaitu DKI Jakarta (39,73), sedangkan yang tertinggi yaitu Nusa Tenggara Timur (55,18). Secara umum, seluruh provinsi di Indonesia juga mengalami penurunan

rasio ketergantungan selama kurun waktu tersebut. Detail proyeksi rasio ketergantungan penduduk di Indonesia berdasarkan provinsi dapat dilihat pada grafik 2.10 berikut.



RASIO KETERGANTUNGAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020



Grafik 2.10
Rasio
ketergantungan
menurut provinsi
tahun 2020

Sumber: BPS, 2020



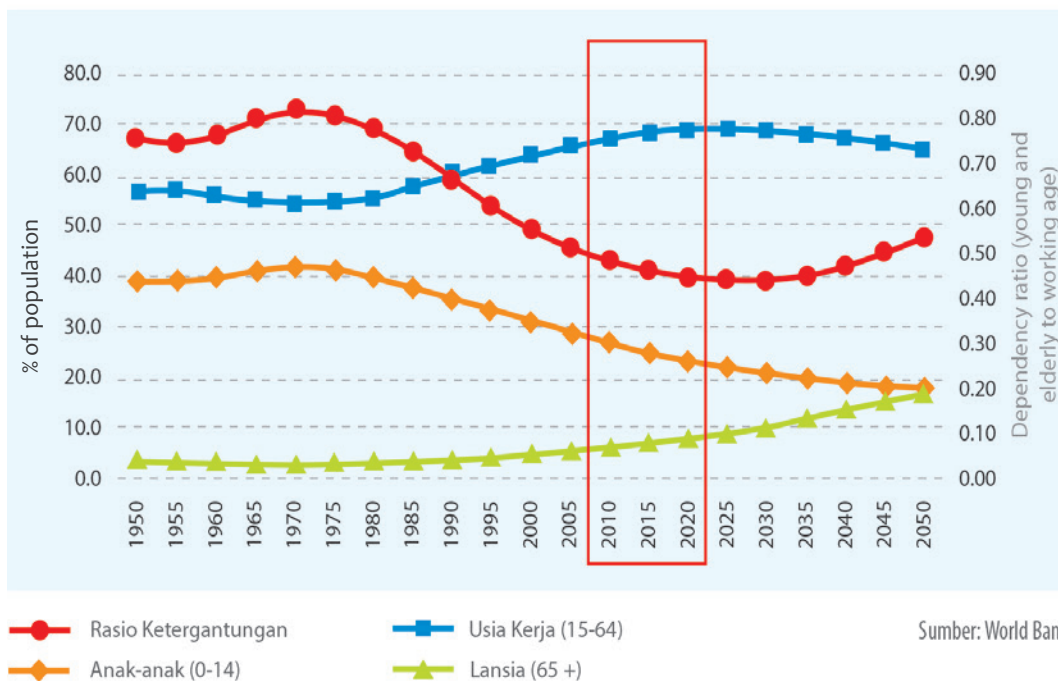
2.1.6 Bonus Demografi

Bonus demografi merupakan potensi pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari perubahan struktur penduduk. Bonus demografi dapat terjadi ketika penduduk usia kerja terus bertumbuh dan relatif lebih besar dibandingkan penduduk usia muda dan lanjut usia. Dengan kata lain struktur umur penduduk berubah, proporsi jumlah penduduk muda mengecil, dan proporsi penduduk usia kerja meningkat. Dengan jumlah penduduk muda yang lebih sedikit, rumah tangga dapat meningkatkan fokus pada kualitas anak. Bonus demografi menjadi momentum yang tepat bagi negara untuk fokus pada investasi sumber daya manusia

yang produktif, kompetitif, dan berdaya saing.

Penduduk usia kerja yang tumbuh lebih cepat daripada penduduk yang bergantung padanya menciptakan jendela kesempatan (*windows of opportunity*) untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan keluarga yang lebih baik. Transisi demografi dapat menghasilkan standar hidup yang lebih baik bagi keluarga dan meningkatkan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Oleh karena itu, transisi demografi pada akhirnya dapat memberikan keuntungan yang signifikan dalam pembangunan ekonomi suatu negara.

RASIO KETERGANTUNGAN DI INDONESIA



Grafik 2.11
Rasio ketergantungan Indonesia



Dengan kondisi tingkat fertilitas dan usia harapan hidup yang berubah secara lebih cepat dari yang diperkirakan pada tahun 2010 dan 2015, maka Indonesia diperkirakan sedang berada di periode akhir puncak bonus demografi.

Di sisi lain, Indonesia juga sudah memasuki era ageing population. Periode ageing population ditandai dengan persentase penduduk lanjut usia (lansia) 60+ tahun melebihi dari 10 persen populasi. Pada sensus penduduk 2020, terdapat 26,4 juta penduduk lansia yang setara dengan 9,93% penduduk dan diproyeksikan menjadi 10,3% pada tahun 2021. Kondisi ini menandai dimulainya periode ageing population di Indonesia mana jumlah penduduk lanjut usia (lansia) 60+ tahun sudah mencapai lebih dari sepuluh persen populasi pada tahun 2021. Pada Sensus Penduduk 2020, terdapat 26,4 juta penduduk lansia yang setara dengan 9,93 persen penduduk.

Terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam usaha mengoptimalkan manfaat dari bonus demografi.

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas modal manusia menjadi kunci utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Membangun kualitas manusia sejak dini dengan pendekatan siklus hidup menjadi langkah utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Penyerapan tenaga kerja yang optimal menjadi penentu kesuksesan dalam memanfaatkan

bonus demografi. Melalui penyerapan tenaga kerja yang optimal, negara mendapatkan keuntungan melalui skema pajak sedangkan pekerja mulai dapat mengumpulkan aset untuk investasi.

3. Mengatasi penduduk usia muda *Not in Education, Employment, or Training* (NEET). Pencapaian bonus demografi tidak terlepas dari tantangan terkait keterbatasan akses dalam memperoleh pendidikan, pelatihan, serta pekerjaan pada usia muda. Di dalam bonus demografi terdapat kelompok penduduk usia muda atau yang sering disebut sebagai tenaga kerja muda yang tidak dalam pendidikan, tidak sedang bekerja dan tidak sedang mengikuti pelatihan (*Not in Education, Employment or Training*—NEET). Penduduk usia muda yang termasuk dalam kategori NEET menjadi beban keluarga, masyarakat dan tentu saja dapat membahayakan stabilitas negara. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu dilakukan berbagai upaya agar tenaga kerja muda tersebut melakukan kegiatan seperti bekerja dan/atau meningkatkan kapasitasnya dengan sekolah dan/atau pelatihan kerja.
4. Meningkatkan partisipasi kerja perempuan. Partisipasi kerja perempuan di Indonesia masih berkisar 53 persen pada tahun 2022, sedangkan di negara-negara Asia Timur dan Asia Pasifik sudah mencapai 60 persen. Mendorong partisipasi kerja perempuan dilakukan dengan tetap meningkatkan perlindungan dan memperhatikan kesejahteraan pekerja perempuan. Selain itu, pemberdayaan perempuan dalam *care*



economy juga sangat penting karena perempuan seringkali bertanggung jawab atas pekerjaan perawatan di rumah tangga. Perempuan yang bekerja dalam *care economy* akan menerima upah yang adil dan kondisi kerja yang layak, termasuk jam kerja yang wajar, perlindungan kesehatan dan keselamatan, serta hak-hak kerja lainnya. *Care economy* akan membantu meningkatkan martabat perempuan yang bekerja dalam sektor perawatan dan memberi pengakuan yang pantas bagi perempuan.

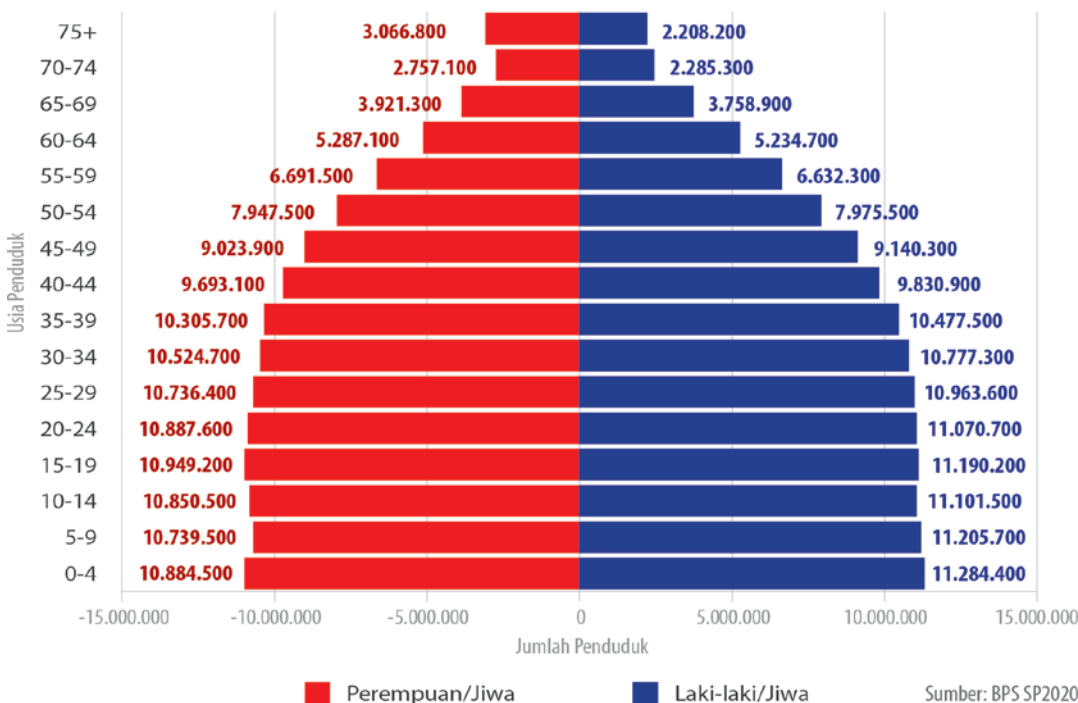
5. Memperkuat literasi keuangan, *saving* dan investasi. Literasi keuangan dan investasi menjadi komponen penting dalam menentukan pencapaian bonus demografi kedua (KemenPPN/Bappenas, 2023). Investasi memainkan peranan penting dalam menggerakkan perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena pembentukan modal dapat memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional dan menciptakan lapangan pekerjaan.

2.1.7 Transisi Demografi

Transisi demografi mengacu pada perubahan dalam struktur populasi suatu negara dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi ke tingkat kelahiran dan kematian yang rendah.

Proses ini biasanya terjadi seiring dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan kesehatan dalam suatu masyarakat Terdapat empat tahap dalam transisi demografi.

PIRAMIDA PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2020



Grafik 2.12
Piramida penduduk Indonesia tahun 2020

Tahap Pertama (Pra-Transisi): Tahap ini ditandai oleh tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi, yang cenderung seimbang sehingga tidak mengalami peningkatan populasi yang signifikan. Faktor-faktor seperti kondisi kesehatan yang buruk, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, dan kebiasaan dalam struktur keluarga yang besar mempengaruhi tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi.

Tahap Kedua (Transisi): Pada tahap ini, terjadi penurunan dramatis dalam tingkat kematian karena kemajuan dalam bidang kesehatan, sanitasi, dan gizi. Meskipun tingkat kelahiran tetap tinggi pada awal tahap ini, dengan waktu, pengetahuan dan akses terhadap metode kontrasepsi meningkat, menyebabkan penurunan bertahap dalam tingkat kelahiran.

Tahap Ketiga (Pasca-Transisi): Di tahap ini, tingkat kelahiran turun mendekati atau bahkan di bawah tingkat kematian, sehingga menyebabkan pertumbuhan populasi yang lebih lambat. Faktor-

















faktor seperti urbanisasi, pendidikan yang lebih tinggi, peningkatan status ekonomi perempuan, dan perubahan sosial menyebabkan pergeseran dalam preferensi keluarga terhadap memiliki jumlah anak yang lebih sedikit.

Tahap Keempat (Post-industrialisasi): Pada tahap ini, kedua tingkat kelahiran dan kematian berada pada tingkat yang rendah dan stabil. Masyarakat sudah mengalami transformasi besar dalam hal demografi, ekonomi, dan sosial. Urbanisasi dan industrialisasi telah mencapai puncaknya, dan perubahan struktural dalam perekonomian telah mengubah pola keluarga dan hubungan antargenerasi.

Perubahan struktur penduduk yang terjadi di Indonesia pada akhirnya mengubah komposisi penduduk menurut umur. Perubahan komposisi penduduk menurut kelompok umur ini ditandai dengan meningkatnya kelompok usia kerja (15-64), menurunnya kelompok usia anak-anak (< 15) dan meningkatnya penduduk usia lansia (65+).



Tabel 2.3
Klasifikasi transisi demografi

Transisi Lanjut (DR < 44.0 – 44.9)	Transisi Berjalan (DR 45 – 49.9)	Pra Transisi (DR 50 – 54.9)	Belum Ada Tanda Transisi (DR 60-69)
 TFR rendah (<2.1)	 TFR rendah (=2.1)	 TFR tinggi (>2.1)	 TFR tinggi (>2.1)
 Kemiskinan rendah	 Kemiskinan rendah	 Kemiskinan tinggi	 Kemiskinan tinggi
 IPM dan IPG tinggi	 IPM dan IPG rendah	 IPM dan IPG rendah	 IPM dan IPG rendah
 UHH tinggi	 UHH rendah	 UHH rendah	 UHH rendah

Sumber: Adioetomo, dkk (2018).



Perubahan ketiga kelompok umur tersebut akan memengaruhi angka rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Perubahan ini bukan semata-mata perubahan demografis, akan tetapi memiliki implikasi penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Hasil Sensus Penduduk tahun 2020 memperlihatkan bahwa piramida penduduk telah menyempit bagian bawah sebagai indikasi menurunnya angka fertilitas dalam beberapa periode terakhir. Kondisi ini disertai dengan cembungnya bagian tengah, yaitu struktur penduduk Indonesia

didominasi oleh struktur usia produktif sebagai akibat terjadinya *baby boom* pada periode setelah kemerdekaan Indonesia. Selain itu, jumlah maupun persentase penduduk usia lansia semakin melebar sebagai akibat dari meningkatnya usia harapan hidup sebagai konsekuensi dari menurunnya angka kematian dan membaiknya status kesehatan masyarakat. Secara nasional, angka ketergantungan penduduk lanjut usia naik sejalan dengan bertambahnya penduduk usia 60+. Pada tahun 1970 tercatat angka rasio ketergantungan sebesar 80 persen dan menurun menjadi 44,33 persen pada tahun 2020 (SP2020).

2.1.8 Mortalitas

Mortalitas (kematian) merupakan salah satu faktor demografi yang memengaruhi jumlah penduduk selain fertilitas (kelahiran) dan migrasi (pindah).

a. Angka Kematian Kasar

Berdasarkan hasil *Long Form SP2020* tercatat angka kematian kasar di Indonesia 4,74 per 1000 penduduk, artinya terdapat 4 sampai dengan 5 kematian untuk setiap 1000 penduduk di Indonesia. Angka kematian kasar (*Crude Death Rate*) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah kematian dalam suatu populasi dalam satu tahun tertentu per 1.000 individu. *Crude Death Rate* ini adalah salah satu indikator demografi penting yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan dan kesejahteraan populasi.

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Secara umum, Angka Kematian Ibu (AKI) didefinisikan sebagai seluruh jumlah kematian setiap perempuan yang terjadi selama periode kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh gangguan kehamilan atau penanganan, bukan akibat kecelakaan atau insidental, tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2019).

Dalam Buku Profil Kesehatan Indonesia, disebutkan bahwa AKI digunakan sebagai acuan menilai indikator keberhasilan program kesehatan ibu dan program kesehatan masyarakat. Upaya percepatan penurunan AKI dilakukan dengan menjamin para ibu hamil dapat mengakses pelayanan

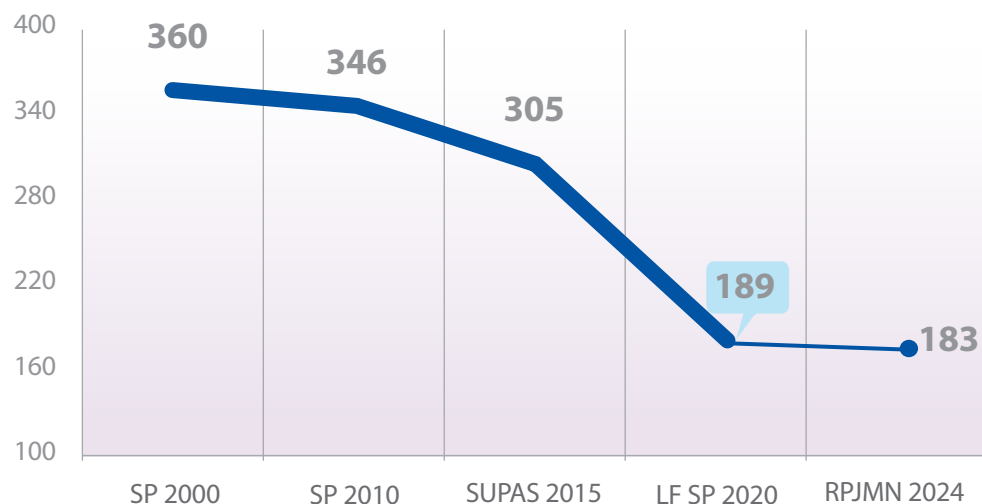
kesehatan yang berkualitas, dimulai dari pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, rujukan saat ibu mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, serta pelayanan keluarga berencana (Kemenkes RI, 2021).

Selama 20 tahun, angka kematian ibu menurun dari 360 kematian per 100.000 kelahiran hidup (SP2000) menjadi 189 kematian per 100.000 kelahiran hidup (LF SP2020). Namun begitu, Indonesia masih belum

berhasil mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Kematian ibu terkait dengan tingkat kesehatan ibu, jika berdasarkan provinsi dengan AKI tertinggi di Provinsi Papua, sebesar 565 per 100.000 kelahiran hidup disusul Papua Barat sebesar 343 per 100.000 kelahiran hidup, Nusa Tenggara Timur sebesar 316 per 100.000 kelahiran hidup, Sulawesi Barat sebesar 282 per 100.000 kelahiran hidup (*Long Form SP2020*).

ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)



Grafik 2.13
Angka Kematian Ibu (AKI)

- Angka Kematian Ibu selama dua dekade turun hampir setengahnya, **menjadi 189 kematian per 100.000 kelahiran hidup**
- Hal ini sejalan dengan peningkatan proporsi persalinan di fasilitas kesehatan dan proporsi persalinan oleh tenaga kesehatan.

Sumber: Long Form SP2020



ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) MENURUT PROVINSI

PROVINSI	MMR
	LF SP2020
Papua	565
Papua Barat	343
Nusa Tenggara Timur	316
Sulawesi Barat	274
Gorontalo	266
Sulawesi Tengah	264
Maluku Utara	261
Nusa Tenggara Barat	257
Maluku Utara	255
Kalimantan Barat	246
Sulawesi Utara	230
Sulawesi Tenggara	226
Kalimantan Selatan	224
Aceh	201
Kalimantan Tengah	200
Kep. Bangka Belitung	198
Sumatera Utara	195

PROVINSI	MMR
	LF SP2020
Kalimantan Utara	194
Lampung	192
Sulawesi Selatan	192
INDONESIA	189
Jawa Barat	187
Jawa Timur	184
Jawa Tengah	183
Bengkulu	179
Sumatera Barat	178
Jambi	177
Kalimantan Timur	177
Sumatera Selatan	175
Riau	158
Kepulauan Riau	142
Banten	127
Bali	85
DI Yogyakarta	58
DKI Jakarta	48



Tabel 2.4
Angka kematian ibu (AKI) menurut provinsi berdasarkan hasil Long Form SP2020

Sumber: Long Form SP2020

Tabel 2.4 memperlihatkan disparitas angka kematian ibu (AKI) berdasarkan provinsi. Berdasarkan hasil Long Form SP2020, AKI tertinggi di Provinsi Papua, sebesar 565 per 100.000 kelahiran hidup disusul Papua Barat sebesar 343 per 100.000 kelahiran hidup, Nusa Tenggara Timur sebesar 316 per 100.000 kelahiran hidup, dan Sulawesi Barat sebesar 274 per 100.000 kelahiran hidup (LF SP2020). Penyebab kematian ibu adalah perdarahan post partum, eklampsia, infeksi, aborsi tidak aman, partus macet, dan penyakit-penyakit penyerta ibu hamil (TBC, Malaria, hepatitis, penyakit pembuluh

darah, diabetes melitus, malnutrisi, dll) (Kemenkes RI, 2021).

Dalam Buku Profil Kesehatan Indonesia, disebutkan bahwa AKI digunakan sebagai acuan menilai indikator keberhasilan program kesehatan ibu dan program kesehatan masyarakat. Upaya percepatan penurunan AKI dilakukan dengan menjamin para ibu hamil dapat mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dimulai dari pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan,



rujukan saat ibu mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, serta pelayanan Keluarga Berencana (Kemenkes RI, 2021).

Beberapa indikator kesehatan ibu dan anak ditunjukkan dalam tabel 2.5. Dari sejumlah indikator tersebut, keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan

dan perlindungan pada saat hamil dan pasca persalinan untuk mengurangi risiko kematian ibu. Penggunaan kontrasepsi juga dapat menurunkan angka kematian ibu.

Pada kelompok masyarakat dimana penggunaan kontrasepsinya tinggi, angka kematian ibu lebih rendah. Kematian ibu di daerah luar Jawa-Bali lebih tinggi.

INDIKATOR	NILAI
Angka Kematian Ibu (<i>Maternal Mortality Rate</i>)	189/100.000 kelahiran hidup (LF SP2020)
Anemia	48%
Kurang gizi	17%
Angka kawin anak	9,23%
Penyebab kematian ibu	Terbesar: Eklampsia dan perdarahan (Covid-19 pada masa pandemi) Penyakit-penyakit penyerta ibu hamil (TBC, malaria, dengue, infeksi saluran nafas bawah, hepatitis, penyakit pembuluh darah, diabetes mellitus, malnutrisi dll)
Saat kematian ibu	24% saat kehamilan 36% saat persalinan 40% saat pasca persalinan
Kematian neonatal	9.3/1000 kelahiran hidup (LF SP2020)
Kematian bayi	16.85/1000 kelahiran hidup (LF SP2020)
Penyebab kematian bayi	Prematuritas (35.5%) <i>Asphyxia</i> dan trauma (21.6%) Kelainan Congenital (17.1%) Infeksi saluran nafas akut
<i>Stunting</i> pada Balita	21,60 (SSGI, 2022)
Angka kelahiran	17.095 (2022)
Jumlah kelahiran	4,7 juta (2020)



Tabel 2.5
Indikator
Kesehatan Ibu dan
Neonatal

Sumber: World Bank data 2022



c. Angka Kematian Bayi (AKB)

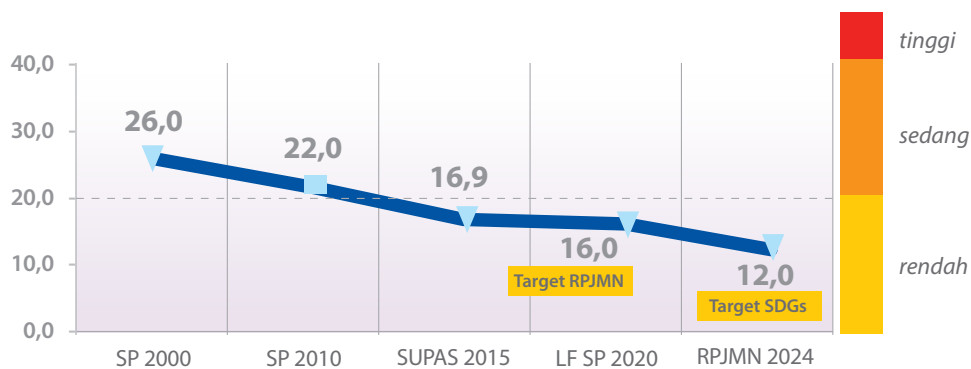
Kematian bayi adalah indikator kualitas manusia yang berarti juga indikator kualitas penduduk. Dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), salah satu variabelnya adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Dasar perhitungan AHH adalah Angka Kematian Bayi (AKB). Seperti yang digambarkan di atas, AKB masih tinggi. Angka Kematian Bayi berada pada angka 16,85/1000 kelahiran hidup, angka kematian neonatal sebesar 9,3 kematian per 1000 kelahiran, sedangkan angka kematian balita sebesar 19,83 kematian per 1000 kelahiran hidup (LF SP2020).

Penurunan Angka Kematian Bayi (IMR) Indonesia hampir 35 persen

dalam 12 tahun terakhir, menurun signifikan dari 26 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2010 (SP2010).

Sebagaimana halnya dengan angka fertilitas, meskipun secara nasional ada kecenderungan menurun, tetapi kesenjangan antar provinsi sangat jelas. Data mengenai angka kematian bayi menurut provinsi (tabel 2.6) juga mempertegas tentang variasi dan gap antar wilayah. Berdasarkan data LF SP2020 IMR paling rendah tercatat di DKI Jakarta (10 per 1000 lahir hidup) dan paling tinggi adalah di Papua (38 per 1000 lahir hidup). Hal ini sejalan dengan peningkatan capaian imunisasi lengkap dan rata-rata lama pemberian ASI.

ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)



Grafik 2.14
Angka Kematian
Bayi (AKB)

- Angka Kematian Bayi turun ke *level* rendah menjadi sekitar 17 **kematian per 1000 kelahiran hidup**
- Hal ini sejalan dengan peningkatan capaian imunisasi lengkap dan rata-rata lama pemberian ASI.



Berdasarkan hasil LF SP2020, terdapat 19 provinsi yang memiliki AKB masih cukup tinggi, di atas rata-rata nasional (16,85 per 100.000 kelahiran hidup) antara lain Jambi, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Aceh, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara

Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, Papua. Berdasarkan grafik 2.6, seluruh provinsi di Pulau Jawa memiliki AKB di bawah rata-rata nasional. Berikut adalah distribusi AKB di Indonesia berdasarkan provinsi pada tahun 2020 (Long Form SP2020).

ANGKA KEMATIAN BAYI/AKB (INFANT MORTALITY RATE/IMR) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

PROVINSI	LF SP2020	PROVINSI	LF SP2020
Aceh	19,41	Nusa Tenggara Timur	25,67
Sumatera Utara	18,28	Kalimantan Barat	17,47
Sumatera Barat	16,35	Kalimantan Tengah	17,95
Riau	15,69	Kalimantan Selatan	17,22
Jambi	16,99	Kalimantan Timur	15,51
Sumatera Selatan	16,78	Kalimantan Utara	16,65
Bengkulu	19,73	Sulawesi Utara	17,23
Lampung	15,69	Sulawesi Tengah	27,72
Kepulauan Bangka Belitung	16,75	Sulawesi Selatan	18,20
Kepulauan Riau	13,31	Sulawesi Tenggara	23,29
DKI Jakarta	10,38	Gorontalo	29,47
Jawa Barat	13,56	Sulawesi Barat	29,21
Jawa Tengah	12,77	Maluku	29,82
DI Yogyakarta	10,90	Maluku Utara	28,61
Jawa Timur	13,49	Papua Barat	37,06
Banten	13,83	Papua	38,17
Bali	13,26	INDONESIA	16,85
Nusa Tenggara Barat	24,64		



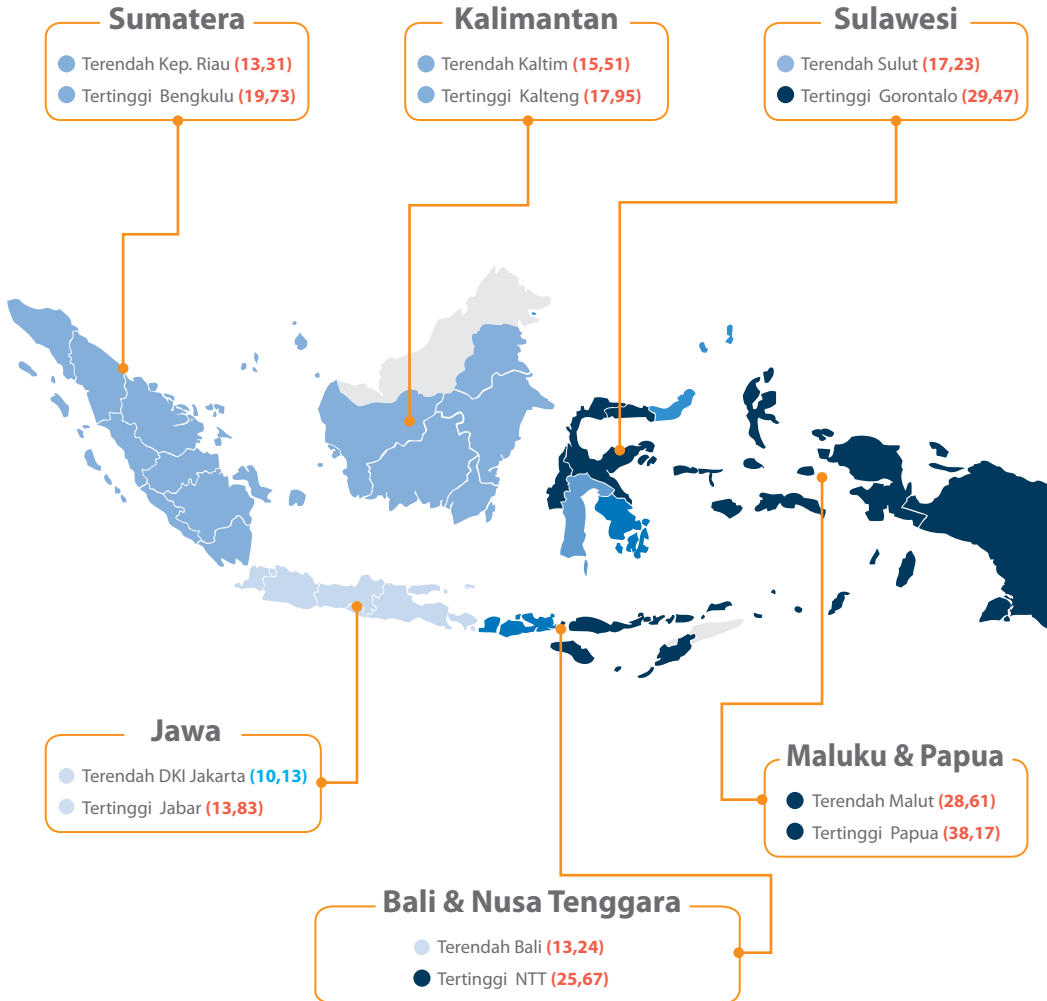
Tabel 2.6
Angka Kematian Bayi/AKB (Infant Mortality Rate/IMR) Menurut Provinsi Tahun 2020

Sumber: Long Form SP 2020



ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) DI INDONESIA TAHUN 2022

● Terendah: DKI Jakarta (10,38) ● Tertinggi: Papua (38,17)



Grafik 2.15
Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia tahun 2022 hasil Long Form SP2020

Sumber: Long Form SP 2020

2.2

Peningkatan Kualitas Penduduk

2.2.1 Kesehatan

a. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Dalam upaya upaya kesehatan ibu idealnya frekuensi pemeriksaan kehamilan atau *antenatal care* yang harus dilakukan oleh ibu hamil minimal sebanyak 6 (enam) kali pemeriksaan kehamilan dan 2 (dua) kali pemeriksaan oleh dokter spesialis kandungan (Kemenkes RI, 2021). Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilihat dari cakupan K1, K4, dan K6, seberapa banyak jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan *antenatal care* oleh tenaga kesehatan setiap trimester dalam satu tahun.

Secara umum, sejak tahun 2007 hingga 2021 cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 cenderung fluktuatif. Terdapat kenaikan proporsi pemeriksaan kehamilan K4 dari 70% pada tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 74,1% pada tahun 2018 (Riskesdas 2018). Pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan menjadi 84,6 persen dan meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 88,8 persen yang dipengaruhi oleh kebijakan adaptasi baru atau *new normal* pada berbagai pelayanan kesehatan pasca pandemi Covid-19.

Kebijakan pembatasan yang diberlakukan pada seluruh pelayanan kesehatan berimbas terutama terhadap Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia tahun 2021. Pelayanan kesehatan ibu hamil, seperti peniadaan kelas ibu hamil secara tatap muka, pembatasan jadwal pelayanan kesehatan hingga keengganan ibu hamil berkunjung periksa kehamilan ke fasilitas kesehatan karena takut tertular Covid-19.

Walaupun secara umum cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 telah melebihi target RPJMN tahun 2021, yaitu melebihi 85%, masih terdapat 17 provinsi dengan persentase cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 di bawah target nasional yang didominasi oleh wilayah timur Indonesia, beberapa di antaranya seperti Papua (16,8%), DI Yogyakarta (60,4%), Nusa Tenggara Timur (63,1%), Maluku Utara (67,6%), Sulawesi Tenggara dan Sumatera Barat (74,7%), Sulawesi Utara (75,2%), Sulawesi Barat (76,9%), dan Maluku (77,5%) (data diperoleh dari Komdat Kesmas Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2022).



Sedangkan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K6 berdasarkan Komdat Kesmas tahun 2021 pada sebagian besar provinsi masih rendah di bawah rata-rata nasional, yaitu di bawah 63%.

b. *Stunting*

Stunting masih merupakan isu kependudukan yang terkait dalam jangka panjang dengan upaya pencapaian bonus demografi. *Stunting* adalah kekurangan gizi kronis selama seribu hari pertama kehidupan (1.000 HPK) yang menyebabkan terganggunya pertumbuhan dan perkembangan seorang bayi di bawah dua tahun (Baduta) (Perumal dkk, 2018).

Anak dengan *stunting* disamping tinggi badan tidak sesuai umurnya (pendek atau sangat pendek), juga memiliki tingkat intelegensi (perkembangan otak yang tidak maksimal) rendah dan lebih rentan terhadap

penyakit serta berisiko memiliki penyakit degeneratif sehingga menurunkan produktivitasnya (Beal dkk, 2018).

Stunting berdampak besar karena dapat menurunkan kemampuan kognitif anak yang terbawa hingga seumur hidup. *Stunting* juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya penyakit *metabolic* dan penyakit tidak menular pada saat dewasa.

Menurut Wakil Presiden Republik Indonesia dalam acara Rapat Kerja Nasional BKKBN Tahun 2022, *stunting* menurunkan produktifitas dan berpotensi menurunkan 2-3% produk domestik bruto setiap tahun. Selain itu produktifitas individu akan berkurang secara signifikan pada orang yang mengalami *stunting*. *Stunting* terkait dengan periode penting pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu pada 1.000



Gambar 2.1
Menjaga tumbuh kembang anak agar terhidar dari *stunting*



hari pertama kehidupan, dimana pada saat itu anak mengalami tumbuh kembang yang sangat pesat terutama pertumbuhan otak. Pertumbuhan otak menyisakan sekitar 2% setelah usia 5 tahun dan meninggalkan kecerdasan yang terbawa sampai dewasa.

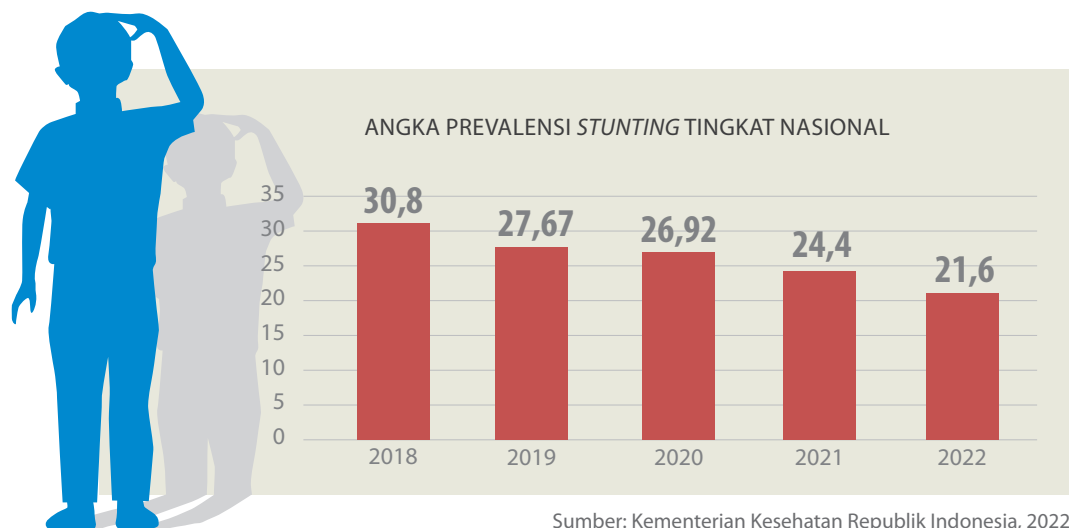
Dalam 270 hari pertama kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan anak sangat tergantung pada kesehatan ibunya. Anemia pada ibu hamil masih pada angka 48% dan kurang energi kronik pada ibu hamil berada pada angka 17% (Kemenkes RI, 2019). Sebagian ibu yang mengalami kurang gizi berada pada usia di bawah 20 tahun. Tantangan dalam upaya peningkatan kualitas penduduk pada bagian ini adalah kesehatan ibu dan anak yang terkait dengan status gizi mereka.

Sebagai upaya peningkatan kualitas SDM, pemerintah menjadikan percepatan penurunan *stunting* sebagai salah satu program prioritas nasional.

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting telah menetapkan 17 kementerian/lembaga menjadi penanggung jawab percepatan penurunan stunting. Ke-17 kementerian/ lembaga tersebut melaksanakan intervensi spesifik dan intervensi sensitif.



Grafik 2.16
Angka prevalensi *stunting* tingkat nasional



Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022

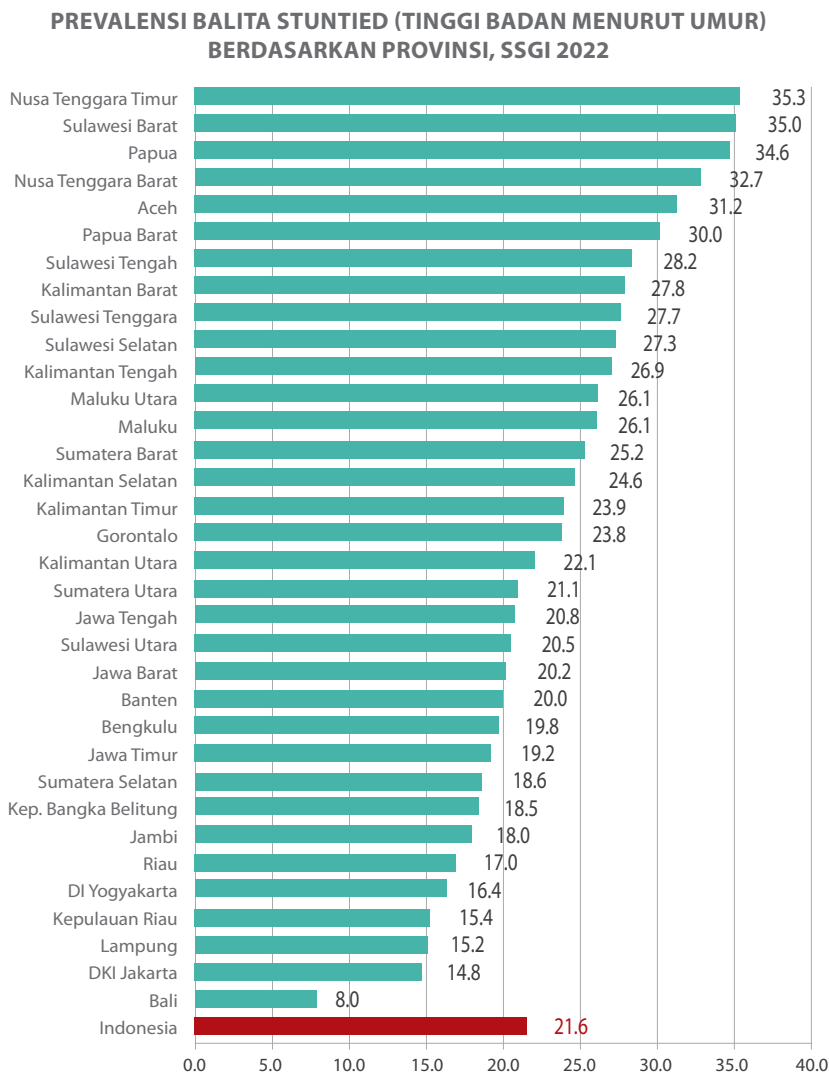


Mengacu pada grafik 2.17, diketahui bahwa angka prevalensi *stunting* di Indonesia masih cukup tinggi meskipun telah terjadi penurunan selama 3 tahun terakhir. Berdasarkan data SSGI, prevalensi *stunting* tahun 2019 sebesar 27,67% dan turun menjadi 24,4% pada tahun 2021 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Di tahun 2022, angka prevalensi *stunting* turun yaitu sebesar 21,6 (SSGI 2022).

Target *stunting* adalah 14% pada tahun 2024 (Pemerintah Indonesia,

2020). Ini berarti pemerintah harus dapat menurunkan angka *stunting* sebesar 10% selama kurang lebih 2 tahun (atau 3 hingga 3,5% setiap tahunnya). Menurut WHO, negara dengan prevalensi *stunting* di atas 20%, memiliki risiko tinggi *stunting*.

Bila dilihat berdasarkan provinsi SSGI 2022, angka prevalensi *stunting* di Indonesia sendiri sangat bervariasi. Provinsi dengan prevalensi *stunting* terendah adalah Provinsi Bali sebesar 8,0% dan provinsi dengan prevalensi *stunting* tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 35,3%.



Grafik 2.17
Prevalensi balita stunted (tinggi badan menurut umur) berdasarkan provinsi, SSGI 2022

2.2.2 Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah yang bersekolah pada berbagai jenjang

pendidikan dengan penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

PROVINSI	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (A P S)											
	7-12			13-15			16-18			19-24		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Aceh	99.84	99.67	99.44	98.49	98.42	97.96	83.27	83.28	83.10	32.50	32.61	31.72
Sumatera Utara	99.44	99.32	99.50	97.04	96.99	96.78	78.21	78.66	78.66	26.98	27.05	26.60
Sumatera Barat	99.61	99.61	99.55	96.60	96.63	96.52	83.68	84.07	83.71	35.96	36.41	35.41
Riau	99.53	99.65	99.61	95.53	95.66	95.72	77.42	77.81	77.32	28.35	28.79	28.65
Jambi	99.82	99.66	99.33	96.41	96.39	96.20	72.37	72.50	72.53	23.75	24.14	23.35
Sumatera Selatan	99.71	99.65	99.38	94.61	94.85	95.06	70.91	71.53	70.93	18.45	18.81	18.61
Bengkulu	99.78	99.76	99.49	97.49	97.49	97.73	79.72	79.75	79.31	29.99	30.46	29.42
Lampung	99.74	99.53	99.56	95.24	95.58	95.63	71.34	71.72	71.14	21.04	21.17	20.72
Kep. Bangka Belitung	99.70	99.47	99.41	93.34	93.17	93.00	67.75	68.15	68.42	17.47	18.02	17.68
Kep. Riau	99.55	99.62	99.28	98.82	98.85	99.01	84.62	84.40	84.54	19.71	19.83	19.50
DKI Jakarta	99.64	99.53	99.44	98.34	98.68	97.95	72.11	72.32	72.10	25.01	24.92	24.89
Jawa Barat	99.66	99.50	99.39	94.45	95.09	95.27	67.74	67.80	68.66	22.84	23.51	23.99
Jawa Tengah	99.73	99.66	99.58	96.37	96.84	96.77	70.14	70.79	70.82	22.41	23.55	23.76
DI Yogyakarta	99.89	99.70	99.59	99.45	99.43	99.01	88.95	89.63	89.95	51.81	51.41	50.43
Jawa Timur	99.54	99.40	99.14	97.68	97.76	97.64	73.05	74.14	73.40	25.81	26.27	26.21
Banten	99.40	99.45	99.33	95.77	96.77	96.39	68.76	68.94	69.22	21.60	21.59	22.14
Bali	99.57	99.70	99.55	98.21	98.22	97.85	82.96	83.96	83.84	28.67	28.95	30.18
Nusa Tenggara Barat	99.52	99.52	99.17	98.32	98.34	97.74	77.64	77.49	77.43	25.97	26.22	25.64
Nusa Tenggara Timur	98.57	98.42	98.59	95.25	95.32	94.83	75.52	75.77	75.55	29.52	30.54	29.36
Kalimantan Barat	98.60	98.64	98.73	92.90	93.14	92.64	68.96	69.38	68.72	24.05	24.57	24.50
Kalimantan Tengah	99.49	99.55	99.20	94.86	95.21	94.61	66.92	66.70	66.32	24.26	24.47	24.29
Kalimantan Selatan	99.48	99.38	99.43	93.04	93.50	94.01	69.38	69.31	69.88	24.63	24.70	24.52
Kalimantan Timur	99.73	99.60	99.57	99.07	98.90	98.75	81.88	82.01	81.43	29.71	29.86	29.33
Kalimantan Utara	98.94	98.67	98.98	96.52	96.51	97.03	76.08	76.50	76.50	23.82	25.02	25.62
Sulawesi Utara	99.59	99.37	99.34	95.27	95.41	94.86	74.12	73.86	74.33	23.18	23.67	23.43
Sulawesi Tengah	98.38	98.50	98.22	93.13	93.32	93.02	75.89	76.32	75.84	27.58	28.22	27.04
Sulawesi Selatan	99.25	99.29	99.43	93.34	93.55	93.20	70.89	71.21	70.81	34.51	35.08	35.07
Sulawesi Tenggara	99.10	99.16	99.05	94.98	95.06	94.80	74.50	75.02	74.53	31.76	31.97	31.81
Gorontalo	98.92	99.02	98.93	91.80	92.05	91.83	71.43	71.30	71.68	31.04	31.66	30.06
Sulawesi Barat	98.33	98.19	98.40	90.07	90.12	89.39	69.84	71.22	70.85	23.24	23.80	23.43
Maluku	99.50	99.52	99.55	97.43	97.65	97.69	79.87	79.68	79.03	38.59	39.03	40.15
Maluku Utara	99.04	98.84	99.13	97.15	97.00	97.59	76.83	77.01	77.70	31.36	31.23	30.67
Papua Barat	97.89	98.08	98.27	96.87	96.85	97.37	81.51	81.21	80.56	31.52	30.92	30.69
Papua	82.99	83.43	84.35	80.48	80.02	81.66	64.83	63.98	65.93	23.23	22.90	23.58
INDONESIA	99.26	99.19	99.10	95.74	95.99	95.92	72.72	73.09	73.15	25.56	26.01	25.99

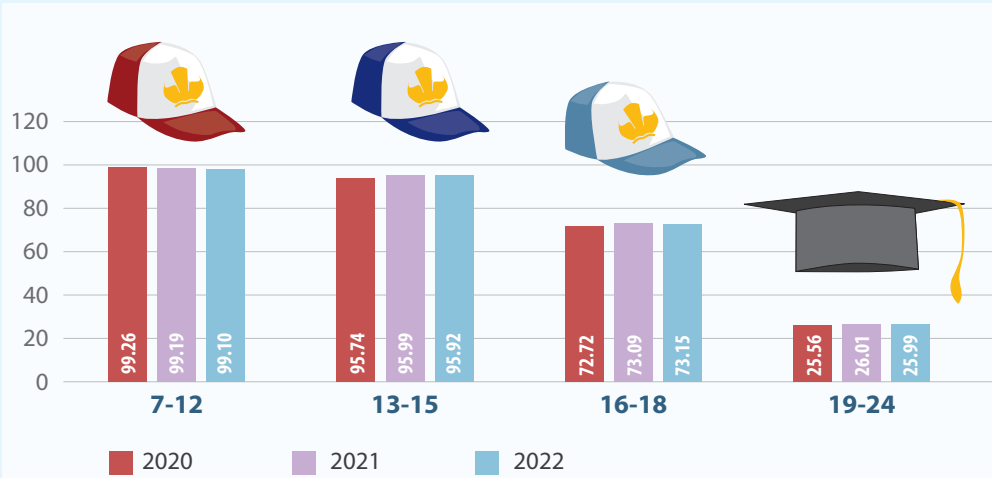


Tabel 2.7
Angka partisipasi sekolah di Indonesia tahun 2019, 2020, 2021

Sumber: BPS-RI, Susenas 2003-2017



ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA



Sumber: BPS, 2020, 2021, 2022.



Grafik 2.18
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
menurut
kelompok umur di
Indonesia, tahun
2020-2022

Angka partisipasi sekolah menurut kelompok umur 7-12 dan 13-15 masih cukup tinggi, berkisar antara 95 sampai 99 persen. Ini berarti hampir seluruh penduduk usia sekolah telah mengenyam pendidikan menurut usia sekolahnya. Namun, untuk usia 16-18 tahun APS berkisar antara 72-73. Ini berarti masih sekitar 27% anak usia 16-18 tidak bersekolah.

Sedangkan APS usia 19-24 sangat rendah angka partisipasinya, yaitu berkisar 25-26%, karena pendidikan pada kelompok ini umumnya adalah pendidikan tinggi dan yang dapat mengikuti pendidikan tinggi masih rendah.

b. Rata-rata Lama Sekolah

Secara umum, rata-rata lama sekolah di seluruh provinsi mengalami kenaikan. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 secara nasional adalah 8,54 tahun 2021 dan 8,69 tahun 2022. Provinsi Papua rata-rata lama sekolahnya sangat rendah yaitu 6,69 tahun 2020 dan 6,76 tahun 2021 dan 7.02 tahun 2022. Hal ini menunjukkan secara rata-rata penduduk Papua hanya berpendidikan sekolah dasar.

Secara umum ada 14 provinsi yang rata-rata lama sekolahnya pada pendidikan Sekolah Menengah Atas (tamat SMP) dan 21 provinsi yang rata-rata lama sekolahnya pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama (tamat SD).



PROVINSI	RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN)		
	2020	2021	2022
Aceh	9.33	9.37	9.44
Sumatera Utara	9.54	9.58	9.71
Sumatera Barat	8.99	9.07	9.18
Riau	9.14	9.19	9.22
Jambi	8.55	8.60	8.68
Sumatera Selatan	8.24	8.30	8.37
Bengkulu	8.84	8.87	8.91
Lampung	8.05	8.08	8.18
Kep. Bangka Belitung	8.06	8.08	8.11
Kepulauan Riau	10.12	10.18	10.37
DKI Jakarta	11.13	11.17	11.31
Jawa Barat	8.55	8.61	8.78
Jawa Tengah	7.69	7.75	7.93
DI Yogyakarta	9.55	9.64	9.75
Jawa Timur	7.78	7.88	8.03
Banten	8.89	8.93	9.13
Bali	8.95	9.06	9.39
Nusa Tenggara Barat	7.31	7.38	7.61
Nusa Tenggara Timur	7.63	7.69	7.70
Kalimantan Barat	7.37	7.45	7.59
Kalimantan Tengah	8.59	8.64	8.65
Kalimantan Selatan	8.29	8.34	8.46
Kalimantan Timur	9.77	9.84	9.92
Kalimantan Utara	9.00	9.11	9.27
Sulawesi Utara	9.49	9.62	9.68
Sulawesi Tengah	8.83	8.89	8.89
Sulawesi Selatan	8.38	8.46	8.63
Sulawesi Tenggara	9.04	9.13	9.25
Gorontalo	7.82	7.90	8.02
Sulawesi Barat	7.89	7.96	8.08
Maluku	9.93	10.03	10.19
Maluku Utara	9.04	9.09	9.24
Papua Barat	7.60	7.69	7.84
Papua	6.69	6.76	7.02
INDONESIA	8.48	8.54	8.69



Tabel 2.8
Rata-rata lama sekolah di Indonesia, tahun 2020-2021-2022

Sumber: BPS,2022

c. Rasio Angka Partisipasi Murni

Rasio angka partisipasi murni adalah perbandingan angka partisipasi perempuan terhadap laki-laki. Jika rasio APM di atas 100, maka lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Secara umum rasio APM seimbang baik pada Pendidikan SD/MI/ sederajat, SMP/MTS/ sederajat,

dan SMA/SMK/MA/ sederajat adalah seimbang dengan selisih persentasenya kurang dari 10%. Namun, untuk rasio APM perguruan tinggi cukup timpang, yaitu lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini salah satunya disebabkan oleh banyaknya laki-laki yang bekerja atau sebagai kepala keluarga.



RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PEREMPUAN/LAKI-LAKI MENURUT PROVINSI

PROVINSI	SD/MI/SEDERAJAT			SMP/MTS/SEDERAJAT			SMA/SMK/MA/SEDERAJAT			PERGURUAN TINGGI		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Aceh	100.01	100.50	99.98	100.18	100.07	98.92	109.06	103.98	101.52	-	116.82	128.52
Sumatera Utara	100.45	99.62	99.87	104.18	97.97	104.01	102.18	104.84	103.27	-	124.56	113.51
Sumatera Barat	99.70	100.01	100.04	109.47	105.56	100.52	112.89	101.61	117.76	-	148.85	133.39
Riau	99.63	98.92	100.00	101.97	102.13	102.53	111.16	108.17	104.81	-	127.20	132.53
Jambi	100.16	100.55	99.69	97.64	100.94	99.88	104.68	98.08	97.47	-	133.38	117.97
Sumatera Selatan	99.11	99.66	99.71	101.56	101.86	104.24	102.06	110.89	104.95	-	107.35	131.61
Bengkulu	99.92	100.58	99.67	93.34	98.59	105.98	106.42	110.91	117.23	-	113.33	118.96
Lampung	100.15	100.36	99.95	96.78	101.49	102.08	110.26	103.80	107.62	-	115.02	150.78
Kep. Bangka Belitung	100.11	100.19	100.14	101.05	105.37	112.62	92.59	101.69	109.85	-	149.01	153.51
Kep. Riau	100.71	100.82	100.16	102.95	102.16	94.59	102.91	105.03	102.05	-	124.40	107.60
DKI Jakarta	100.37	100.77	99.26	104.68	94.14	103.32	92.52	97.66	101.01	-	103.48	145.56
Jawa Barat	99.44	99.89	100.52	98.30	97.78	100.91	98.59	99.88	109.50	-	114.09	105.27
Jawa Tengah	100.71	100.20	99.22	98.90	100.90	99.70	104.55	101.98	102.72	-	136.70	127.34
DI Yogyakarta	99.64	100.02	100.40	93.97	102.72	101.50	102.01	102.01	107.32	-	105.61	102.60
Jawa Timur	100.26	99.72	100.21	99.72	103.09	103.50	99.53	102.85	105.18	-	123.66	122.15
Banten	100.77	100.09	100.63	100.29	95.64	97.86	96.86	97.65	110.73	-	128.47	122.96
Bali	100.28	99.62	99.85	102.86	99.75	98.72	97.55	102.27	99.51	-	104.64	107.64
Nusa Tenggara Barat	99.89	99.44	99.98	98.72	97.97	99.60	97.69	91.48	107.07	-	92.44	93.75
Nusa Tenggara Timur	100.72	99.43	98.05	105.59	108.23	106.64	124.46	123.74	121.09	-	144.09	126.13
Kalimantan Barat	100.22	99.32	100.09	104.92	106.64	109.04	115.36	106.01	103.90	-	116.35	174.46
Kalimantan Tengah	100.14	100.01	99.42	99.60	101.86	106.29	100.34	96.22	100.27	-	99.06	122.58
Kalimantan Selatan	100.24	100.65	100.46	103.95	98.39	104.21	101.34	103.36	103.74	-	115.06	125.40
Kalimantan Timur	99.95	100.25	99.34	100.98	97.90	100.71	112.30	89.27	103.17	-	115.40	124.13
Kalimantan Utara	99.19	97.70	101.58	97.69	101.59	92.24	95.13	107.43	109.89	-	90.50	147.16
Sulawesi Utara	98.28	100.35	102.32	101.96	104.64	102.33	103.31	109.48	99.84	-	122.46	161.59
Sulawesi Tengah	97.48	98.87	100.99	103.67	107.15	106.48	108.17	112.08	102.46	-	126.38	126.13
Sulawesi Selatan	99.58	100.18	99.54	97.24	102.03	100.93	102.46	97.03	99.67	-	125.46	121.94
Sulawesi Tenggara	99.45	99.24	100.66	103.16	100.46	102.42	109.42	103.75	100.14	-	111.31	118.98
Gorontalo	100.38	101.22	100.23	107.16	106.67	110.53	100.42	118.24	125.76	-	175.05	138.03
Sulawesi Barat	98.34	99.13	98.77	104.96	113.05	97.58	110.70	107.72	108.43	-	153.34	136.90
Maluku	97.85	100.34	99.91	102.44	98.66	104.02	104.01	93.29	96.90	-	114.99	119.04
Maluku Utara	99.89	100.48	100.16	98.04	99.30	101.43	95.25	98.68	103.57	-	104.00	113.51
Papua Barat	99.02	100.11	99.38	105.84	101.80	99.58	105.88	106.10	104.77	-	131.87	110.65
Papua	98.27	103.28	100.36	104.10	97.56	106.19	97.37	90.35	106.69	-	94.47	106.20
INDONESIA	99.98	99.98	100.01	100.41	100.34	101.89	102.58	102.09	105.70	-	120.47	121.04

Sumber: BPS 2022

Tabel 2.9
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM)
perempuan/laki-laki menurut provinsi





**JENIS KELAMIN +
JUMLAH**

**TINGKAT PENYELESAIAN PENDIDIKAN MENURUT
JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Laki-laki	90.05	92.17	94.28	93.58	94.46	95.69	97.00	97.44
Perempuan	92.90	95.66	96.29	95.86	96.54	96.33	97.76	98.21
Laki-laki+perempuan	91.44	93.88	95.25	94.68	95.48	96.00	97.37	97.82



SD/SEDERAJAT

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Laki-laki	77.44	81.56	82.70	82.65	83.34	86.26	87.04	88.64
Perempuan	80.78	86.06	86.82	87.34	87.23	89.58	90.78	91.71
Laki-laki+perempuan	79.05	83.76	84.74	84.96	85.23	87.89	88.88	90.13



SLTP/SEDERAJAT

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Laki-laki	48.61	55.40	56.64	60.64	57.00	62.15	64.48	64.09
Perempuan	55.68	59.71	58.84	63.10	59.75	65.85	67.46	68.31
Laki-laki+perempuan	52.04	57.47	57.71	61.84	58.33	63.95	65.94	66.13



SLTA/SEDERAJAT

Sumber: Susenas KOR, BPS, 2022



Tabel 2.10
Tingkat penyelesaian pendidikan menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin

d. Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

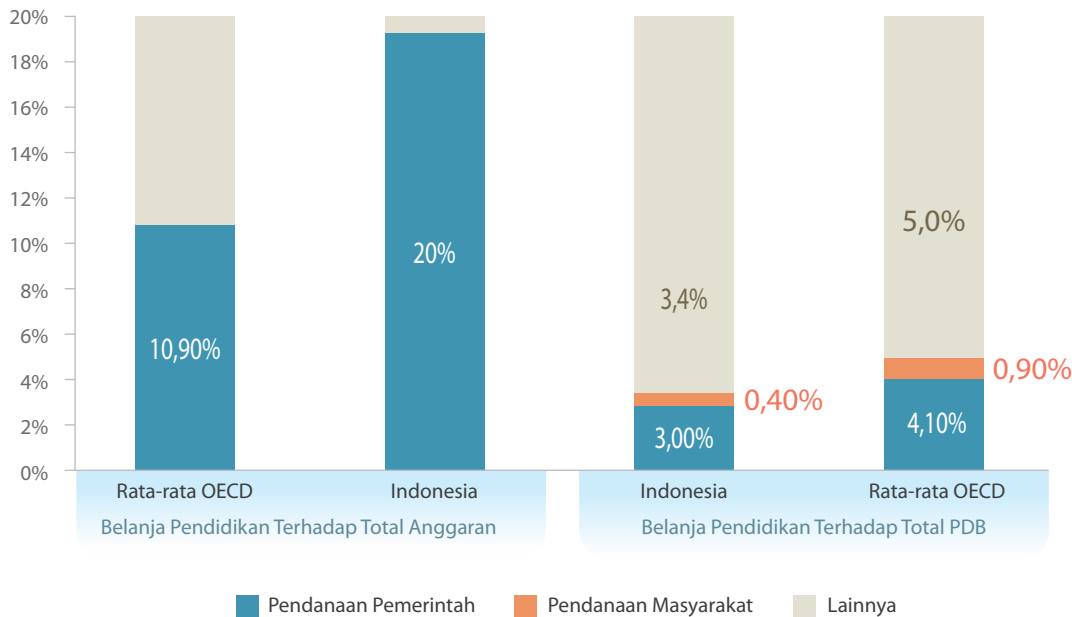
Kondisi terkait pendidikan juga dapat dianalisis berdasarkan jenis kelamin dan tingkat sosial-ekonomi.

1. Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

Data (tabel 2.10) menunjukkan bahwa Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) di Indonesia hampir seimbang. Pada jenjang SD, peserta didik laki-laki sebanyak 97,44% dan perempuan 98,21%. Jenjang SMP, peserta didik laki-laki 88,64% dan perempuan 91,71%.

Sementara untuk tingkat SLTA siswa laki-laki 64,09% dan perempuan 68,31%.

Di masa datang jumlah penduduk usia sekolah 3-24 tahun dan jumlah angkatan kerja produktif yang meningkat membutuhkan investasi untuk penyediaan pelayanan pendidikan yang merata sampai ke pendidikan tinggi dan pelatihan kerja. Industri yang akan banyak berbasis teknologi memerlukan tenaga kerja yang sesuai yang membutuhkan pendidikan di bidang teknologi dan pendidikan untuk penyiapan tenaga kerja dengan basis teknologi. Perubahan sosial juga akan berubah dengan semakin terbukanya akses informasi, teknologi dan perbaikan infrastruktur.



Grafik 2.19
Perbandingan anggaran dan pengeluaran pendidikan Indonesia dan Negara OECD

Selain itu urbanisasi dan tumbuhnya kota-kota baru dengan corak masyarakat yang semakin heterogen memerlukan layanan pendidikan yang visioner dan antisipatif. Dengan berkembangnya perekonomian yang berbasis teknologi, maka kualitas penduduk juga dituntut dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Investasi yang lebih besar diperlukan untuk menjadikan penduduk sebagai subjek pembangunan yang responsif terhadap perubahan situasi global. Teknologi yang semakin tinggi mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia. Perkembangan teknologi telah dan akan menciptakan mesin, dimana manusia kemudian menjadi pengendali melalui berbagai bentuk teknologi. Dalam konteks ini laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama untuk menjadi SDM pembangunan.

2. Perbandingan Anggaran dan Pengeluaran Pendidikan Indonesia dan Negara OECD

Total pengeluaran pendidikan Indonesia sebagaimana diukur dari persentase PDB masih rendah, walaupun anggaran pemerintah untuk pendidikan sudah besar. Grafik 2.19 memperlihatkan perbandingan anggaran dan pengeluaran pendidikan Indonesia dengan negara anggota OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*). Rata-rata anggaran nasional negara anggota OECD untuk pendidikan sebesar 10,9%, jauh di bawah Indonesia yang menganggarkan 20% dari APBN untuk pendidikan. Negara anggota OECD memiliki angka pengeluaran pendidikan dari pendanaan pemerintah sebesar 4,1% dari PDB dan dari pendanaan masyarakat sebesar 0,9% dari PDB. Indonesia sendiri memiliki angka



pengeluaran pendidikan dari pendanaan pemerintah sebesar 3% dari PDB dan angka pengeluaran pendidikan dari pendanaan masyarakat sebesar 0,4%. Total terlihat untuk negara anggota OECD mengalokasikan 5% dari PDB mereka untuk pendidikan, sedangkan Indonesia hanya mengalokasikan 3,4%.

Ini berarti pengeluaran pendidikan Indonesia memiliki selisih kira-kira Rp 250 triliun dibandingkan dengan rerata pengeluaran pendidikan negara anggota OECD. Oleh karena itu, masih terdapat celah untuk memanfaatkan dana atau investasi dari pihak swasta untuk mendanai pendidikan di Indonesia. Indonesia perlu memikirkan regulasi yang dapat mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi mendukung pembiayaan pendidikan.

e. Sumber Daya Manusia (SDM) IPTEK

Untuk dapat membangun Indonesia yang berkualitas di masa depan, keberadaan SDM yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah dibutuhkan mengingat persaingan global yang berbasis pada kemajuan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di masa ini. Di Indonesia, SDM Iptek adalah merupakan tenaga lembaga penelitian dan pengembangan. SDM

Iptek sendiri terdiri dari berbagai profesi, di antaranya dosen, peneliti, dokter, teknisi penelitian dan perkerjasama, dan lain-lain.

Berdasarkan data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), jumlah SDM IPTEK di Indonesia pada tahun 2018 ada sebanyak 301.885 orang. Dari angka tersebut, yang berkualifikasi Doktor/S3 baru sebesar 14,08%. Sementara itu, angkatan kerja lulusan pendidikan menengah atas cenderung turun selama 2019-2021.

Tenaga kerja sektor teknologi informasi dan komunikasi jumlahnya semakin besar. Pada awal tahun 2020, jumlahnya mencapai 1,09 juta yang meningkat 1,3% dibandingkan tahun 2021. Namun demikian jumlah tenaga yang dibutuhkan lebih besar dengan meingkatnya industri berbasis teknologi informasi.³

Jika dilihat dari Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), Indonesia berada pada nilai 5,59 dari skala 0-10. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Indonesia harus terus melakukan percepatan kesiapan SDM, yang dapat menjadi penggerak ekonomi, industri, serta birokrasi yang berdaya saing dan modern.

³ Kementerian Koinfo. *Indonesia darurat tenaga programmer*. 2017.



f. Angkatan Kerja Lulusan Pendidikan Menengah Ke atas

Siswa yang telah menyelesaikan pendidikan menengah ke atas memiliki peluang dan kesempatan untuk diserap oleh lapangan kerja. Perbandingan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2019 dan 2021 menunjukkan bahwa angkatan kerja lulusan pendidikan menengah ke atas cenderung turun

selama 2019-2021. Untuk SLTA umum/SMU pada tahun 2019 memiliki persentase sebesar 92,13%, sementara di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1,22% menjadi 90,91%. Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/SMK pada tahun 2019 memiliki persentase sebesar 89,84%, sementara di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,77% menjadi 88,87%.

2019

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja (AK)				Bukan Angkatan Kerja (BAK)			
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah AK	Bekerja/AK (%)	Sekolah	Mengurus	Lainnya	Jumlah BAK
Tidak/belum pernah sekolah	3.733.536	40.771	3.884.307	98,92	-	1.641.310	959.501	2.600.811
Tidak/belum tamat SD	15.949.878	347.712	16.297.590	97,87	105.015	6.548.419	2.358.498	9.011.932
SD	31.594.947	865.778	32.460.725	97,33	1.691.460	10.846.631	1.898.291	14.436.382
SLTP	22.978.481	1.137.195	24.116.037	95,28	10.010.878	8.385.122	967.784	19.363.784
SLTA Umum/SMU	23.509.461	2.008.035	25.517.498	92,13	3.164.421	7.649.757	1.179.829	11.994.007
SLTA Kejuruan/SMK	15.046.419	1.739.625	16.786.044	89,64	801.824	3.318.900	546.930	4.667.664
Akademi/Diploma	3.460.919	218.954	3.679.873	94,05	46.578	925.679	147.908	1.147.163
Universitas	12.481.289	746.354	13.227.623	94,36	123.171	1.606.886	373.529	2.103.586
Tak terjawab	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	128.755.271	7.104.424	135.859.695	94,77	15.943.345	40.949.704	8.432.270	65.325.319

2021

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja (AK)				Bukan Angkatan Kerja (BAK)			
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah AK	Bekerja/AK (%)	Sekolah	Mengurus	Lainnya	Jumlah BAK
Tidak/belum pernah sekolah	1.444.717	23.905	1.468.622	98,37	-	622.024	399.240	1.021.264
Tidak/belum tamat SD	15.059.433	431.329	15.490.762	97,22	71.261	6.333.228	2.695.277	0.099.764
SD	32.884.043	1.393.492	34.277.535	95,93	1.673.008	10.696.218	2.542.064	14.911.290
SLTP	23.276.159	1.604.448	24.880.607	93,55	8.829.833	7.937.228	1.709.183	18.476.242
SLTA Umum/SMU	24.723.536	2.472.859	27.198.395	90,91	3.109.591	8.129.847	2.126.827	13.366.265
SLTA Kejuruan/SMK	16.858.755	2.111.338	18.970.093	88,87	805.644	4.053.425	1.076.798	5.935.867
Akademi/Diploma	3.463.379	216.024	3.679.403	94,13	35.569	893.935	195.675	1.125.179
Universitas	13.340.501	848.657	14.189.158	94,04	119.538	1.912.042	588.275	2.619.853
Tak terjawab	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	131.050.523	9.102.052	140.152.575	93,51	14.644.442	40.577.943	11.333.339	66.555.724

Sumber: Sakernas, 2021

Tabel 2.11
Persentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah ke atas





2.2.3 Revolusi Mental

Sejak akhir tahun 2016, Presiden Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Inpres ini bertujuan untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa Indonesia yang bermartabat.

Dalam dokumen RPJMN tahun 2020-2024, indeks capaian revolusi mental Indonesia pada tahun 2018 adalah sebesar 67%. Angka tersebut masih cukup jauh bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yakni 74,3% pada akhir tahun 2024. Hal tersebut menandakan bahwa masih perlu kerja keras di antara para pelaku perubahan dalam mempraktikkan dan membudayakan nilai-nilai revolusi mental.

Revolusi mental dapat menjadi bagian Ketahanan Sosial Budaya karena di dalam RPJMN dan RKP, revolusi mental merupakan pembangunan kebudayaan. Berdasarkan Perpres No 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, Revolusi Mental telah ditetapkan sebagai Prioritas Nasional ke-4 dalam RPJMN 2020-2024 dan merupakan sebagai bentuk gerakan kebudayaan yang memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

Berdasarkan amanat Perpres Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, Revolusi Mental

memiliki Program Prioritas Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa yang diarahkan untuk mencapai sasaran semakin mantapnya internalisasi nilai esensial Revolusi Mental (integritas, etos kerja, gotong royong) untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa. Dalam RKP tersebut terdapat program Penguatan dan Pengembangan Gugus Tugas Revolusi Mental, Penguatan Pusat Perubahan GNRM di daerah serta Diseminasi Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Arah Kebijakan dan strategi Revolusi Mental dalam Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas dan Peran Keluarga dan Masyarakat. Dengan arah kebijakan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter. Strategi revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter anak melalui pengasuhan berbasis hak anak berdasarkan karakteristik wilayah dan target sasaran, yang mencakup:

1. Penyiapan kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup.
2. Peningkatan kualitas keluarga berdasarkan siklus hidup dengan memperhatikan kesinambungan antar generasi, sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga.
3. Pewujudan lingkungan yang kondusif melalui penguatan masyarakat, kelembagaan, regulasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi media dan dunia usaha.



2.2.4 Indeks Pembangunan Pemuda

Dalam rangka memantau kemajuan pembangunan pemuda sebagai hasil investasi pada pemuda, diperlukan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) guna memastikan relevansi, efektivitas, dan efisiensi kebijakan dan program pembangunan pemuda dalam rangka meningkatkan kapasitas pemuda dan menetapkan target rencana investasi masa depan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 mengategorikan pemuda sebagai warga negara berusia 16 hingga 30 tahun. Hal ini berarti bahwa sebanyak 64,92 juta orang atau hampir seperempat dari jumlah penduduk Indonesia (23,90%) pada tahun 2021 merupakan pemuda. Pemuda laki-laki lebih banyak daripada pemuda perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,99.

Persentase pemuda di perkotaan lebih besar daripada di perdesaan (58,88% berbanding 41,12%). Berdasarkan distribusi menurut wilayah, lebih dari separuh pemuda terkonsentrasi di Pulau Jawa (55%). Sekitar 61,09 persen pemuda belum kawin (Susenas, 2021). Sekitar satu dari sepuluh pemuda telah menjadi kepala rumah tangga, sementara tujuh dari sepuluh pemuda tinggal bersama keluarga.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) terdiri dari 5 (lima) dimensi yaitu demografi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan sosial ekonomi. Masih rendahnya capaian program tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain; sosialisasi pengenalan program yang belum maksimal karena program

relatif baru, dukungan anggaran relatif masih rendah, masih banyak daerah yang belum menjadikan program IPP sebagai program prioritas.

Secara umum, IPP tahun 2015-2018 cenderung naik. Provinsi dengan pertumbuhan IPP paling tinggi adalah Provinsi Sumatera Selatan dengan kenaikan 7%. Tiga provinsi dengan IPP terendah adalah Kalimantan Selatan (48%), Papua (47,5%), dan Jawa Barat (46,17%). Tiga provinsi dengan IPP tertinggi adalah DI Yogyakarta (70,33%), Bali (61,33%) dan Kalimantan Utara (57,00%). Target IPP pada tahun 2024 sebesar 57,67%. Strategi peningkatan kualitas pemuda, mencakup:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi, termasuk memfasilitasi ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda.
2. Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, di antaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan.
3. Pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.



Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 mempublikasikan buku Statistik Pemuda Indonesia. Secara nasional, pemuda yang berusaha dengan jenis jabatan *white collar* sebesar 0,41%, dimana Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan persentase pemuda yang berusaha dengan jenis

jabatan *white collar* merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 1,03%, dan yang paling rendah adalah Provinsi Sulawesi Barat. Ilustrasi dari pencapaian per wilayah untuk jabatan *white collar* dan perempuan yang bekerja di sektor formal digambarkan pada tabel 2.12 di bawah ini.

Provinsi	Pemuda Berusaha dengan Jenis Jabatan <i>White Collar</i> per Jumlah Pemuda	Pemuda Perempuan yang Bekerja di Sektor Formal per Jumlah Pemuda Perempuan
	(1)	(2)
Aceh	0,24	15,70
Sumatera Utara	0,38	20,94
Sumatera Barat	0,32	19,61
Riau	0,35	20,97
Jambi	0,25	19,48
Sumatera Selatan	0,24	20,51
Bengkulu	0,51	19,36
Lampung	0,41	17,84
Kep. Bangka Belitung	0,26	25,65
Kepulauan Riau	0,67	38,56
DKI Jakarta	0,41	34,96
Jawa Barat	0,48	26,56
Jawa Tengah	0,42	29,01
DI Yogyakarta	1,03	36,23
Jawa Timur	0,53	23,99
Banten	0,35	28,33
Bali	0,73	31,38
Nusa Tenggara Barat	0,33	16,21
Nusa Tenggara Timur	0,20	14,43
Kalimantan Barat	0,16	17,69
Kalimantan Tengah	0,24	20,91
Kalimantan Selatan	0,28	22,52
Kalimantan Timur	0,38	25,17
Kalimantan Utara	0,36	24,42
Sulawesi Utara	0,15	18,05
Sulawesi Tengah	0,07	17,87
Sulawesi Selatan	0,35	18,28
Sulawesi Tenggara	0,23	19,47
Gorontalo	0,16	20,90
Sulawesi Barat	0,05	16,50
Maluku	0,31	14,73
Maluku Utara	0,32	14,04
Papua Barat	0,49	16,50
Papua	0,16	7,09
INDONESIA	0,41	24,00



Tabel 2.12
Indikator penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)*, Indonesia, 2021

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

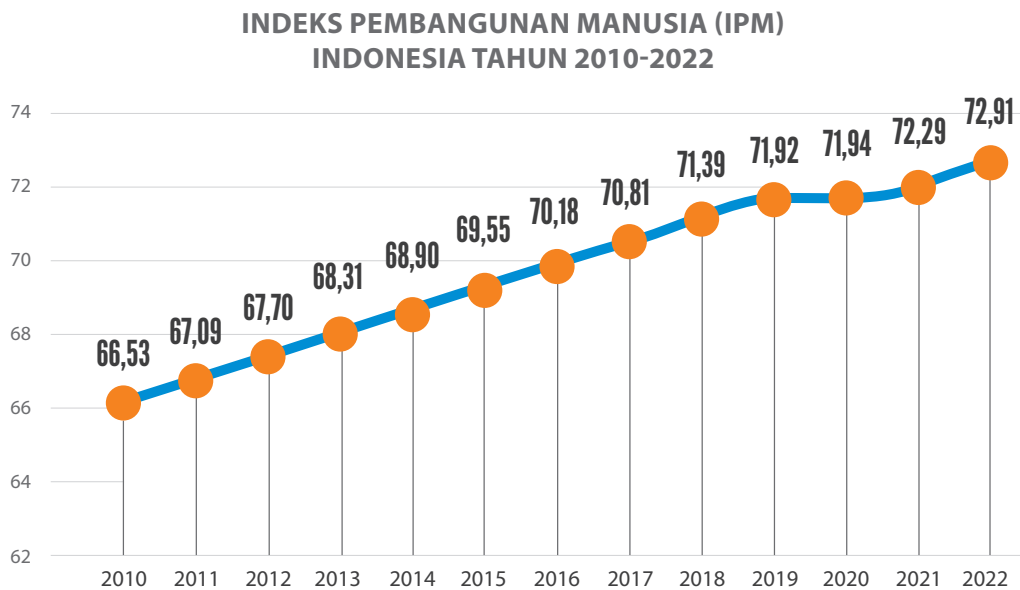
*Indikator ini digunakan dalam penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)



2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, yaitu rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan *purchasing power parity*. Selama 2010–2022, rata-rata IPM Indonesia meningkat sebesar 0,77 persen per tahun. Pada tahun 2010 IPM di

Indonesia mencapai angka 66,53 dan meningkat pertumbuhannya secara rata-rata 0,5% dengan IPM tertinggi pada tahun 2022 sebesar 72,91. Angka IPM di Indonesia selama 2010-2015 masih tergolong sedang (skala 60-70), pada tahun 2016-2022 IPM di Indonesia masuk ke dalam kategori tinggi (skala 70-80) (BPS, 2022).



Grafik 2.20
Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)
Indonesia tahun
2010 – 2022

Sumber: BPS, 2022

2.2.6 Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) di Indonesia sejak tahun 2010 hingga tahun 2022 menunjukkan tren yang meningkat. UHH merupakan sebuah indikator yang menunjukkan kualitas kesehatan di suatu tempat. Perhitungan UHH oleh BPS dilakukan dengan dua metode dengan tujuan berbeda.

1. Pada proyeksi penduduk: UHH dihitung dengan mengonversi nilai IMR/AKB menggunakan *Life Table Coalle-Dememy West Model*.
2. Pada perhitungan IPM: UHH/AHH dihitung dengan mengonversi nilai Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH) menggunakan

program *Mortpack* dan *Metode Trussle* dengan *Model West*.

Kedua perhitungan ini memiliki keunggulan masing-masing, yaitu:

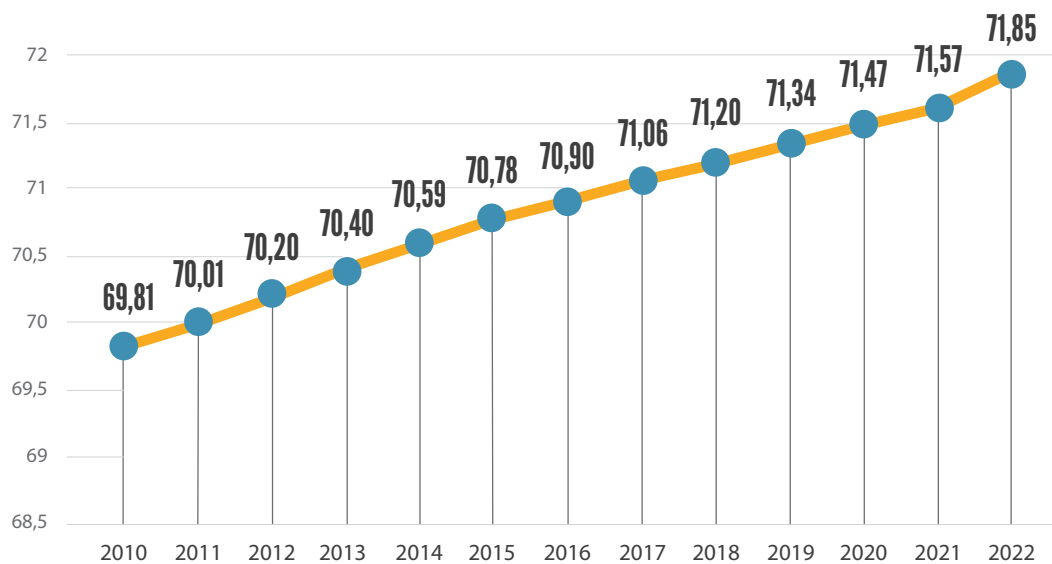
1. Metode pada proyeksi penduduk menggunakan data hasil LF SP2020 sebagai data historis terakhir dan perhitungan proyeksi UHH;
2. Metode perhitungan IPM menggunakan SP2020 dan hasil survei lainnya. Dengan menggunakan hasil survei, maka nilai UHH tahunan dapat diperoleh. Namun penggunaan hasil survei seperti Susenas juga dilakukan sampling yang tidak berdasarkan data terbaru.

Semakin tinggi angka harapan hidup seseorang di suatu wilayah, maka semakin baik pula kualitas kesehatan di wilayah tersebut. Data dari BPS menunjukkan bahwa UHH di Indonesia

telah mencapai angka 71,85 pada tahun 2022. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia menjalani hidup hingga berusia kurang lebih 71-72 tahun. Angka ini dapat semakin ditingkatkan apabila kualitas pendukung kesehatan manusia dapat ditingkatkan, seperti fasilitas kesehatan, tempat tinggal, makanan, dan lingkungan sosial kehidupan masyarakat di Indonesia.

Bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,85 tahun. UHH pada tahun 2022 ini meningkat 0,28 tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 71,57 tahun. UHH telah meningkat sebesar 2,04 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,24 persen per tahun selama periode 2010 hingga 2022. Pada tahun 2010, UHH Indonesia adalah 69,81 tahun dan pada tahun 2022 mencapai 71,85 tahun.

USIA HARAPAN HIDUP INDONESIA TAHUN 2010-2022

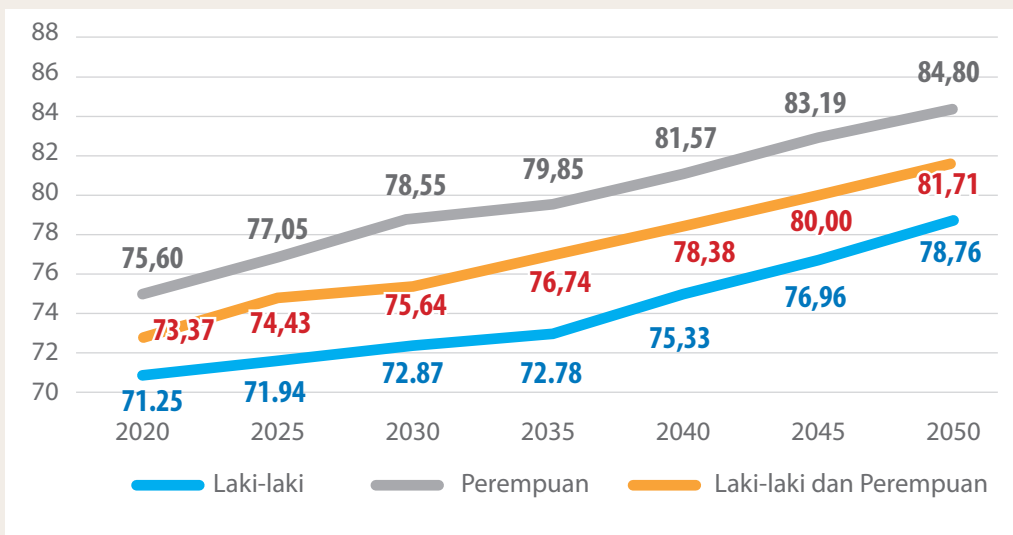


Grafik 2.21
Usia harapan hidup Indonesia, 2010-2022

Sumber: Naskah RPJPN 2025-2045, Hal 8



TARGET USIA HARAPAN HIDUP (UHH) SAAT LAHIR INDONESIA MENURUT SKENARIO TREN, 2020–2045



Sumber: LF SP 2020



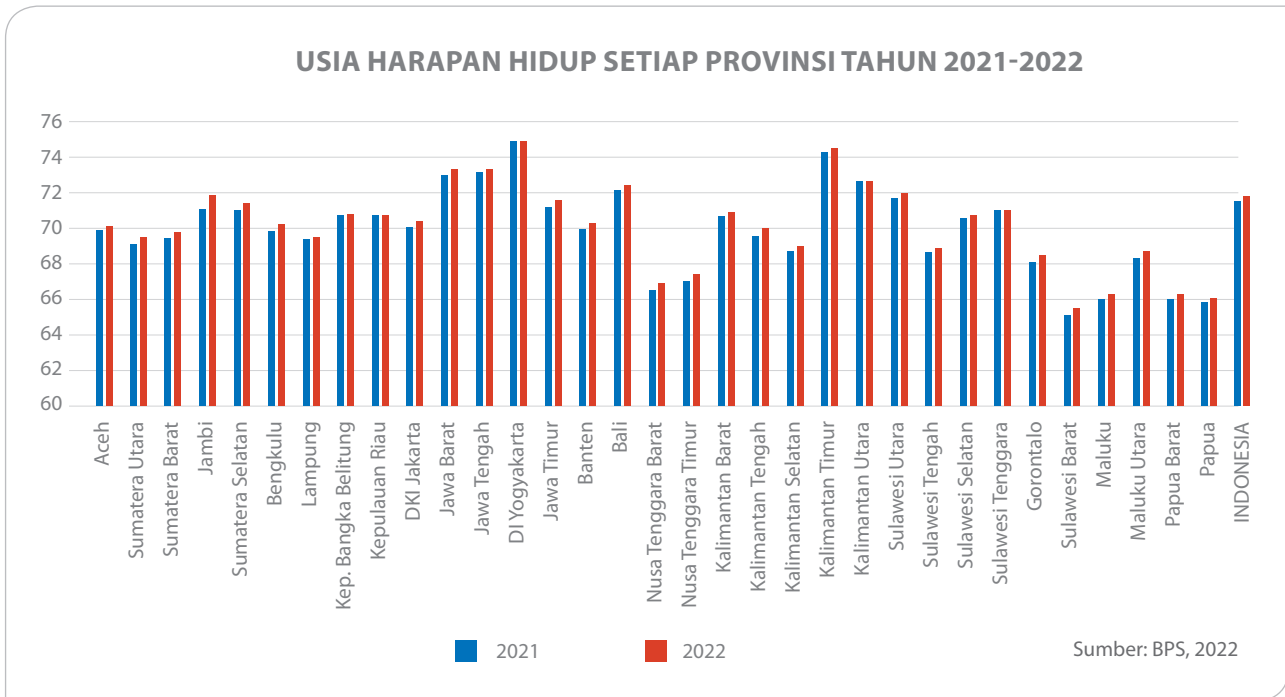
Grafik 2.22
Asumsi Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir Indonesia menurut skenario tren, 2020–2050

Grafik 2.23 juga memperlihatkan bahwa tren angka harapan hidup di level provinsi juga menunjukkan pola yang sama, yaitu naik dari tahun 2020 ke tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa di level provinsi juga sudah terjadi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang mendorong perubahan tren kenaikan angka harapan hidup.

Masih terdapat beberapa provinsi yang perlu meningkatkan angka harapan hidupnya agar tidak terlalu rendah apabila dibandingkan dengan UHH tingkat nasional. Provinsi-provinsi yang perlu mendapat dukungan untuk peningkatan UHH antara lain, Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,

Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Walaupun usia harapan hidup Indonesia naik, ada masalah besar yang sedang dihadapi oleh penduduk Indonesia yakni beberapa penyakit menular seperti tuberkulosis masih tinggi dan penyakit tidak menular seperti kanker, penyakit jantung, diabetes, stroke juga meningkat.



Grafik 2.23
Usia Harapan
Hidup Setiap
Provinsi, 2021-2022

Berdasarkan grafik 2.23 di atas, 10 Provinsi dengan UHH terbesar di Indonesia adalah Jawa Timur (71.74), Riau (71.95), Sulawesi Utara (72.08), Bali (72.60), Kalimantan Utara (72.67), DKI Jakarta (73.32), Jawa Barat (73.52), Jawa Tengah (74.57), Kalimantan Timur (74.62), dan DI Yogyakarta (75.08).

Salah satu indikator untuk melihat kualitas hidup masyarakat adalah melalui Usia Harapan Hidup Sehat atau *Healthy life Expectancy (HALE) at birth (year)*. Usia Harapan Hidup Sehat adalah perkiraan usia rata-rata individu di suatu populasi yang diharapkan dapat hidup

dalam kondisi sehat, baik fisik maupun mental. Konsep ini bertujuan untuk mengukur kualitas hidup masyarakat, bukan hanya panjang umur. Dalam konteks ini, hidup sehat mencakup tidak hanya kebebasan dari penyakit atau cacat, tetapi juga kesejahteraan emosional, sosial, dan psikologis.

Berdasarkan data *World Health Organization (WHO)*, Usia Harapan Hidup Sehat perempuan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2019, HALE Perempuan sebesar 63,8 tahun sedangkan HALE laki-laki sebesar 61,9 tahun.



PROVINSI	USIA HARAPAN HIDUP (UHH) MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN					
	Laki-laki			Perempuan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Aceh	68.04	68.07	68.26	71.91	71.94	72.16
Sumatera Utara	67.22	67.35	67.66	71.08	71.21	71.60
Sumatera Barat	67.59	67.70	67.99	71.45	71.57	71.89
Riau	69.75	69.82	70.03	73.55	73.62	73.90
Jambi	69.27	69.33	69.57	73.07	73.19	73.49
Sumatera Selatan	68.00	68.11	68.38	71.86	71.95	72.29
Bengkulu	67.47	67.54	67.74	71.27	71.40	71.68
Lampung	68.78	68.86	69.07	72.61	72.69	72.97
Kep. Bangka Belitung	68.77	68.86	69.06	72.59	72.70	72.97
Kep. Riau	68.08	68.24	68.58	71.90	72.07	72.47
DKI Jakarta	71.10	71.21	71.45	74.80	74.91	75.22
Jawa Barat	71.30	71.57	71.77	75.00	75.19	75.48
Jawa Tengah	72.51	72.61	72.71	76.30	76.42	76.53
DI Yogyakarta	73.22	73.27	73.28	76.83	76.89	76.93
Jawa Timur	69.42	69.51	69.81	73.27	73.35	73.71
Banten	68.08	68.15	68.46	71.93	71.99	72.36
Bali	70.28	70.39	70.69	74.03	74.17	74.53
Nusa Tenggara Barat	64.63	64.81	65.14	68.39	68.66	69.07
Nusa Tenggara Timur	65.15	65.28	65.54	68.96	69.11	69.43
Kalimantan Barat	68.80	68.87	69.08	72.67	72.74	73.00
Kalimantan Tengah	67.84	67.89	68.08	71.66	71.72	72.02
Kalimantan Selatan	66.76	66.97	67.23	70.62	70.79	71.13
Kalimantan Timur	72.54	72.79	72.80	76.21	76.51	76.52
Kalimantan Utara	70.63	70.69	70.70	74.44	74.48	74.54
Sulawesi Utara	69.82	69.89	70.16	73.67	73.72	74.04
Sulawesi Tengah	66.77	66.91	66.98	70.72	70.85	70.95
Sulawesi Selatan	68.68	68.77	69.03	72.56	72.65	72.96
Sulawesi Tenggara	69.31	69.35	69.44	73.37	73.37	73.47
Gorontalo	66.14	66.27	66.56	70.09	70.21	70.53
Sulawesi Barat	63.20	63.39	63.74	67.02	67.19	67.60
Maluku	64.12	64.23	64.53	67.93	68.05	68.43
Maluku Utara	66.43	66.55	66.84	70.32	70.44	70.79
Papua Barat	64.20	64.33	64.54	67.90	68.05	68.44
Papua	64.02	64.15	64.34	67.65	67.79	68.16
INDONESIA	69.59	69.67	69.93	73.46	73.55	73.83



Tabel 2.13
Usia Harapan Hidup menurut jenis kelamin

Sumber: BPS, 2023



2.3

Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga merupakan upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga).

Pilar pembangunan keluarga pada bab ini disamping membahas tentang keluarga (iBangga) namun juga membahas aspek Jaminan Sosial (*capital*) untuk keluarga. Keluarga yang berkualitas akan dihasilkan jika mereka mendapatkan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial (*capital*) yang cukup, terutama bagi keluarga-keluarga rentan baik dari segi sosial maupun ekonomi.



Gambar 2.2
Keluarga
berkualitas

Foto: Dok. BKKBN



2.3.1 Ketahanan Fisik

- **Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Ketenagakerjaan**

Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Ketenagakerjaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia semakin menguat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pelaksanaan JKN yang universal bagi seluruh penduduk dipengaruhi oleh cakupan kepesertaan, kepatuhan iuran, dan utilisasi. Target hingga 2024 kepesertaan JKN adalah 267.311.566 jiwa atau 95,95 persen dari total penduduk (Desember, 2023). Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengklasifikasikan daerah berdasarkan cakupan kepesertaan JKN kedalam 3 kelompok, yaitu 1) kelompok rendah (kurang dari 65 persen), 2) kelompok sedang (65-95 persen) dan 3) kelompok tinggi (lebih dari 95 persen).

Secara nasional kepesertaan JKN masuk ke dalam kelompok sedang, sementara jika dilihat menurut provinsi, kepesertaan JKN mayoritas berada pada kelompok sedang, terutama di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera dan Jawa. Khusus untuk Provinsi Aceh dan Kepulauan Riau kepesertaan JKN-nya sudah mencapai kelompok tinggi, yaitu di atas 96%.

Untuk Pulau Jawa, kepesertaan JKN tertinggi ada di DKI Jakarta (180,4%). Kepesertaan JKN di Kalimantan pada kelompok sedang

terjadi di Kalimantan Barat (85,1%) dan Kalimantan Selatan (84,9%), sementara yang masuk di kelompok tinggi terjadi di Kalimantan Utara (104,1%), Kalimantan Timur (109,8%), dan Kalimantan Tengah (100,4%).

Seluruh provinsi di Sulawesi telah memasuki kepesertaan JKN yang sedang (65-95%). Provinsi Maluku dan Maluku Utara masuk ke dalam kelompok kepesertaan JKN sedang, sedangkan seluruh provinsi di Papua masuk ke dalam kelompok kepesertaan JKN yang tinggi (DJSN, 2022).

Jumlah peserta JKN mencakup Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non PBI. Selama Desember 2021 sampai dengan Desember 2023, proporsi cakupan peserta JKN cenderung konstan dengan jumlah kepesertaan PBI selalu lebih tinggi dari kepesertaan Non PBI. Hingga Desember 2023, jumlah peserta Non PBI sebanyak 128.506.155 jiwa (48%), dan peserta PBI APBN sebanyak 96.753.724 jiwa APBN dan 42.051.687 peserta dari PBI APBD (52%).

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri dari 5 (lima) program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan per November 2023 mencapai 39.836.185 pekerja atau 30,85% dari seluruh penduduk bekerja Respon pemerintah terkait dengan Jaminan Sosial adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang



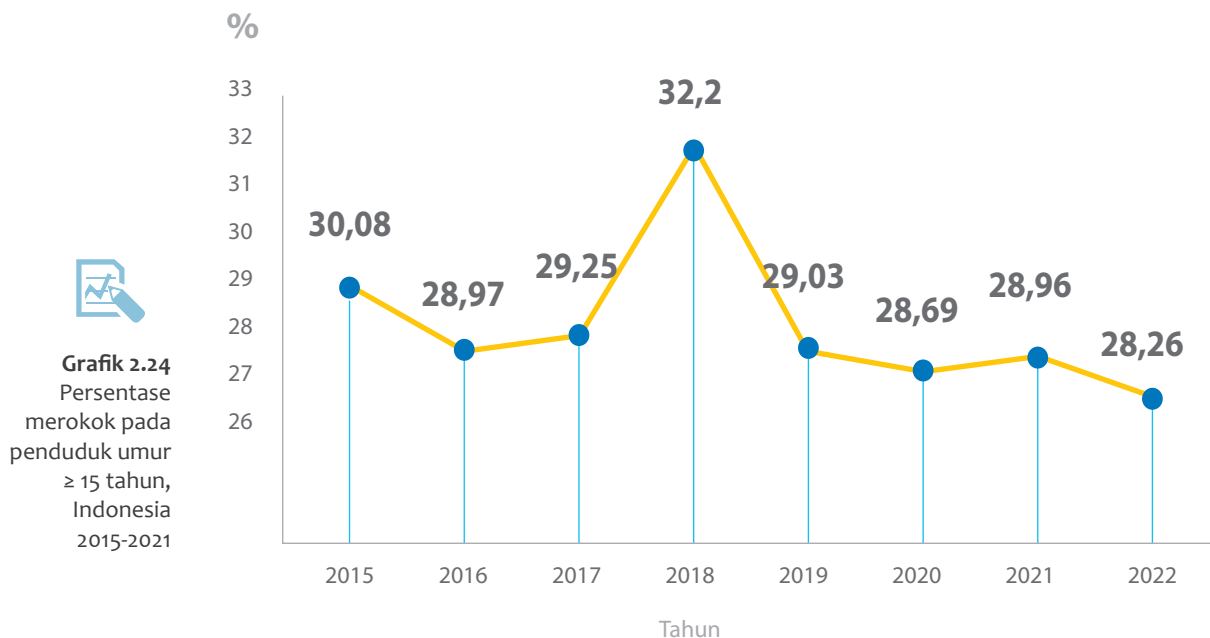
Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

- **Persentase Merokok**

BPS pada tahun 2022 telah mempublikasikan Statistik Indonesia 2022 (*Statistical Yearbook of Indonesia 2022*), salah satu isu kependudukan yang terkait dengan kesehatan adalah persentase merokok. Merokok adalah aktivitas membakar tembakau kemudian menghisap asapnya baik menggunakan rokok maupun pipa pada sebulan terakhir sampai saat pencacahan.

Persentase penduduk yang merokok sejak tahun 2015 hingga 2022 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015, persentase penduduk yang merokok sebesar 30,08%. Pada tahun 2016 dan 2017, persentase penduduk yang merokok menurun, masing-masing sebesar 28,97% dan 29,25%. Pada tahun 2018, persentase penduduk merokok cukup tinggi yaitu sebesar 32,2%. Setelah itu, tahun 2019 (29,03%) dan 2020 (28,69%) penduduk yang merokok cenderung menurun, sedangkan di tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 28,96. Pada tahun 2022 persentase penduduk yang merokok kembali menurun menjadi 28,26%.

**PERSENTASE MEROKOK PADA PENDUDUK
UMUR ≥ 15 TAHUN INDONESIA TAHUN 2015-2021**



Grafik 2.24
Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun, Indonesia 2015-2021

Sumber: BPS, 2022



Provinsi	Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut Provinsi (Persen)		
	2020	2021	2022
Aceh	28.06	28.30	27.58
Sumatera Utara	27.28	27.24	25.32
Sumatera Barat	30.08	30.50	30.27
Riau	28.06	28.34	26.86
Jambi	28.01	27.47	28.62
Sumatera Selatan	30.56	30.65	30.49
Bengkulu	32.31	33.17	32.16
Lampung	33.43	34.07	33.81
Kep. Bangka Belitung	28.23	28.16	26.84
Kep. Riau	26.16	26.17	23.08
DKI Jakarta	25.75	24.44	21.25
Jawa Barat	32.55	32.68	32.07
Jawa Tengah	27.70	28.24	28.72
DI Yogyakarta	22.64	24.54	23.97
Jawa Timur	27.78	28.53	28.51
Banten	31.58	31.76	31.21
Bali	20.50	19.58	17.91
Nusa Tenggara Barat	30.58	32.71	33.20
Nusa Tenggara Timur	26.14	27.22	26.76
Kalimantan Barat	27.49	27.93	26.64
Kalimantan Tengah	28.89	29.33	26.54
Kalimantan Selatan	23.83	24.51	21.89
Kalimantan Timur	24.42	23.37	22.21
Kalimantan Utara	25.66	27.46	24.23
Sulawesi Utara	27.95	27.87	25.29
Sulawesi Tengah	30.64	29.77	29.04
Sulawesi Selatan	24.89	24.91	23.76
Sulawesi Tenggara	25.77	25.85	23.35
Gorontalo	30.30	30.50	30.38
Sulawesi Barat	26.85	27.17	25.36
Maluku	26.18	27.90	26.80
Maluku Utara	29.83	29.84	28.82
Papua Barat	25.80	27.07	24.80
Papua	26.97	24.91	22.22
INDONESIA	28.69	28.96	28.26

Sumber: Modul Konsumsi Susenas



Tabel 2.14
Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun menurut provinsi



Jika dilihat menurut provinsi, selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2021, hanya Bali yang memiliki persentase merokoknya rendah. Ini berarti penduduk di Provinsi Bali secara umum telah menyadari pentingnya kesehatan dengan tidak merokok. Sementara 33 provinsi lainnya memiliki persentase merokok yang cenderung meningkat selama 2015 sampai dengan 2021. Ini berarti di ke-33 provinsi tersebut masih rendah kesadaran akan kesehatan terutama dalam hal menghindari merokok.

Persentase penduduk yang merokok menurut kelompok umur menunjukkan bahwa banyak usia sekolah SLTA/ sederajat dan Perguruan Tinggi (15-24 tahun) yang merokok yaitu sebesar 18,40%. Secara umum, persentase penduduk pada kelompok umur 25-34 tahun dan 35-44 tahun berkisar antara 29,16% sampai 35,34%. Ini berarti bahwa sepertiga dari kelompok umur tersebut merupakan penduduk yang merokok. Penduduk lansia juga memiliki persentase perokok yang cukup besar yaitu sebesar 21,9%. Merokok berdampak terhadap kesehatan reproduksi dan ekonomi keluarga.

Penelitian menunjukkan bahwa laki-laki yang merokok akan menurunkan tingkat kualitas sperma untuk dapat membuahi indung telur. Hal ini akan berdampak tidak saja pada kesehatan reproduksi yang bersangkutan, namun juga berpeluang melahirkan anak *stunting*. Budaya merokok pada keluarga juga berdampak pada status ekonomi keluarga terutama rumah tangga miskin. Penelitian menunjukkan bahwa banyak sekali anak-anak putus sekolah dari keluarga miskin yang bapak atau orang tuanya merokok.

Dari aspek ekonomi, menurut Susenas 2021, ada 59,3 juta perokok dan pengeluaran untuk rokok pada tahun 2022 adalah Rp 365,7 triliun. Pengeluaran untuk rokok di kalangan keluarga miskin adalah terbesar kedua setelah makanan dan 2,5 kali pengeluaran untuk langganan listrik.

Secara ekonomi jumlah pengeluaran untuk rokok sangat besar, tidak memberikan manfaat dan mengurangi penggunaan uang untuk hal lain yang positif. Sementara itu, masalah kesehatan lain seperti *stunting*, anemia memerlukan asupan gizi, namun pengeluaran harus beralih ke rokok. Pengeluaran untuk rokok pada mereka yang menganggur juga besar. Pada tahun 2021, pengeluaran untuk rokok pada 7,3 juta perokok yang tidak bekerja mencapai Rp 6,8 triliun. Bahkan mereka lebih mementingkan rokok dari pada makanan.

Tiga juta orang mengalami kematian dini setiap tahunnya terkait konsumsi tembakau yang menyebabkan penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung dan *stroke*, penyebab kematian utama di dunia, demikian bunyi pernyataan tersebut, menandai Hari Tanpa Tembakau Dunia. Kematian tersebut termasuk 890.000 kematian para perokok pasif.

Berdasarkan data *Global Youth Tobacco Survey*, Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas), dan Sentra Informasi Keracunan Nasional (Sikernas) dari BPOM menyebutkan ada 3 dari 4 orang mulai merokok di usia kurang dari 20 tahun. Prevalensi perokok anak terus naik setiap tahunnya,



pada 2013 prevalensi perokok anak mencapai 7,20%, kemudian naik menjadi 8,80% tahun 2016, 9,10% tahun 2018, 10,70% tahun 2019. Jika tidak dikendalikan, prevalensi perokok anak akan meningkat hingga 16% di tahun 2030. Tingginya prevalensi perokok pemula akan menghasilkan generasi muda yang tidak unggul. Perlu adanya penyempurnaan perlindungan terhadap generasi muda dan anak-anak dari bahaya merokok. (Kementerian Kesehatan. Perokok anak masih banyak, revisi PP Tembakau diperlukan, 2022).

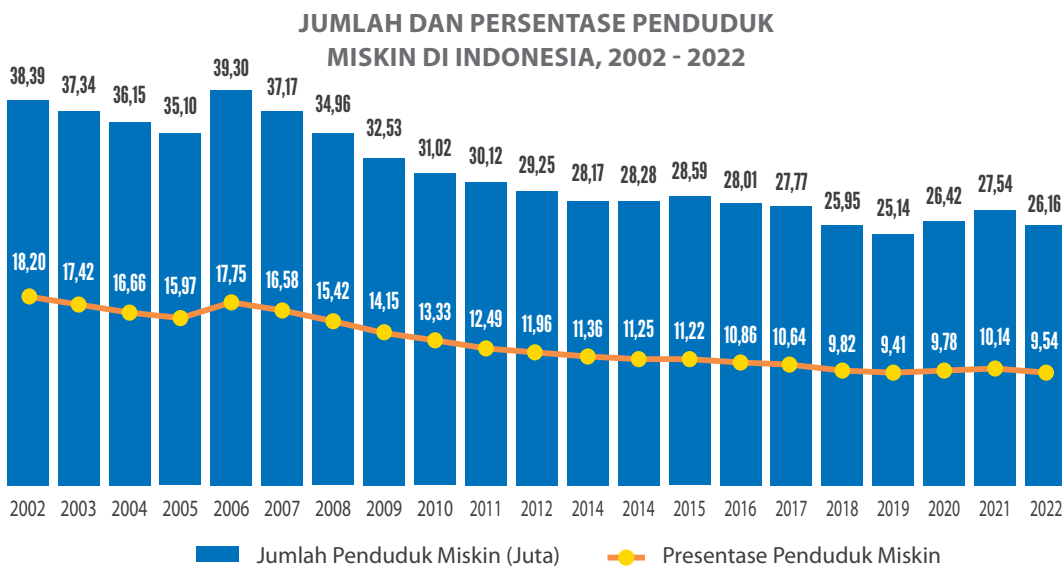
Respon pemerintah terkait dengan kebijakan merokok yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Aturan tersebut perlu diperkuat kembali dengan cara melakukan revisi Peraturan Pemerintah tersebut. Karena PP 109/2012 tidak mampu mengendalikan perokok anak dan kematian, walaupun bukan satu-satunya cara untuk mencegah perilaku merokok, tetapi cara tersebut dapat memperbaiki celah regulasi yang masih dianggap lemah.

2.3.2 Ketahanan Ekonomi

- **Angka Kemiskinan**

BPS pada 2021 telah mengeluarkan publikasi berjudul Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia. Publikasi ini menjelaskan kondisi kemiskinan yang dilihat dari,

1) perkembangan tingkat kemiskinan, 2) indeks kedalaman kemiskinan, dan 3) indeks keparahan kemiskinan tahun 2002 - 2021. Perkembangan kemiskinan di Indonesia dapat ditunjukkan dari grafik 2.25 berikut:



Grafik 2.25
Jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia, 2002 - 2022

Sumber: BPS



Perkembangan jumlah penduduk miskin dari 18,2% di tahun 2002 hingga 9,54% di tahun 2022, cenderung mengalami penurunan walaupun di beberapa tahun terjadi peningkatan. Pada tahun 2006 persentase penduduk miskin meningkat menjadi 17,75% setelah sebelumnya di tahun 2005 persentasenya hanya sebesar 15,97%, dan kenaikan jumlah penduduk miskin juga terjadi di tahun 2020 ke 2021, yaitu dari 9,78% menjadi 10,14%.

Perkembangan jumlah penduduk miskin dari 18,2% di tahun 2002 hingga 9,54% di tahun 2022, cenderung mengalami penurunan walaupun di beberapa tahun terjadi peningkatan. Pada tahun 2006 persentase penduduk miskin meningkat menjadi 17,75% setelah sebelumnya di tahun 2005 persentasenya hanya sebesar 15,97%, dan kenaikan jumlah penduduk miskin juga terjadi di tahun 2020 ke 2021, yaitu dari 9,78% menjadi 10,14%.

Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Perkotaan 2021 dan 2022 adalah 1,29 dan 1,23, sementara Indeks Kedalaman Kemiskinan Perdesaan 2021 dan 2022 adalah 2,27 dan 2,25, dan secara total Indeks Kedalaman Kemiskinan tahun 2021 dan 2022 adalah 1,71 dan 1,59. Indeks Keparahan Kemiskinan di Indonesia secara umum menurun dari tahun 2021 ke 2022.

Indeks Keparahan Kemiskinan Perkotaan 2021 dan 2022 adalah 0,31 dan 0,29, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan Perdesaan tahun 2021 dan 2022 adalah 0,57 dan 0,54,

dan secara total Indeks Keparahan Kemiskinan tahun 2021 dan 2022 adalah 0,42 dan 0,39.

Dari tiga indeks tersebut dapat disimpulkan bahwa kecenderungan kemiskinan di Indonesia adalah menurun dari tahun 2002 sampai 2022, namun penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan masih cukup besar dengan keparahan kemiskinan yang juga cukup tinggi, terutama pada tahun 2020 dan 2021.

- **Pendapatan Per Kapita**

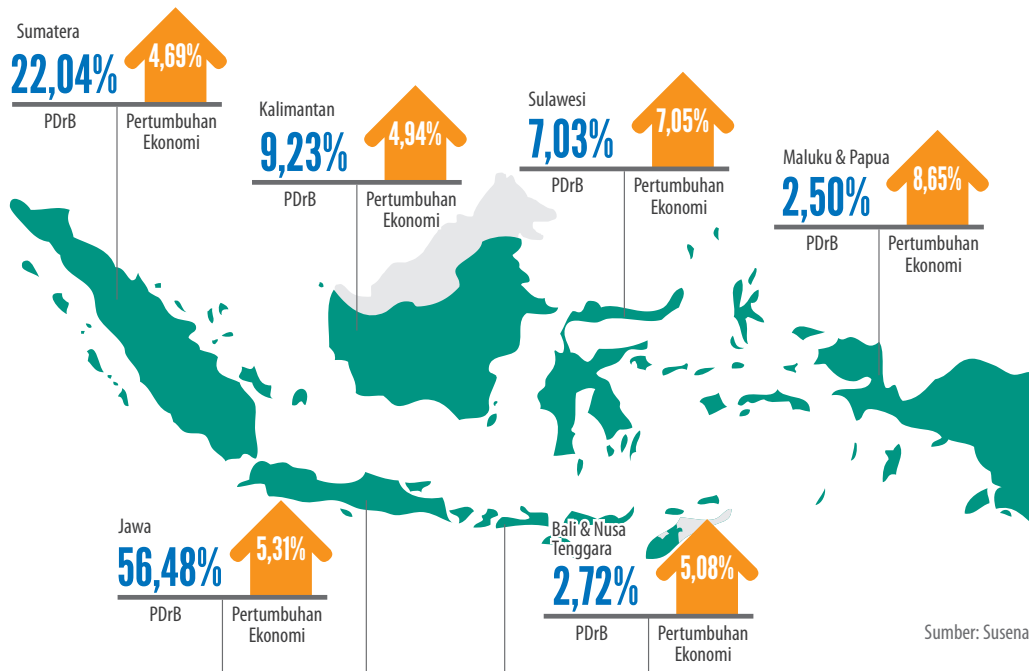
Pengeluaran Per Kapita merupakan proksi untuk menggambarkan pendapatan keluarga. Secara umum, pengeluaran per kapita merupakan biaya konsumsi seluruh anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Indikator ini berguna dalam menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk.

Ekonomi keluarga dapat dilihat secara agregat menggunakan PDB. PDB di Indonesia dipublikasikan oleh BPS untuk menggambarkan perekonomian dilihat dari sisi pendapatan dan sisi lapangan usaha. Menurut pendekatan pendapatan/pengeluaran, konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator terkait dengan ekonomi.

Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi diluar pulau Jawa masih belum merata, masih bertumpu di pulau Jawa karena berbagai hal, seperti akses transportasi, tingginya biaya operasional.



PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PDRb MENURUT WILAYAH TAHUN 2022



Grafik 2.26
Pertumbuhan dan kontribusi PDRb menurut wilayah

Sumber: Susenas

Ini bisa dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dihitung berdasarkan PDB/PDRb atas dasar harga konstan. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial selama tahun 2022 masih didominasi Kelompok Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 56,48%. Dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 56,48%. Kinerja ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang mengalami kenaikan sebesar 5,31% menjadi terasa dampaknya. Bandingkan dengan Maluku dan Papua, meski kinerja ekonominya tumbuh sampai 8,65% kontribusinya pada PDB masih di angka 2,50%.

Tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,31%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87% (BPS, 2022). Selama tahun 2022 kelompok provinsi di Pulau Jawa mewarnai struktur dan kinerja ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi sebesar 56,48% dan kinerja ekonomi yang mencatat pertumbuhan 5,31% (BPS, 2022).

2.3.3 Ketahanan Psikososial

a. Indeks Pembangunan Gender

Secara keseluruhan, aspek gender dalam pembangunan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan suatu indeks yang mengukur pencapaian pembangunan kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

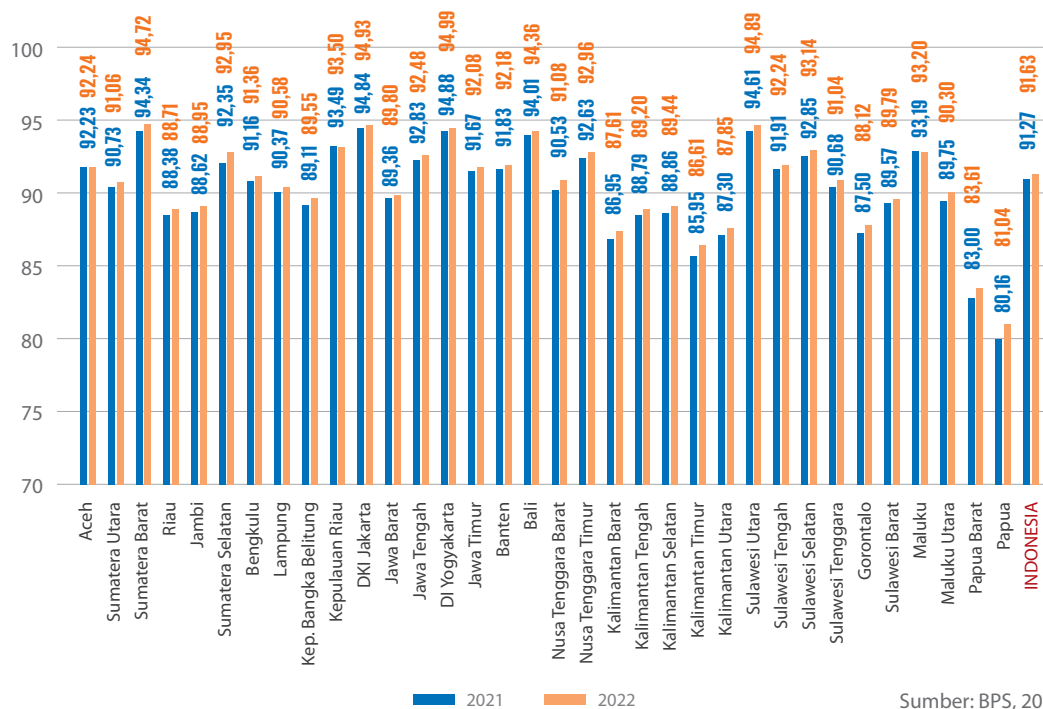
IPG dibentuk melalui 3 dimensi yaitu umur panjang dan hidup

sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi umur sehat dapat diukur melalui angka harapan hidup saat lahir, pada dimensi pengetahuan dapat diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan pada dimensi kehidupan yang layak dapat diukur melalui perkiraan pendapatan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015).

Berdasarkan data BPS pada tahun 2022 IPG Indonesia sebesar 91,63, dan tahun 2021 sebesar 91,27. Indeks Pembangunan Gender terbentuk

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) TAHUN 2021 DAN 2022

Grafik 2.27
Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2021 dan 2022



Sumber: BPS, 2022



melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kesetaraan gender terwujud apabila tidak terdapat kesenjangan antara IPM perempuan dan IPM laki-laki. Capaian pada tahun 2022 ini mengalami kenaikan sebesar 0,36 poin dibandingkan pada tahun 2021.

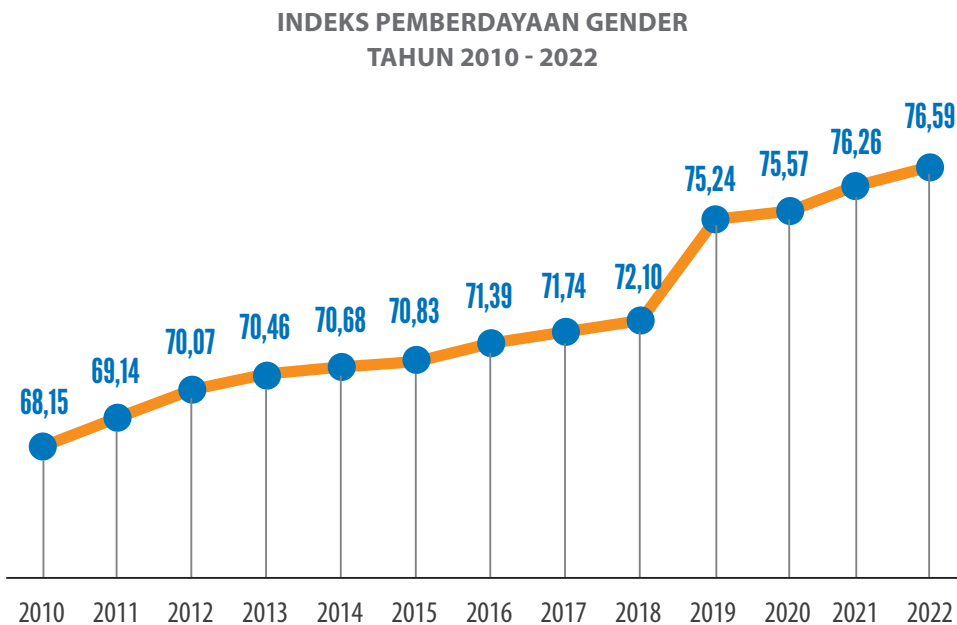
Berdasarkan sebaran provinsi, terdapat 15 provinsi dengan nilai IPG di atas nilai nasional. Tiga provinsi dengan capaian IPG tertinggi, yaitu DI Yogyakarta (94,99), DKI Jakarta (94,93) dan Sulawesi Utara (94,89). Tiga provinsi dengan IPG terendah yaitu Provinsi Papua (81,04), Papua Barat (83,61) dan Kalimantan Timur (86,61).

Kenaikan angka IPG tahun 2022 salah satunya dipengaruhi oleh kenaikan

pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita laki-laki naik dari Rp 15.770 ribu pada tahun 2021 menjadi Rp 16.215 ribu pada tahun 2022, sedangkan perempuan naik dari Rp 9.050 ribu menjadi Rp 9.281 ribu (BPS, 2023). Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

b. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menurut laporan UNDP 2019 masih lebih tinggi dibandingkan angka indeks global, IDG (GII). Indeks ini terdiri atas tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Tren IDG di Indonesia cenderung meningkat dari tahun 2010 sebesar 68,15 menjadi 76,59 di tahun 2022.



Sumber: BPS 2022



Grafik 2.28
Indeks pemberdayaan gender tahun 2010-2022

Meningkatkan IDG di Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Bangka Belitung disebabkan oleh semakin banyaknya partisipasi perempuan di pembangunan, salah satunya meningkatnya peran perempuan dalam parlemen dan publik.

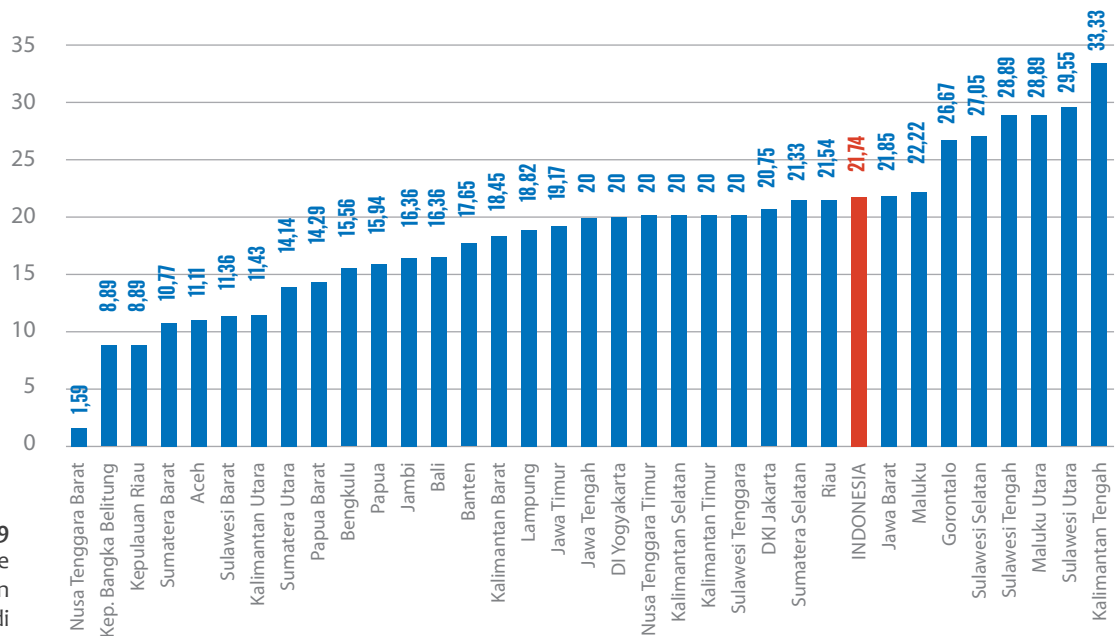
Partisipasi perempuan di parlemen merupakan salah satu faktor yang meningkatkan IDG. Data keterlibatan perempuan dalam parlemen menurut provinsi di tahun 2022 menunjukkan bahwa peran perempuan sudah cukup tinggi, yang menunjukkan cukup banyaknya provinsi yang memiliki perempuan di parlemen.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan meningkat dari

45,76 % tahun 2015 menjadi 53,54% pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, TPAK laki-laki meningkat dari 82,71% menjadi 83,18%. Kenaikan TPAK perempuan lebih besar dari laki-laki.

Kesenjangan antarprovinsi masih ada dalam perkembangan kemampuan perempuan. Dari keadaan yang ada dan melihat perkembangan posisi perempuan di bidang ketenagakerjaan, maka untuk masa depan perempuan adalah potensi sumber daya manusia yang masih dapat dikembangkan dengan pesat. Indonesia diproyeksikan dapat meningkatkan PDB senilai US\$135 miliar pada 2025, jika dapat mendorong kesetaraan perempuan

**KETERLIBATAN PEREMPUAN
DI PARLEMEN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022**

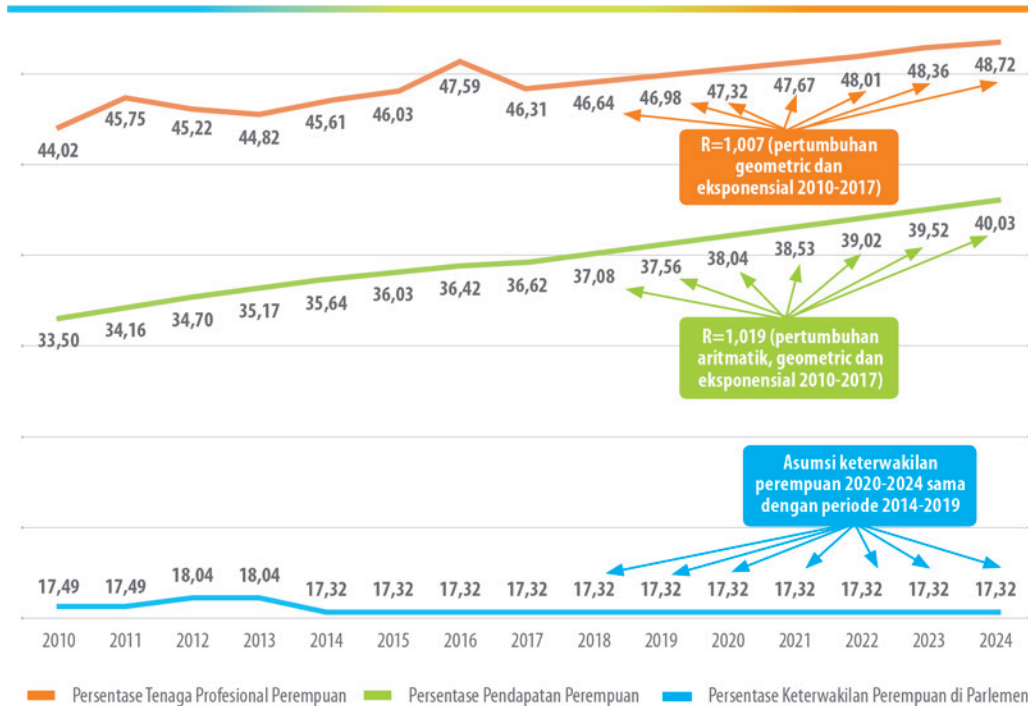


Sumber: BPS 2023

Grafik 2.29
Persentase keterlibatan perempuan di parlemen menurut provinsi tahun 2022



PROYEKSI KOMPONEN IDG SAMPAI 2024



Sumber: BPS, Proyeksi Komponen IDG



Grafik 2.30
Proyeksi
komponen IDG
sampai 2024

dalam kontribusi ekonomi. Sebesar US\$43 miliar kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) tersebut dapat diraih jika partisipasi tenaga kerja perempuan dinaikkan. Sejumlah US\$ 41 miliar dapat diraih fleksibilitas dalam jam kerja perempuan dapat dinaikkan. Kenaikan sebesar US\$51 miliar berasal dari kenaikan produktifitas dari kerja perempuan. Namun demikian, harus ada pengalihan yang signifikan dari perempuan yang bekerja di sektor agrikultur, atau di bisnis kecil keluarganya, ke sektor yang lebih produktif. Potensi itu akan dapat dicapai secara maksimal jika ada perbaikan kebijakan, infrastruktur,

penggunaan teknologi yang merata dan dukungan lainnya untuk peran domestik yang saat ini masih dibebankan pada perempuan.⁴

Jika dilihat potensi perkembangan dari IDG, proyeksi berikut dapat memberikan gambaran kecenderungannya (lihat grafik 2.30).

c. Indeks Pemenuhan Hak Anak

Menurut Konvensi Hak Anak, terdapat 4 klaster pemenuhan hak anak dan 1 klaster perlindungan khusus anak, yaitu: Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan

4 Mc. Kinsey. *Women Matter: Time to Accelerate*. 2017



pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V: perlindungan khusus. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) telah meningkat sebesar 1,89% dari 63,67 di tahun 2019 menjadi 65,56 di tahun 2020 (Kemen PPPA dan BPS, 2021).

Berdasarkan grafik 2.31, terdapat 5 Provinsi yang memiliki IPHA terendah, yaitu Papua (47,90), Nusa Tenggara Timur (50,14), Maluku Utara (51,97), Maluku (54,08), dan Sulawesi Tenggara (54,51). Kelima provinsi tersebut merupakan 5 provinsi terendah dari tahun 2018, 2019 dan 2020. Sedangkan 5 provinsi yang memiliki IPHA tertinggi di tahun 2020 adalah DI Yogyakarta (84,25), Bali (77,56), DKI Jakarta (76,38), Jawa Timur (71,52) dan Kepulauan Riau (71,42). IPHA pada tahun 2020 telah melampaui target di angka 64, yaitu sebesar 65,56.

Menurut Kemen PPPA, IPHA nasional telah mencapai 65,56 di tahun 2020. Angka ini menunjukkan telah terjadi peningkatan presentase pemenuhan hak anak sebesar 1,89%. Ada tiga provinsi dengan capaian IPHA tertinggi, yaitu DI Yogyakarta 84,25, Bali 77,56, dan DKI Jakarta 76,38. IPHA di tahun 2020 sebesar 65,56 telah melampaui target di angka 64.

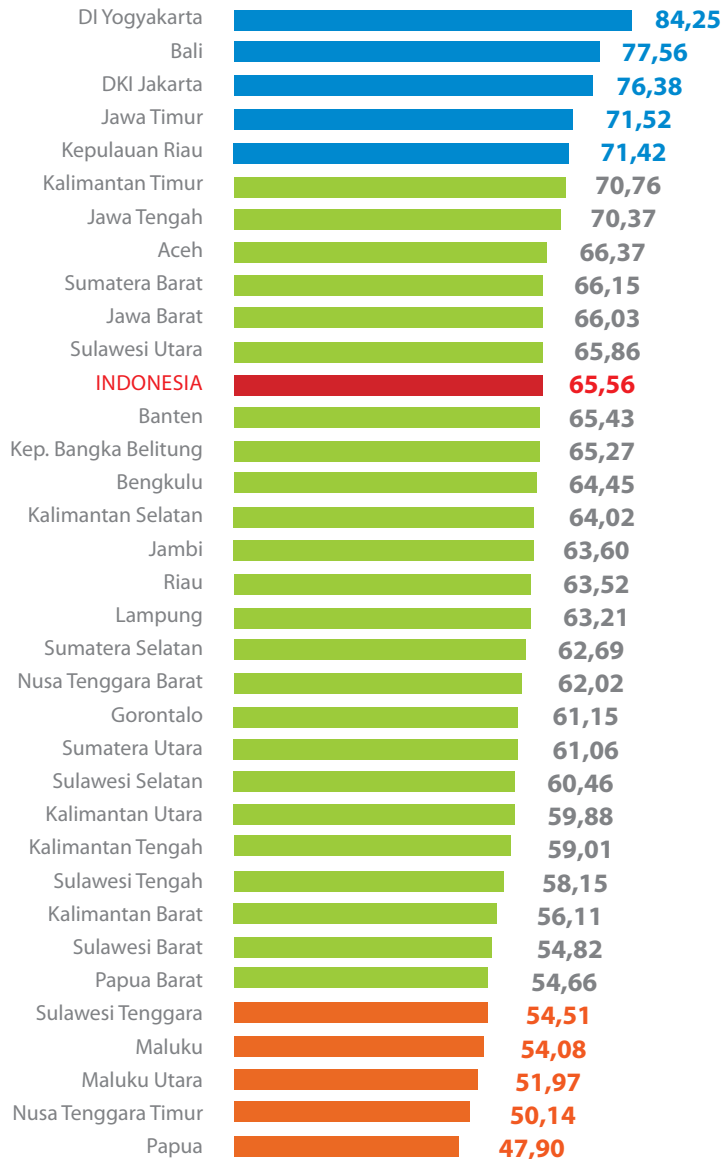
Tahun 2024 target IPA sebesar 73,49, prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan

sepanjang hidupnya menurun pada tahun 2024. Arah kebijakan meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda sebagai strategi pewujudan Indonesia Layak Anak diimplementasikan melalui penguatan sistem perlindungan anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah untuk memastikan anak menikmati haknya, mencakup:

1. Penguatan regulasi dan penegakkan hukum yang proporsional terhadap kepentingan terbaik anak.
2. Penguatan efektivitas kelembagaan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyedia layanan, koordinasi, sistem data dan informasi, serta fungsi pembinaan dan pengawasan.
3. Peningkatan pemahaman tentang perlindungan anak bagi para pemangku kepentingan, masyarakat, keluarga, dan anak.
4. Penguatan jejaring antara pemerintah dengan komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat.
5. Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya.
6. Penguatan upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi termasuk isu pekerja anak, dan penelantaran pada anak.
7. Penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
8. Penguatan pengasuhan di lingkungan keluarga dan pengasuhan sementara di institusi lainnya.



INDEKS PEMULIHAN HAK ANAK TAHUN 2020



Grafik 2.31
Indeks pemulihan
hak anak tahun
2020

Sumber: KemenPPPA dan BPS, 2021.

9. Peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus.
10. Peningkatan layanan dan rehabilitasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

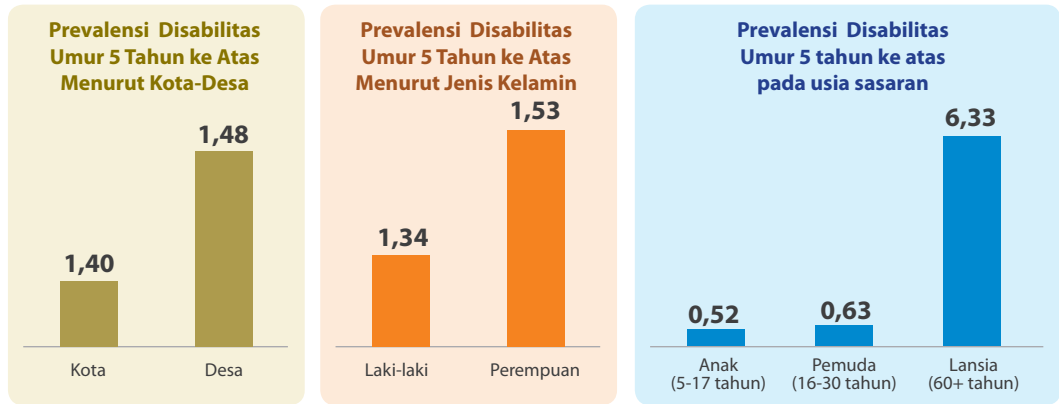
d. Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam ber-

PREVALENSI DISABILITAS UMUR 5 TAHUN KE ATAS DI INDONESIA TAHUN 2020



Grafik 2.32
Prevalensi disabilitas umur 5 tahun ke atas di Indonesia tahun 2020



Sumber: Long Form SP2020

interaksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

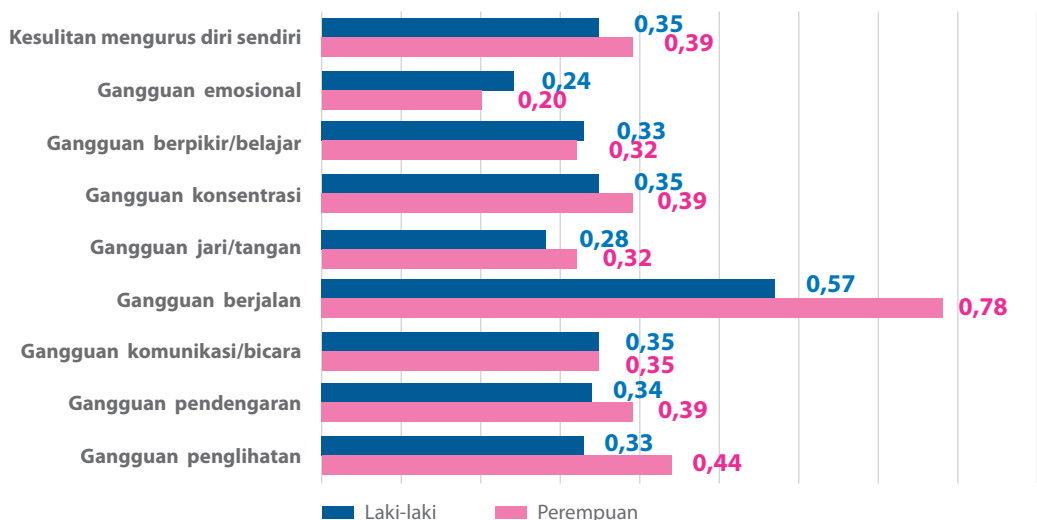
Berdasarkan hasil Long Form SP2020 prevalensi disabilitas umur 5 tahun ke atas yaitu sebesar 1,43%, untuk

disabilitas berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebesar 1,34% dan perempuan 1,53%. Berdasarkan kelompok usia sasaran, prevalensi disabilitas pada lansia (60 tahun ke atas) lebih besar dari kelompok umur lainnya. Hal tersebut dikarenakan penurunan fungsi fisik maupun mental/emosi akibat proses penuaan.

PERSENTASE PENDUDUK DISABILITAS MENURUT JENIS KESULITAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2020



Grafik 2.33
Presentase penduduk dengan disabilitas menurut jenis kesulitan dan jenis kelamin di Indonesia tahun 2020



Sumber: Long Form SP2020



Secara umum penduduk perempuan lebih banyak mengalami kondisi disabilitas dibandingkan penduduk laki-laki. Jenis kesulitan disabilitas yang paling banyak dialami oleh perempuan di antaranya adalah kesulitan mengurus diri sendiri, gangguan konsentrasi,

gangguan jari/tangan, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan dan paling banyak pada gangguan berjalan. Sedangkan laki-laki cenderung lebih banyak mengalami gangguan emosional dan gangguan berpikir/belajar (lihat grafik 2.33).

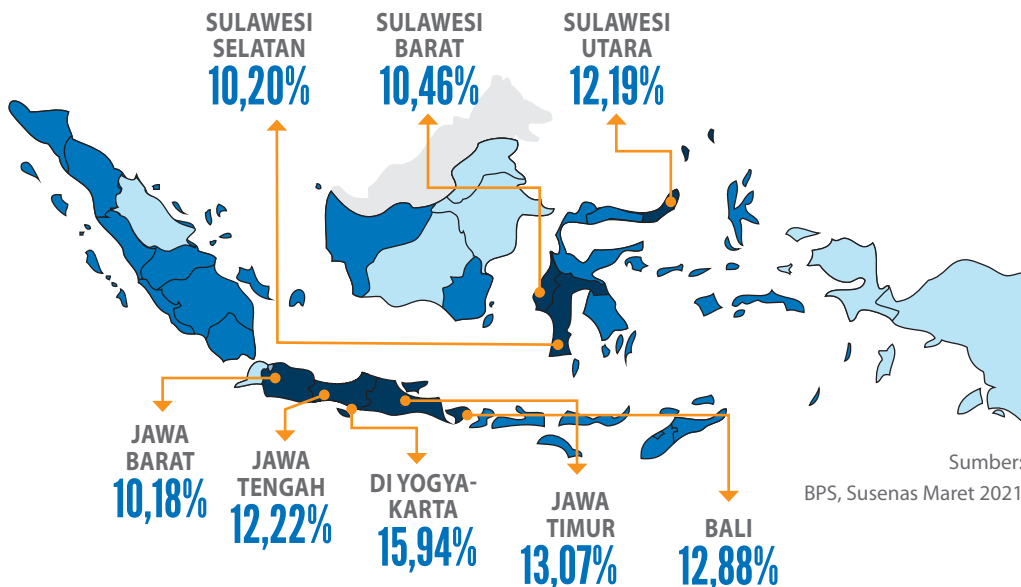
2.3.4 Ketahanan Sosial Budaya

a. Indeks Ketentraman Kelanjutusiaan

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Lanjut Usia (lansia) adalah seseorang yang telah mencapai usia enam puluh tahun ke atas. Secara global, negara-negara dunia sedang dalam menghadapi fenomena penuaan penduduk (*aging population*), termasuk Indonesia. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), *Australian Government*, dan SMERU

research institute pada tahun 2020 telah menerbitkan Laporan penelitian berjudul *Situasi Lansia di Indonesia dan Akses terhadap Program Perlindungan Sosial: Analisis Data Sekunder*. Indonesia akan mengalami *aging population* pada tahun 2030. Fenomena ini diindikasikan dengan telah meningkatnya penduduk usia lanjut sebesar 25,7 juta orang (9,6%) pada tahun 2019. Pada tahun 2020 lansia di Indonesia meningkat menjadi 10% dan di tahun 2040 menjadi 20%.

PROVINSI DENGAN STRUKTUR PENDUDUK TUA DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber:
BPS, Susenas Maret 2021



Grafik 2.34
Provinsi dengan struktur penduduk tua di Indonesia tahun 2021

Berdasarkan Susenas tahun 2021, distribusi persentase lansia pada 2021 sangat beragam antarprovinsi. Delapan provinsi tertinggi yang sudah memiliki persentase di atas 10%, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (15,94 persen), Jawa Timur (13,07 persen), Jawa Tengah (12,22 persen), Sulawesi Utara (12,19 persen), Bali (12,88 persen), Sulawesi Selatan (10,20 persen), Sulawesi Barat (10,46 persen), dan Jawa Barat (10,18 persen).

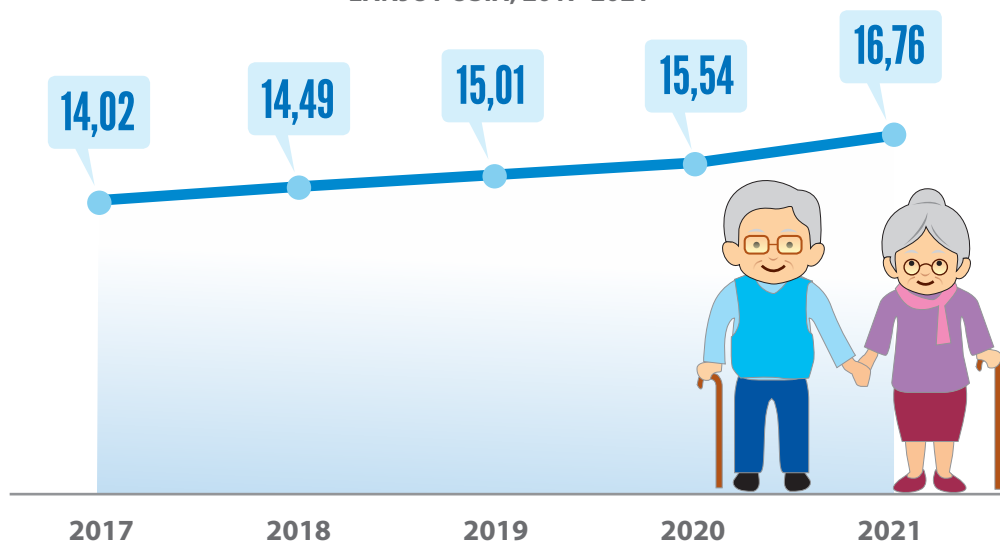
Hal ini berarti kedelapan provinsi ini telah memasuki *aging population* karena persentase penduduk lansia sudah di atas 10%. Secara teoritis provinsi atau negara yang memiliki lansia di atas 10% akan mendapatkan manfaat yaitu terjadinya bonus demografi tahap II.

Indonesia secara bertahap akan menjadi negara yang menua secara demografis. Persentase penduduk berusia di atas 65 tahun

akan meningkat sebesar 25% di tahun 2050. Sejumlah 25 juta orang padatahun 2019 akan meningkat menjadi 80 juta di tahun 2050 (BPS 2019). Dari tahun 2017 hingga 2021 terdapat peningkatan rasio ketergantungan lansia, yaitu dari 14,02 menjadi 16,76. Angka tersebut memiliki arti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia 15-59 tahun) harus menanggung 17 orang penduduk lanjut usia (BPS, 2021). Sedangkan pada tahun 2045 terdapat 3 orang penduduk usia produktif akan menanggung 1 orang penduduk lanjut usia.

Sekitar 11% lansia hidup dengan kesejahteraan yang rendah, dalam kondisi miskin. Lebih dari 60% tinggal bersama anggota keluarga lain yang kemungkinan besar bertindak sebagai perawatnya. Pengeluaran bulanan rata-rata keluarga dengan lansia diperkirakan 3% lebih tinggi daripada keluarga tanpa lansia (TNP2K, 2020).

PERKEMBANGAN RASIO KETERGANTUNGAN PENDUDUK LANJUT USIA, 2017-2021



Grafik 2.35
Perkembangan rasio ketergantungan penduduk lanjut usia, 2017-2021

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021



Untuk mengantisipasi perubahan kondisi demografis tersebut, sangat penting untuk memastikan kesejahteraan lansia. Apalagi lansia cenderung mengalami penurunan kondisi kesehatan dan kemungkinan menyandang disabilitas. Lansia pun pada umumnya menjadi kurang produktif sehingga mengalami penurunan dan bahkan kehilangan pendapatan. Kondisi tersebut menyebabkan lansia lebih rentan terhadap berbagai risiko dan guncangan yang terkait dengan sosial ekonomi.

Kelompok lansia menjadi *dependent group* bagi generasi muda yang tinggal bersama mereka. Saat ini ada sekitar 40% lansia tinggal dalam 3 generasi yang mengakibatkan penduduk usia produktif menjadi sulit memberikan investasi yang maksimal bagi generasi di bawahnya dan bagi dirinya sendiri, serta masa tuanya. Penduduk usia produktif masih harus membagi investasi mereka untuk generasi di atasnya. Sekitar 80% penduduk usia 65 tahun ke atas tinggal di rumah tangga dengan konsumsi per kapita di bawah Rp 50.000 per hari dan tidak memiliki jaminan pendapatan (BPS. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2018).

Menurut TNP2K, 80 % lansia hidup dalam kemiskinan dan relatif tinggi dibandingkan dengan kelompok umur lainnya (Kidd et al. 2018). Selain itu kelompok lansia belum seluruhnya terlindungi oleh Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Hasil Susenas Maret 2023, lansia yang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2023 yaitu sebanyak

10,04 persen. Data lansia yang telah memiliki JKN yaitu sebesar 75,10 persen. Adapun data kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada program Jaminan Pensiun pada lansia yaitu sebesar 9,43 persen dan pada program Jaminan Hari Tua pada lansia yaitu sebesar 6,50 persen.

Rendahnya cakupan penerima manfaat dan terbatasnya program perlindungan sosial lansia memengaruhi tingkat kesejahteraan lansia. Pemerintah harus menyiapkan diri untuk menghadapi kenaikan penduduk lansia yang akan mulai pada sekitar tahun 2030.

Respon pemerintah terkait dengan lansia adalah diterbitkannya Strategi Nasional (Stranas) Kelanjutusiaan (Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2021). Perpres tersebut memberikan arah kebijakan terkait dengan mewujudkan hidup lansia Indonesia yang mandiri, sejahtera dan bermartabat. Perpres Stranas Kelanjutusiaan akan menguatkan lansia dalam hal perlindungan sosial, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan kelembagaan, dan pemenuhan hak lansia.

b. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

iBangga adalah pengukuran kualitas keluarga yang diukur dari 3 (tiga) dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan (BKKBN, 2021). iBangga bernilai antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: di bawah 40 iBangga yang kurang baik atau rentan, diantara 40-70 iBangga-nya cukup baik, dan di atas 70 iBangga baik atau Tangguh.



INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA PER PROVINSI TAHUN 2022

Provinsi	Indeks Ketentraman	Indeks Kemandirian	Indeks Kebahagiaan	Indeks Pembangunan Keluarga
Aceh	60.99	51.78	60.61	57.79
Sumatera Utara	56.25	53.12	55.56	54.98
Sumatera Barat	58.63	53.18	56.56	56.12
Riau	57.32	52.38	60.52	56.74
Jambi	57.61	52.66	59.74	56.67
Sumatera Selatan	57.02	53.63	58.22	56.29
Bengkulu	59.30	52.81	60.41	57.51
Lampung	56.67	52.61	58.03	55.77
Kep. Bangka Belitung	59.79	52.30	58.62	56.90
Kep. Riau	61.88	53.49	62.79	59.39
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	59.21	54.01	60.40	57.87
Jawa Tengah	60.54	54.31	59.62	58.16
DI Yogyakarta	62.84	54.52	60.89	59.42
Jawa Timur	59.93	53.89	59.79	57.87
Banten	57.89	53.06	59.98	56.98
Bali	62.44	53.25	61.22	58.97
Nusa Tenggara Barat	54.31	51.93	56.07	54.10
Nusa Tenggara Timur	55.92	49.02	55.58	53.51
Kalimantan Barat	57.48	49.84	56.50	54.61
Kalimantan Tengah	56.73	50.44	55.58	54.25
Kalimantan Selatan	57.89	52.25	57.31	55.82
Kalimantan Timur	61.74	50.88	57.55	56.72
Kalimantan Utara	62.63	49.89	55.89	56.14
Sulawesi Utara	61.79	52.65	56.49	56.98
Sulawesi Tengah	58.47	49.63	55.15	54.42
Sulawesi Selatan	60.84	52.07	53.88	55.60
Sulawesi Tenggara	58.44	51.73	55.47	55.21
Gorontalo	58.75	51.67	53.74	54.72
Sulawesi Barat	60.68	50.05	54.73	55.15
Maluku	56.37	51.70	59.94	56.00
Maluku Utara	56.33	51.40	58.82	55.52
Papua	52.27	40.50	46.18	46.32
Papua Barat	55.32	43.29	55.75	51.45
INDONESIA	58.23	52.41	57.56	56.07



Tabel 2.15
Indeks pembangunan keluarga per provinsi tahun 2022

Sumber: BKKBN, 2023



Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) memberi gambaran/potret umum kondisi keluarga yang berbasis wilayah dan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan keluarga sampai *level* daerah. iBangga dapat digunakan sebagai target pembangunan dan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan keluarga melalui program/kegiatan yang dibutuhkan oleh keluarga di daerah sesuai dengan permasalahan yang ditemukan.

iBangga pada tahun 2022 memiliki capaian 56,07, dengan capaian dimensi ketentraman sebesar 58,23, dimensi kemandirian sebesar 52,41, dan dimensi kebahagiaan sebesar 57,56. Di Yogyakarta merupakan provinsi dengan iBangga tertinggi, yaitu sebesar 59,42, sedangkan Papua merupakan provinsi dengan iBangga terendah, yaitu sebesar 46,32.

c. Perubahan Sosial dalam Keluarga

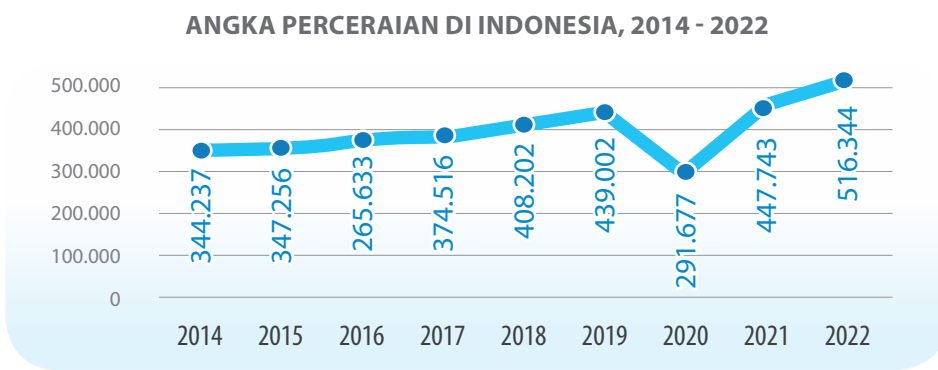
Perubahan sosial dalam keluarga dapat dilihat dari 3 aspek kependudukan yaitu angka perceraian, perkawinan anak, dan kerentanan keluarga yang memiliki lansia.

• Angka Perceraian

BPS merilis Statistik Indonesia 2022, jumlah kasus cerai telah mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022. Jumlah kasus perceraian pada tahun 2020 sebanyak 291,677 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 447,743 kasus, dan pada tahun 2022 sebanyak 516,344 kasus. Pada tahun 2022 sebanyak 388,358 kasus perceraian terjadi karena istri gugat cerai dan telah diputus oleh pengadilan. Sementara itu, sebanyak 127,986 kasus perceraian terjadi karena suami mengajukan talak dan permohonannya telah diputus oleh pengadilan.

Berdasarkan provinsi, kasus perceraian tertinggi pada tahun 2020 berada di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 65,755 kasus, sedangkan pada tahun 2021-2022 kasus perceraian tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat, yaitu sebesar 98,088 kasus pada tahun 2021 dan 113,643 kasus pada tahun 2022.

Masalah perceraian harus diantisipasi karena terkait dengan program kependudukan, khususnya pembangunan keluarga dan tumbuh kembang anak serta kualitas penduduk.



Sumber: BPS 2022



Grafik 2.36
Angka perceraian di Indonesia, 2014-2022



KASUS PERCERAIAN PER PROVINSI, 2020-2022

PROVINSI	CERAI								
	2020			2021			2022		
	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	JUMLAH	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	JUMLAH	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	JUMLAH
Aceh	1,093	3,078	4,171	1,469	4,973	6,442	1,879	5,917	7,796
Sumatera Utara	2,661	10,148	12,809	3,553	13,717	17,270	3,911	16,118	20,029
Sumatera Barat	1,458	3,833	5,291	2,372	6,999	9,371	2,657	7,621	10,278
Riau	1,637	4,615	6,252	3,198	9,524	12,722	3,700	11,229	14,929
Jambi	947	2,936	3,883	1,147	3,853	5,000	1,329	4,136	5,465
Sumatera Selatan	1,535	4,867	6,402	2,473	8,719	11,192	2,869	9,632	12,501
Bengkulu	808	2,296	3,104	912	2,933	3,845	1,075	3,151	4,226
Lampung	2,469	8,758	11,227	3,119	11,914	15,033	3,586	13,562	17,148
Kep. Bangka Belitung	510	1,491	2,001	577	1,900	2,477	759	2,272	3,031
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	3,038	9,060	12,098	3,959	12,058	16,017	4,943	14,965	19,908
Jawa Barat	10,826	26,677	37,503	23,971	74,117	98,088	27,907	85,736	113,643
Jawa Tengah	16,808	48,947	65,755	18,802	56,707	75,509	21,150	64,262	85,412
DI Yogyakarta	1,344	3,944	5,288	1,467	4,166	5,633	1,570	4,537	6,107
Jawa Timur	18,581	43,289	61,870	25,113	63,122	88,235	29,150	72,915	102,065
Banten	2,302	8,099	10,401	3,323	12,345	15,668	4,006	14,695	18,701
Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	1,275	3,580	4,855	2,040	6,945	8,985	2,373	8,373	10,746
Nusa Tenggara Timur	155	296	451	135	301	436	195	408	603
Kalimantan Barat	846	3,403	4,249	1,126	4,099	5,225	1,379	4,257	5,636
Kalimantan Tengah	405	1,190	1,595	810	2,674	3,484	1,015	2,987	4,002
Kalimantan Selatan	824	2,586	3,410	1,543	6,039	7,582	1,773	6,452	8,225
Kalimantan Timur	1,775	5,237	7,012	1,996	6,005	8,001	2,550	7,641	10,191
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	341	957	1,298	440	1,444	1,884	485	1,696	2,181
Sulawesi Tengah	425	1,185	1,610	940	3,019	3,959	1,012	3,448	4,460
Sulawesi Selatan	2,991	9,706	12,697	3,406	12,169	15,575	3,854	13,504	17,358
Sulawesi Tenggara	699	2,069	2,768	868	2,954	3,822	1,010	3,349	4,359
Gorontalo	318	1,134	1,452	524	1,894	2,418	535	2,199	2,734
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maluku	71	154	225	212	547	759	265	682	947
Maluku Utara	136	340	476	319	882	1,201	432	1,056	1,488
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Papua	429	1,095	1,524	514	1,324	1,838	617	1,558	2,175
INDONESIA	76,707	214,970	291,677	110,400	337,343	447,743	127,986	388,358	516,344



Tabel 2.16
Kasus perceraian per provinsi, 2020-2022

Sumber: BPS, 2023



JUMLAH PERCERAIAN MENURUT FAKTOR TAHUN 2022

FAKTOR PERCERAIAN	JUMLAH
Zina	690
Mabuk	1781
Madat	383
Judi	1191
Meninggalkan salah satu pihak	39,359
Dihukum Penjara	1447
Poligami	874
Kekerasan dalam rumah tangga	4972
Cacat badan	309
Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus	284,169
Kawin Paksa	377
Murtad	1635
Masalah Ekonomi	110,939
Lain-lain	0

Sumber: BPS, 2023



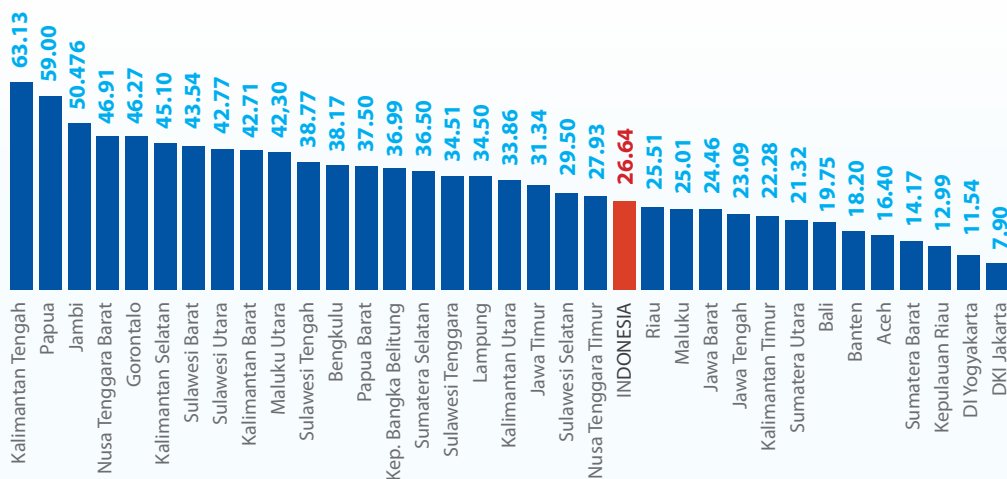
Tabel 2.17
Jumlah Perceraian
Menurut Faktor
Tahun 2022

Pada tahun 2022, kasus perceraian didominasi oleh perselisihan/pertengkaran terus-menerus, masalah ekonomi, salah satu pihak menggugat cerai, dan kekerasan dalam rumah tangga.

• Perkawinan Anak

Untuk menggambarkan perkawinan anak digunakan angka kelahiran anak usia 15-19 tahun atau yang biasa disebut *Age Specific Fertility Rate* (ASFR 15-19). Angka ini sebetulnya

ASFR 15-19 MENURUT PROVINSI HASIL LONG FORM SP2020

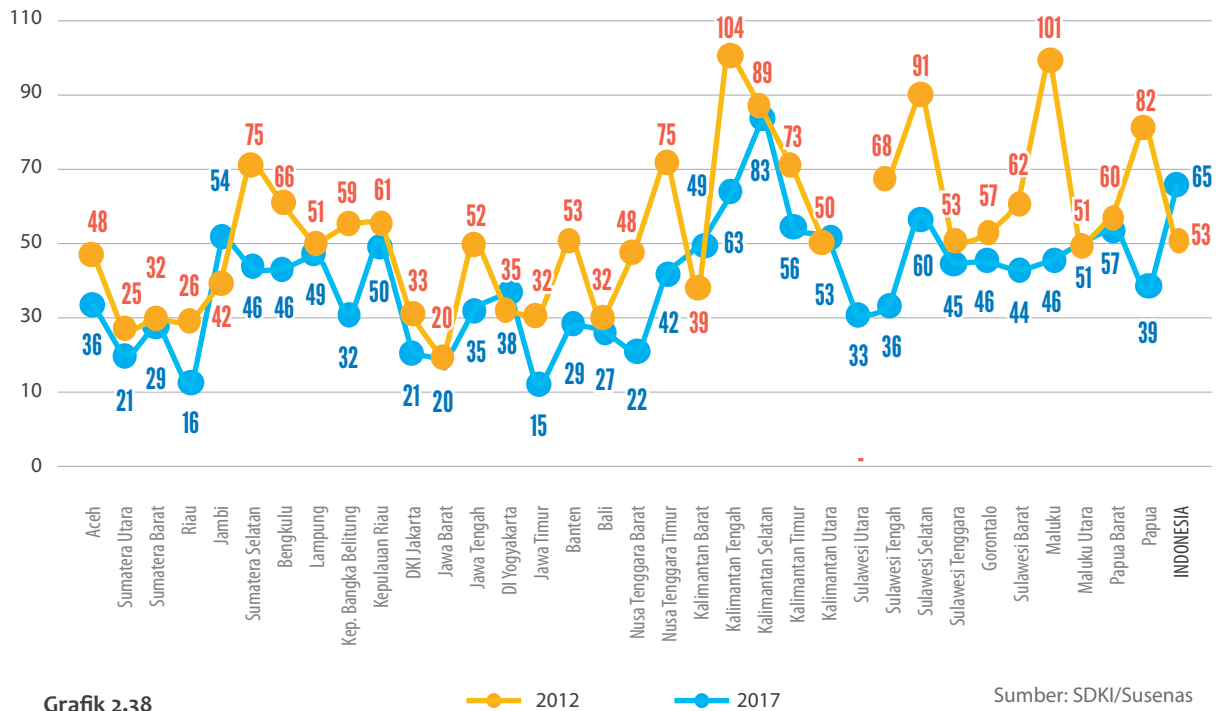


Sumber: Long Form SP2020



Grafik 2.37
ASFR 15-19 menu-
rut provinsi hasil
Long Form SP2020

ANGKA KELAHIRAN PADA USIA 15-19 TAHUN



Grafik 2.38
Angka kelahiran pada usia
15-19 tahun

Sumber: SDKI/Susenas

tidak hanya menggambarkan tingkat fertilitas pada anak muda (15-19 tahun) namun juga berkaitan erat dengan kesehatan reproduksi seorang wanita dan pendidikan. Secara nasional berdasarkan SDKI 2012 dan 2017, angka perkawinan anak pada usia 15-19 tahun menurun dari 48 kelahiran pada tahun 2012 turun menjadi 36 kelahiran per 1.000 anak usia 15-19 tahun.

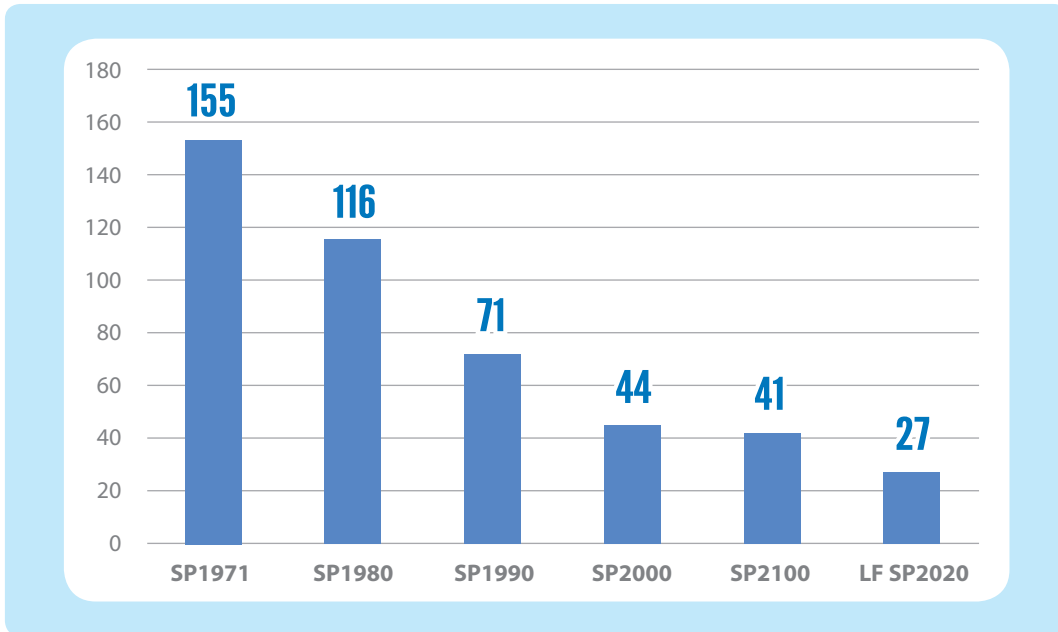
Grafik 2.38 di atas menunjukkan ASFR 15-19 tahun menurut provinsi. Sebanyak 11 (sebelas) provinsi memi-

liki jumlah kelahiran di bawah rata-rata nasional, di antaranya, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Bali, Banten, Sumatera Utara, Jawa Timur, Lampung, dan Kalimantan Utara.

Sedangkan Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan semua provinsi di Sulawesi memiliki angka kelahiran yang masih sangat tinggi. Angka ASFR 15-19 tahun cenderung menurun pada tahun 2012 hingga 2017. ASFR 15-19 tahun angkanya lebih tinggi di perdesaan dibandingkan di perkotaan.



TREN ASFR 15-19 INDONESIA DARI SP1971 SAMPAI LONG FORM SP2020



Grafik 2.39
Tren ASFR 15-19
Indonesia dari
SP1971 sampai
Long Form SP2020

Sumber: BPS, 2023

Sedangkan menurut hasil *Long Form* SP2020, angka kelahiran sebesar 26–27 kelahiran di antara 1.000 perempuan umur 15–19 tahun. Dalam lima puluh tahun terakhir terjadi penurunan angka fertilitas remaja (ASFR15–19 tahun) yaitu dari 155 dari hasil SP1971 menjadi 26,64 dari hasil *Long Form* SP2020.

Respon terkait pembangunan keluarga antara lain adalah Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Perpres ini mendukung terciptanya keluarga yang berkualitas guna mendukung Indonesia Emas 2045.

- **Kerentanan keluarga yang memiliki lansia**

Indonesia secara bertahap akan menjadi salah satu negara yang menua secara demografis. Persentase orang berusia di atas 65 tahun akan meningkat sebesar 25 persen di tahun 2050, dari 25 juta jiwa di tahun 2019 akan meningkat menjadi 80 juta jiwa di tahun 2050 (BPS 2019).

Pada tahun 2020, *dependensi ratio* akan terus mengalami peningkatan dimana terdapat 6 orang penduduk usia produktif yang menanggung satu orang penduduk lansia, dan pada tahun 2045 terdapat 3 orang penduduk usia produktif yang menanggung satu orang penduduk lanjut usia (lansia).



Sekitar 11 (sebelas) persen lansia hidup dengan kesejahteraan yang rendah (dalam kondisi miskin) dan lebih dari 60 persen tinggal bersama anggota keluarga lain yang kemungkinan besar bertindak sebagai perawat atau pengasuhnya. Selain itu, pengeluaran bulanan rata-rata keluarga dengan lansia diperkirakan 3 persen lebih tinggi daripada keluarga tanpa lansia (TNP2K, 2020).

Mengantisipasi perubahan kondisi demografis tersebut, sangat penting untuk memastikan kesejahteraan lansia. Apalagi lansia cenderung mengalami penurunan kondisi kesehatan dan rentan menderita disabilitas. Lansia pun umumnya menjadi kurang produktif sehingga mengalami penurunan dan bahkan kehilangan pendapatan. Kondisi tersebut menyebabkan lansia rentan terhadap berbagai risiko guncangan kejiwaan, khususnya terkait sosial ekonomi.

Kelompok lansia rentan menjadi *dependent group* bagi generasi muda yang tinggal bersama mereka. Saat ini ada sekitar 40 persen lansia tinggal dalam tiga generasi yang mengakibatkan penduduk usia produktif menjadi

sulit memberikan investasi maksimal bagi generasi di bawahnya, juga bagi dirinya sendiri serta untuk masa tuanya nanti. Penduduk usia produktif masih harus membagi investasi mereka untuk menanggung kebutuhan generasi di atasnya.

Sekitar 80 persen penduduk usia 65 tahun ke atas tinggal di rumah tangga dengan konsumsi per kapita di bawah Rp 50.000 per hari dan tidak memiliki jaminan pendapatan (BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat *Welfare Statistic* 2018, 2018). Menurut TNP2K, 80 persen lansia hidup dalam kemiskinan dan relatif lebih tinggi dibandingkan kelompok umur lainnya (Kidd, et al., 2018). Selain itu, kelompok lansia belum seluruhnya terlindungi Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Minimnya cakupan penerima manfaat dan terbatasnya program perlindungan sosial khusus lansia berpengaruh terhadap capaian kesejahteraan bagi lansia. Saatnya untuk berbenah dan mempersiapkan program dan kebijakan untuk menghadapi ledakan populasi lansia yang akan dimulai tahun 2030.



2.4

Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Persebaran penduduk dan mobilitas penduduk menggambarkan dinamika penduduk di suatu wilayah. Persebaran penduduk dan mobilitas penduduk terkait dengan erat. Mobilitas penduduk dapat

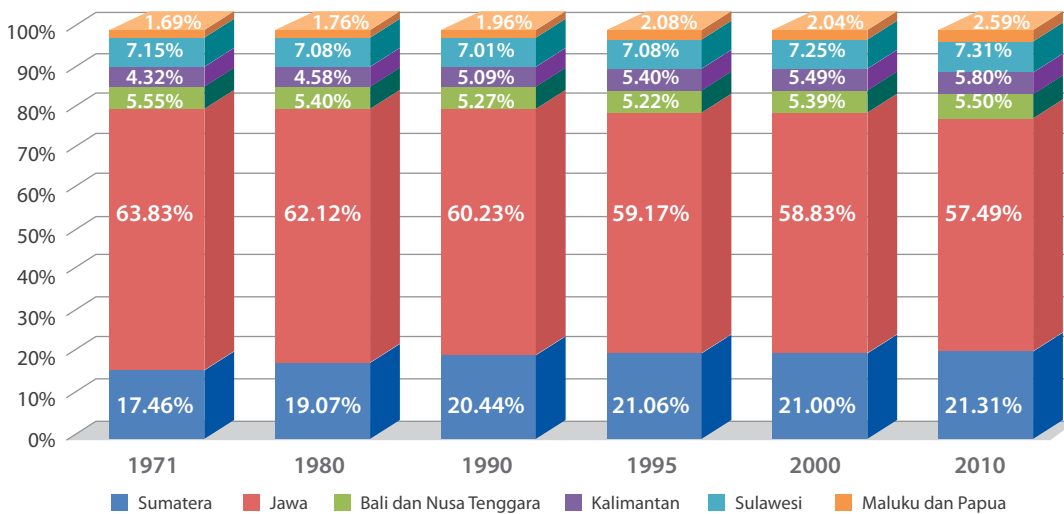
memengaruhi persebaran penduduk. Mobilitas penduduk yang tinggi ke suatu wilayah menambah jumlah penduduk, meskipun jumlah penduduk juga ditentukan oleh pertumbuhan alami.

2.4.1 Persebaran Penduduk

Salah satu isu penting mengenai kondisi kependudukan di Indonesia adalah dalam hal persebaran penduduk. Persebaran penduduk Indonesia sangat tidak berimbang. Pulau Jawa telah lama menjadi daerah tujuan migrasi dan

kondisi ini berperan dalam menyumbang jumlah penduduk yang sangat besar di Pulau Jawa. Sejak sebelum kemerdekaan sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di Jawa (grafik 2.40) dan berlanjut sampai dengan saat ini.

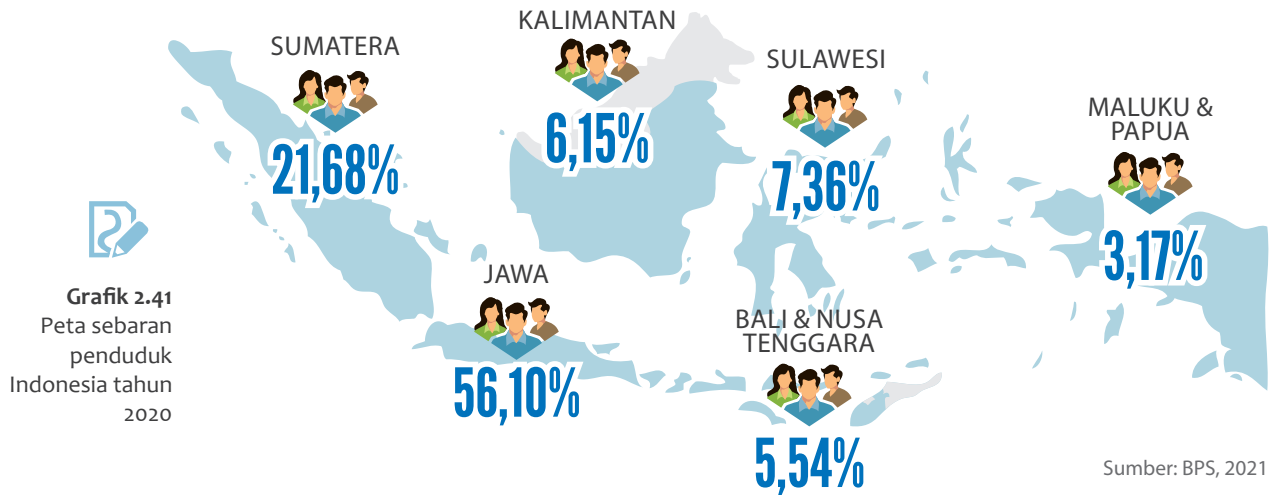
PERSEBARAN PENDUDUK INDONESIA, 1971-2010



Grafik 2.40
Persebaran penduduk Indonesia, 1971-2010

Sumber : Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995

PETA SEBARAN PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2020



Grafik 2.41
Peta sebaran penduduk Indonesia tahun 2020

Pada tahun 1970, sekitar 63,83 persen penduduk Indonesia tinggal di pulau Jawa. Hasil Sensus Penduduk tahun 1980 menunjukkan 62,12 persen penduduk yang ada masih berkonsentrasi di Pulau Jawa. Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan sedikit penurunan, dimana pulau Jawa masih dihuni oleh sekitar 57,49 persen penduduk Indonesia.

Grafik 2.41 menunjukkan bahwa 56,1 persen penduduk masih tinggal di Pulau Jawa. Sebaliknya, proporsi penduduk terendah terdapat di Pulau Maluku dan Papua yang hanya 3,17 persen dari total penduduk Indonesia.

Persebaran penduduk menurut pulau dapat dilihat pada grafik 2.41. Pada grafik tersebut mengungkap, tahun 2020 masih terjadi ketidakseimbangan persebaran penduduk antar pulau. Upaya pengelolaan mobilitas penduduk

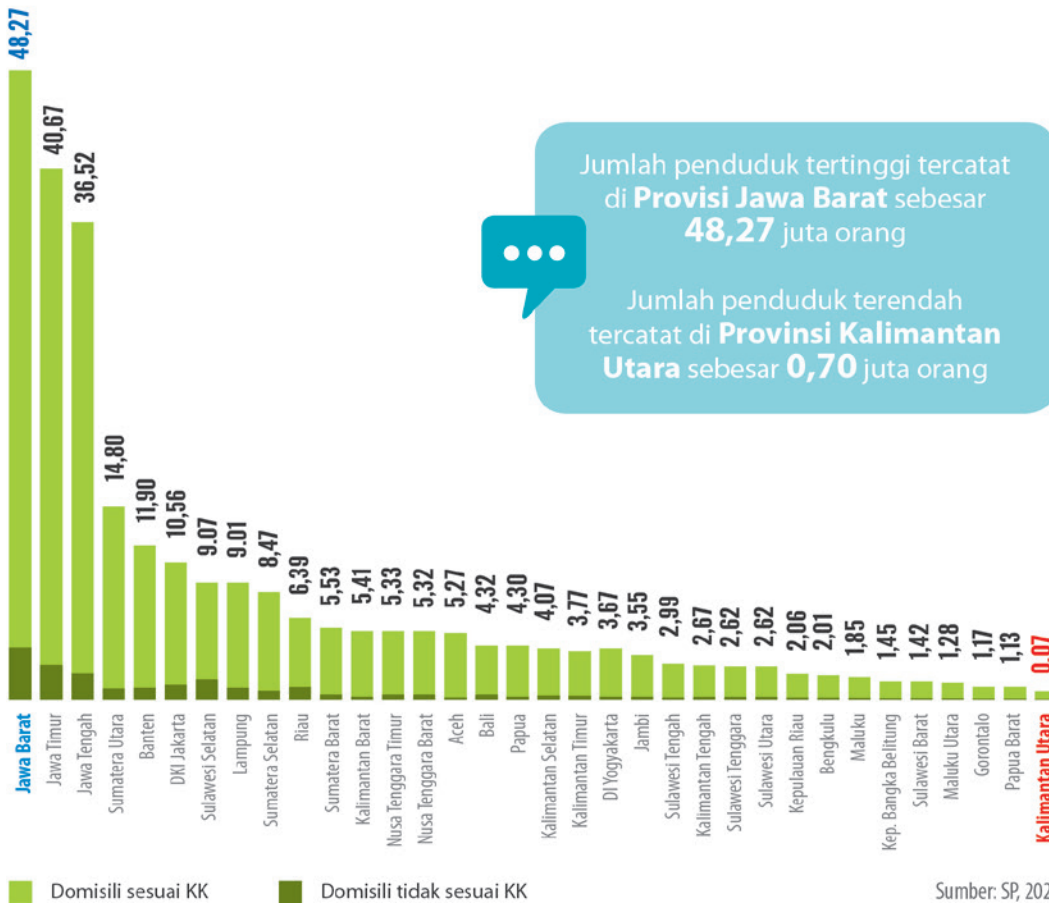
masih perlu menjadi perhatian di tahun-tahun yang akan datang. Rencana pemindahan ibukota negara ke Pulau Kalimantan diharapkan dapat lebih menyeimbangkan persebaran penduduk Indonesia.

Persebaran yang tidak merata tersebut mengakibatkan kepadatan penduduk antar pulau sangat timpang. Sebagaimana terlihat pada grafik 2.42, Jawa Barat memiliki kepadatan penduduk lebih dari 1000 orang per km² dibandingkan kepadatan penduduk di Kalimantan Utara yang hanya 25 orang per km². Diperkirakan pada tahun 2045, penduduk masih terkonsentrasi di Jawa.

Ketimpangan distribusi penduduk ini menunjukkan bahwa, kebijakan redistribusi penduduk langsung maupun tidak langsung telah dilakukan.



JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI DI INDONESIA



Jumlah penduduk tertinggi tercatat di **Provinsi Jawa Barat** sebesar **48,27** juta orang

Jumlah penduduk terendah tercatat di **Provinsi Kalimantan Utara** sebesar **0,70** juta orang



Grafik 2.42
Jumlah penduduk menurut provinsi di Indonesia

2.4.2 Migrasi

Badan Pusat Statistik tahun 2021 mempublikasikan Buku Berjudul Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja. Laporan tersebut menyebutkan, mobilitas permanen dan non permanen. Migrasi risen adalah migrasi berdasarkan tempat tinggal 5 tahun yang lalu yaitu seseorang yang provinsi tempat tinggal saat pencacahan berbeda dengan provinsi tempat tinggalnya 5 tahun yang lalu. Migrasi risen per 2021 menunjukkan laki-laki sebesar 50,92%, kelompok umur 2024 tahun sebesar 33,79%, dan pendidikan SLTA/ sederajat sebesar 50,71%. Ada 5 provinsi dengan persentase migrasi risen terbesar yaitu Kepulauan

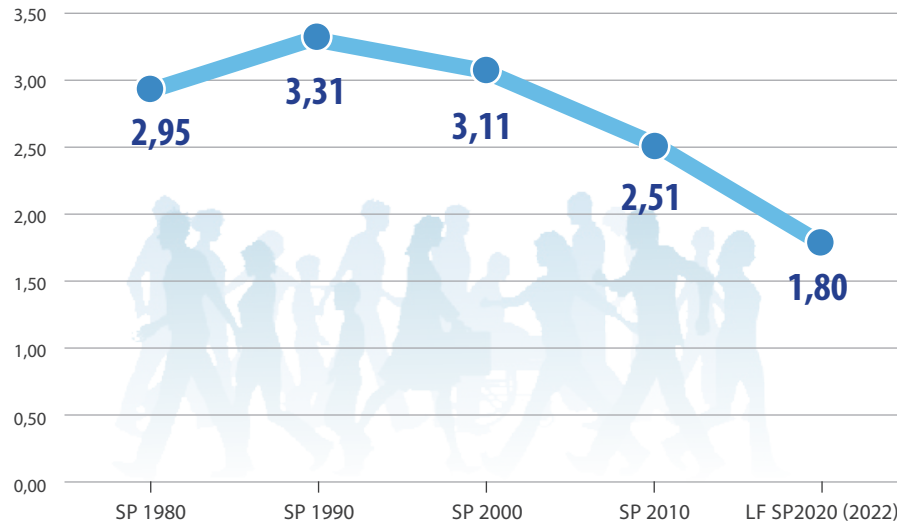
riau (9,74%), DI Yogyakarta (7,42%), Kalimantan Utara (5,26%), DKI Jakarta (4,84%), dan Papua Barat (4,84%).

Berdasarkan hasil Long Form SP2020, angka migrasi risen antarprovinsi sebesar 1,80%. Hal ini menunjukkan dua dari 100 penduduk Indonesia merupakan mereka yang bermigrasi antarprovinsi pada lima tahun terakhir. Tren angka migrasi dari SP1980 sampai SP2020 sempat mengalami penurunan, salah satunya karena dipengaruhi peristiwa penting seperti pandemi Covid-19. Migrasi risen antarprovinsi tertinggi di angka 5,09% pada Provinsi DI Yogyakarta,

TREN ANGKA MIGRASI RISEN ANTARPROVINSI
SECARA NASIONAL SP1980 SAMPAI LONG FORM SP2020



Grafik 2.43
Tren angka migrasi risen antarprovinsi secara nasional SP1980 sampai Long Form SP2020

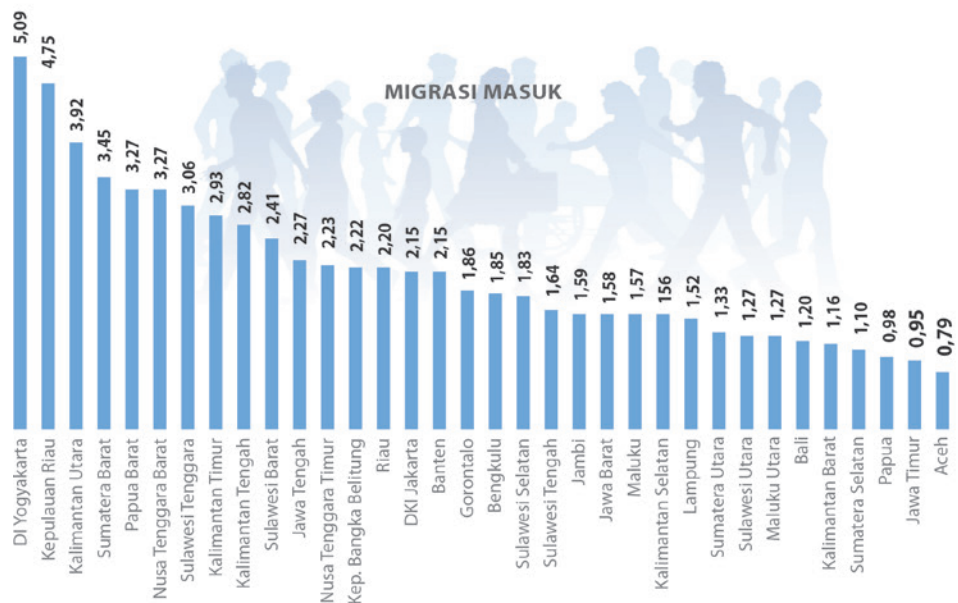


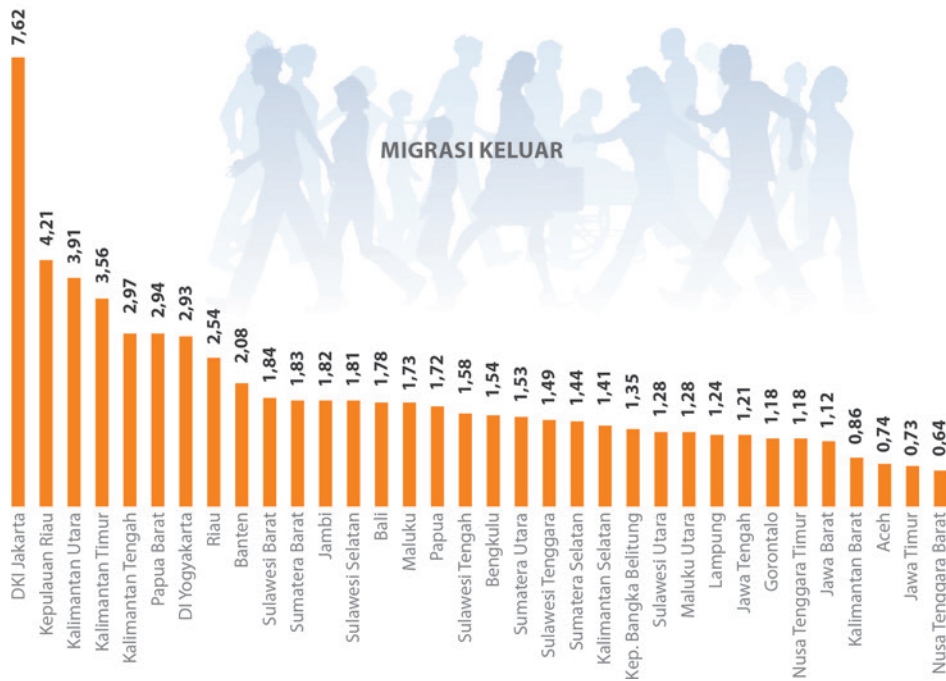
Sumber: Long Form SP2020

diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau di angka 4,75%, dan Provinsi Kalimantan Utara di angka 3,92%. Sementara migrasi keluar risen antarprovinsi tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 8,07%, Provinsi Kepulauan Riau (4,19%) dan Provinsi Kalimantan Utara (3,91%).

Data tentang pekerja migran risen menurut Sakernas 2020, menunjukkan bahwa 4% penduduk bekerja umur 15 tahun ke atas adalah pekerja migran risen. Empat persen dari pekerja migran risen adalah penduduk berumur 25-34 tahun.

ANGKA MIGRASI MASUK DAN MIGRASI KELUAR RISEN MENURUT PROVINSI





Grafik 2.44
Angka migrasi masuk dan migrasi keluar risen menurut provinsi
Hasil Long Form SP2020

Sumber: BPS, 2023

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat satu fenomena bahwa DKI Jakarta sudah tidak lagi menjadi tujuan utama migrasi, bahkan menjadi provinsi dengan migrasi keluar tertinggi. Selain itu, dari 10 Provinsi dengan migrasi masuk terbanyak, hanya 1 provinsi yang berada di Pulau Jawa. Sebanyak 36,2% pekerja migran risen tinggal di perdesaan, dan sebanyak 36,8% tinggal di perkotaan. Pekerja migran risen menurut status perkawinan menunjukkan bahwa sebanyak 69,4% berstatus kawin. Pola migrasi lain di Indonesia adalah migrasi desa-kota. Menurut data BPS (2021), saat ini penduduk yang tinggal di perkotaan adalah 57% dan diperkirakan bahwa pada tahun 2035 penduduk yang tinggal di perkotaan akan naik menjadi 66,6%. Pada tahun 2045 diperkirakan 70 % atau 220 jutapenduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan.

Long Form SP2020 mencatat migrasi internasional yang masuk ke Indonesia

atau keluar dari Indonesia pada periode tahun 2017–2022. Migrasi internasional didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dari negara satu ke negara lain untuk tinggal atau menetap di negara tujuan minimal 1 tahun atau kurang dari 1 tahun tetapi bermaksud untuk menetap. Berdasarkan hasil Long Form SP2020 pada periode 2017–2022 jumlah migran masuk internasional sebanyak 443,9 ribu orang, sedangkan jumlah migran keluar internasional sebanyak 591,4 ribu orang. Jumlah migran yang keluar lebih banyak 147,5 ribu orang yang berarti lebih banyak penduduk yang berpindah keluar dari Indonesia.

Angka migrasi internasional digunakan untuk mengetahui rata-rata tahunan jumlah penduduk yang berpindah negara tempat tinggal per 1.000 penduduk. Berdasarkan hasil Long Form SP2020, angka migrasi masuk internasional sebesar 0,32 atau dapat diartikan untuk setiap 100.000

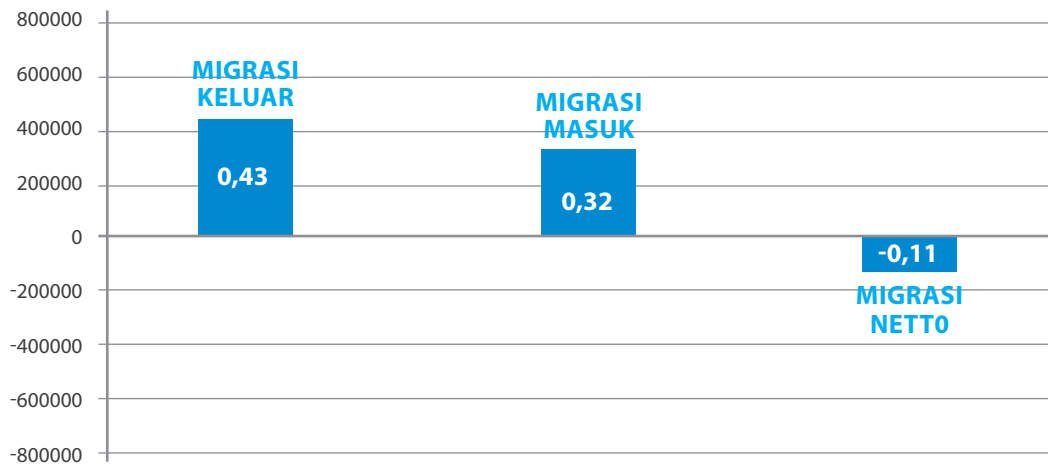
penduduk terdapat sekitar 32 orang yang berpindah tempat tinggal dari luar negeri ke Indonesia. Sedangkan angka migrasi keluar internasional adalah sebesar 0,43 yang berarti terdapat

sekitar 43 penduduk Indonesia yang berpindah tempat tinggal ke luar negeri per 100.000 penduduk. Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh angka migrasi neto internasional adalah sebesar -0,11.

**MIGRASI INTERNASIONAL MASUK, KELUAR DAN NETTO,
LONG FORM SP2020**



Grafik 2.45
Migrasi internasional masuk, keluar dan netto, Supas 2015



Sumber: Bappenas 2019 :13

2.4.3 Mobilitas Non Permanen

Data Long Form SP2020, menunjukkan bahwa migrasi internasional keluar lebih banyak dibandingkan migrasi internasional masuk. Artinya, migrasi internasional bersih (netto) adalah negatif (grafik 2.45). Jumlah migrasi internasional netto tercatat 147,5 ribu orang. Muhidin (2014) menyebutkan bahwa secara umum kesimpulan yang dapat diambil dari pola migrasi internal di Indonesia adalah sebagai berikut:

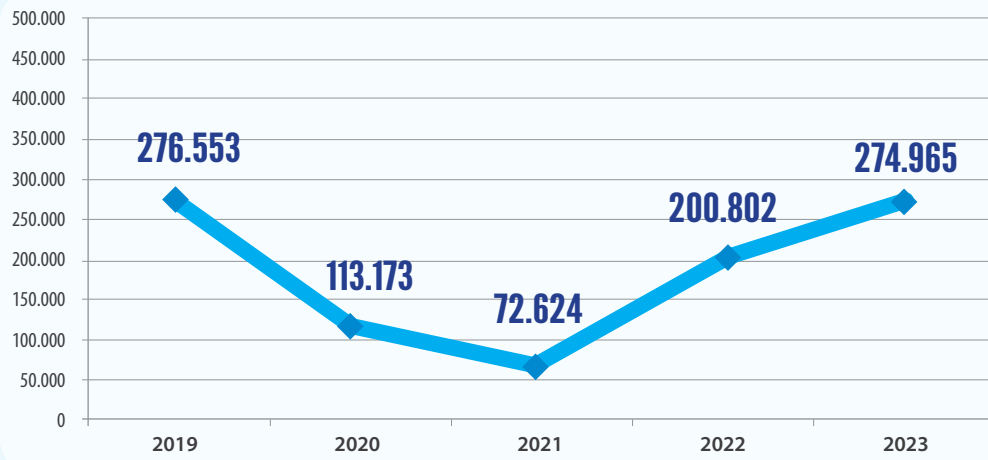
- Cenderung berpindah pada jarak yang lebih pendek (migrasi antardistrik) dari pada perpindahan jarak jauh. Mendukung fenomena migrasi sirkular.
- Lebih banyak migrasi antar daerah ke wilayah yang berdekatan (*adjacent*) yang menunjukkan fungsi jarak.

- Terjadi pergeseran dalam pola arah, sebelumnya lebih banyak ke luar Jawa sekarang menuju pulau Jawa.
- Mobilitas lebih banyak dipicu oleh faktor ekonomi misalnya pekerjaan dan infrastruktur, selain itu juga menjauhi daerah/provinsi yang sedang terjadi konflik politik atau kondisi sosial ekonomi yang tidak stabil serta daerah yang berisiko tinggi bencana.

Pada tahun 2021, tercatat ada sebanyak 72.624 penempatan Pekerja Migran Indonesia. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2022, mencapai 200.802 penempatan yang menunjukkan peningkatan sebesar 176% dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian di tahun 2023, jumlah penempatan peningkatan



PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 2019-2023



Grafik 2.46
Penempatan
pekerja migran
Indonesia
2019-2023

Sumber: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 2024

37% menjadi sebanyak 274.965 penempatan. Sebaliknya di dalam negeri terjadi pola migrasi ulang alik. Migrasi ulang alik merujuk padapergerakan penduduk antara dua lokasi atau wilayah yang berbeda secara berkala atau berulang-ulang. Ini bisa berarti individu atau kelompok yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian kembali ke tempat asalnya. Pada tahun 2019, ada 1,25 juta pekerja komuter di wilayah Jabodetabek yang aktivitas utamanya berada di Jakarta.

Komuter perempuan memiliki tingkat penggunaan transportasi umum yang lebih tinggi, seperti bus dan KRL, Namun, meningkatnya pendapatan berpengaruh positif terhadap pemilihan mobil bagi mereka perjalanan pulang pergi setiap hari, sedangkan pendapatan yang lebih rendah mendorong para komuter untuk memiliki preferensi yang lebih tinggi mengendarai sepeda motor.

Tingginya biaya penggunaan kendaraan pribadi (baik mobil maupun sepeda

motor) ditambah dengan harga tiket yang terjangkau serta tingkat pelayanan angkutan umum yang lebih baik dapat menurunkan tingkat penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan daya tarik penggunaan angkutan umum. Perluasan jaringan transportasi umum yang berorientasi transit dinilai akan mendorong lebih banyak komuter memilih angkutan umum dibandingkan kendaraan pribadi. Pemerintah perlu memastikan pembangunan yang seimbang antara perdesaan dan perkotaan. Pembangunan yang seimbang antara perdesaan dan perkotaan diperlukan agar urbanisasi dapat dikendalikan. Hal ini penting, agar tidak terjadi kepadatan penduduk di daerah perkotaan yang mengakibatkan daya dukung lingkungan di kota tersebut menjadi menurun. Selain itu, menjaga penduduk tetap di desa merupakan hal penting karena selama ini desa merupakan sumber pangan bagi penduduk Indonesia. Terdapat empat strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong pembangunan yang seimbang antara

perdesaan dan perkotaan. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas SDM, kelembagaan, dan kolaborasi para pihak dalam pengembangan ekonomi lokal di kawasan perdesaan. Hal ini penting agar kegiatan perekonomian di desa dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Kedua, pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana pelayanan dasar, ekonomi (layanan keuangan), dan konektivitas di kawasan perdesaan.

Ketiga, pemerintah perlu membantu mengembangkan komoditas unggulan lokal dan mendorong industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan. Keempat, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengembangkan komoditas unggulan dan teknologi pertanian di perdesaan. Kedua strategi ini sejalan dengan strategi pertama yaitu pengembangan ekonomi lokal dan diperlukan agar penduduk usia kerja tidak perlu melakukan urbanisasi untuk mendapatkan pekerjaan.

2.4.4 Pekerjaan

Migrasi dan pekerjaan adalah dua aspek yang sangat penting dalam kehidupan penduduk. Banyak migrasi yang terjadi karena adanya peluang pekerjaan di tempat yang baru. Orang bisa saja meninggalkan daerah asal mereka untuk mencari pekerjaan yang lebih baik di kota atau negara lain. Selain itu, beberapa orang memilih untuk melakukan migrasi sementara atau sirkuler, di mana mereka pindah ke tempat-tempat dengan musim atau peluang pekerjaan yang berbeda.

a. Jumlah Angkatan Kerja

Penduduk dibedakan menurut angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja/menerima pendapatan pada lapangan usaha tertentu. Bukan angkatan kerja adalah penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Persentase orang yang bekerja pada tahun 2019 sebesar 94,36%, tahun 2021 turun menjadi 94,04% dan tahun 2022 naik di

2019 Pendidikan Tertinggi yang Ditematkan	Angkatan Kerja (AK)				Bukan Angkatan Kerja (BAK)			
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah AK	Bekerja/AK (%)	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah BAK
Tidak/belum pernah sekolah	3.733.536	40.771	3.884.307	98,92	-	1.641.310	959.501	2.600.811
Tidak/belum tamat SD	15.949.878	347.712	16.297.590	97,87	105.015	6.548.419	2.358.498	9.011.932
SD	31.594.947	865.778	32.460.725	97,33	1.691.460	10.846.631	1.898.291	14.436.382
SLTP	22.978.481	1.137.195	24.116.037	95,28	10.010.878	8.385.122	967.784	19.363.784
SLTA Umum/SMU	23.509.461	2.008.035	25.517.498	92,13	3.164.421	7.649.757	1.179.829	11.994.007
SLTA Kejuruan/SMK	15.046.419	1.739.625	16.786.044	89,64	801.824	3.318.900	546.930	4.667.664
Akademi/Diploma	3.460.919	218.954	3.679.873	94,05	46.578	925.679	147.908	1.147.163
Universitas	12.481.289	746.354	13.227.623	94,36	123.171	1.606.886	373.529	2.103.586
Tak terjawab	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	128.755.271	7.104.424	135.859.695	94,77	15.943.345	40.949.704	8.432.270	65.325.319

Sumber: Sakernas, 2021



2021

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja (AK)				Bukan Angkatan Kerja (BAK)			
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah AK	Bekerja/AK (%)	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah BAK
Tidak/belum pernah sekolah	1,444.717	23.905	1.468.622	98,37	-	622.024	399.240	1.021.264
Tidak/belum tamat SD	15.059.433	431.329	15.490.762	97,22	71.261	6.333.228	2.695.277	0.099.764
SD	32.884.043	1.393.492	34.277.535	95,93	1.673.008	10.696.218	2.542.064	14.911.290
SLTP	23.276.159	1.604.448	24.880.607	93,55	8.829.833	7.937.228	1.709.183	18.476.242
SLTA Umum/SMU	24.723.536	2.472.859	27.198.395	90,91	3.109.591	8.129.847	2.126.827	13.366.265
SLTA Kejuruan/SMK	16.858.755	2.111.338	18.970.093	88,87	805.644	4.053.425	1.076.798	5.935.867
Akademi/Diploma	3.463.379	216.024	3.679.403	94,13	35.569	893.935	195.675	1.125.179
Universitas	13.340.501	848.657	14.189.158	94,04	119.538	1.912.042	588.275	2.619.853
Tak terjawab	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	131.050.523	9.102.052	140.152.575	93,51	14.644.442	40.577.943	11.333.339	66.555.724

Sumber: Sakernas, 2021

Tabel 2.18
Persentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah ke atas



2022

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja					
	Bekerja	Pernah Bekerja	Tidak Pernah Bekerja	Jumlah	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
SD	52,494,615	1,153,420	799,064	1,952,484	54,447,099	96,41
SMP/Sederajat	23,724,640	682,909	817,898	1,500,807	25,225,447	94,05
SMA/Sederajat	42,405,871	1,570,114	2,569,551	4,139,665	46,545,536	91,11
Perguruan tinggi	16,671,587	323,634	509,341	832,975	17,504,562	95,24
Jumlah/Total	135,296,713	3,730,077	4,695,854	8,425,931	143,722,644	94,14

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bukan Angkatan Kerja (BAK)					
	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah BAK	Jumlah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
SD	1,796,996	17,945,887	4,861,005	24,603,888	79,050,987	68,88
SMP/Sederajat	10,038,506	8,042,353	1,088,001	19,168,860	44,394,307	56,82
SMA/Sederajat	3,687,177	12,192,345	2,275,657	18,155,179	64,700,715	71,94
Perguruan tinggi	86,860	3,069,380	613,572	3,769,812	21,274,374	82,28
Jumlah/Total	15,609,539	41,249,965	8,838,235	65,697,739	209,420,383	68,63

Sumber: BPS, 2023



Tabel 2.19
Penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan jenis kegiatan selama seminggu yang Lalu

angka 94,14% yang disebabkan angka pengangguran meningkat dari 7,1 juta menjadi 9,1 juta orang. Pandemi Covid-19 telah menambah angka pengangguran sebanyak 28,2%.

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Selama masa pandemi Covid-19 diperkirakan banyak terjadi pengu-

rangan angkatan kerja serta pengurangan jam kerja di kantor. Selama 2018 hingga 2022, tingkat partisipasi angkatan kerja Indonesia memperlihatkan adanya penurunan dari 69,21% ke 68,08% di tahun 2021. Ini berarti terjadi penurunan 1,13% yang disebabkan pandemi Covid-19. Tingkat partisipasi angkatan kerja

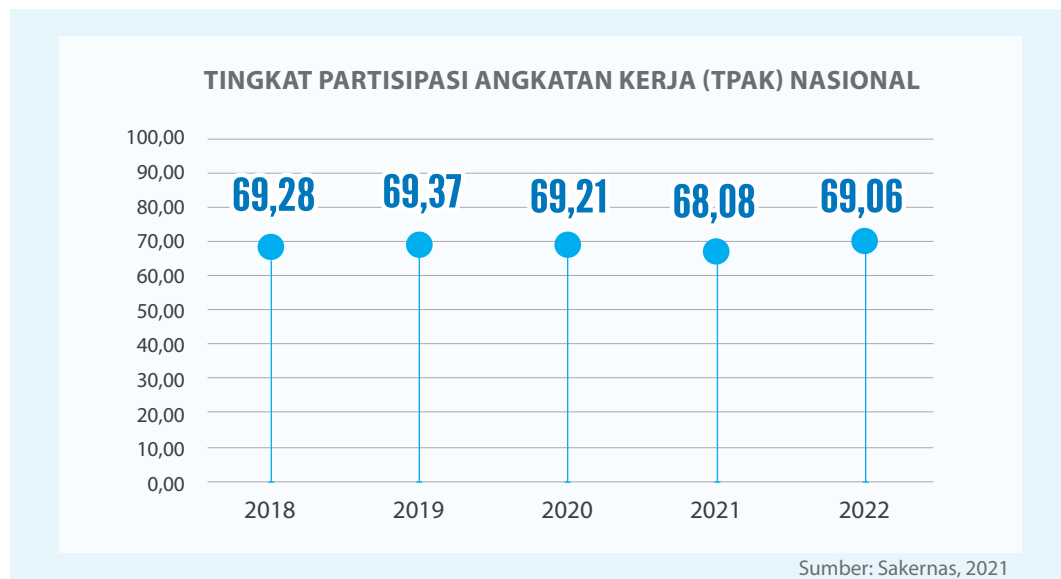
akan sejalan dengan tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin meningkat partisipasi angkatan kerjanya namun tidak memengaruhi angka pasokan tenaga kerja. Kenaikan persentase TPAK menurut jenjang pendidikan akan mengindikasikan apakah terjadi peningkatan angkatan kerja pada level pendidikan tertentu. Misalnya perbandingan kenaikan TPAK tahun 2021 (68,9) ke 2022 (72,5) memperlihatkan penambahan angkatan kerja pada jenjang pen-

didikan SD sebesar 3,6 persen.

Persentase TPAK tahun 2021 (68,08) naik pada tahun 2022 sebesar 0,98 persen (69,06). Pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja pada level universitas. Pada tahun 2019 angka TPAK universitas sebesar 88,4 persen turun hingga 82,8 persen pada tahun 2022. Terjadi penurunan TPAK di level universitas pada kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2022 sebesar 5,6 persen.



Grafik 2.47
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja
(TPAK) Nasional,
Indonesia
2018-2022



Tabel 2.20
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja
(TPAK)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tidak/belum pernah sekolah	58.3	60.4	60.3	60.7	63.9
Tidak/belum tamat SD	68.5	68.1	66.6	64.2	70.2
SD	70.3	70.6	70.4	68.9	72.5
SLTP	56.8	56.6	56.4	57.7	57.5
SLTA Umum/SMU	71.9	70.7	71.0	68.1	67.3
SLTA Kejuruan/SMK	79.5	79.1	78.8	77.1	75.4
Akademi/Diploma	77.3	78.4	78.8	75.5	75.6
Universitas	85.8	88.4	87.6	84.0	82.8
Total	69.28	69.37	69.21	68.08	69.06

Sumber: Sakernas, 2021



c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Kondisi pemberdayaan perempuan di sektor ketenagakerjaan masih menghadapi beberapa tantangan klasik. *Pertama*, terkait partisipasi perempuan di dunia kerja. Data BPS pada Februari 2022 menunjukkan TPAK perempuan masih berada jauh di bawah laki-laki, dimana TPAK laki-laki sebesar 83,6 persen dan perempuan hanya sebesar 54,2 persen. Kondisi tersebut menyebabkan hanya 40 persen perempuan yang berpartisipasi dari 144 juta angkatan kerja. Padahal setengah dari populasi Indonesia saat ini adalah perempuan.

Kedua, adanya ketimpangan dalam hal pendidikan dan kompetensi yang sebenarnya merupakan modal dasar untuk berdaya, karena semakin tinggi pendidikan perempuan maka akan semakin besar proporsinya yang masuk ke pasar kerja.

Data menunjukkan bahwa persentase angkatan kerja perempuan yang berpendidikan rendah lebih besar dibandingkan laki-laki serta masih ada kesenjangan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan. Diskriminasi terhadap TPAK perempuan juga masih terjadi dari tahun ke tahun dan ditemukan pada semua tingkatan latar belakang pendidikan, kelompok umur hingga jenis pekerjaan.

Tingkat pengangguran perempuan selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki, namun mayoritas perempuan bekerja di sektor informal (65%). Angka TPAK perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki yang hanya 56%. Bekerja di sektor informal tentu memiliki dampak kepada upah dan perlindungan sosial yang lebih rendah, sehingga banyak pekerja perempuan berada dalam posisi yang lebih rentan.



Grafik. 2.48
Tingkat Partisipasi
Angkatan
Kerja (TPAK)
perempuan



Pada tahun 2020, menurut laporan *United Nations Development Programme* (UNDP), Indonesia memiliki skor indeks ketimpangan gender di peringkat 121 dari 162 negara. Indonesia merupakan peringkat terbawah dibandingkan negara-negara G20 lainnya. Indonesia bisa meningkatkan produk domestik bruto sebesar 9 persen pada tahun 2025 apabila tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat, lebih banyak perempuan bekerja penuh waktu dan lebih banyak perempuan bekerja di sektor dengan produktivitas tinggi seperti manufaktur.

Puncak bonus demografi sedang dialami Indonesia, dimana jumlah perempuan usia kerja sangat besar dan memiliki potensi yang sangat menjanjikan bila dioptimalkan bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bangsa. Peningkatan kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan akan meningkatkan kontribusi perempuan yang dapat

memberikan dampak lebih besar bagi kesejahteraan dan pencapaian pembangunan.

TPAK perempuan pada tahun 2021 yaitu sebesar 53,34 persen naik sedikit dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 53,13 persen. Menurut Menteri Ketenagakerjaan selain naiknya cenderung sedikit, TPAK perempuan Indonesia masih berada di bawah Vietnam dan Thailand.

Data tahun 2014–2019 memperlihatkan bahwa pekerja migran Indonesia lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Artinya, isu tentang feminisasi pekerja migran masih tetap berlanjut. Pergeseran juga terjadi pada jenis pekerjaan. Pada periode 2014–2016, lebih dari 50 persen pekerja migran Indonesia bekerja di sektor formal, tetapi pada tahun 2018 justru sebaliknya, sebagian besar pekerja migran bekerja di sektor informal. Hal ini diikuti dengan meningkatnya pekerja migran yang berpendidikan



Tabel 2.21
Perkembangan
remitansi
2011-2018

PERKEMBANGAN REMITANSI 2011-2018		
No	TAHUN	REMITANSI (dalam US\$ miliar)
1	2011	6,73
2	2012	6,9,9
3	2013	7,40
4	2014	8,34
5	2015	9,42
6	2016	8,85
7	2017	8,76
8	2018	10,97

Data ditarik pada 7 Februari 2019

Sumber : <http://portal.bnp2tki.go.id/read/14133/Data->



SD pada tahun 2014, yaitu 32,3 persen menjadi 34,3 persen pada tahun 2018. Untuk periode Januari-Maret 2019, jumlah pekerja migran yang berpendidikan SD adalah 34,8 persen.

Perubahan ini memprihatinkan, karena usaha untuk menggeser pekerjaan pekerja migran dari informal menjadi formal, dan dari pendidikan rendah ke tinggi, masih belum menunjukkan hasilnya. Selain itu berbagai kasus terhadap perlindungan migran yang masih muncul menjadi agenda besar Indonesia di masa yang akan datang. Pendidikan rendah dan juga pekerjaan di sektor informal merupakan salah satu penyebab terjadinya berbagai permasalahan di negara tujuan. Pada waktu yang bersamaan permasalahan di dalam negeri juga masih belum tuntas.

Data di BNP2TKI menyebutkan bahwa pada tahun 2018, 3 besar pengaduan yang masuk adalah tidak memiliki dokumen (9%); ingin dipulangkan (7%) dan gaji tidak dibayar (5%). Kepemilikan dokumen merupakan indikasi dari kasus *undocumented migration* yang merupakan kasus lama yang bersifat struktural di Indonesia. Demikian juga masalah gaji yang tidak dibayar merupakan masalah yang selalu muncul sehingga harus ada terobosan kebijakan yang mampu mengatasi masalah tersebut.

Pekerja migran Indonesia memiliki peran yang sangat penting secara ekonomi, makro maupun mikro.

Pada sisi makro, pengiriman remitansi merupakan potensi besar untuk mendorong perekonomian daerah. Jumlah remitansi cenderung meningkat meskipun jumlah pekerja migran mengalami penurunan. Sebagai contoh selama periode 2014-2018, jumlah remitansi meningkat sebesar 2,63 miliar US dollar atau 31,5 persen selama 4 tahun atau rata-rata 7,9 persen per tahun.

d. *Decent Work*

Dalam peningkatan kualitas manusia, terkait isu ketenagakerjaan ada 3 (tiga) hal yang menjadi perhatian. Pertama, kesempatan kerja, mencakup *employment to population*, *low payment rate* yang menggambarkan tingkat kualitas pendapatan keluarga, angka setengah pengangguran sebagai gambaran dari produktivitas tenaga kerja. Disamping itu, isu terkait ketenagakerjaan terkait juga dengan Jaminan Sosial dan Sistem Dialog Sosial.

Employment to Population di Indonesia memperlihatkan kenaikan dari 62,97% pada tahun 2020 menjadi 63,4% pada tahun 2021. Hal ini berarti terjadi kenaikan kesempatan kerja sebesar 0,43%. Kesempatan kerja ini meningkat baik untuk laki-laki maupun perempuan. Untuk perempuan, kenaikannya adalah dari 49,7% pada tahun 2020 menjadi 50,08% pada tahun 2021. Sedangkan untuk laki-laki, meningkat dari 76,26% pada tahun 2020 menjadi 76,73% pada tahun 2021.

2.4.5 Infrastruktur

- **Indeks Infrastruktur Jalan dan Transportasi**

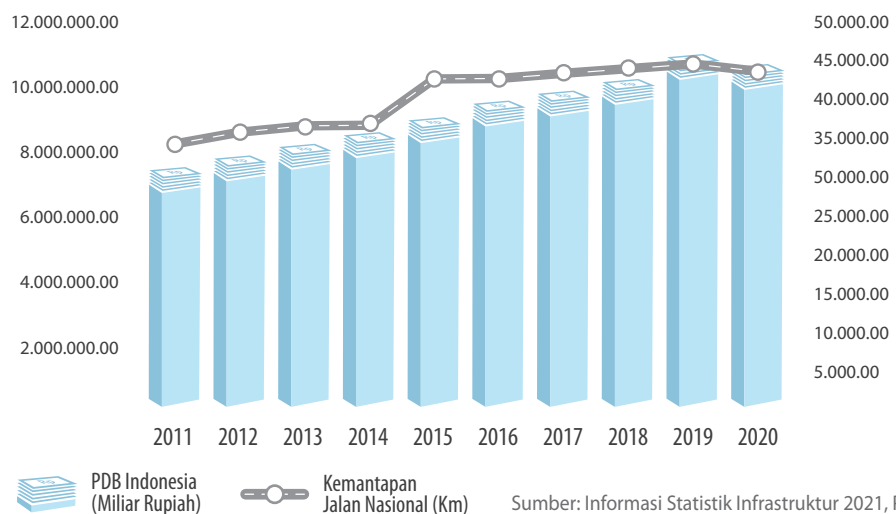
Infrastruktur jalan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, persebaran dan kepadatan penduduk. Infrastruktur jalan akan memberikan dampak positif pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan mobilitas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Infrastruktur jalan juga meningkatkan akses sumber daya ekonomi dan pendapatan serta berperan dalam menyeimbangkan persebaran penduduk.

Infrastruktur jalan dibagi menjadi tiga yaitu jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Kementerian PUPR telah menerbitkan publikasi berjudul Informasi Statistik Infrastruktur 2022. Kemantapan jalan nasional pada tahun 2020 sebesar

91,27% dan pada tahun 2021 sebesar 91,81%. Total panjang jalan pada tahun 2020 sebesar 46.963,96 km dengan total kemantapan sebesar 42.863,25 km, sementara total panjang jalan pada tahun 2021 sebesar 46.964,78 km dengan total kemantapan sebesar 43.116,70 km. Kemantapan jalan nasional yang tertinggi pada tahun 2020 berada di DI Yogyakarta (99,71%) dan pada tahun 2021 berada di Kepulauan Bangka Belitung (99,44%), sedangkan jalan nasional yang terendah pada tahun 2020 dan 2021 berada di Provinsi Papua Barat (69,32% dan 75,55%).

Kemantapan jalan juga berkorelasi dengan PDB. Selama kurun waktu 2011-2020, peningkatan kemantapan jalan nasional berdampak pada peningkatan PDB, seperti yang diperlihatkan pada grafik 2.49.

KEMANTAPAN JALAN NASIONAL



Grafik 2.49
Kemantapan jalan nasional tahun 2020

Sumber: Informasi Statistik Infrastruktur 2021, PUPR, 2021



KEMANTAPAN JALAN NASIONAL TAHUN 2020-2021

Provinsi	2020			2021		
	Total Panjang Jalan (km)	Panjang Mantap Jalan (km)	Kemantapan Jalan (%)	Total Panjang Jalan (km)	Panjang Mantap Jalan (km)	Kemantapan Jalan (%)
Aceh	2102.065	2029.83	96.56	2102.07	2064.02	98.19
Sumatera Utara	2632.223	2532.62	96.21	2632.22	2507.72	95.27
Sumatera Barat	1448.81	1308.48	90.31	1449.62	1339.59	92.41
Riau	1336.614	1132.30	84.71	1336.61	1159.51	86.75
Jambi	1317.929	1225.31	92.97	1317.93	1231.61	93.45
Sumatera Selatan	1600.162	1413.48	88.33	1600.16	1492.15	93.25
Bengkulu	792.607	766.51	96.70	792.61	757.74	95.60
Lampung	1292.212	1234.05	95.49	1292.21	1213.26	93.89
Kep. Bangka Belitung	600.398	596.59	99.36	600.40	597.04	99.44
Kepulauan Riau	586.825	572.08	97.48	586.83	577.32	98.38
DKI Jakarta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jawa Barat	1789.201	1694.35	94.69	1789.20	1723.54	96.33
Jawa Tengah	1518.088	1486.41	97.91	1518.09	1398.01	92.09
DI Yogyakarta	247.913	247.20	99.71	247.91	245.51	99.03
Jawa Timur	2361.227	2214.15	93.77	2361.23	2185.79	92.57
Banten	564.885	522.24	92.45	564.89	524.61	92.87
Bali	629.3935	618.55	98.27	629.39	621.59	98.76
Nusa Tenggara Barat	934.553	922.57	98.71	934.55	917.92	98.22
Nusa Tenggara Timur	1857.911	1757.93	94.61	1857.91	1759.25	94.69
Kalimantan Barat	2117.572	1916.70	90.51	2117.57	1987.34	93.85
Kalimantan Tengah	2002.084	1646.27	82.22	2002.08	1647.91	82.31
Kalimantan Selatan	1204.297	1147.40	95.27	1204.30	1151.67	95.63
Kalimantan Timur	1710.896	1302.42	76.12	1710.90	1409.95	82.41
Kalimantan Utara	585.163	497.11	84.95	585.16	503.24	86.00
Sulawesi Utara	1663.917	1593.91	95.79	1663.92	1558.26	93.65
Sulawesi Tengah	2373.4	2320.44	97.76	2373.40	2335.19	98.39
Sulawesi Selatan	1745.917	1655.77	94.83	1745.92	1658.97	95.02
Sulawesi Tenggara	1497.814	1366.42	91.22	1497.81	1327.51	88.63
Gorontalo	748.598	732.77	97.88	748.60	710.72	94.94
Sulawesi Barat	763.169	687.78	90.12	763.17	687.77	90.12
Maluku	1771.668	1607.21	90.71	1771.67	1632.24	92.13
Maluku Utara	1203.342	1124.07	93.41	1203.34	1111.53	92.37
Papua Barat	1326.376	919.56	69.32	1326.38	1002.08	75.55
Papua	2636.733	2070.60	78.52	2636.73	2076.16	78.74
Indonesia	46963.9625	42863.24	91.26	46964.78	43116.70	91.81

Sumber: KemenPUPR, 2022

Tabel 2.22
Kemantapan jalan nasional tahun
2020-2021



Infrastruktur jalan juga bisa dilihat dari perkembangan jalan tol. Berdasarkan data Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Ditjen Bina Marga (2023), ruas tol yang beroperasi di Indonesia sebanyak 66 ruas, dengan jumlah

panjang tol operasi 2.569 km. Tol terpanjang terletak di Tol Terbanggi Besar - Pematang Panjang - Kayu Agung sepanjang 189,4 km. Tol layang terpanjang terletak di tol Jakarta Cikampek *Elevated* (MBZ) sepanjang 38 km.

2.4.6 Perkembangan Status Pembangunan Desa

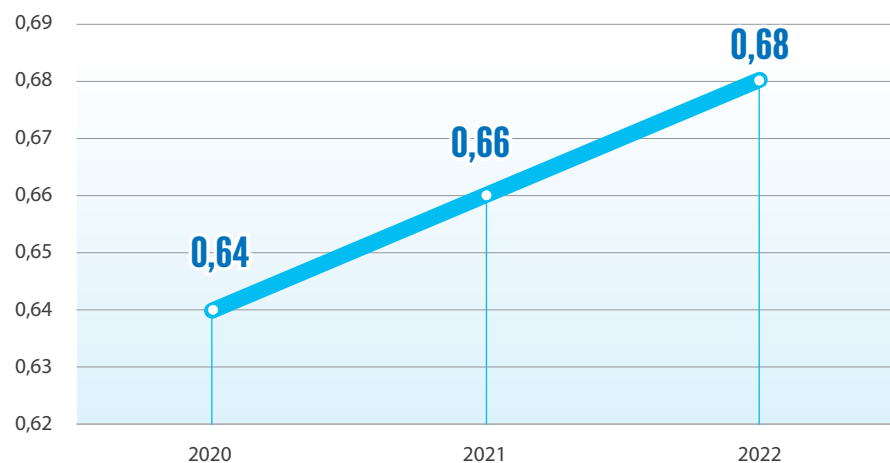
Perkembangan status pembangunan desa dapat dilihat dari peringkat nilai rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM) yang secara rutin dikeluarkan oleh Kementerian Desa PDTT. Selama tiga tahun terakhir, IDM di Indonesia secara nasional cenderung meningkat dari 0,64 pada tahun 2020 menjadi 0,66 pada tahun 2021, dan meningkat lagi 0,68 pada tahun 2022.

Jika dilihat menurut provinsi nilai rata-rata IDM selama kurun waktu 2020-2022 cenderung meningkat, kecuali Provinsi Papua. Nilai rata-rata IDM di Papua tahun 2020, 2021, dan 2022 berturut-turut adalah 0,46, 0,46, dan 0,47. Ini

menunjukkan IDM di desa-desa di Papua menurun di tahun 2021. Provinsi Bali merupakan provinsi yang memiliki rata-rata nilai IDM tertinggi dan Papua merupakan provinsi dengan rata-rata nilai IDM terendah. Dengan besarnya arus urbanisasi, apakah pembangunan desa akan dapat mengimbangi migrasi penduduk dari desa ke kota? Isu ini akan menjadi isu persebaran penduduk yang diperkirakan akan berlangsung terus sampai tahun 2045.

Angkatan kerja, pembangunan ekonomi menurut wilayah, sarana transportasi dan daya dukung lingkungan saling terkait dalam pergerakan penduduk.

TREN INDEKS DESA MEMBANGUN 2020-2022



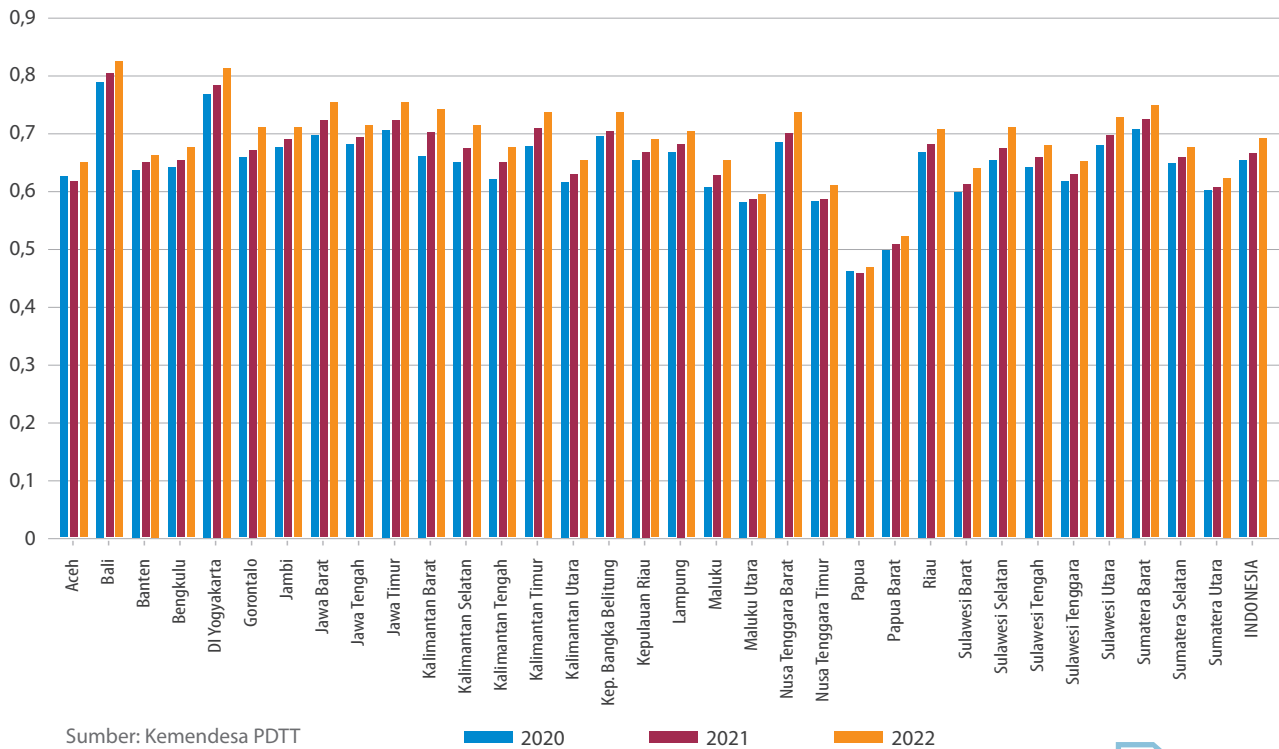
Sumber: Kemendesa PDTT



Grafik 2.50
Tren indeks desa membangun 2020-2022



DESA MEMBANGUN TAHUN 2020-2022 MENURUT PROVINSI



Sumber: Kemendes PDTT

2020 2021 2022



Grafik 2.51
Desa membangun
2020-2022 menurut
provinsi

Prinsipnya adalah bahwa perpindahan terjadi karena adanya keinginan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Mereka dengan kemampuan lebih baik tentunya akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari perpindahan penduduk ini. Pusat-pusat perkembangan ekonomi akan lebih banyak menjadi tujuan migrasi. Perpindahan penduduk dapat menjadi sumber daya pembangunan setempat namun juga akan menjadi beban, karena berdampak pada sumber daya alam dan ekonomi yang ada.

Persebaran penduduk seperti saat ini tentunya akan memperburuk kualitas penduduk, karena akan menambah beban pada kemampuan daya dukung alam dan lingkungan. Pulau Jawa masih

menjadi sumber daya ekonomi yang lebih besar dari daerah lain. Untuk mengendalikan persebaran penduduk agar terjadi keseimbangan yang optimal, maka harus menciptakan persebaran sumber daya ekonomi. Kemampuan penduduk dan kesesuaiannya dengan sumber penghidupan yang ada di tempat lain juga diperlukan, agar migrasi menjadi persebaran penduduk yang seimbang dengan pembangunan ekonomi. Migrasi antarwilayah dan migrasi internasional diperkirakan meningkat. Pada tahun 2045, Jawa - Bali tetap merupakan wilayah penduduk terpadat (1312 jiwa per km²) serta Maluku - Papua dan Kalimantan wilayah dengan kepadatan penduduk rendah (9 jiwa dan 38 jiwa per km²).

Pemerintah telah menerbitkan kebijakan terkait dengan transmigrasi yang lebih sesuai dengan dinamika kependudukan saat ini. Untuk menarik lebih banyak pemuda diharapkan transmigrasi tidak hanya diberikan fasilitasi berupa lahan dan perumahan, namun juga diberikan peluang peningkatan kreativitas pada usaha-usaha kecil menengah dengan dukungan pemasaran berbasis teknologi informasi. Transpolitan merupakan salah satu upaya pemerataan penduduk secara lebih kondusif.

Selain kebijakan mengenai transmigrasi, pemerintah juga membuat kebijakan dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi khusus (KEK) di luar Pulau Jawa. Selain bertujuan untuk meningkatkan ekonomi daerah setempat, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan menjadi magnet ekonomi (*economic vibrant*) bagi penduduk luar daerah untuk bekerja.

2.4.7 Bencana

- **Indeks Kebencanaan**

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2023 mempublikasikan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2022. Indeks Risiko Bencana Indonesia terdiri dari sembilan ancaman, yaitu banjir, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan dan cuaca ekstrim. Masing-masing provinsi memiliki potensi bencana yang berbeda-beda, maka perlu dilakukan mitigasi bencana sesuai dengan

karakteristik daerah. Tingkat risiko bencana Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 yaitu tinggi, sedang dan rendah seperti pada tabel 2.23 berikut ini.

Peta risiko bencana tingkat provinsi tahun 2022 menunjukkan sebaran risiko bencana di Indonesia. Sebagian provinsi di Pulau Sumatera juga berisiko tinggi bencana yaitu Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Sebagian provinsi di Pulau Kalimantan, seperti Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur memiliki risiko bencana tinggi.

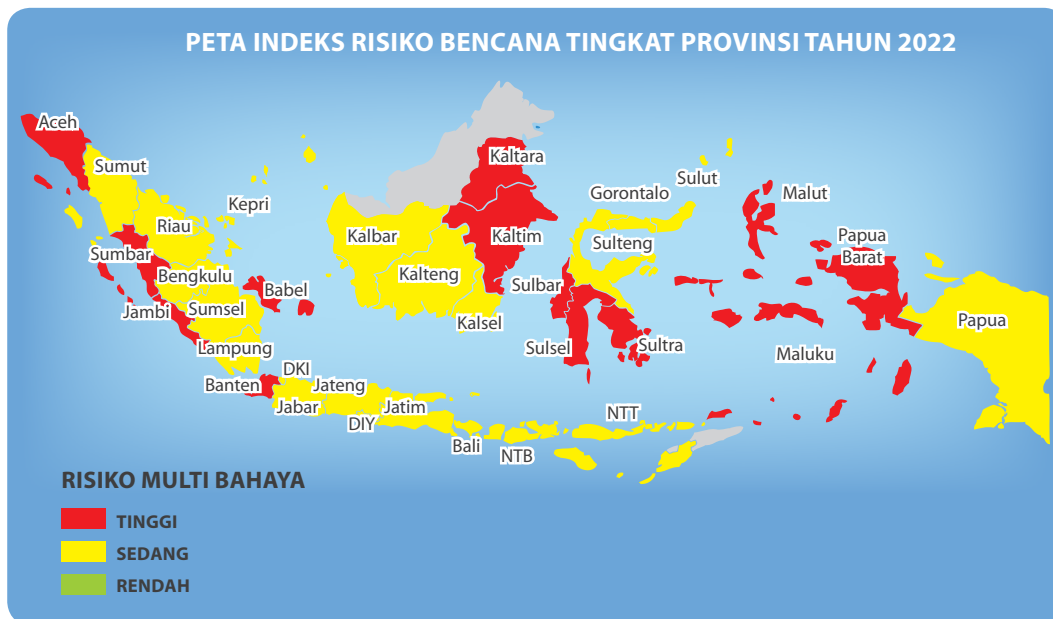
INDEKS RISIKO BENCANA 2015-2021

TOTAL SKORING	KLARIFIKASI TINGKAT RISIKO PROVINSI	WARNA (DI PETA)
$S_{min} - (S_{min} + X)$	Tingkat Risiko Rendah	Hijau
$(S_{min} + X) - (S_{min} + 2X)$	Tingkat Risiko Sedang	Kuning
$(S_{min} + 2X) - S_{maks}$	Tingkat Risiko Tinggi	Merah



Tabel 2.23
Indeks risiko bencana 2015-2021

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2021



Grafik 2.52
Peta indeks risiko bencana tingkat provinsi tahun 2022

Sumber: BNPB, 2023

Di Pulau Sulawesi, risiko tinggi bencana berada di Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara, serta Provinsi Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara juga memiliki risiko tinggi bencana. Provinsi-provinsi Pulau Jawa pada umumnya memiliki risiko bencana sedang kecuali Banten yang memiliki risiko bencana tinggi. Provinsi Bali, Nusa Tenggara dan Papua berada pada risiko bencana sedang.

Bencana juga memberikan risiko untuk terjadinya migrasi yang berarti juga penyiapan *resettlement* dengan semua kebutuhannya. Selain itu, bencana juga memberikan risiko kenaikan angka kematian. Di daerah yang sering mengalami bencana, ada kecenderungan bahwa perempuan/WUS akan memerlukan kontrasepsi.

JUMLAH KEJADIAN BENCANA 2015-2021

JENIS KEJADIAN	JUMLAH KEJADIAN						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Banjir	531	825	980	883	790	1.518	650
Gelombang pasang	7	22	11	53	18	44	21
Kekeringan	7	NA	19	130	123	26	3
Kebakaran hutan dan lahan	46	178	96	536	757	618	162
Angin ribut	571	663	11	1.137	1.390	1.484	490
Tanah longsor	502	599	850	642	726	1.152	368



Tabel 2.24
Jumlah kejadian bencana 2015-2021

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2021



INDEKS RISIKO BENCANA PROVINSI TAHUN 2022

NO	PROVINSI	IRBI 2021	IRBI 2022	STATUS	CAPAIAN
1	Aceh	149.99	19.10	▼	TURUN
2	Sumatera Utara	143.83	142.51	▼	TURUN
3	Sumatera Barat	147.36	144.39	▼	TURUN
4	Riau	142.41	141.26	▼	TURUN
5	Jambi	135.32	133.49	▼	TURUN
6	Sumatera Selatan	137.31	132.99	▼	TURUN
7	Bengkulu	157.14	155.35	▼	TURUN
8	Lampung	145.42	142.55	▼	TURUN
9	Kepulauan Bangka Belitung	160.98	158.52	▼	TURUN
10	Kepulauan Riau	114.71	110.93	▼	TURUN
11	DKI Jakarta	60.43	62.58	▲	NAIK
12	Jawa Barat	134.94	131.62	▼	TURUN
13	Jawa Tengah	125.73	115.38	▼	TURUN
14	DI Yogyakarta	126.34	119.56	▼	TURUN
15	Jawa Timur	125.86	121.70	▼	TURUN
16	Banten	149.08	144.51	▼	TURUN
17	Bali	124.19	123.98	▼	TURUN
18	Nusa Tenggara Barat	122.33	119.83	▼	TURUN
19	Nusa Tenggara Timur	142.52	139.23	▼	TURUN
20	Kalimantan Barat	138.69	136.72	▼	TURUN
21	Kalimantan Tengah	130.75	123.56	▼	TURUN
22	Kalimantan Selatan	141.66	128.81	▼	TURUN
23	Kalimantan Timur	153.28	146.67	▼	TURUN
24	Kalimantan Utara	157.03	157.47	▲	NAIK
25	Sulawesi Utara	133.29	129.62	▼	TURUN
26	Sulawesi Tengah	146.07	143.44	▼	TURUN
27	Sulawesi Selatan	154.87	150.07	▼	TURUN
28	Sulawesi Tenggara	157.90	155.79	▼	TURUN
29	Gorontalo	123.06	120.61	▼	TURUN
30	Sulawesi Barat	164.85	165.23	▲	NAIK
31	Maluku	160.84	162.47	▲	NAIK
32	Maluku Utara	146.63	149.22	▲	NAIK
33	Papua Barat	146.46	146.77	▲	NAIK
34	Papua	122.38	122.15	▼	TURUN



Tabel 2.25
Tabel indeks risiko
bencana provinsi
tahun 2022.

Sumber: BNPB, 2023



Mereka mengalami beban ganda, karena pekerjaan domestik sehari-hari akan menjadi lebih berat karena adanya bencana, baik itu banjir, kekeringan ataupun bentuk bencana lainnya. Pada daerah yang mengalami kekeringan, maka tugas perempuan akan bertambah karena mereka harus mencari air dan ikut mencari nafkah. Begitu juga pada daerah banjir, karena sumber daya alam yang memberikan dukungan untuk kehidupan sehari-hari semakin berkurang.

Meningkatnya bencana juga disebabkan karena perubahan iklim yang semakin nyata dampaknya. Perubahan iklim menyebabkan meningkatnya bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, angin ribut/puting

beliung dan kebakaran hutan dan lahan. Jumlah bencana semakin besar sehingga perubahan iklim dan dampaknya harus diperhitungkan.

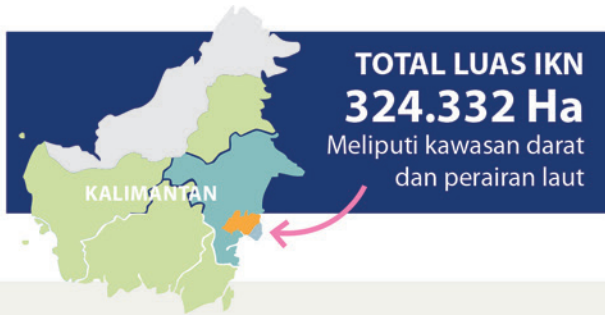
Berdasarkan publikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2023, nilai indeks risiko di provinsi merupakan rata-rata dari nilai indeks risiko di kabupaten/kota pada provinsi tersebut. Nilai IRBI paling tinggi berada di Provinsi Sulawesi Barat (165,23) dan paling rendah berada di Provinsi DKI Jakarta (62,58). Berdasarkan tabel 2.25 Indeks Risiko Bencana Provinsi tahun 2022, terdapat beberapa provinsi yang mengalami kenaikan status risiko bencana, yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat.

2.4.8 Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

Pemerintah Indonesia telah memulai proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Pemindahan IKN ini menjadi salah satu strategi untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah dan mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Telah ditetapkan wilayah IKN dengan luas total 324.332 hektare seperti diilustrasikan dalam grafik 2.58. Jumlah penduduk total yang berada di lokasi wilayah lokasi IKN kurang lebih sebanyak 165.000 jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan 0,42%. Namun, tentunya

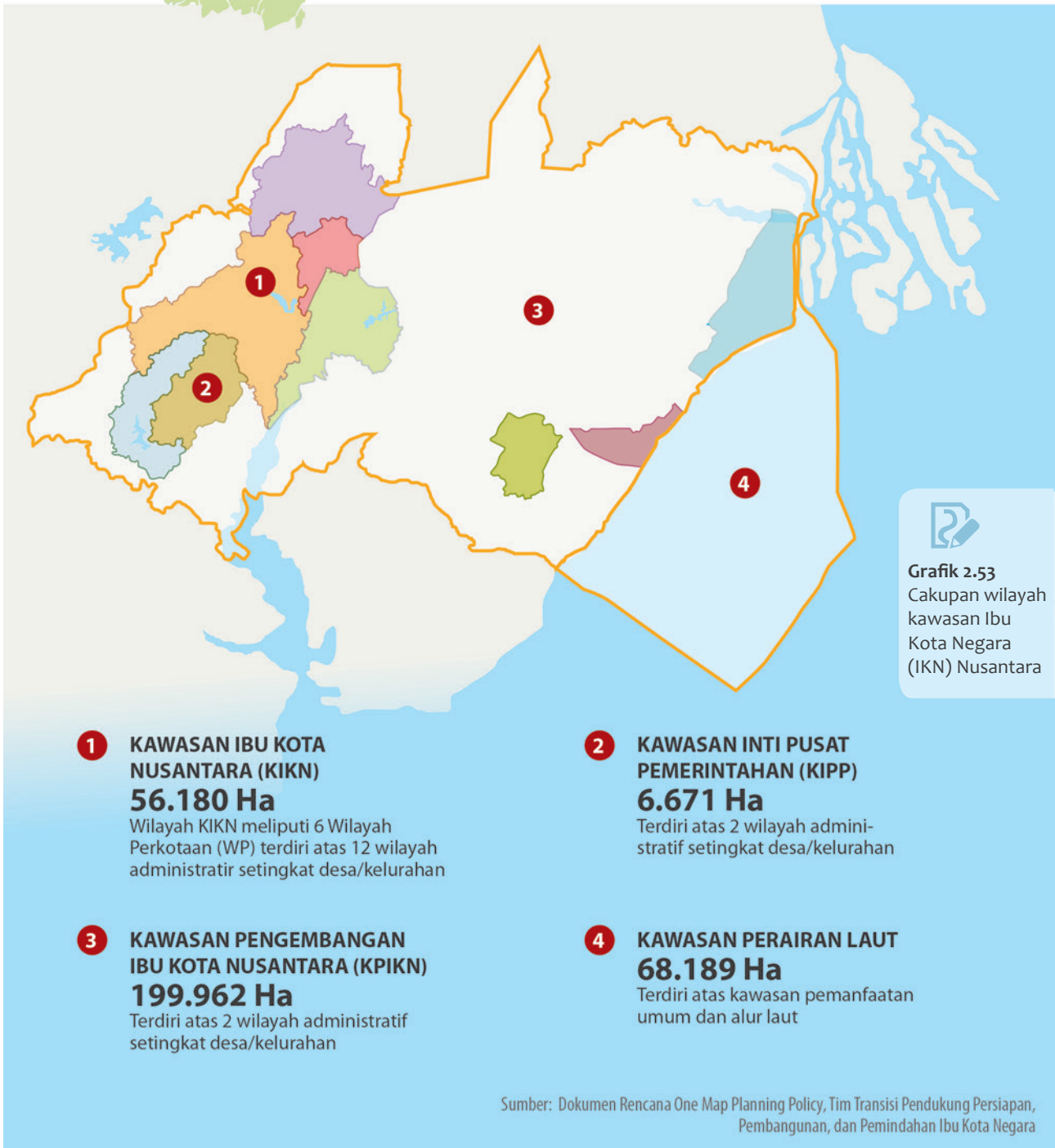
penduduk yang tinggal di sekitar wilayah IKN juga akan merasakan dampak baik langsung ataupun tidak langsung dari pembangunan IKN ini. Salah satu hal mendasar yang perlu dipahami adalah profil masyarakat di wilayah IKN.

Hasil identifikasi berdasarkan studi dari Yayasan Bumi (2020), suku asli di wilayah IKN antara lain Suku Paser, Suku Kutai, Suku Bajau, Suku Dayak Basap, Suku Dayak Kenyah, Suku Dayak Benuaq, dan Suku Dayak Tunjung. Selain suku asli, terdapat juga suku pendatang antara lain Suku Jawa, Bugis, Banjar, Toraja, Sunda, Madura, dan Buton.



LUAS WILAYAH DARATAN IKN
256.142 Ha

Terdiri atas 54 wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan





Gambar 2.3
Desain maket
kawasan Ibu
Kota Negara
(IKN) Nusantara

Keberadaan suku asli dan pendatang ini perlu diperhatikan dan disiapkan agar mobilitas penduduk yang secara intensif akan terjadi saat proses pembangunan dan pemindahan IKN dapat berjalan dengan baik dan dapat mendorong peningkatan kapasitas penduduk setempat (asli ataupun pendatang).

Aspek sosial kependudukan menjadi bagian penting untuk memastikan IKN adalah kota untuk semua tanpa meninggalkan satu pihak pun dalam

prosesnya (*no one left behind*). Transformasi sosial menjadi isu kritical sebagai akibat dari peningkatan mobilitas penduduk untuk mendukung berbagai aktifitas pembangunan di IKN. IKN perlu menyampaikan pesan baru kepada dunia utamanya mengenai keharmonisan dan inklusifitas terutama untuk memastikan masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton saja namun juga terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan.

2.5

Penataan Administrasi Kependudukan

Data merupakan hal vital dalam kerangka menempatkan penduduk sebagai subjek maupun objek pembangunan, data menjadi bukti yang empiris dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan (*evidence-based policy*). Oleh sebab itu, kepemilikan data kependudukan seperti NIK, Akta Kelahiran, KK, dan lainnya sangat penting karena dapat mempermudah pelayanan dasar masyarakat yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, serta administrasi kependudukan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Kementerian Dalam Negeri cakupan kepemilikan NIK sudah cukup tinggi. Pada Semester I Tahun 2023 jumlah penduduk Indonesia terdapat penduduk wajib KTP-el sebesar 204,971,858 jiwa dengan jumlah perekaman sebesar 99,26 persen.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, pemerintah melakukan berbagai upaya dan inovasi dalam pelayanan dokumen kependudukan untuk memperluas cakupan kepemilikan dokumen kependudukan selama masa pandemi, di antaranya pelayanan administrasi kependudukan secara daring, penerapan legalisasi dokumen dengan menggunakan tanda tangan secara daring, dan pencetakan dokumen secara mandiri.



Gambar 2.4
Pendataan penduduk diperlukan untuk pelayanan kesehatan



Foto: Dok. BKKBN



2.5.1 Pemanfaatan Data Kependudukan

Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk membutuhkan data kependudukan terkait dengan ketenagakerjaan, tata kelola urbanisasi, tata kelola migrasi baik internal (transmigrasi maupun swadaya) maupun internasional (penempatan dan pencatatan tenaga kerja Indonesia/diaspora Indonesia di luar negeri maupun tata kelola tenaga kerja asing di Indonesia). Administrasi kependudukan mencakup perluasan cakupan NIK, kepemilikan akta kelahiran, pencatatan kematian, pencatatan perpindahan serta dokumen administratif lainnya.

Pengelolaan data kependudukan dewasa ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang menyatakan bahwa kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. SDI mempunyai prinsip-prinsip, yaitu memenuhi standar data, memenuhi kaidah interoperabilitas data, menggunakan kode referensi atau data induk, serta memiliki metadata.

Data kependudukan berasal dari tiga sumber, yaitu, sensus, survei dan registrasi penduduk (*civil registration and vital statistics*). Sensus dan survei pada saat ini dilakukan oleh BPS dan registrasi penduduk (administrasi

penduduk) dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik ditegaskan bahwa penyelenggaraan statistik dasar menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik, sedangkan statistik sektoral dilakukan oleh kementerian/ lembaga lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pengelolaan data administrasi kependudukan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 telah mengatur mengenai hak akses pemanfaatan data kependudukan. Terkait akses pemanfaatan data kependudukan, Perangkat Daerah dan Badan Hukum dapat mengadakan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan menggunakan *web portal*, *web service* atau juga *card reader*. Namun demikian, dalam rangka perlindungan dan keamanan data, hak akses pemanfaatan data dibatasi hanya sekedar cek data saja. Artinya data kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan pembangunan, namun tetap terjaga kerahasiaan datanya terutama data perorangan yang dilindungi oleh undang-undang.



Hak akses pemanfaatan data kependudukan merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP elektronik. NIK dan data kependudukan yang dimaksud dalam Permendagri tersebut adalah data yang telah dikonsolidasikan dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan Data Center Kementerian Dalam Negeri.

Dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP-el kepada lembaga pengguna yang meliputi satuan kerja perangkat daerah dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hak akses digunakan untuk memudahkan pelayanan publik dan dalam rangka perencanaan pembangunan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data kependudukan

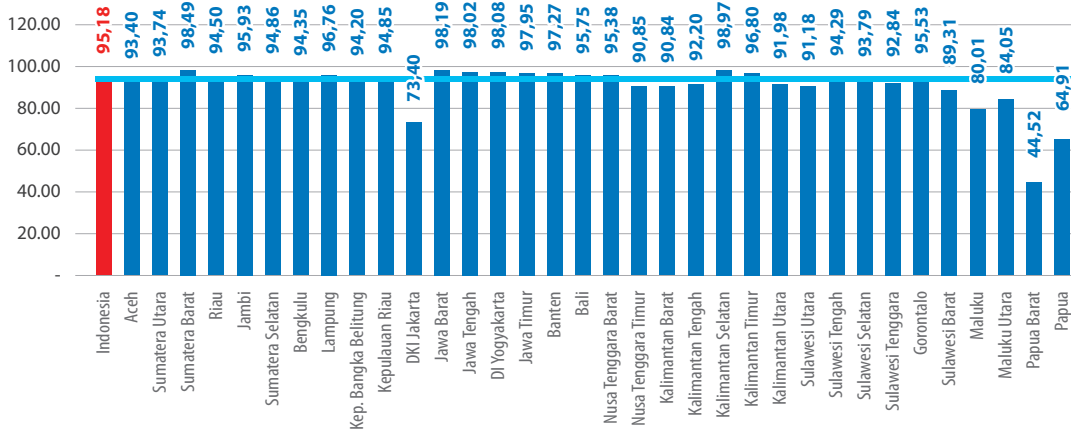
di antaranya dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Digitalisasi layanan dokumen kependudukan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 pasal ke-13, tertulis bahwa NIK merupakan basis data dalam penerbitan paspor, SIM, NPWP, Polis Asuransi, Sertifikat tanah, dan lainnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri pada tahun 2013, telah terdapat 10 lembaga yang bekerjasama dengan Dukcapil dalam mengintegrasikan pemanfaatan data NIK dalam program kerja mereka.

Jumlah lembaga tersebut sempat mengalami stagnansi hingga tahun 2015, namun pada akhirnya meningkat pesat hingga mencapai 3.904 lembaga pada tahun 2021 dimana 2.178 adalah Kementerian/Lembaga di pusat yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS), 1.726 adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menandatangani PKS menggunakan *data warehouse* terpusat. Ke depan, pemanfaatan NIK diharapkan dapat semakin meningkat mengingat NIK sangat dibutuhkan untuk berbagai hal, salah satunya adalah dalam mencapai target sasaran kelompok rentan yang mendapatkan program bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan oleh pemerintah.



PERSENTASE PENDUDUK MEMILIKI KTP TAHUN 2022



Sumber: Dukcapil, 2022



Grafik 2.54
Persentase penduduk memiliki KTP tahun 2022

- **Persentase Kepemilikan KTP**

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah bukti identitas kependudukan yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) khusus sehingga wajib dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia.

Persentase kepemilikan KTP adalah rasio antara jumlah penduduk yang telah merekam KTP dibagi dengan jumlah penduduk total. Secara nasional, persentase penduduk yang memiliki KTP di Indonesia berdasarkan laporan Ditjen Dukcapil pada semester I Tahun 2023 adalah sebesar 99,26%.

Tiga belas provinsi telah melampaui persentase kepemilikan KTP melebihi capaian nasional, dimana Provinsi Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan persentase

kepemilikan KTP paling tinggi yaitu 98,97%. Sementara provinsi dengan persentase kepemilikan KTP paling rendah terdapat di Provinsi Papua (44,52%) dan Papua Barat (64,91%).

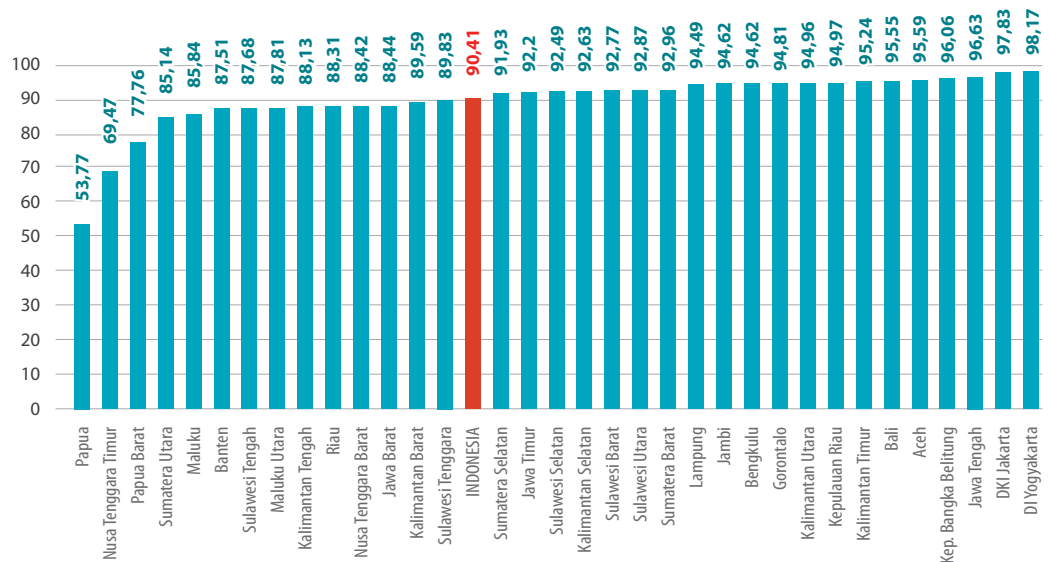
- **Persentase Kepemilikan Akta Lahir**

Akta kelahiran adalah hak anak dalam administrasi kependudukan. Secara nasional, persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun di tahun 2022 sebesar 90,41% yang berarti dari 100 penduduk baru ada 90 orang yang memiliki akta kelahiran. Provinsi dengan persentase akta kelahiran yang sangat rendah adalah Papua, sebesar 53,77%, sementara Provinsi dengan persentase akta kelahiran yang sangat tinggi adalah DI Yogyakarta (98,17%) dan DKI Jakarta (97,83%).

PERSENTASE CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PADA PENDUDUK 0-17 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2022



Grafik 2.55
Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun menurut provinsi tahun 2022



Sumber: Dukcapil, 2022

- **Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)**

Anak usia 0-14 tahun wajib memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai bentuk dukungan terhadap jaminan bantuan sosial yang akan diberikan. Persentase kepemilikan KIA adalah rasio antara jumlah yang memiliki KIA dibagi dengan penduduk usia 0-14 tahun (umur tidak produktif). Secara nasional persentase kepemilikan KIA di Indonesia adalah sebesar 51,93%, ini berarti masih separuh dari anak usia 0-14 tahun yang memiliki KIA. Persentase kepemilikan KIA di Indonesia sangat bervariasi.

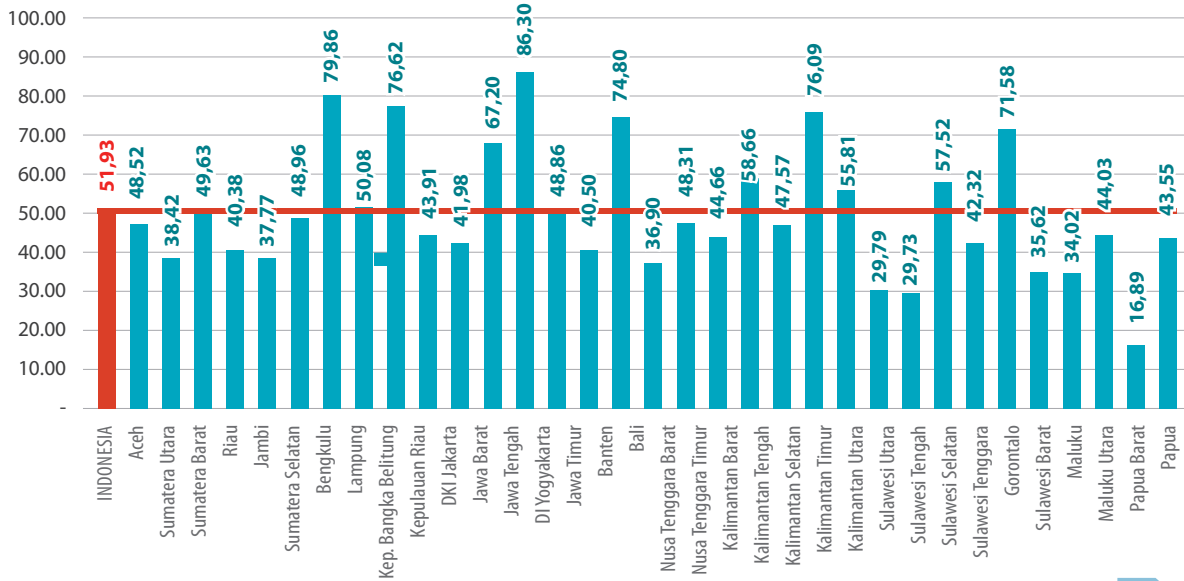
Disparitasnya berada pada angka 16,89% sampai dengan 86,30%. Dibutuhkan kebijakan yang strategis agar penduduk usia 0-14

tahun dapat memiliki KIA. Provinsi dengan persentase kepemilikan KIA paling tinggi adalah Provinsi DIY sebesar 86,30% dan provinsi dengan persentase kepemilikan KIA paling rendah adalah Provinsi Papua sebesar 16,89%. Respon terkait dengan pilar ini adalah telah diberlakukannya:

1. Strategi Nasional Administrasi Kependudukan dan Pengembangan Statistik Hayati (AKPSH). AKPSH terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2019.
2. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang dapat menyatukan seluruh data dan informasi kependudukan serta data-data lainnya guna mendukung peningkatan pelayanan kepada



CAKUPAN KARTU IDENTITAS ANAK TAHUN 2022



Sumber: Dukcapil, 2022



Grafik 2.56
Cakupan kartu identitas anak tahun 2022

masyarakat dan menghindari salah sasaran dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.

- Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang bertujuan

untuk menyatukan seluruh sistem pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah berbasis elektronik guna mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta pelaksanaan intervensi pembangunan yang lebih baik.



Blueprint
**Pembangunan
Kependudukan**
INDONESIA 2045

III

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN





3.1

Tantangan Kependudukan Global

Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai agenda pembangunan global pasca-2015 (pasca-MDG's), diharapkan menjadi arah pembangunan berkelanjutan 2015-2030. SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target yang berkaitan dengan sosio, ekonomi, dan lingkungan. Selaras dengan semangat SDGs, isu kependudukan global dikuatkan kembali melalui pernyataan Nairobi 2019 yang dikenal sebagai ICPD25. Konferensi ini bertujuan untuk menegaskan kembali – setelah 25 tahun – upaya untuk melaksanakan Program Aksi ICPD Kairo 1994 dalam konteks pencapaian SDGs melalui “Pernyataan Nairobi tentang ICPD25 – Mempercepat Janji” (“*Nairobi Statement on ICPD25 – Accelerating the Promise*”). Terdapat lima komitmen yang menjadi fokus utama ICPD25:

1. Mencapai akses universal terhadap kesehatan, hak seksual, dan hak reproduksi sebagai bagian dari jaminan kesehatan universal;
2. Memobilisasi pembiayaan untuk menyelesaikan Program Aksi ICPD dan untuk mempertahankan keuntungan yang diperoleh;
3. Memanfaatkan keragaman demografis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai pembangunan berkelanjutan;

4. Mengakhiri kekerasan berbasis gender dan praktik berbahaya lain;
5. Menegakkan hak atas perawatan kesehatan seksual dan reproduksi dalam aksi kemanusiaan.

Kelima fokus utama ini diharapkan akan menjadi arah bagi berbagai Program Aksi Kependudukan yang dilaksanakan di masing-masing negara.

Jumlah penduduk dunia telah berkembang dengan pesat, bahkan dalam kurun waktu 12 tahun telah bertambah 1 miliar. Pada akhir tahun 2010 penduduk dunia berjumlah 7 miliar dan pada akhir 2022 penduduk dunia telah mencapai 8 miliar orang. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memperkirakan pada akhir abad 21 ini, penduduk dunia akan berjumlah 11 miliar orang. Dinamika kependudukan yang terjadi pada tataran global akan memberikan dampak terhadap dinamika pembangunan kependudukan di Indonesia.

Saat ini, Indonesia menjadi negara keempat terbesar di dunia dengan proporsi 3,4% dari penduduk dunia. Pertumbuhan penduduk ini akan memengaruhi dan dipengaruhi situasi global dan merupakan tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai visi Indonesia 2045.

Ketimpangan kependudukan dan ekonomi antarregional dunia tetap menjadi tantangan besar dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dunia. Kondisi ketimpangan antarregional dari segi kondisi penduduk maupun tingkat ekonomi, menyebabkan potensi migrasi penduduk tinggi dari wilayah Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Karibia ke kawasan Eropa, Amerika Utara, dan Oseania. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan imigrasi, kebutuhan pasar tenaga kerja, dan meningkatnya jumlah penduduk lansia (*aging population*) yang berdampak pada tekanan fiskal dan politis dalam pelayanan kesehatan dan perluasan perlindungan sosial.

Struktur penduduk dunia mengarah pada penduduk tua yang sudah dimulai dari tahun 2020, dimana jumlah penduduk Asia lebih dari 4,5 miliar dan 414 juta di antaranya adalah mereka yang berusia 65 tahun. Pada tahun 2060, penduduk tua diperkirakan akan menjadi 1,2 miliar orang (US Census Bureau, 2022).

Di tingkat global, beberapa kondisi kependudukan lainnya saat ini pengaruhnya kuat bagi kependudukan di Indonesia, misalnya peningkatan kelas pendapatan menengah, persaingan sumber daya alam, perkembangan teknologi yang pesat, perubahan iklim, bencana alam, serta adanya pandemi.

a. Meningkatnya Kelas Pendapatan Menengah (*Middle-Income Class*)

Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi keberadaan kelas menengah sangat penting, di sisi lain pertumbuhan kelas pendapatan

menengah yang pesat menciptakan peluang dan memberikan tantangan mengingat jumlahnya yang semakin besar dan memberi pengaruh luas secara ekonomi, sosial, dan politik.

Secara ekonomi, kelas menengah akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pendapatan per kapita akan mendorong pengeluaran serta meningkatkan tabungan dan investasi. Ini merupakan peluang bagi industri dalam negeri maupun luar negeri untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Meningkatnya kelas menengah juga memberi peluang bagi berkembangnya industri baru, antara lain industri di bidang instrumen keuangan dan investasi. Peluang ini harus dimanfaatkan oleh industri dalam negeri.

Dari aspek sosial dan politik, meningkatnya kelas menengah juga mendorong kemampuan akses terhadap informasi dan keterbukaan masyarakat terhadap berbagai macam informasi dan ideologi. Selain itu, keterbukaan terhadap informasi dan ideologi tersebut berpotensi menimbulkan pergeseran nilai-nilai (*values*) di tengah masyarakat sehingga memungkinkan terjadinya konflik antargenerasi apabila tidak diantisipasi dengan baik. Akses kepada informasi tersebut juga menciptakan generasi yang lebih terbuka sehingga nilai budaya suatu negara akan diwarnai oleh budaya global seperti demokrasi, persamaan hak, dan kreativitas berinovasi secara sosial.



b. Persaingan Sumber Daya Alam

Keterbatasan sumber daya alam di tengah jumlah penduduk yang meningkat sudah lama menjadi kekhawatiran dunia. Pertumbuhan penduduk dirumuskan sesuai dengan deret ukur, sedangkan ketersediaan sumber daya alam dirumuskan menurut deret hitung. Bertambahnya penduduk dunia, meningkatnya kegiatan ekonomi dan perubahan gaya hidup akan meningkatkan kebutuhan sumber daya alam yang terbatas. Berbagai kebutuhan penduduk yang mengandalkan sumber daya alam akan mendorong persaingan dalam memperebutkan sumber daya alam, baik antarwilayah di dalam negeri maupun antarnegara.

Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar dengan berbagai jenisnya, tetapi dengan mempertimbangkan jumlah penduduk yang besar, sumber daya alam menjadi isu. Penduduk Indonesia yang tersebar tidak merata dan terkonsentrasi pada daerah tertentu juga berpengaruh pada keadaan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam seperti air, energi dan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan. Terjadi persaingan untuk pemenuhan kebutuhan penduduk dan penguasaan sumber daya alam oleh pihak tertentu.

Sumber daya alam akan menjadi salah satu modal dalam peningkatan ekonomi Indonesia. Pemanfaatan sumber daya alam dengan menjual bahan mentah akan berkurang dan ditingkatkan menjadi perkembangan

ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan kreativitas untuk mendukung keberlanjutan. Peningkatan sumber daya alam diperkirakan tidak mampu memenuhi kebutuhan permintaan yang meningkat pesat meskipun pertambahan penduduk dunia melambat, kecuali terjadi terobosan teknologi (*technology breakthrough*) yang berkelanjutan.

c. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi telah berkontribusi pada kesejahteraan manusia di berbagai bidang. Pemanfaatan teknologi digunakan untuk mengelola sumber daya alam yang terbatas agar dapat memenuhi kebutuhan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan penduduk.

Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai inovasi yang kemudian dicerminkan dalam perkembangan teknologi. Pertumbuhan penduduk yang meningkat kemudian menurunkan kembali kualitas hidup mereka, pendapatan menurun. Dengan keadaan ini, penduduk akan menurunkan pertumbuhannya dan berinvestasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anaknya agar bisa mendapatkan inovasi yang lebih besar dengan jumlah orang yang lebih sedikit (Dong dan Merdikawati, 2023).

Perkembangan teknologi telah berkontribusi pada kesejahteraan manusia di berbagai bidang. Namun pada saat yang bersamaan perkembangan teknologi dapat mengganggu

kesejahteraan manusia, salah satunya dapat memengaruhi bagaimana tenaga kerja dipekerjakan dan suatu perusahaan beroperasi (Adha, dkk, 2020).

Tren industrialisasi akan menjadi penentu postur ekonomi dunia pada tahun 2045. Negara maju yang saat ini telah memasuki era Revolusi Industri 3.0 dan 4.0 akan fokus pada industri yang didominasi oleh otomatisasi dan perangkat produksi yang dikendalikan melalui sistem berbasis internet. Perkembangan ini sejalan dengan penurunan ketersediaan pekerja pada negara maju yang telah memasuki era *aging population*. Jenis produk

yang dihasilkan adalah *high value* dan *customized product*. Indonesia akan beralih dari era Industri 2.0 menuju Industri 3.0, dimana kebutuhan terhadap pekerja terampil (*skilled workers*) semakin tinggi.

Secara praktis banyak produk teknologi yang digunakan untuk berbagai kemajuan seperti teknologi digital untuk membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau kegiatan niaga lainnya. Teknologi membantu dalam kemudahan untuk fasilitas akses kredit, informasi pasar, pertukaran informasi dan komunikasi yang cepat antara para pelaku pasar (Nasution 2017).



Grafik 3.1
Masalah sosial
yang muncul
dari penggunaan
internet

MASALAH SOSIAL YANG MUNCUL DARI PENGGUNAAN INTERNET

- 1** Masalah komunikasi yang berlebihan, hingga melebur batas privasi seseorang
- 2** Penggunaan media elektronik yang terlalu lama menyebabkan terhambatnya kegiatan lain hingga menimbulkan masalah kesehatan
- 3** Munculnya permasalahan *social isolation and neurosis*, yaitu zona diri individu yang tidak berinteraksi dengan manusia atau orang lain (Kristiyono, 2015).





Perkembangan teknologi diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Misalnya, perkembangan teknologi digitalisasi untuk membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memperoleh fasilitas akses kredit dan informasi pasar, serta koneksi antar pelaku pasar. Pengaruh lain dari perkembangan teknologi adalah perkembangan telekomunikasi yang dapat menciptakan jarak antara satu individu dan individu lain, dimana pertukaran informasi dan komunikasi akan semakin cepat terjadi (Nasution, 2017). Untuk itu, pembangunan SDM dan pengaturan pertumbuhan penduduk merupakan kunci dalam penggunaan teknologi untuk peningkatan kesejahteraan. Pendidikan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan menguasai teknologi, kemudian menjadi amat penting dalam kebijakan pembangunan.

Per tahun 2019 jumlah pengguna internet di Indonesia sebesar 196,71 juta jiwa dari total 266,91 juta jiwa penduduk Indonesia, atau sebesar 73,7 %. Jumlah tersebut naik dari 64,8 % dari tahun 2018. Penggunaan internet memberikan manfaat berupa meluasnya perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi pada masyarakat, kendati akan muncul berbagai permasalahan sosial dari pengguna internet.

Perkembangan teknologi perlu disertai dengan kesadaran sifat

teknologi yang bias keterampilan, dimana pemerintah harus mendorong kapasitas masyarakat dalam inovasi dan pemakaian teknologi agar dapat memaksimalkan manfaat kemajuan teknologi (Fuady, 2018).

d. Perubahan Iklim

Dalam studi membahas kondisi dunia yang akan mencapai bahkan melampaui ambang batas 1,5° celcius yang diperkirakan terjadi antara tahun 2021 dan 2040 yang mencapai lebih dari 50 persen. Apabila dihitung menggunakan skenario emisi tinggi, maka ambang batas 1,5° celcius akan dicapai dalam waktu lebih singkat, yaitu pada tahun 2030-an (<https://wri-indonesia.org>).

Setiap kenaikan suhu bumi akan mengubah intensitas dan frekuensi curah hujan ekstrem, meningkatkan ancaman kekeringan dan gelombang panas, risiko banjir dan tanah longsor di kawasan lainnya. Fenomena pencairan es di kutub juga menaikkan tinggi muka air laut dan menjadi ancaman bagi penduduk di kota-kota pesisir dan meningkatkan potensi abrasi pantai.

Penyakit endemik di wilayah tropis, seperti malaria dan demam berdarah akan semakin sulit untuk dihapuskan. Potensi kemunculan kembali penyakit lama dan potensi jenis penyakit baru juga akan semakin tinggi pada seluruh kawasan, terutama di wilayah tropis.

Perubahan iklim juga merupakan faktor pencetus migrasi masyarakat dari suatu daerah karena dampak perubahan iklim yang dialami di daerah asal, walaupun belum dirasakan secara signifikan pada saat ini

(Thiede, 2017)

Berbagai masalah dan potensi masalah yang akan semakin bertambah karena perubahan iklim tersebut perlu diantisipasi sejak dini. Berbagai perubahan yang terjadi ini membawa dampak pada mata pencaharian masyarakat, kestabilan kehidupan, kesehatan dan berbagai faktor lainnya. Beberapa kelompok masyarakat yang hidupnya tergantung pada sumber daya alam mengalami perubahan hidup yang sangat signifikan, seperti kelompok petani, nelayan atau kelompok masyarakat adat tertentu. Beberapa laporan juga menunjukkan bahwa perubahan iklim berpengaruh terhadap penurunan produksi bahan pangan akibat gagal panen.

Perubahan iklim diprediksi akan menjangkau seluruh kawasan di dunia tanpa terkecuali, sehingga dapat merugikan sektor ekonomi lebih besar. Masyarakat dunia harus mengubah cara menggunakan dan menghasilkan energi, membuat dan mengkonsumsi barang jasa, serta mengolah lahan yang dimiliki. Dunia harus bisa mencapai emisi CO₂ nol bersih dan menurunkan gas non-CO₂, seperti gas metana secara besar-besaran sebagai bentuk upaya membatasi dampak berbahaya dari perubahan iklim (<https://wriindonesia.org>).

Pembangunan di berbagai sektor harus memperhitungkan adanya perubahan iklim dan dampaknya pada manusia. Strategi untuk meningkatkan adaptasi dan resiliensi masyarakat terhadap perubahan iklim harus menjadi bagian yang integral dalam pembangunan kependudukan.

e. Bencana Kesehatan (Pandemi)

Pandemi yang memengaruhi banyak aspek kehidupan manusia di seluruh dunia pada tahun 2020 adalah pandemi Covid-19. Kematian, kemiskinan dan pengangguran merupakan dampak yang paling nyata. Hasil kajian menunjukkan bahwa rata-rata kematian akibat pandemi Covid-19 adalah 0,34/100.000 penduduk. Persentase penduduk miskin naik dari sebelum pandemi sebesar 9,22% menjadi



9,78% pada maret 2020, disamping itu terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 3,5 juta orang pada tahun 2020 dan pengangguran naik menjadi 2,67 orang. Penduduk laki-laki pada usia produktif lebih banyak terpapar Covid-19 hal ini disebabkan karena mobilitas yang lebih tinggi dan kurang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Angka kematian pada laki-laki juga lebih tinggi terutama pada mereka yang berusia lanjut (Hägg & Jylhävä, 2021). Secara biologis mereka lebih rentan dan juga karena adanya *comorbid* yang mereka bawa seperti hipertensi, penyakit jantung dan diabetes serta penyakit paru. Pandemi Covid-19 telah memaksa perubahan cara hidup masyarakat dalam hal pola kerja, belajar, komunikasi, berniaga dan transaksi.

Adanya protokol kesehatan dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kemudian diubah menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya mencegah penularan Covid-19, mengubah berbagai aspek kehidupan yang semula dengan kontak fisik menjadi digital atau secara daring. Cara hidup seluruh lapisan masyarakat kini dituntut untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi dan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis transformasi digital.

Pembatasan jumlah pegawai yang dapat hadir bekerja di tempat kerja

selama pandemi Covid-19 mengubah pola kerja. Jika semula seluruh pegawai diwajibkan hadir secara fisik di tempat kerja pada jam kerja menjadi secara bergiliran sebagian pegawai bekerja dari rumah (*Work from Home/WFH*). WFH membawa implikasi dan tantangan di antaranya berupa kebutuhan sarana dan prasarana seperti komputer atau laptop, koneksi internet, serta tuntutan kedisiplinan untuk dapat bekerja pada jam kerja di tengah kondisi yang terjadi di rumah.

Sementara itu, rapat-rapat digantikan rapat virtual dengan menggunakan aplikasi *video conference*. Namun, WFH dan rapat virtual dalam waktu yang lama ditengarai dapat menyebabkan dampak berupa kelelahan, baik secara fisik maupun mental, akibat berada di depan komputer terlalu lama dan terbatasnya interaksi sosial dengan rekan-rekan kerja.

Risiko penularan Covid-19 telah memaksa proses pembelajaran tatap muka di sekolah, mulai dari prasekolah hingga pendidikan tinggi dihentikan. Pembelajaran tetap dilaksanakan secara dalam jaringan (*daring*) dari rumah. Namun, praktik sekolah daring dari rumah ini mempunyai implikasi dan tantangan yang tidak mudah dihadapi, baik oleh para murid, guru/pendidik, maupun orang tua.

Jika dilaksanakan dalam waktu yang lama, praktik ini dikhawatirkan dapat menyebabkan dampak berupa



kelelahan, baik secara fisik maupun mental, baik bagi murid, guru/pendidik, dan orang tua. Hal ini dapat disebabkan akibat berada di depan komputer terlalu lama, tidak dapat berinteraksi dengan teman-teman sekolah, atau orang tua yang di waktu yang sama sedang WFH.

Protokol kesehatan yang mengharuskan menjaga jarak dan menjauhi kerumunan menyebabkan terjadinya *social distancing*. Hal ini berarti pertemuan dengan banyak orang dilarang atau diperbolehkan namun dibatasi jumlah pesertanya. Akibatnya, kegiatan-kegiatan berupa pertemuan tatap muka seperti reuni, arisan, halal bi halal, dan ibadah ditiadakan dan diubah menjadi pertemuan daring. Kendati pertemuan secara daring ditengarai tidak dapat menggantikan interaksi interpersonal secara tatap muka.

Sementara itu, pembatasan kegiatan mendorong kegiatan transaksi keuangan yang semula lebih banyak dilaksanakan secara tunai menjadi transaksi daring. Berbelanja kebutuhan rumah tangga maupun sandang dan pangan menjadi umum dilakukan dengan menggunakan aplikasi belanja daring (*online*

shopping). Untuk mengurangi risiko penularan, metode pembayaran yang digunakan lebih banyak nontunai melalui *e-Money*, *mobile banking*, dan *internet banking*.

Secara umum pandemi Covid-19 mendorong terjadinya perubahan dalam kesadaran kesehatan, skema perilaku bisnis dan kegiatan ekonomi, praktik pendidikan, pelayanan publik dan kesehatan, serta yang tidak dapat dilupakan adalah percepatan adaptasi pada gaya hidup digital dan mobilitas digital. Proses tersebut tentu akan memberikan dampak terhadap aspek kependudukan di Indonesia. Pertanyaannya adalah sejauh apa dampak kependudukan yang akan diberikan merupakan bahasan yang membutuhkan analisis lebih lanjut. Sebagai usaha dalam memaksimalkan dampak positif, dan mengantisipasi dampak negatifnya.

Selain pandemi Covid-19, Indonesia juga mengalami beberapa bencana wabah penyakit lainnya. Berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2012, Indonesia pada setiap tahunnya terdapat 15 juta penderita malaria klinis dan menyebabkan 30.000 orang meninggal dunia (Radhi, 2015).



3.2

Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Indonesia Menuju 2045

Pembangunan kependudukan tertuang dalam salah satu dari empat pilar yang terdapat dalam Visi Indonesia Emas 2045 yaitu pilar pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan demografis di Indonesia yang diproyeksikan berlangsung hingga tahun 2045 memengaruhi bentuk dan struktur penduduk sehingga menjadi tantangan bagi pembangunan.

Tantangan terbesar dan paling mendasar adalah untuk menyesuaikan diri dengan jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 324,05 juta orang pada tahun 2045. Jumlah penduduk yang besar tersebut akan menuntut terpenuhinya kebutuhan dan peningkatan taraf hidup, menimbulkan dampak ekonomi (kemiskinan dan pengangguran), kesehatan (kematian maternal, bayi dan balita), pendidikan, degradasi lingkungan dan juga sosial – politik (konflik).

Perubahan struktur penduduk juga membawa pengaruh terutama dengan capaian *demographic dividend* atau yang disebut dengan bonus demografi. Pada 2045, Indonesia berpotensi untuk masuk

ke dalam tahap ke2 bonus demografi, dimana ada 4 kelompok umur yang harus mendapat perlakuan berbeda yaitu usia balita dan anak, usia remaja transisi menuju dewasa, usia dewasa (produktif), dan usia lanjut (lansia). Oleh sebab itu diperlukan intervensi kebijakan dengan pendekatan siklus hidup dimana teradapt perlakuan yang berbeda untuk setiap kelompok umur.

Sampai dengan tahun 2045, pertumbuhan penduduk usia lanjut diperkirakan akan lebih besar dibandingkan penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan usia kurang dari 15 tahun. Jika pada masa tua penduduk tetap produktif, kontribusi ekonomi tidak hanya disumbang oleh penduduk usia produktif tetapi juga dari penduduk usia lanjut.

Indonesia mengalami tantangan multi-dimensi yang meliputi naiknya angka kemiskinan dan juga ketimpangan urbanisasi yang cepat disertai disparitas nasional dan pergeseran global yang mengakibatkan kerentanan perdagangan, keuangan dan perubahan iklim. Pandemi memperlambat kemajuan pembangunan Indonesia dan juga menyoroti perlunya transformasi ekonomi Indo-



nesia agar dapat melanjutkan pembangunan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Transisi menuju ekonomi yang berbasis pengetahuan yaitu sistem ekonomi yang didasarkan pada modal intelektual, dimana pengetahuan, sumber daya manusia, serta teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor-faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan dan kekayaan Indonesia.

Penduduk Indonesia didominasi generasi berpendidikan tinggi, menguasai penggunaan teknologi informasi, bergaul intens dengan menggunakan media sosial, serta terpapar nilai-nilai global. Indonesia di 2045 tampak menjadi lebih sejahtera dengan adanya penyebaran pusat-pusat pertumbuhan meskipun dinamika politik di tingkat pusat akibat persinggungan kepentingan bisnis, politik, dan birokrasi masih tinggi. Disamping itu, masih tetap terjadi ketimpangan antardaerah dan berbagai gesekan sosial.

Indonesia merupakan negara industri cukup maju dengan jumlah kelas menengah lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin maupun konglomerat. Sektor agroindustri berkembang dan terjadi peningkatan kemakmuran di perdesaan karena dukungan perkembangan iptek yang lebih tinggi pada agroindustri. Proses pembangunan sudah relatif berbasis

iptek pada segala tingkatan, namun, permasalahan ekonomi yang berdampak pada kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial serta korupsi masih menjadi tantangan yang cukup besar.

Indonesia akan berada di tengah-tengah peradaban modern dunia sebagai bangsa yang multietnik, multikultur, bangsa yang pluralis dengan kadar nasionalisme yang tipis. Di 2045, ketahanan nasional RI belum tangguh secara menyeluruh. Pengakuan regional/internasional atas kapasitas diplomasi RI juga belum tinggi yang berujung pada sulitnya RI memperjuangkan kepentingan nasionalnya di forum internasional.

Indonesia di 2045 sudah menerapkan perencanaan pembangunan yang berbasis rendah karbon dan mengadaptasi pemanfaatan ruang berdasarkan penataan ruang wilayah yang baik. Pembangunan yang dilakukan memperhatikan prinsip-prinsip *Sustainable Development Goals*, yaitu *environmental sustainability*, *economic sustainability*, dan *social sustainability*. Sektor swasta akan berperan aktif dalam pembiayaan program pembangunan berkelanjutan melalui konsep *green banking* dan *green financing*. Selain itu, kedaulatan pangan dijadikan fokus utama dalam pengelolaan ketahanan pangan.



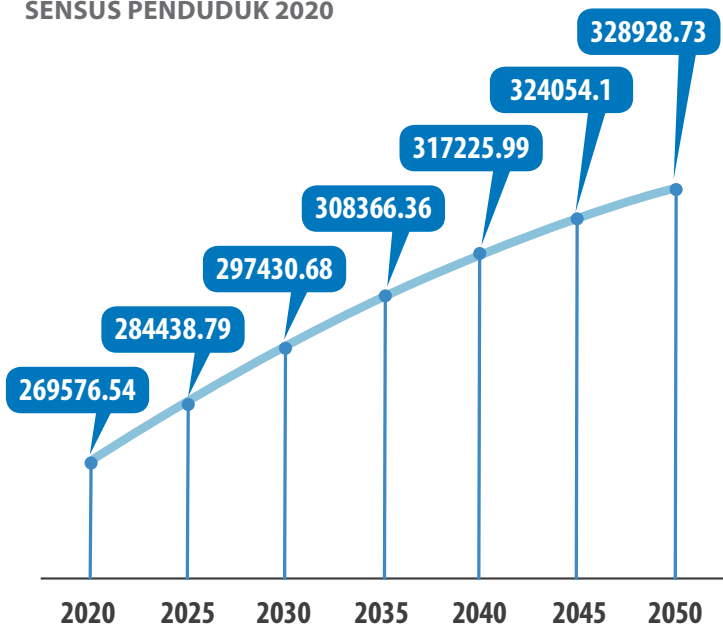
Tahun	Jumlah Penduduk			Sex Ratio	Growth
	Laki-laki	Perempuan	Total		
2020	136,344.59	133,231.95	269,576.54	102,3	1,08
2025	143,547.96	140,890.83	284,438.79	101,9	0,90
2030	149,677.51	147,753.17	297,430.68	101,3	0,72
2035	154,685.33	153,681.03	308,366.36	100,7	0,57
2040	158,611.54	158,614.45	317,225.99	100,0	0,43
2045	161,528.92	162,525.18	324,054.10	99,4	0,30
2050	163,518.27	165,410.46	328,928.73	98,9	



Tabel 3.1
Proyeksi
Penduduk
Indonesia
berdasarkan
sensus penduduk
2020

Sumber : BPS, 2022

**PROYEKSI PENDUDUK
INDONESIA BERDASARKAN
SENSUS PENDUDUK 2020**



▶ Pertumbuhan penduduk semakin melambat, dampak umur harapan hidup semakin tinggi/ angka kematian bayi semakin menurun

▶ Sex ratio diproyeksikan semakin turun menembus di bawah 100, menandakan semakin banyak perempuan dibandingkan laki-laki



Grafik 3.2
Proyeksi
Penduduk
Indonesia
berdasarkan
sensus penduduk
2020

Sumber: BPS, 2022

Dalam pembangunan kependudukan menuju Indonesia Emas tahun 2045, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengatasi segala bentuk isu permasalahan kependudukan terutama terkait pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk.

Skenario proyeksi pembangunan kependudukan di Indonesia telah disusun berdasarkan kebijakan pemerintah dan tren masa lampau. Tren fertilitas di masa depan menjadi faktor penentu dari jumlah, struktur, dan pertumbuhan penduduk Indonesia.

Tren fertilitas bervariasi dipengaruhi oleh perkembangan sosial dan ekonomi, serta pemakaian alat kontrasepsi.

Hingga tahun 2045, angka fertilitas total di Indonesia diproyeksikan terus turun dan ditargetkan untuk terjaga pada 2,0 kelahiran tiap perempuan dengan penyesuaian TFR di setiap provinsi. Tren mortalitas yang diukur melalui tingkat kematian bayi (IMR) juga diproyeksikan menurun seiring peningkatan usia harapan hidup saat lahir. Sedangkan, migrasi diasumsikan konstan.

3.2.1 Isu Terkait Kuantitas Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk diperkirakan akan semakin menurun hingga tahun 2045, namun jumlah penduduk Indonesia masih cukup besar. Berdasarkan data *United Nations World Population Prospects* (UN WPP), Indonesia berada pada peringkat keenam penduduk terbesar di dunia setelah China, India, Amerika Serikat (AS), Nigeria dan Pakistan. Meskipun penduduk Indonesia tergolong tinggi, tetapi tingkat kepadatan Indonesia masih tergolong rendah karena Indonesia memiliki wilayah daratan kepulauan yang luas.

1. Dominasi Penduduk Usia Produktif dan Bonus Demografi

Berdasarkan data *Long Form Sensus Penduduk 2020*, angka fertilitas total telah mencapai target sebesar 2,18 anak per wanita usia subur meskipun masih terjadi disparitas antarprovinsi.

Beberapa provinsi telah mencapai *replacement level* dan bahkan lebih rendah dari angka replacement rate anak per wanita usia subur yaitu Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Bali, Banten, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan DKI Jakarta. Ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah selama ini terkait pengendalian jumlah penduduk khususnya pengendalian kelahiran secara nasional ‘*onthetrack*’ menuju capaian target ideal.

Di sisi lain, proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Indonesia masih sangat besar. Berdasarkan hasil *Long Form Sensus Penduduk 2020*, proporsi penduduk usia produktif mencapai 69,28 persen dari keseluruhan penduduk. Pada tahun 2045, proporsi penduduk usia produktif tersebut diperkirakan



Gambar 3.1
Peningkatan
populasi

mulai mengalami sedikit penurunan menjadi 65,79 persen.

Besarnya proporsi penduduk usia 15-64 tahun memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memetik bonus demografi. Bonus demografi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh dari struktur demografi yang menguntungkan suatu negara.

Istilah ini seringkali digunakan dalam konteks peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk usia produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak bekerja, seperti anak-anak dan lansia. Bonus demografi terjadi ketika jumlah

pendapatan, tabungan maupun investasi yang dimiliki oleh penduduk produktif lebih besar daripada pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tanggungan penduduk tidak produktif.

Partisipasi angkatan kerja perempuan yang saat ini masih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki, perlu ditingkatkan. Turunnya TFR, dimana jumlah anak menjadi lebih sedikit, akan meningkatkan peluang bagi perempuan untuk bekerja semakin besar. Untuk itu perlu didukung dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan serta perluasan kesempatan kerja bagi perempuan.

Indonesia telah memasuki periode *windows opportunity* bonus

demografi sejak tahun 2012 dan diprediksi akan berakhir pada tahun 2041. Pemanfaatan bonus demografi secara maksimal menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang diawali dari perubahan struktur demografi penduduk serta didukung dengan peningkatan produktivitas dan investasi produktif.

Namun demikian, terdapat disparitas periode pemanfaatan bonus demografi antarwilayah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota. Perbedaan antar wilayah ini membutuhkan respon kebijakan yang berbeda. Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk 2020, Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara dan Papua Barat periode *windows opportunity* bonus pada tahun 2020-2045. Sedangkan Provinsi Kepulauan Riau, Aceh, Riau, dan Nusa Tenggara Barat diperkirakan akan mendapatkan kesempatan bonus demografi pada tahun 2020-2040. Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur belum diketahui waktu *windows of opportunity* bonus demografi.

Selain disparitas pada *level* provinsi, disparitas pencapaian transisi demografi yang berujung pada bonus demografi juga terjadi di kabupaten dan kota. Adioetomo (2019) melakukan klasifikasi transisi demografi kabupaten/ kota pada tahun 2015 di Indonesia ke dalam 4 fase: transisi lanjut yang mengindikasikan akhir fase transisi demografi, transisi berjalan, pransisi demografi, dan kabupaten/

kota yang belum menunjukkan waktu transisi demografi.

Dengan kondisi tersebut, maka kebijakan pembangunan kependudukan antardaerah menjadi tidak relevan ketika disamakan. Penting kiranya untuk merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik setiap wilayah, walaupun secara umum tujuan pembangunan harus menuju visi dan misi yang sama.

Perbedaan masa transisi demografi setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia akan memengaruhi karakteristik tiap generasi dalam memilih lapangan kerja. Fenomena bonus demografi Indonesia terhadap penyediaan lapangan kerja antargenerasi harus disiapkan secara matang oleh pemerintah.

Bidang pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan merupakan 3 (tiga) jenis lapangan usaha yang menjadi konsentrasi penyerapan angkatan kerja Indonesia baik dari generasi X hingga generasi *Baby Boom* dan veteran. Generasi X dan milenial cenderung lebih tertarik bekerja pada lapangan usaha perdagangan dan industri, sedangkan generasi *Baby Boom* masih banyak bekerja di lapangan usaha sektor pertanian.

Kecenderungan generasi muda bekerja yang bergeser dari sektor pertanian ke sektor perdagangan dan industri menunjukkan adanya



ketertarikan menggeluti usaha yang tidak monoton, memberikan kebebasan mengembangkan usaha yang memberikan keuntungan maksimal.

Jika kondisi ini berlanjut pada masa depan, maka dimungkinkan akan terjadi transformasi struktural perekonomian di Indonesia, yang mulanya dari negara agraris menjadi negara industri. Munculnya era revolusi industri 4.0 telah mendorong upaya-upaya industri *startup* memasuki dunia bisnis yang dipandang lebih inovatif dan kreatif dalam menciptakan hal baru bagi dunia industri Indonesia (Kemenppa, 2018).

2. Meningkatnya Proporsi Penduduk Tua

Pada tahun 2045, penduduk lanjut usia yang berumur 60 tahun ke atas diperkirakan mencapai 19,97 persen dan penduduk lanjut usia berumur 65 tahun ke atas sekitar 14,6 persen. Merujuk definisi penduduk lanjut usia menurut Undang-Undang Kesejahteraan Lansia Nomor 13 Tahun 1998, era penuaan penduduk ini dimulai ketika persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mencapai lebih dari 10 persen. Meskipun demikian, transisi menuju struktur penduduk tua sebetulnya sudah mulai terjadi pada tahun 2020 di mana persentase penduduk lanjut usia sudah mencapai 9,9 persen (BPS, 2021).

Meningkatnya jumlah lanjut usia juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi keluarga, dengan struktur keluarga yang makin kecil serta partisipasi anggota keluarga dalam

pasar kerja, maka akan memengaruhi dukungan keluarga dalam kerangka *long-term care* bagi lanjut usia.

Jumlah penduduk lansia yang semakin besar serta perubahan struktur rumah tangga dan masyarakat menuntut sistem perlindungan sosial yang mapan. Perlindungan sosial yang komprehensif direncanakan dengan memperhatikan perubahan struktur penduduk dan tetap mempertahankan mekanisme dukungan keluarga (*family support*) dengan menanamkan nilai-nilai keluarga dan hubungan yang erat antargenerasi. Padahal skema jaminan dan perlindungan sosial yang dikembangkan selama ini masih memerlukan keluarga sebagai penyokongnya, sehingga diperlukan langkah-langkah spesifik yang dapat mengakomodasi hal ini.

Angka morbiditas (kesakitan) penduduk usia 60 tahun ke atas makin menurun, memungkinkan penduduk usia 60 ke atas untuk menjadi tetap produktif. Hal ini memungkinkan penduduk lansia dapat tetap bekerja setelah memasuki masa pensiun dan tetap produktif di usia tua. Pemerintah harus terus mengkampanyekan *active aging* agar lansia tetap sehat dan produktif di masa tua.

Untuk mendukung produktivitas ekonomi penduduk lansia, dibutuhkan dukungan pelayanan kesehatan penduduk terutama lansia dan juga infrastruktur (sarana dan prasarana) yang memadai untuk kebutuhan lansia. Meningkatnya

penduduk usia lansia membutuhkan perawatan lansia dalam bentuk penyediaan *caregiver*, serta dukungan jaminan sosial bagi lansia. Untuk menyiapkan lansia produktif, pendekatan dilakukan bersifat *life course*, yang mencakup pencegahan dan promosi, *long-term care*, dan *end-of-life care*. Selain itu, diperlukan dukungan peningkatan keterampilan serta penyediaan lapangan kerja yang memadai dan sesuai dengan kondisi fisik lansia.

Produktivitas lansia dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara disamping kontribusi ekonomi utama dari penduduk usia produktif. Dengan proporsinya yang semakin besar dari keseluruhan penduduk, isu ini harus menjadi salah satu arah kebijakan strategis bagi pemerintah hingga tahun 2045. Lansia yang produktif memungkinkan negara mendapatkan keuntungan bonus demografi yang kedua setelah periode bonus demografi yang pertama dilalui.

3. Disparitas Fertilitas Antarprovinsi

Menjaga agar pertumbuhan penduduk tetap positif merupakan tantangan yang cukup nyata dalam kerangka pembangunan kependudukan. Dengan menjaga jumlah anak sekitar 2 (dua) untuk setiap perempuan memberikan harapan bahwasanya pertumbuhan penduduk yang negatif akan belum terjadi di Indonesia.

Apabila TFR terus dipertahankan sebesar 2,0 apabila TFR dipertahankan sampai tahun 2045 sebesar 2,0 dan

mempercepat peningkatan umur harapan hidup sebesar 80 tahun maka jumlah penduduk akan mencapai 324 juta jiwa pada tahun 2045. Maka kebijakan menjaga TFR pada angka 2,0 secara nasional merupakan tantangan tersendiri mengingat variasi TFR pada 34 provinsi di Indonesia sangat beragam. Menjaga pertumbuhan penduduk yang seimbang pada angka *replacement level* sama artinya dengan menjaga *fiscal support ratio*.

Estimasi tren penurunan TFR di setiap provinsi berbeda-beda. Sebagian provinsi telah melewati target TFR lebih awal, seperti Provinsi Bali, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara telah mencapai 2,1 kelahiran sejak tahun 2020. Tetapi sebagian provinsi lainnya baru melewati batas target TFR setelah tahun 2045 yang sebagian besar merupakan wilayah Indonesia bagian timur, seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur, serta sebagian kecil wilayah Indonesia Barat, seperti Aceh, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Perbedaan capaian TFR antarprovinsi tersebut diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun strategi kebijakan pembangunan kependudukan dengan melihat kapabilitas daya dukung penunjang lainnya. Wilayah dengan TFR yang masih relatif tinggi masih harus merumuskan strategi yang tepat untuk secara konsisten mempercepat



penurunan angka TFR. Wilayah-wilayah tersebut seyogyanya menjadi prioritas program Keluarga Berencana Nasional dalam beberapa tahun ke depan.

Di wilayah dengan angka TFR yang masih tinggi, prevalensi penggunaan kontrasepsi (CPR) masih perlu ditingkatkan seiring dengan upaya menurunkan *unmet need*. Sebaliknya wilayah dengan TFR yang sudah cukup rendah, secara berkelanjutan tetap harus terpenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan kontrasepsi. Upaya ini bertujuan untuk menjaga agar TFR tidak kembali meningkat atau juga tidak menurun ke *level* yang lebih rendah lagi.

Dalam upaya pencapaian target TFR, salah satu perhatian penting di Indonesia adalah angka fertilitas

kelompok usia muda (15-19 tahun) yang sangat erat kaitannya dengan perkawinan anak. Secara umum, selama lebih dari 30 tahun perkembangan capaian ASFR (15-19 tahun) di Indonesia cenderung mengalami penurunan pada seluruh kelompok usia dan tidak menunjukkan perbedaan signifikan usia melahirkan bagi wanita.

Pada tahun 2045, capaian ASFR diproyeksikan akan stagnan seiring dengan capaian TFR dan tingkat fertilitas tertinggi telah bergeser ke usia yang lebih tua, yaitu pada rentang usia 25-29 tahun. Dengan semakin meningkatnya ketersediaan akses pendidikan dan lapangan kerja bagi wanita usia produktif pada masa mendatang, diharapkan tidak muncul lagi isu perkawinan usia anak baik di perkotaan maupun perdesaan.

3.2.2 Isu Terkait Peningkatan Kualitas Penduduk

Peningkatan kuantitas penduduk harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar suatu negara dapat menghasilkan *output* perekonomian yang lebih optimal. Kualitas penduduk sangat berkaitan dengan kapabilitas sumber daya manusia baik fisik maupun nonfisik (kecerdasan, mental, spiritual). Kualitas penduduk dibutuhkan dalam akselerasi pembangunan karena pembangunan akan optimal jika diiringi dengan peningkatan produktivitas.

Gambaran pembangunan kualitas hidup

manusia Indonesia dapat dinilai dari HDI (*Human Development Index*) atau IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Berdasarkan data UNDP 2020, Indonesia menempati urutan ke-107 dengan capaian HDI atau IPM lebih baik dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara di kawasan Asia Selatan dan Afrika (BPS, 2022). IPM Indonesia terus meningkat setiap tahun walaupun sedikit melambat selama pandemi Covid-19.

Menyongsong Indonesia Emas 2045, berbagai isu penting menyangkut kualitas penduduk dihadapi bangsa



Indonesia. Isu ini mencakup aspek-aspek penting dalam penciptaan SDM unggul meliputi peningkatan derajat kesehatan penduduk, peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan lapangan kerja yang layak, penurunan ketimpangan gender, maupun pengentasan kemiskinan.

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Penduduk

Dengan kemajuan teknologi kesehatan bidang genetika, pengobatan dan pemulihan, serta peningkatan program-program pelayanan kesehatan, tingkat kematian mengalami penurunan dan penduduk Indonesia akan hidup lebih lama, pada tahun 2045 diproyeksikan usia harapan hidup penduduk Indonesia mencapai 75,5 tahun. Meningkatnya derajat kesehatan penduduk di satu sisi memberikan keuntungan dengan semakin panjang usia harapan hidup penduduk, tetapi di sisi lain membawa konsekuensi perubahan struktur penduduk menuju penduduk tua (*aging population*) dengan meningkatnya proporsi penduduk lansia.

Menghadapi periode *aging population* yang diperkirakan mulai terjadi tahun 2022 ini, pemerintah perlu merumuskan kebijakan kesehatan terutama dalam hal peningkatan upaya promotif dan preventif sejak dini agar juga dapat mengurangi beban pembiayaan pelayanan kuratif yang dinilai sangat penting. Kualitas hidup penduduk lansia juga harus dapat dipertahankan melalui

program layanan kesehatan dan kesejahteraan untuk menciptakan generasi lanjut usia yang sehat-mandiri-aktif-produktif (SMART).

Meskipun perbaikan kesehatan terus berjalan, kondisi Indonesia yang saat ini menghadapi transisi epidemiologi juga perlu perhatian khusus. *Triple Burden of Diseases* atau beban tiga penyakit yang muncul bersamaan akan terus mengancam sektor kesehatan di Indonesia, jika pemerintah tidak segera mengupayakan kebijakan pengendalian dan penanggulangan masalah kesehatan secara seksama.

Tiga beban penyakit tersebut meliputi prevalensi penyakit tidak menular, angka penyakit menular klasik yang masih tinggi, dan munculnya penyakit infeksi baru yang berevolusi seperti Covid-19. Karena itu, Pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan pembangunan kesehatan yang lebih diprioritaskan pada upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

2. Pembangunan SDM

Penyiapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting, sinyal suatu pertumbuhan penduduk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi melalui indikator peningkatan kualitas SDM. Bagaimana menempatkan penyiapan kualitas SDM ini sebagai suatu program prioritas nasional di K/L serta mitra terkait lainnya. Ada berbagai faktor penyebab terjadinya



kualitas SDM Indonesia rendah yaitu; dari akses pendidikan, kesehatan juga kesempatan kerja.

Kesehatan dan pendidikan dalam arti luas sangat berperan dalam peningkatan sumberdaya manusia. Pendidikan yang diperlukan dalam suatu masyarakat adalah pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan sosial ekonomi dalam masyarakat tersebut. Saat ini untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, diperlukan sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara global. Oleh karena itu agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu berdaya saing secara global, maka diperlukan pendidikan yang memenuhi standar mutu internasional.

Di bidang kesehatan salah satunya adalah *stunting* yang merupakan masalah serius karena kondisi kekurangan gizi kronik akan memengaruhi kecerdasan anak dan kualitas SDM di masa depan. Angka *stunting* di Indonesia saat ini masih tinggi. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), angka *stunting* di Indonesia masih 21,6 persen (SSGI 2022) atau sekitar 4,7 juta balita Indonesia mengalami *stunting*, meski turun dari 24,4 persen (SSGI 2021). Kasus *stunting* di Indonesia masih jauh dari yang ditargetkan dalam RPJMN 2020-2024, yaitu 14 persen.

Balita atau baduta yang mengalami *stunting* akan memiliki tingkat kecerdasan yang kurang maksimal anak *stunting* menjadi lebih rentan

terhadap penyakit dan di masa depan dapat berisiko pada menurunnya tingkat produktivitas pada akhirnya secara luas *stunting* akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan. BKKBN sebagai lembaga Negara, berdasarkan Perpres No.72 tahun 2021 mendapatkan amanah sebagai ketua percepatan penurunan *stunting*, sebagai pembina keluarga Indonesia bagaimana membina keluarga sadar hidup sehat dan bebas *stunting* sehingga tercipta SDM yang berkualitas dan produktif.

3. Disparitas Pendidikan Antarwilayah

Pendidikan merupakan kunci utama dalam pengembangan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dalam seluruh dimensinya yang menjadi hak bagi setiap warga negara. Pendidikan yang berkualitas akan mengantarkan kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bermartabat. Meskipun tingkat pendidikan masyarakat semakin meningkat, disparitas pendidikan antarkelompok masyarakat maupun antarwilayah di Indonesia masih relatif tinggi.

Pendidikan berkualitas ditentukan oleh peran kondisi ekonomi rumah tangga. Kondisi ekonomi yang rendah seringkali menghambat kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan seringkali menghambat anggota keluarga mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kelompok rumah tangga berstatus ekonomi



terbawah masih memiliki kesenjangan pendidikan yang cukup tinggi terutama pada jenjang perguruan tinggi.

Disparitas pendidikan juga terlihat saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19 karena tuntutan adaptasi yang cepat di setiap layanan pendidikan untuk mengganti proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh dengan pemanfaatan teknologi digital. Sedangkan, akses teknologi digital masih terbatas dan belum dapat menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, kondisi ekonomi rumah tangga yang sempat memburuk saat pandemi Covid-19 juga semakin memberatkan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi biaya pendidikan.

Hingga tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia usia 7-18 tahun (sekolah dasar dan sekolah menengah) dan penduduk umur 19-24 tahun (perguruan tinggi) terus bertambah banyak. Hal ini menjadi tantangan besar dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dengan menjaga prinsip *equity of access to quality education*.

Perlu strategi pembangunan pendidikan yang tepat menyesuaikan dengan Visi Indonesia 2045, perubahan ekonomi, perubahan sosio-kultural dan demografi, serta kebutuhan pasar tenaga kerja yang semakin bervariasi.

Disparitas pendidikan penduduk

antarwilayah Indonesia juga masih cukup besar dan menjadi salah satu isu yang harus ditangani secara serius. Disparitas pendidikan antara perkotaan dan perdesaan masih cukup menonjol dibuktikan dengan kesenjangan tingkat pendidikan penduduk antarperkotaan dan perdesaan yang masih cukup lebar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2023 menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih cukup tinggi. Berdasarkan data tentang tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun ke atas di desa dan kota, masih terdapat 5,11% penduduk desa yang tidak/belum pernah sekolah dan sebanyak 12,39% tidak menamatkan pendidikan SD. Sementara itu, angka penduduk yang tidak/belum pernah sekolah di wilayah perkotaan hanya 1,93% dan penduduk yang tidak tamat SD adalah 6,62%. Pada perkotaan, terdapat 49,16% penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan SMA/ sederajat. Akan tetapi, penduduk desa yang menamatkan jenjang pendidikan SMA/ sederajat hanya sebesar 27,98%.

Pemerintah perlu menyusun strategi penyelenggaraan pendidikan dengan mengangkat prinsip kesetaraan, meningkatkan akses pendidikan dan kesadaran berpendidikan pada masyarakat. Untuk mengantisipasi ancaman situasi terburuk di masa mendatang dan menghapus disparitas pendidikan antarwilayah



di Indonesia, pemerintah perlu menyusun strategi penyelenggaraan pendidikan dengan mengangkat prinsip kesetaraan, meningkatkan akses pendidikan dan kesadaran berpendidikan pada masyarakat.

Hingga tahun 2045, pemerintah harus menjamin distribusi pendidikan berkualitas, seperti memadainya kualitas guru dan pembangunan infrastruktur, bantuan pembiayaan pendidikan dari anggaran pemerintah, kontribusi investasi dari sektor swasta, peningkatan kualitas peserta didik, perubahan kurikulum yang cukup praktis dan operasional, serta penyesuaian kemudahan otonomi daerah dan koordinasi lintas kementerian/lembaga, yang harus merata dan inklusif ke seluruh penjuru Indonesia, agar dapat menghasilkan masyarakat yang kompeten dan sejahtera.

Mengingat hingga saat ini akses pendidikan secara gratis di Indonesia belum seluruhnya terlaksana, hanya sebagian biaya pendidikan yang ditiadakan, belum terpenuhinya pembangunan infrastruktur pendidikan, serta keterbatasan masalah geografis di beberapa Daerah Tertinggal Perbatasan Kepulauan (DTPK), seluruh hambatan ini masih menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia yang harus dituntaskan.

4. Penyediaan Lapangan Kerja yang Layak

Isu penciptaan lapangan kerja masih menjadi perhatian dalam 25 tahun ke depan sejalan dengan meningkatnya penduduk usia produktif dan peru-

bahan struktur ekonomi serta kemajuan dan perkembangan teknologi akan berpengaruh besar terhadap pasar tenaga kerja.

Pada tahun 2045 akan ada sekitar 60 persen jenis pekerjaan akan menerapkan otomatisasi dan 30 persen pekerjaan berpotensi digantikan oleh revolusi teknologi (Bappenas, 2019). Padahal di saat sekarang pun Indonesia sudah menghadapi beberapa tantangan tentang ketenagakerjaan di Indonesia.

Di sisi lain, struktur ekonomi berubah dari sektor pertanian ke industri dan jasa yang tercermin dari kemampuan sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja yang menurun digantikan dengan sektor perdagangan, industri pengolahan, dan jasa.

Bersamaan dengan itu, ekonomi berbasis pengetahuan semakin meningkat bertumpu pada inovasi teknologi yang mensyaratkan penduduk berpendidikan lebih tinggi dan menguasai Iptek. Tuntutan untuk menyediakan layanan pendidikan dan pelatihan untuk jenis-jenis keahlian dan keterampilan tertentu meningkat dan harus dipenuhi.

Karena itu, tantangan ketenagakerjaan di Indonesia bukan hanya tuntutan penyediaan lapangan kerja yang terus meningkat, tetapi juga menyangkut pekerjaan layak yang tercermin dari ciri-ciri penduduk bekerja meliputi, didominasi pekerja berpendidikan rendah, bekerja di sektor informal, dan bekerja kurang

dari batas jumlah jam kerja yang normal.

Ketiga ciri tersebut saling berkaitan dan berdampak kepada rendahnya upah/gaji yang diterima oleh pekerja. Banyaknya penduduk yang bekerja di sektor informal disebabkan oleh pendidikan yang rendah, dan selanjutnya bisa berakibat bekerja kurang dari jam kerja normal.

Fokus untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui investasi modal manusia menjadi penting untuk mengurai permasalahan ini disamping memperbaiki sisi penawaran atau penyediaan lapangan kerja. Dalam periode pemanfaatan bonus demografi, diharapkan Indonesia dapat menghasilkan tenaga kerja yang fleksibel dan adaptif melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, penguatan transisi lapangan kerja dan pelatihan kompetensi terutama bidang keteknikan dan teknologi informasi (Bappenas, 2019).

5. Ketimpangan Gender

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan nasional. Tercapainya kesetaraan gender dapat mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat melalui partisipasi masyarakat baik perempuan maupun laki-laki yang optimal dalam proses pembangunan. Tujuan kelima dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Secara umum, gambaran kesetaraan gender dapat dilihat dari perbedaan IPM laki-laki dan perempuan. Meskipun selama 10 tahun terakhir, IPM Indonesia terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2021 mencapai 72,29 pada seluruh dimensi, jika dilihat berdasarkan gender, IPM laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ketimpangan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.

Lebih jauh pada komponen IPM, faktor ekonomi merupakan kontributor terbesar dari kesenjangan IPM antara laki-laki dan perempuan. Salah satu poin penting dalam kaitan ini adalah bahwa masih tampak ketimpangan gender dalam partisipasi angkatan kerja. Survei Sakernas tahun 2021 menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja laki-laki mencapai lebih dari 80 persen lebih tinggi dibandingkan perempuan yang hanya mencapai 50 persen. Tingginya angka pengangguran juga lebih banyak didominasi oleh kaum perempuan mencapai 10,09 persen (BPS, 2021).

Masih tingginya *stereotype* akan peran dan kedudukan perempuan yang masih cenderung mengarah kepada kegiatan domestik, seperti berumah tangga. Kondisi ini perlu diubah agar tidak ada lagi bentuk diskriminasi terhadap perempuan saat memasuki pasar kerja. Perubahan cara pandang akan pentingnya pendidikan tinggi dan tingkat kematangan usia sangat berpengaruh pada pengambilan



keputusan perempuan untuk berkesempatan terjun dalam dunia kerja (Kemen PPPA, 2018).

Ketimpangan gender dalam bidang pendidikan juga masih terlihat nyata dan masih tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional. Status pendidikan pada perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki baik di perdesaan maupun perkotaan, di mana secara rata-rata laki-laki lebih lama mengenyam pendidikan dibandingkan perempuan. Walaupun dalam 3 tahun terakhir tingkat penyelesaian pendidikan di seluruh tingkatan baik laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan dan persentase akses pendidikan bagi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tingkat fertilitas. Partisipasi perempuan dalam pendidikan yang rendah meningkatkan peluang perempuan bereproduksi. Perkawinan anak akan mudah terjadi, jika tidak adanya dukungan orangtua dan lingkungan untuk melanjutkan pendidikan.

Berbagai alasan yang mendasari misalnya masih tingginya *stereotype* bahwa perempuan didoktrin hanya berkewajiban mengurus anak dan suami, masih rendahnya kesadaran masyarakat pentingnya menempuh pendidikan tinggi, kesulitan mengakses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, serta lokasi fasilitas pendidikan yang sulit dijangkau dari lokasi tempat tinggal.

Padahal kontribusi perempuan dalam dunia pendidikan sangat dibutuhkan karena semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan maka akan semakin berkualitas dalam mendidik anak-anaknya.

Secara nasional, keterlibatan perempuan dalam parlemen hanya mencapai 21,89 persen. Hal tersebut membuktikan bahwa masih tingginya ketidaksetaraan gender khususnya perempuan yang dianggap kurang memiliki kapabilitas pengambilan keputusan dan memimpin suatu organisasi politik. Rendahnya keterlibatan perempuan dalam parlemen menjadi salah satu penghambat kemajuan negara ke arah kesetaraan gender.

Seringkali perempuan berkendala memasuki dunia politik. Kuota hak suara perempuan sangat dibatasi karena masih tingginya *stereotype* gender bahwa seorang pemimpin haruslah laki-laki dan peran perempuan dalam mengambil keputusan dianggap dapat mewakili segala isu keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia yang memenuhi harapan serta mem-

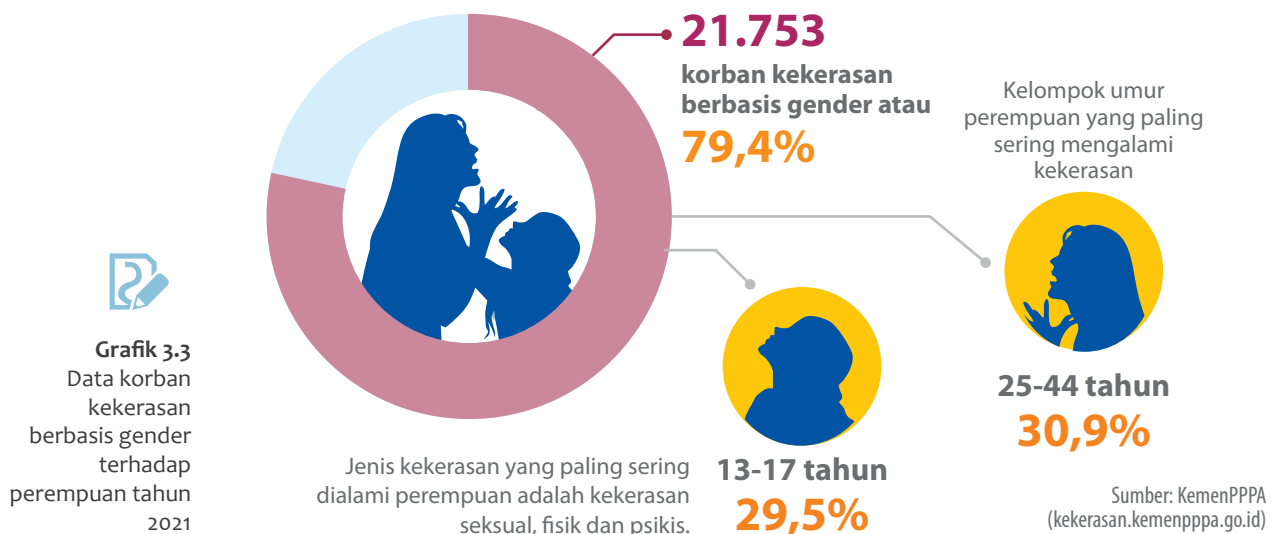
berikan solusi yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat (International IDEA, 2002).

Kesetaraan dan keadilan gender juga harus dimaknai terciptanya masyarakat demokratis, sejahtera, dan adil dengan menghapuskan segala bentuk diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan seksual. Salah satu hal yang menjadi target adalah mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat, termasuk perdagangan (*trafficking*) orang, eksploitasi seksual dan bentuk eksploitasi lainnya.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berdampak pada segala aspek kehidupan seperti

kesehatan fisik dan mental, sosial, ekonomi. Dari sisi ekonomi, dampak kekerasan terhadap perempuan dapat berpengaruh pada kesulitan ekonomi karena kehilangan pekerjaan. Sedangkan dari sisi sosial, perempuan bisa mendapatkan stigmatisasi dan diskriminasi dari masyarakat. Dampak dari kekerasan akan berpengaruh terhadap partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam masyarakat serta kualitas hidup perempuan (KPPA, 2017). Jika melihat dari data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mayoritas kekerasan terhadap perempuan terjadi pada kelompok umur produktif. Hal ini tentu menjadi tantangan Indonesia dalam menghadapi bonus demografi.

DATA KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2021





3.2.3 Isu Terkait Pembangunan Keluarga

Di Indonesia pembangunan keluarga merupakan upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat (UU No. 52/2009). Meskipun perilaku dari keluarga sangat bergantung pada kondisi lingkungannya, akan tetapi para ahli meyakini bahwa perilaku keluarga –baik dalam konsumsi, maupun perilakunya secara umum– sangat dipengaruhi oleh siklus kehidupan keluarga. Siklus kehidupan keluarga diambil dari teori pembangunan keluarga, yang menggambarkan evolusi perkembangan keluarga sepanjang waktu, yang ditandai dari membangun pola hubungan yang terjadi antara anggota keluarga.

Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat menjadi sasaran utama dalam pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera yang hidup dalam lingkungan yang sehat pada setiap tahapan kehidupan, sehingga diperlukan intervensi berbeda namun berkelanjutan.

Adapun tantangan pembangunan keluarga:

1. Dinamika Keluarga

Kondisi yang terjadi saat ini seiring dengan kemajuan teknologi informasi telah mengubah hubungan antar keluarga, yang menjadi tantangan dalam pembangunan keluarga

berdasarkan siklus hidup dimulai dari gagasan perencanaan dari tahap pra berkeluarga (perencanaan kehidupan berkeluarga) pra nikah, hamil, pasca melahirkan (*neo natal*), usia anak, usia remaja, usia produktif hingga lanjut usia. *Pertama*, fase perencanaan/penyiapan kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup, dimana calon pengantin bukan hanya siap nikah tapi juga siap hamil sehingga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) atau periode Emas dan balita. Yaitu fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin pada saat kehamilan (270 hari) sampai dengan anak berusia 2 tahun (730 hari) karena pada masa itulah stunting dapat terjadi dan sekaligus dapat dicegah atau masih dapat dikoreksi.

Yang menjadi perhatian pemerintah pada fase ini adalah memastikan kecukupan gizi dan pola asuh bayi, balita, dan balita untuk mencegah gagal tumbuh (*stunting*). Masalah *stunting* masih banyak, Data SSGI tahun 2022 masih sebesar 21,6 persen sedangkan tahun 2024 target 14 persen harus tercapai. Calon Pengantin atau sumber daya manusia harus sehat tidak sekadar diberikan makanan yang banyak, tapi gizinya terpenuhi, tidak anemia dan mengonsumsi pil penambah darah yang larut gula. Namun yang menjadi kendala adalah siswa tidak mau mengonsumsi pil penambah darah sudah diberikan. Ini semua harus menjadi bagian dari transformasi pendidikan.

Kedua, fase usia dini anak. Pemerintah telah menginisiasi program Pendidikan Anak Usia Dini–Holistik Integratif (PAU D-HI) yang memaksimalkan kemampuan kognitif anak (stimulasi psikologis, pola asuh yang tepat, pemberian makan yang tepat) termasuk pembiasaan pada nilai-nilai karakter yang baik. Peran penting dan kualitas keluarga yang mewarnai pembentukan karakter yaitu pada model pendidikan yang diberikan orangtua terhadap anaknya. Pendidikan karakter akan berjalan efektif dan utuh jika melibatkan tiga institusi, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan karakter tidak akan berjalan dengan baik jika mengabaikan salah satu institusi, terutama keluarga.

Masa remaja juga tidak kalah penting, mengingat meningkatnya nilai-nilai

individualisme serta mudahnya kontrol sosial dari masyarakat, maka peranan keluarga dalam mengelola kehidupan remaja dengan pengembangan pola asuh yang baik dan benar harus ditekankan dengan menggunakan beberapa prinsip pengasuhan positif (Sanders, 2011).

Ketiga, fase investasi sekolah melalui wajib belajar 12 tahun dan penguatan pendidikan karakter. Yaitu pengajaran yang menekankan pada nilai-nilai untuk membentuk kepribadian anak, seperti kejujuran, saling menghargai, tanggung jawab, adil, peduli, dan bertindak sebagai warga negara yang baik.

Keempat, fase perguruan tinggi yang menargetkan peningkatan produktivitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM). Ini sangat



Gambar 3.2
Peran penting
orangtua
terhadap
pendidikan anak

Foto: Dok. BKKBN



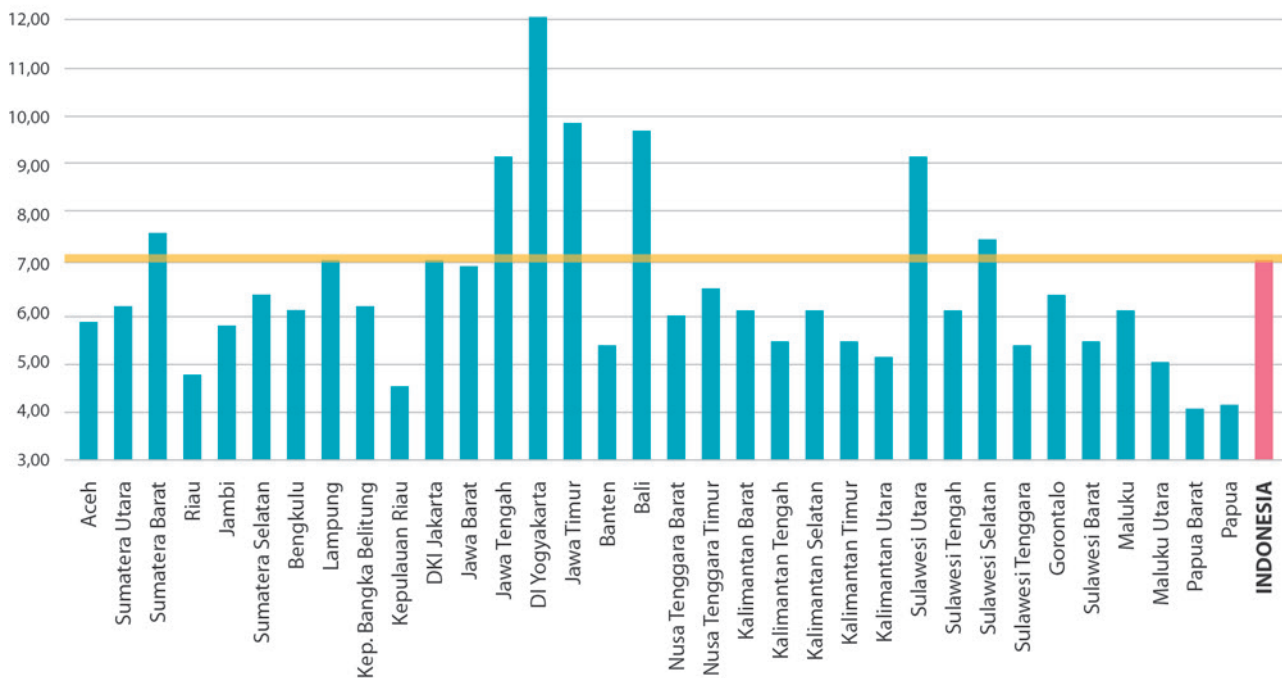
dibutuhkan agar Indonesia siap menghadapi bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada 2030 mendatang.

Kelima, fase produktif ialah fase manusia memasuki dunia kerja, membangun keluarga berkualitas. “Pada fase ini, pemerintah juga memiliki PR besar yaitu menyiapkan generasi selanjutnya dalam membangun keluarga. Keenam, fase lansia diharapkan pada fase ini bisa diwujudkan lansia yang sehat, mandiri, aktif, dan bermartabat. Dimulai dengan gaya hidup sehat dan olahraga secara teratur. Seiring meningkatnya usia harapan hidup maka terbuka potensi para Lansia diberdayakan sebagai bonus demografi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, selama sepuluh tahun terakhir, persentase penduduk Lansia di Indonesia meningkat dari 7,57 persen pada 2012 dan menjadi 10,48 persen pada 2022. Angka tersebut diproyeksi akan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 19,9 persen pada 2045. Kondisi ini menunjukkan Indonesia sedang berada dalam masa transisi menuju era *aging population* yaitu ketika persentase penduduk usia 60 tahun keatas mencapai lebih dari 10 persen.

Meskipun Indonesia sekarang berada dalam periode untuk dapat memetik bonus demografi, tetapi Indonesia juga harus mulai mempersiapkan diri untuk memasuki masa transisi menuju *aging*

PROPORSI PENDUDUK 65+ SETIAP PROVINSI DI TAHUN 2024



Sumber Bappenas 2023

Grafik 3.4
Proporsi penduduk 65+ setiap provinsi di tahun 2024

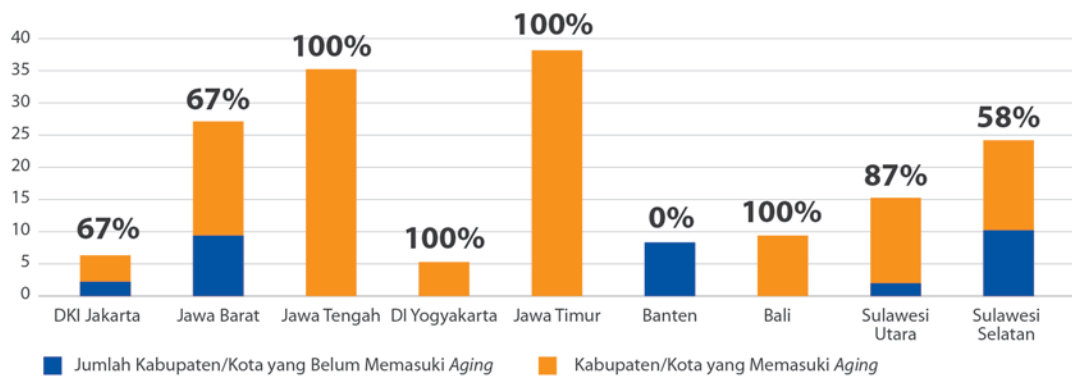


population. Pemerintah perlu mulai mempersiapkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kondisi kependudukan di Indonesia tersebut. Jika penduduk lansia memiliki kesehatan, pendidikan, dan keterampilan yang memadai, serta dapat terus berkontribusi dalam perekonomian, maka kelompok penduduk tersebut berpeluang membuka jendela kesempatan untuk Indonesia memperoleh bonus demografi kedua di masa yang akan

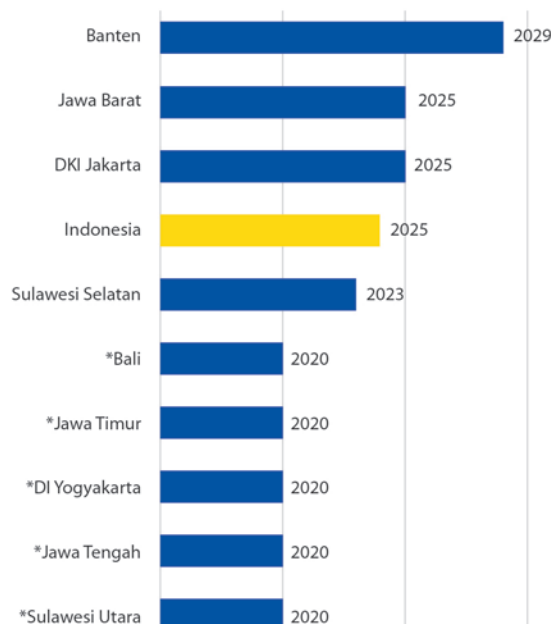
datang, menuju Indonesia emas 2045.

Pada tahun 2024, sebagian Provinsi di Indonesia telah memiliki proporsi lansia yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Sebagian besar Provinsi di Pulau Jawa, Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi utara telah memasuki *aging population* (Bappenas, 2023). Kondisi *aging population* di masing-masing daerah pada tahun 2025 dapat dilihat dari grafik berikut ini.

KABUPATEN/KOTA YANG MEMASUKI AGING POPULATION DI TAHUN 2025



TAHUN MEMASUKI AGING POPULATION



1. Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nali dan sebagian besar provinsi di wilayah Jawa memasuki *aging population* lebih cepat daripada nasional yang baru memasuki *aging population* di tahun 2024.
2. Banten baru memasuki periode *aging population* di tahun 2029. Provinsi ini merupakan provinsi yang paling akhir memasuki periode *aging population* dibandingkan nasional. Provinsi Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Provinsi di Pulau Jawa.
3. Hanya Provinsi Banten yang kabupaten/kota-nya belum memasuki *aging population*.
4. Seluruh kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur telah memasuki *aging population*.



Grafik 3.5
Kabupaten/kota yang memasuki *aging population*

Sumber Bappenas 2023



Seiring dengan meningkatnya pembangunan bidang kesehatan, yaitu meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) menyebabkan:

- a. Proporsi penduduk usia lanjut (65+) untuk nasional dan setiap provinsi mengalami peningkatan tiap tahunnya.
- b. Jika program-program yang bersifat *population responsive* dipersiapkan sejak dini, maka penuaan penduduk tidak akan menjadi masalah untuk pemerintah, melainkan akan membantu perekonomian negara atau tercapainya bonus demografi kedua.

Bonus demografi kedua dideskripsikan sebagai keadaan suatu negara atau wilayah ketika proporsi dari penduduk yang berusia tua (65+) semakin banyak, tetapi mereka dikategorikan penduduk usia lanjut yang masih produktif dan memberikan sumbangan bagi perekonomian negara.

Ada empat kegiatan yang dilakukan pada program Bangga Kencana yang dilaksanakan, antara lain: (1) Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), (2) Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR), (3) Kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja), dan (4) Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) dan sekolah lansia.

2. Masih Rendahnya Optimalisasi Fungsi Keluarga

Secara teoritis setiap keluarga akan memiliki struktur dan fungsi dari keluarga. Struktur keluarga diatur dari berbagai peran yang menyusun sistem sosial di lingkungan keluarga – dimana peran akan terbentuk berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat. Sistem sosial merupakan konstruksi besar yang membentuk struktur keluarga, dan sangat berpengaruh menentukan fungsi keluarga, oleh sebab itu struktur dan fungsi keluarga merupakan bagian penting dalam studi dan kebijakan yang terkait dengan keluarga.

BKKBN telah menetapkan ada delapan fungsi keluarga yang menjadi prasyarat, serta pola hidup setiap keluarga dalam rangka terwujudnya keluarga sejahtera dan berkualitas. Ke delapan fungsi keluarga sebagai berikut: (1) Fungsi Agama, Fungsi Sosial Budaya, (3) Fungsi Cinta Kasih, (4) Fungsi Perlindungan, (5) Fungsi Reproduksi, (6) Fungsi Sosialisasi Pendidikan, (7) Fungsi Ekonomi, dan (8) Fungsi Lingkungan. Permasalahan keluarga terjadi apabila ke-8 fungsi keluarga tidak berfungsi optimal.

Dalam mengimplementasikan fungsi keluarga diklasifikasikan 8 (delapan) yang meliputi:



- **Fungsi Agama**

Fungsi agama dalam keluarga dikembangkan agar keluarga menjadi tempat persemaian nilai-nilai agama dan budaya bangsa, sehingga seluruh anggota keluarga menjadi insan agamis yang penuh iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- **Fungsi Sosial Budaya**

Keluarga diharapkan dapat mengenalkan budaya Indonesia sebagai dasar-dasar nilai kehidupan, sehingga anak mempunyai wawasan terhadap berbagai budaya, baik daerah maupun nasional.

- **Fungsi Cinta Kasih**

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan cinta kasih. Dengan cinta dan kasih sayang yang terjadi dengan baik di keluarga, maka rumah tangga akan menjadi tempat yang menyenangkan bagi anggota keluarga yang lain.

- **Fungsi Perlindungan**

Fungsi ini menekankan bahwa keluarga merupakan pelindung yang pertama dan utama dalam memberikan kebenaran, keteladanan, serta tempat bernaung kepada anak dan keturunan.

- **Fungsi Reproduksi**

Mengetahui dan menanamkan fungsi reproduksi sangat penting bagi keluarga untuk mengatur reproduksi sehat yang terencana. Sehingga anak yang dilahirkan

nantinya mampu menjadi generasi penerus yang berkualitas.

- **Fungsi Sosialisasi Pendidikan**

Pendidikan dalam keluarga tidak hanya tentang bagaimana meningkatkan fungsi kognitif atau mencerdaskan, akan tetapi bagaimana membentuk karakter yang berakhlak mulia. Di sini, keluarga berperan penting terhadap upaya pembentukan kepribadian yang baik terdapat para anggota keluarga dari waktu ke waktu. Dalam kaitan ini, keluarga berperan mendidik anak mulai dari awal sampai menjadi manusia dewasa.

- **Fungsi Ekonomi**

Keluarga dalam fungsi ekonomi merupakan tempat membina dan menanamkan nilai-nilai keuangan keluarga, dan merencanakan keuangan keluarga, sehingga terwujud keluarga sejahtera. Fungsi ekonomi menjadikan keluarga berfungsi sebagai unit produksi secara ekonomi.

- **Fungsi Lingkungan**

Kesadaran akan pentingnya lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman perlu ditanamkan sejak dini. Hal ini untuk mendorong sikap dan perilaku peduli lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, melakukan kegiatan penghijauan, hemat energi, dan sebagainya.



2. Masih Rendahnya Perilaku Hidup Sehat pada Keluarga

Kesehatan mental merupakan suatu isu yang menjadi perhatian bagi masyarakat dewasa ini. Fenomena demikian berkaitan dengan adanya modernisasi ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan berbagai masalah psikologis dan sosial di lingkungan sekolah dan keluarga.

Berdasarkan Riskesdas 2013, di Indonesia mental *emotional disorder* pada remaja angkanya sebesar 6,1 persen, tahun 2018 naik menjadi 9,8 persen. Angka itu menunjukkan bahwa remaja yang perlu pendampingan serius bertambah. Sementara angka orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang sebelumnya 1,7 per 1.000, angkanya naik menjadi 7 per 1.000 pada tahun 2018, atau kenaikannya hampir 3 kali lipat. Di Indonesia lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi (Riskesdas 2018).

Tentu hal sangat memprihatinkan. Karena itu peran keluarga sebagai tempat membesarkan dan membangun karakter SDM menjadi sangat penting. Stabilitas suatu negara ditentukan oleh keluarga yang sehat ekonomi, sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan.

Sosialisasi akan kesehatan mental perlu diterapkan baik di desa,

sekolah dan tempat layanan publik. Pendampingan terhadap masyarakat yang membutuhkan harus dilakukan dengan maksimal untuk menekan angka penderita gangguan kesehatan. Dengan berbagai peran tersebut diharapkan masyarakat dewasa serta remaja dapat mengetahui pentingnya menjaga kesehatan mental.

3. Masih Rendahnya Ketahanan Keluarga dan Ketahanan Pangan Keluarga

Keluarga memiliki fungsi dan peran sangat penting yang harus dijalankan dengan baik agar menghasilkan sumber daya manusia berkualitas yang berpengaruh dalam menentukan tingkat kesejahteraan keluarga. Namun, dalam praktiknya masih banyak keluarga yang mengalami permasalahan membangun keluarga, sehingga berdampak pada pergeseran fungsi dan peran keluarga. Faktor terbesar terjadinya peningkatan fenomena kasus perceraian pasangan suami-istri dipicu oleh perselisihan atau pertengkaran rumah tangga akibat terpuruknya kondisi finansial rumah tangga.

Dalam PP Nomor 52 tahun 2019 telah dijelaskan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik, materil, dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan

kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Pengertian secara harfiah dari ketahanan dan kesejahteraan keluarga memang berbeda, namun keduanya saling berkaitan karena keluarga dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi berpotensi menjadi keluarga yang lebih tangguh (KemenPPA, 2016).

Keluarga di seluruh Indonesia diharapkan tetap berjuang memenuhi kebutuhan pangannya masing-masing dan masyarakat. Ketahanan pangan akan mudah tercapai, sebagai salah satu indikatornya melalui tercukupinya pengonsumsi pangan yang sehat. Dengan mengonsumsi pangan sehat, akan membuat stamina dan imunitas tubuh kuat dan terjaga.

Mengacu pada definisi *Food and Agriculture Organization* (FAO) mengenai ketahanan pangan, maka untuk mencapai kondisi ketahanan pangan harus memenuhi 4 komponen yang harus dipenuhi yaitu: pertama, kecukupan ketersediaan bahan pangan. Kedua, stabilitas ketersediaan bahan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun, ketiga, aksesibilitas/keterjangkauan terhadap bahan pangan, serta keempat, kualitas/keamanan bahan pangan yang digunakan.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah No 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan, ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya

pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan pada dasarnya bicara soal ketersediaan pangan (*food availability*), stabilitas harga pangan (*food price stability*), dan keterjangkauan pangan (*food accessibility*).

Peran perempuan dalam menjaga ketahanan pangan keluarga setidaknya terbagi dalam tiga hal: *Pertama*, kemampuan untuk mengatur ekonomi keluarga sehingga mampu untuk membeli kebutuhan pangan. *Kedua*, kreatifitas perempuan dalam melakukan diversifikasi pangan. *Ketiga*, kreatifitas untuk memanfaatkan lahan kosong sebagai tempat menanam tanaman pangan. Dan peran-peran nyata dari perempuan dalam menopang ketahanan pangan keluarga ini menjadi kontribusi nyata untuk menunjang ketahanan pangan nasional.

Semakin baik ketahanan keluarga, semakin baik pula kemampuan keluarga menghadapi perubahan-perubahan. Kebijakan yang tepat dapat mencegah keluarga Indonesia berada dalam situasi krisis sekaligus memastikan ketahanan keluarga tetap tangguh. Keberhasilan upaya membangun kualitas keluarga di Indonesia dapat diukur menggunakan suatu indikator yang disebut iBangga (Indikator Pembangunan Keluarga) melalui



pemetaan wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang, atau rentan. iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia

- Optimalisasi pemanfaatan iBangga untuk meningkatkan komitmen Kementerian/Lembaga serta mengakomodir kebutuhan lintas KL terkait pembangunan keluarga.
- Penguatan pemanfaatan I-Bangga sebagai instrumen untuk memantau dan mengukur kualitas pembangunan keluarga serta risiko kerentanan keluarga di daerah.
- Penguatan advokasi di daerah (Pemda, CSO, Organisasi Keagamaan).
- Mendorong peningkatan partisipasi sektor swasta dalam menerapkan kebijakan pembangunan keluarga
- Peningkatan inovasi, penyediaan alternatif model pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya keluarga.

4. Kemiskinan yang Masih Tinggi

Kemiskinan masih menjadi permasalahan besar di Indonesia yang harus dihapuskan karena penghapusan kemiskinan merupakan “kunci

utama” dalam target SDG’s yang akan melatarbelakangi keberlanjutan capaian pembangunan di bidang lainnya. Pengupayaan penurunan kesenjangan pendapatan dan kemiskinan akan terus dilakukan pemerintah Indonesia. Tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 10,14 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 27,54 juta jiwa. Sedangkan, tingkat kemiskinan ekstrem nasional tercatat sebesar 4 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 10,86 juta jiwa (TNP2K, 2021).

Dalam perjalanannya hingga tahun 2030, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi mampu bertumbuh 5,7 persen setiap tahun melalui pemanfaatan bonus demografi dan kemajuan teknologi, serta melakukan transformasi struktural. Rasio Gini diprediksi menurun ke tingkat ideal sebesar 0,34 pada tahun 2035 dan Indonesia akan terbebas dari kemiskinan akut (kemiskinan yang terjadi terus menerus atau berulang) pada tahun 2040 (KemenPPN/Bappenas, 2019). Sesuai yang tertuang dalam SDGs bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen dalam pengentasan kemiskinan bagi masyarakat berpendapatan rendah dan mengurangi proporsi penduduk semua usia yang hidup dalam kemiskinan dari semua dimensi, mengupayakan seluruh masyarakat rentan dan miskin agar memperoleh hak yang sama, serta mengurangi kerentanan masyarakat miskin terhadap kejadian ekstrem terkait iklim, bencana, sosial, ekonomi, dan



lingkungan. Indonesia juga diprediksi akan keluar dari *Middle Income Trap* pada tahun 2036 dan memiliki PDB terbesar ke-5 pada tahun 2045 sedunia (KemenPPN/Bappenas, 2019). Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan akut menjadi nol persen pada tahun 2030 yang berkelanjutan hingga tahun 2045.

Secara umum, tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2011 - 2021 mengalami penurunan relatif kecil baik dari jumlah maupun persentase, walaupun pada tahun 2013 dan 2015 Indonesia sempat mengalami kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin yang dipicu oleh kenaikan harga komoditi kebutuhan pokok sebagai akibat kenaikan harga bahan bakar minyak.

Perekonomian Indonesia telah memasuki krisis pada awal tahun 2020 saat pandemi Covid-19 menghasilkan 26,42 juta jiwa penduduk miskin (BPS, 2022). Kondisi ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah dalam pembatasan sosial, semakin banyak populasi terpapar Covid-19, sehingga mengurangi kemampuan rumah tangga dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pembatasan sosial membuat perekonomian tidak beroperasi 100 persen, sehingga banyak tempat usaha ditutup dan pekerja terpaksa dirumahkan (<https://smeru.or.id/>).

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 menyusun berbagai

strategi kebijakan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran yang berkoordinasi dengan lintas sektor kementerian/lembaga, meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong kemiskinan di Indonesia.

Melalui Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) digunakan sebagai basis data upaya-upaya pengentasan kemiskinan. Data ini telah memiliki nama dan alamat yang jelas atau *by name by address* (BNBA). Selain itu, data tersebut juga memiliki peringkat/desil kesejahteraan dan indikator lokasi yang dapat digunakan untuk menentukan sasaran program.

Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini tidak hanya dilakukan dengan pendekatan yang bersifat konvensional seperti bantuan sosial, bantuan langsung tunai, bantuan pangan non-tunai dan seterusnya, tetapi juga bantuan-bantuan yang memiliki fungsi pemberdayaan ekonomi. Hal ini telah diupayakan agar pengentasan kemiskinan bersifat *sustain* atau berkelanjutan. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai 0% di tahun 2024, dimana target pemerintah Indonesia ini lebih cepat lima tahun dari target global yang direncanakan pada tahun 2030 sesuai kesepakatan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).



Selain itu, *Pricewaterhouse Coopers* (PwC) memproyeksikan bahwa di tahun 2045, Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar nomor empat di dunia setelah, Tiongkok, India dan Amerika Serikat. Artinya, setelah Indonesia merayakan 100 tahun usia kemerdekaannya, Indonesia akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. Indonesia Emas

tahun 2045 diestimasikan terjadi saat era revolusi industri 5.0. Era revolusi industri kelima ini diwarnai oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), super komputer, rekayasa genetika, teknologi nano, mobil otomatis, dan inovasi. Era revolusi industri 5.0 akan terjadi dalam kecepatan eksponensial sehingga akan berdampak terhadap ekonomi, industri, pemerintahan, dan politik.

3.2.4 Isu Terkait Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Perpindahan penduduk dalam konteks pembangunan memerlukan suatu keseimbangan dalam kebijakan nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota agar lebih terarah dan terdistribusi secara merata. Motif ekonomi masih menjadi pendorong utama migrasi risen maupun migrasi permanen. Banyak migran melakukan perpindahan untuk bekerja dalam pekerjaan musiman yang biasanya tersedia hanya pada waktu tertentu dalam setahun, seperti panen pertanian, industri pariwisata, atau konstruksi musiman. Motif ekonominya adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam jangka waktu tertentu. Beberapa orang melakukan migrasi sementara untuk mengikuti program pendidikan atau pelatihan kerja yang tidak tersedia di wilayah asal mereka. Mereka dapat pindah untuk sementara waktu demi memperoleh keterampilan tambahan atau pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan prospek pekerjaan mereka di masa depan.

Migrasi permanen seringkali didorong oleh motif ekonomi utama, yaitu mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Ini bisa termasuk mencari pekerjaan yang lebih baik, gaji yang lebih tinggi, atau kondisi ekonomi yang lebih stabil di tempat baru. Kadang-kadang, ketidakstabilan ekonomi, seperti resesi, bencana alam atau konflik politik, bisa menjadi pendorong migrasi permanen. Penduduk dapat memutuskan untuk pindah secara permanen untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan keamanan finansial mereka.

1. Perubahan Pola Migrasi

Perubahan demografi yang terjadi hingga tahun 2045 memengaruhi perpindahan penduduk. Perubahan struktur penduduk menuju dewasa dan menua yang ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif, menuntut ketersediaan lapangan kerja yang lebih luas. Keterbatasan kesempatan kerja



Gambar 3.3
Keterbatasan
kesempatan
bekerja
mendorong
penduduk
bermigrasi



Foto: Dok. BKKBN

di tempat asal akan mendorong penduduk untuk berpindah ke tempat lain. Motivasi dan pergerakan ekonomi ini mendorong penduduk berpindah dengan pola permanen.

Pola perpindahan penduduk yang lain didorong dengan pesatnya perkembangan digitalisasi informasi dan komunikasi sebagai salah satu ciri globalisasi. Jarak geografis tidak menjadi halangan penduduk untuk melakukan perpindahan. Revolusi TIK bersamaan dengan kemajuan layanan transportasi telah menurunkan biaya migrasi secara signifikan sehingga mempermudah dan mempercepat migrasi penduduk (Czaika dan de Haas, 2014). Hal ini

akan memengaruhi perubahan pola mobilitas dari permanen menjadi non permanen dan akan menjadi semakin intens di masa depan. Bentuk mobilitas non permanen akan terdiri dari mobilitas sirkuler, musiman dan komuter (Ananta dan Arifin, 2014).

Mobilitas permanen masih akan berlanjut tetapi volume mobilitas di masa yang akan datang adalah pada isu perubahan daerah tujuan migrasi. Migran tidak lagi tertarik menuju wilayah-wilayah yang kompetisinya tinggi untuk mendapatkan pekerjaan/ peluang usaha, seperti Jawa dan Sumatera, tetapi tujuan migrasi akan bergeser ke wilayah-wilayah lain yang memungkinkan migran untuk meraih



peluang peningkatan kesejahteraan dan karir. Penting untuk diingat bahwa motivasi untuk migrasi dapat sangat beragam dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang kompleks. permanen.

Data Susenas 2020 menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau dan DI Yogyakarta menjadi lokasi tujuan terbesar penduduk usia produktif berjenis kelamin laki-laki dan berpendidikan terakhir SLTA sederajat untuk melakukan migrasi risen (BPS, 2021). Hasil penelitian di Kabupaten Sleman menemukan, aspirasi migran usia muda memiliki aspirasi untuk bermigrasi kembali ke daerah tujuan baru dengan alasan untuk meningkatkan karir yang lebih tinggi (Malamassam dkk, 2019).

Pekerja migran risen diprediksi akan lebih banyak bertempat tinggal di daerah perkotaan dan menggeluti lapangan kerja utama di bidang perdagangan besar dan eceran, serta reparasi dan perawatan mobil dibandingkan bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Perpindahan penduduk juga akan banyak terjadi melewati batas negara. Pekerja migran menjadi salah satu alasan perpindahan baik ke luar Indonesia maupun masuk ke Indonesia. Tenaga Kerja Asing yang masuk ke Indonesia akan lebih banyak didominasi dari kawasan Asia Timur, seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan India yang menggeluti sektor usaha jasa (BPS,

2020). Sedangkan, pekerja migran Indonesia lebih memilih bermigrasi ke negara Hongkong, Taiwan, dan Malaysia. Pada tahun 2045 angka pertumbuhan migran ini akan terus mengalami perubahan.

Migrasi menjadi satu bagian dalam Hak Asasi Manusia dan kesepakatan internasional sebagai salah satu efek globalisasi dan dapat membawa dampak positif bagi suatu negara. Indonesia termasuk dalam negara yang menyetujui kesepakatan internasional dalam dokumen terpadu untuk Migrasi yang Aman, Teratur dan Reguler (*Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration*), sehingga tata kelola migrasi internasional di Indonesia mengarah kepada kesepakatan tersebut ke depannya.

2. Pesatnya Proses Urbanisasi

Pada tahun 2045, sebagian besar penduduk Indonesia diperkirakan menetap di wilayah perkotaan dengan pembangunan infrastruktur dan perkembangan ekonomi. Daerah-daerah yang berada di sekitar kota juga akan berubah menjadi bagian dari kawasan perkotaan dan dinamakan proses urbanisasi-mega. Fenomena ini sudah terlihat di daerah Jakarta dan sekitarnya (Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang) dan akan terus berkembang ke depan. Konsekuensinya, peranan perkotaan dalam pembangunan semakin penting, sebagai ruang bagi berkembangnya eksternalitas positif dari aglomerasi industri dan tenaga kerja terlatih.



Proses perpindahan ke daerah perkotaan harus mempertimbangkan kesejahteraan penduduk, kualitas hidup, dan daya dukung lingkungan. Pengaturan tata ruang kota harus mendukung pelayanan sosial dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, lingkungan hidup yang sehat dengan penyediaan air bersih, sanitasi yang baik, pengelolaan sampah dan ruangan yang cukup untuk aktivitas fisik, serta infrastruktur lain yang memadai.

Pada tahun 2035, hampir 90 persen penduduk Pulau Jawa akan mendiami wilayah perkotaan dan kapasitas penduduk DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat akan mencapai 76 juta jiwa. Daya dukung Jawa dan DKI Jakarta pun akan semakin menurun, sehingga memerlukan pemindahan pusat pemerintahan dari Pulau Jawa ke Luar Pulau Jawa (KemenPPN dan Bappenas, 2019).

Dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, pemerintah Indonesia telah merancang rencana awal pemindahan IKN baru ke Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2020 yang dianggap sebagai upaya mengatasi tingginya urbanisasi. Kepadatan penduduk tidak lagi terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Pemindahan IKN baru merupakan bentuk transformasi Jawa sentris menjadi Indonesiasentris yang bertujuan positif terhadap pemerataan persebaran penduduk dan memberikan perbaikan pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan daerah perkotaan juga mewujudkan proses urbanisasi yang berkelanjutan dan mendukung upaya mengatasi perubahan iklim dengan mengurangi karbon emisi yang dihasilkan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan rendah karbon.

3. Meningkatkan Mobilitas Non Permanen

Pada tahun 2045, tingkat mobilitas penduduk non permanen diprediksi meningkat. Penduduk usia produktif berjenis kelamin laki-laki mendominasi sebagai pekerja migrasi sirkuler yang bekerja di bidang konstruksi. Ada perbedaan kecenderungan migran komuter yang bekerja di sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi dan perawatan mobil (Sakernas, 2020; Susenas, 2020). Migran komuter akan cenderung menggunakan transportasi pribadi daripada transportasi umum (BPS, 2021).

Pola mobilitas sirkuler terbentuk pada perpindahan tempat untuk pulang dan pergi dalam jangka waktu setiap minggu atau bulan kurang dari 6 bulan dengan lokasi tempat tinggal dan kerja berbeda. Bentuk kedua, mobilitas musiman adalah perpindahan yang dipengaruhi oleh situasi atau “musim”, misalnya adanya pekerjaan di saat tertentu di suatu daerah.

Bentuk terakhir, mobilitas komuter adalah perpindahan pulang-pergi setiap hari dalam jangka waktu kurang



dari 24 jam dengan tujuan bekerja dengan lokasi tempat tinggal dan kerja melampaui batas administratif kabupaten/kota (BPS, 2021).

Sepanjang ada kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan karir di tempat baru, maka penduduk atau migran di suatu daerah akan berpindah ke tempat yang baru. Bahkan, mobilitas non permanen ini dapat dilakukan kapan saja dan ke mana saja, sehingga muncul istilah mobilitas penduduk yang tidak bisa ditebak terjadinya,

yang dikenal dengan wira-wiri.

Mobilitas wira-wiri ini dapat terjadi dalam internal wilayah Indonesia, bahkan juga melewati batas negara terutama dilakukan oleh mereka yang berpendidikan dan berketerampilan tinggi. Dengan percepatan perkembangan digital, wira-wiri digital akan menjadi semakin sering terjadi di masa mendatang, dimana penduduk dalam waktu yang singkat dapat berada di mana saja tanpa perlu ke mana-mana.

3.2.5 Isu Terkait Penguatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan dan *Database* Kependudukan

a. Belum Optimalnya Tata Kelola Data Kependudukan

Pentingnya komponen penduduk dalam pembangunan menjadikan kebutuhan akan data kependudukan sebagai hal yang sangat mendasar. Data menjadi bukti empiris dalam perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi kebijakan. Sehubungan dengan hal tersebut, data kependudukan dibutuhkan untuk mengakomodasi empat hal yang paling penting, yaitu peningkatan kualitas penduduk, pengendalian kuantitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, data kependudukan.

Sistem registrasi penduduk di Indonesia yang belum dikelola dengan baik akan menyebabkan

sebagian penduduk terdiskriminasi. Data registrasi kependudukan menjadi penting karena bila seseorang tidak teregistrasi, ia bisa kehilangan hak-hak dasarnya seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, serta layanan publik lainnya dari masa kanak-kanak hingga lanjut usia. Saat ini cakupan Kartu Keluarga dan e-KTP sudah cukup tinggi, namun beberapa layanan administrasi yang lain seperti pemenuhan akta kelahiran, kartu identitas anak, dan akta nikah masih menjadi tantangan besar hingga beberapa tahun ke depan. Sebagai contoh, cakupan akta kelahiran untuk anak usia 0-17 tahun baru mencapai 90,41 persen pada tahun 2022 menurut hasil Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).



Gambar 3.4
Pendataan
dan pelayanan
kesehatan pada
balita

Foto: Dok. BKKBN

Penguatan terhadap tata kelola data kependudukan terutama pada data administrasi kependudukan (registrasi vital) sangat penting untuk dilakukan. Karakteristik yang dimiliki registrasi penduduk berupa jangka waktu pelaksanaan yang berkesinambungan, cakupan wilayah yang luas dan meliputi seluruh keterangan dasar kependudukan memungkinkan menghasilkan data kependudukan yang valid dan aktual secara murah dan efektif untuk perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Namun sampai saat ini hasil pelaksanaan registrasi tersebut belum dapat diwujudkan karena terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaannya baik berasal dari instansi pelaksana maupun masyarakat. Keterbatasan akses: terutama di daerah pedesaan

atau terpencil, akses terhadap layanan registrasi vital seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian terbatas karena jarak fisik, kurangnya infrastruktur, atau kendala ekonomi. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya registrasi vital atau kurangnya pendidikan mengenai prosedur yang diperlukan dapat menyebabkan kelalaian dalam mendaftarkan peristiwa penting, seperti kelahiran atau pernikahan.

Pencatatan data kelahiran dilakukan di berbagai tempat seperti Puskesmas, rumah sakit, rumah bersalin, serta dokter dan bidan praktik. Kalau data ini dikelola dan diolah dengan baik, maka dapat menghitung angka kelahiran seperti angka kelahiran kasar (*crude birth rate*/CBR), angka fertilitas menurut



umur (*age-specific fertility rate/ASFR*), dan angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*) –data yang sangat penting untuk perencanaan pembangunan kesehatan dan Program Keluarga Berencana.

Pencatatan data kematian juga tersebar di berbagai institusi seperti rumah sakit, puskesmas, kantor desa/kelurahan dan Dinas Pemakaman yang juga belum dikelola dengan baik. Kalau semua data kematian tersebut diolah secara terintegrasi dan terhubung dalam jaringan (*daring*), maka akan dapat dihitung angka kematian seperti kematian bayi baru lahir (*neonatal mortality rate*), kematian bayi (*infant mortality rate*), dan kematian ibu melahirkan (*maternal mortality rate*) yang sangat penting untuk perencanaan pembangunan kesehatan.

b. Meningkatnya Integrasi Penggunaan data Administrasi Kependudukan

Integrasi data administrasi kependudukan menjadi urgensi, arah analisis, dan evaluasi regulasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Adanya integrasi data administrasi kependudukan yang komprehensif dapat memungkinkan pemerintah sebagai pengambil kebijakan untuk memberikan intervensi yang sesuai dalam pemecahan masalah kependudukan. Meskipun dalam prosesnya, integrasi data membutuhkan tahapan yang panjang mulai dari identifikasi kebutuhan, membangun kemitraan, menemukan pendekatan pemo-

delan yang tepat, mengelola risiko, dan metadata, akan tetapi data administrasi kependudukan yang terintegrasi dapat menjadi sarana informasi sekaligus solusi dari berbagai masalah kependudukan.

Integrasi data kependudukan dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Di saat yang sama, data yang terintegrasi juga dapat digunakan untuk menginformasikan kebijakan, melukiskan gambaran nasional tentang kondisi sosial, lingkungan, dan ekonomi, sehingga mengakselerasi perencanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Diketahui bahwa saat ini hampir setiap instansi pemerintah pusat maupun daerah sudah melakukan transformasi digital dan memiliki sistem informasi masing-masing. Kendati demikian, setiap instansi memiliki data yang dilindungi oleh undang-undang sehingga sulit untuk berbagi data elektronik. Selain itu, akses terhadap data-data tersebut juga masih bersifat terpisah sehingga terjadi duplikasi dan perbedaan pada elemen data sejenis. Oleh karena itu, diperlukan adanya tata kelola data nasional untuk mengintegrasikan dan mengharmonisasikan berbagai elemen baik dari segi teknologi, regulasi, dan wewenang lintas sektor untuk menciptakan integrasi data kependudukan yang komprehensif.

Dalam konteks integrasi data kependudukan ini, pemerintah mulai berbenah diri dan kemudian

menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam peraturan ini ada dua substansi yang paling esensial, yaitu pertama, adanya perbaikan kaidah penyusunan data, dan kedua, adanya keinginan membangun fondasi kuat untuk mewujudkan praktik keterbukaan data (*transparency*) dan saling bagi pakai data (*interoperability*) di antara institusi pemerintahan.

Dalam konteks perbaikan kualitas data, menurut peraturan ini data yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan harus benar dan berkualitas. Data yang diproduksi baik data dasar maupun data yang digunakan sebagai pembentuk indikator perencanaan pembangunan – dalam bentuk indikator program, indikator kegiatan dan indikator keluaran (*output*)–seluruhnya harus sesuai prinsip Satu Data Indonesia.

Pertama, harus menggunakan Standar Data yang benar. *Kedua*, harus memiliki Metadata yang baku. *Ketiga*, harus memiliki Kode Referensi dan Data Induk. *Keempat*, data yang telah diproduksi harus dapat dibagi pakaikan secara luas ke seluruh instansi pemerintah dan (bahkan) ke publik sehingga harus memiliki interoperabilitas yang tinggi melalui Portal Satu Data Indonesia.

Perkembangan *Big Data* juga harus dapat diantisipasi dalam perkembangan kependudukan. Konteks

Amerika misalnya, setidaknya terdapat 4 juta pencatatan kelahiran per tahunnya, ditambah dengan setidaknya 2 juta catatan kematian, jutaan survei mikrodata, catatan jaminan kesehatan, dan berbagai data lainnya.

Kondisi ini pada saat yang sama mengantarkan perkembangan pengetahuan berbasis data (*data driven knowledge*) – *big data* – yang dianggap mampu mengubah bagaimana data diproduksi dan dikelola. Data yang dihasilkan dalam konteks populasi ini pada satu sisi juga menunjukkan bagaimana fenomena kependudukan bekerja dalam ruang digital.

Namun bukan berarti para pengambil dan pengampu kebijakan bisa sepenuhnya menaruh kepercayaan terhadap *big data*. Sebab nyatanya masih banyak keterbatasan yang memungkinkan data yang ditangkap tidak sepenuhnya mampu benar-benar menjelaskan masyarakat. Terutama pada jejak digital yang dihasilkan dari perilaku internet, yang sangat bisa jadi tidak diproduksi oleh keseluruhan populasi melainkan hanya sekelompok orang yang memiliki akses terhadap kegiatan “produksi data”.

Terlebih keterbatasan pada algoritma analisis tetap menjadi batasan, apakah data yang dihasilkan benar-benar sesuai dan mampu menjelaskan kondisi realita sebenarnya. Sehingga proses pengaplikasian *big data*



bukan hanya berurusan dengan bagaimana menganalisis data yang tersedia, serta memilih jenis data yang sesuai dengan kebutuhan analisis, dan memiliki karakteristik yang representatif bagi populasi. Hal yang paling utama kemudian dalam upaya pengaplikasian *big data* adalah berarti membangun jaringan lintas sektor kepada berbagai pihak yang memiliki “jejak digital”. Mitra potensial seperti perusahaan penyedia jaringan komunikasi yang mampu mencatat keberadaan setiap telepon seluler pada suatu wilayah, perusahaan transportasi yang mencatat perjalanan penduduk, rumah sakit

yang mencatat rekam medis, dan berbagai pihak lainnya perlu menjadi perhatian. Kedua, adalah membangun sistem algoritma yang mumpuni dalam berbagai kasus analisis yang dibutuhkan.

Ketersediaan data yang cenderung tidak terstruktur membutuhkan algoritma yang baik dalam membaca dan menerjemahkannya sesuai kebutuhan analisis. Tanpa kesadaran akan potensi dan keterbatasan data, kemitraan strategis, dan kompetensi SDM yang memadai, serta pemrograman algoritma yang baik maka akan sangat sulit memaksimalkan *big data* dalam kebijakan kependudukan.

Blueprint
**Pembangunan
Kependudukan**
INDONESIA 2045

IV

**PRINSIP
PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN**





Gambar 4.1
Mendidik anak
mencintai bangsa
melalui sejarah

Foto: Dok. BKKBN

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Pembangunan nasional mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilaksanakan berdasarkan

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan kependudukan Indonesia menganut prinsip-prinsip tentang;

1. Pembangunan Berwawasan Kependudukan.
2. Pembangunan Berkelanjutan.
3. Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia.
4. Pembangunan Berwawasan Bhinneka Tunggal Ika (Multikulturalisme).
5. Pembangunan Berwawasan Global (Berbasis Responsif).



4.1

Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Aspek penduduk merupakan hal yang sangat fundamental dalam dimensi pembangunan. Dalam nilai-nilai budaya, penduduk merupakan pelaku dan juga sasaran pembangunan karena penduduklah yang akan menikmati hasil pembangunan. Berkaitan dengan peran penduduk dalam pembangunan, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas penduduk melalui berbagai sumber daya yang ada, dengan demikian akan terwujud keluarga kecil yang berkualitas serta tercapainya upaya pengendalian kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bertujuan untuk mencapai kehidupan yang layak bagi semua orang di bumi yang sehat pada tahun 2030. Sebagian targetnya kemungkinan tidak akan bisa tercapai jika gagal mengatasi permasalahan kependudukan yang ada. Kebijakan kependudukan yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas penduduk adalah kunci untuk memenuhi SDGs.

Indonesia berkomitmen tinggi untuk menjaga pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan pembangunan dalam dimensi politik dan sosial.

Konsep pembangunan kependudukan yang akan digunakan dalam *Blueprint* Pembangunan Kependudukan 2045 ini adalah konsep yang bersifat integral. Ada tiga komponen dalam konsep tersebut, yaitu pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan.

Tahap pertama yakni pengelolaan fokus kebijakan yang dilakukan adalah pada kuantitas penduduk. Tujuannya adalah untuk menciptakan struktur penduduk yang kondusif untuk mencapai kesejahteraan penduduk. Dalam fase ini target yang ingin dicapai adalah pencapaian bonus demografi. Adapun cara yang dilakukan adalah mengelola fertilitas, mortalitas dan mobilitas penduduk.

Tahap kedua adalah tahap pengembangan yang memiliki fokus pada pengembangan kualitas penduduk. Tujuan fase ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari berbagai dimensinya.

Tahap ketiga adalah pemanfaatan sebagai tahap akhir dari pembangunan kependudukan. Pada tahap ini sasarannya adalah memanfaatkan potensi penduduk yang dari sisi jumlah sudah kondusif dan dari sisi kualitasnya sudah tinggi. Tujuan akhir dari tahap ini adalah meningkatkan



kesejahteraan penduduk, daripada mementingkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Dengan strategi pembangunan bersifat *bottom up planning*, perencanaan berasal dari bawah, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, yang lebih penting adalah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

Dalam operasionalisasi konsep ini ada dua sektor yang menjadi penting untuk diperhatikan. *Pertama*, di seluruh tahap pembangunan kependudukan dilakukan dengan pendekatan keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dianggap mampu menjadi *tool* dan *mean* dalam mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan.

Kedua, semua tahap dan penguatan pendekatan keluarga hanya dapat dilakukan dengan baik jika dikerjakan berbasis data. Dalam pembangunan kependudukan harus dibangun sistem informasi yang memadukan berbagai data kependudukan dalam “satu data”. Hal inilah yang akan mendasari konsep *evidence based policy* (kebijakan pembangunan yang senantiasa didasarkan pada data dan informasi kependudukan yang akurat) serta mencermati berbagai isu kependudukan yang ada (*population responsive policy*) juga memperhatikan kondisi dan situasi kependudukan yang diharapkan di masa depan.

Selain memperhatikan tren dan dinamika kependudukan yang terjadi, pemerintah juga harus mempunyai visi dan misi kependudukan kedepan diinginkan (reka yasa penduduk) menuju Indonesia emas 2045. Visi kependudukan masa depan sangat penting dan strategis, karena penduduk bukan hanya sebagai obyek

pembangunan namun sebagai subyek pembangunan.

Kebijakan pembangunan kependudukan berkaitan dengan rekayasa penduduk dimasa depan yang diinginkan, baik dari pengendalian kuantitas dan pertumbuhan, kualitas maupun persebarannya atau yang dikenal sebagai *population influencing policy*. Sebagai contoh adalah program KB, pemerintah tidak menginginkan penduduk masa depan tidak terkendali, konsekuensinya program KB harus mendapat perhatian dari seluruh bangsa Indonesia. Hal ini tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yang mengamanatkan penduduk tumbuh seimbang (PTS) pada tahun 2025, selanjutnya terus dipertahankan.

Dari sisi kualitas, penduduk Indonesia relatif masih rendah, tercermin dari dari IPM Indonesia untuk tahun 2020 menduduki peringkat ke 107 dari 189 negara yang dianalisis oleh *United Nation Development Programme* (UNDP). Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan berkaitan hal ini adalah melakukan berbagai upaya pembangunan dengan kebijakan yang efektif agar kualitas penduduk dapat ditingkatkan baik indikator kesehatan, pendidikan maupun ekonomi, yang dipergunakan untuk menghitung HDI.

Terkaithalini, sangat penting dirumuskannya *roadmap* rancangan induk (*grand design*) atau *Blueprint* Pembangunan Kependudukan Indonesia Emas 2045, yang berkaitan dengan 5 pilar yaitu; pengendalian kuantitas, kualitas, mobilitas, pembangunan keluarga dan adminduk berkaitan sasaran/target yang ingin dicapai.



4.2

Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip lain yang penting dalam pembangunan adalah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Definisi dasar dalam pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang (United Nation, 1987). Prinsip ini juga telah disebutkan dalam hasil ICPD 1994 dan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009. Pembangunan berkelanjutan berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui kesempatan kerja dan peluang usaha berkelanjutan, inovatif, industri yang inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau serta didukung oleh kemitraan yang saling bersinergi.

Pembangunan di Indonesia harus mengarusutamakan tercapainya tujuan SDGs dalam pembangunan di segala bidang dengan memasukkan sebagian besar target ke dalam dokumen perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah. Dengan mengarusutamakan SDGs akan menjaga perspektif dan paradigma keberlanjutan dalam arah pembangunan nasional dan daerah.

Namun target SDGs tidak akan dapat tercapai hanya oleh pemerintah, tetapi

juga membutuhkan sinergi dengan organisasi masyarakat sipil, media, swasta, filantropis, dan akademisi. Selain itu, budaya dan perilaku masyarakat juga perlu mendukung program pembangunan berkelanjutan sesuai dengan kaidah-kaidah yang tercantum dalam SDGs.

SDGs mewujudkan cara pandang pembangunan multidimensi. Maksudnya, untuk memecahkan suatu permasalahan atau isu pembangunan diperlukan solusi dan kontribusi dari berbagai sektor. Perspektif yang sempit dan ego sektoral antarinstansi baik pemerintah maupun swasta hanya akan menimbulkan inefisiensi, ketidakefektifan, tumpang tindih, dan pemborosan anggaran. Salah satu keunggulan SDGs yang cukup penting adalah memecah kebekuan ego-sektoralisme (*silo*), mendorong kolaborasi, keterkaitan dan penguncian melalui indikator terukur. Indonesia kini memiliki 319 indikator SDGs. Untuk mencapai target indikator SDGs tersebut, rencana aksi implementasi sektor terkait harus dimasukkan, dipantau dan dievaluasi secara periodik atau berkala.

Keterkaitan antargenerasi juga merupakan salah satu pertimbangan



penting dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang berfokus pada ekonomi saja akan cenderung untuk menggunakan sumber daya alam dengan berlebihan. Potensi, kemampuan, modal dan sumber daya yang ada tidak dapat digunakan untuk satu kurun waktu, tetapi dikembangkan untuk pembangunan di kurun waktu berikutnya.

Untuk itu, dalam prinsip pembangunan berkelanjutan ini, terdapat 3 aspek yang berkaitan, yaitu:



1

Aspek pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan



2

Aspek pembangunan sosial yang berkelanjutan untuk mencapai kualitas hidup yang tinggi



3

Aspek pengelolaan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

Ketiga aspek tersebut harus dilihat dalam konteks perkembangan kependudukan. Aspek pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merujuk pada penempatan peran penduduk sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi. Jadi penduduk sebagai subjek pembangunan. Aspek pembangunan sosial yang berkelanjutan merupakan penjabaran dari penempatan peran penduduk sebagai objek pembangunan. Penduduk sebagai penikmat pembangunan. Aspek pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan menempatkan peran penduduk sebagai pemelihara lingkungan hidup demi kehidupan generasi mendatang.

Sumber daya (alam) harus dikelola dengan sebijaksana mungkin. Konsep tentang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) datang pertama kali oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED). Mengacu pada konsep yang dikembangkan oleh WCED maka krisis lingkungan dan pembangunan tidak dapat dipecahkan secara terpisah, tetapi harus secara terkait. Memecahkan krisis lingkungan secara tersendiri hanya akan memperparah krisis pembangunan, yang pada gilirannya akan kembali menimbulkan masalah lingkungan hidup yang lebih besar lagi.



Untuk mencapai keadaan yang memungkinkan keberlanjutan, strategi Pemerintah lakukan dengan merumuskan tujuh agenda pembangunan 2020-2024 harus dicapai yang menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan lintas instansi antara lain:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. agenda ini menitikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar. Misalnya saja pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menjangkau kesehatan semesta. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan

pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. hal ini dititikberatkan pada peningkatan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja.
5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukham dan transformasi pelayanan publik.

Strategi pembangunan global yang berwawasan lingkungan seperti dirumuskan WCED itu diadopsi oleh Indonesia sesuai pula dengan filsafat pembangunan yang berkembang di Indonesia. Kesadaran akan keterkaitan krisis ekonomi dan pembangunan, merupakan salah satu alasan yang memperkuat keputusan untuk menerapkan konsep ini.



4.3

Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia

Menerapkan “pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk pembangunan” dalam praktiknya menjadi tantangan terbesar yang dihadapi tidak hanya para pendukung hak asasi manusia tetapi juga pengambil kebijakan dalam pembangunan. Pembangunan adalah konsep yang kontroversial meskipun hak asasi manusia dan pembangunan bersifat melengkapi. Meski, secara historis ada jarak antara hak asasi manusia dan pembangunan.

Di tingkat global, PBB menerbitkan deklarasi tentang universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tahun 1948. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah wujud kesepakatan standar hak asasi manusia (HAM) yang berlaku secara universal. Universalitas tersebut mengisyaratkan bahwa setiap orang, di negara mana pun ia berada, memiliki hak hidup yang sama, pembangunan kependudukan Indonesia menganut prinsip utama yakni memenuhi hak-hak dasar manusia atau sejalan dengan deklarasi Universal HAM. Setiap orang wajib menjaga, melindungi serta menghormati haknya setiap orang.

Singkatnya, gagasan tentang hak atas pembangunan telah menetapkan dua hal. *Pertama*, memperkenalkan pembangunan sebagai hak asasi manusia untuk memberikan otoritas hukum dan moral kepada negara-negara berkembang untuk melakukan redistribusi sumber daya internasional dalam meningkatkan pembangunan dan mengarahkan pembangunan ke bidang hak.

Kedua, gagasan hak atas pembangunan mengandaikan pembangunan sebagai perwujudan hak asasi manusia baik sipil dan politik, maupun ekonomi, sosial, dan budaya. Ini menegaskan bahwa semua orang memiliki hak untuk pembangunan dan bahwa pembangunan dicapai melalui realisasi semua jenis hak asasi manusia. Pandangan inti dari pendekatan ini adalah bahwa pembangunan setara dengan perwujudan hak asasi manusia. Kita perlu mengembangkan kebijakan yang mengedepankan hak asasi manusia, dan norma-norma yang adil di tempat kerja dan di rumah sehingga kita dapat membangun keluarga yang lebih sehat, ekonomi yang lebih kuat dan masyarakat yang tangguh.

Pembangunan kependudukan berbasis HAM adalah pendekatan yang mengintegrasikan hak asasi manusia (HAM) ke dalam kebijakan dan praktik pembangunan penduduk. Hal ini berarti memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan penduduk tidak hanya memperhatikan pertumbuhan jumlah penduduk, tetapi juga memperhatikan dan menghormati hak-hak asasi manusia individu dan kelompok. Beberapa prinsip dan komponen kunci dari pendekatan pembangunan kependudukan berbasis HAM antara lain:

- (1) **Non-Diskriminasi:** Menghilangkan segala bentuk diskriminasi dalam kebijakan dan program pembangunan penduduk berdasarkan pada ras, etnis, agama, gender, usia, atau status sosial dan ekonomi.
- (2) **Partisipasi Aktif dan Inklusif:** Memastikan partisipasi aktif dan inklusif dari seluruh kelompok dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan penduduk.
- (3) **Akses pada Layanan Kesehatan Reproduksi:** Menjamin akses yang setara dan universal terhadap layanan kesehatan reproduksi, termasuk layanan kesehatan maternal, keluarga berencana, dan pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS.
- (4) **Pendidikan dan Informasi:** Memberikan pendidikan seksual yang komprehensif dan informasi yang akurat tentang hak reproduksi dan kesehatan seksual kepada semua individu, termasuk remaja.
- (5) **Perlindungan Terhadap Kekerasan dan Penyalahgunaan:** Mencegah dan mengatasi kekerasan, penindasan, dan penyalahgunaan dalam konteks reproduksi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, mutilasi genital perempuan, dan pernikahan anak.
- (6) **Keseimbangan Antara Hak Individu dan Kebijakan Kependudukan:** Memastikan bahwa kebijakan kependudukan menghormati hak individu untuk membuat pilihan reproduksi yang bebas dan informasi, tanpa campur tangan atau tekanan dari pihak lain atau pemerintah.
- (7) **Kepastian Hukum:** Menguatkan kerangka hukum dan kelembagaan yang melindungi dan mempromosikan hak-hak reproduksi dan kependudukan, termasuk hak atas identitas dan registrasi sipil.
- (8) **Kerjasama Antar-Sektor:** Memfasilitasi kerjasama lintas-sektoral antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional dalam mempromosikan dan melindungi HAM dalam konteks pembangunan kependudukan. Pembangunan kependudukan berbasis HAM mengakui bahwa hak-hak asasi manusia adalah landasan utama untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh populasi.



Pengendalian penduduk berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pendekatan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengatur pertumbuhan penduduk, yang tetap memperhatikan dan menghormati hak-hak asasi manusia setiap individu. Menekankan pentingnya pendekatan yang berkelanjutan dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, yang memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak asasi manusia setiap individu serta dampaknya terhadap lingkungan dan pembangunan sosial-ekonomi.

Mobilitas penduduk berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pendekatan dalam merencanakan, mengelola, dan memfasilitasi perpindahan manusia yang memperhatikan dan menghormati hak-hak asasi manusia setiap individu yang terlibat dalam proses mobilitas tersebut. Mengakui hak setiap individu untuk bergerak bebas dan memilih tempat tinggalnya sendiri. Ini termasuk hak untuk meninggalkan negara asal, memilih tempat tujuan baru, dan kembali ke negara asal tanpa diskriminasi atau hambatan yang tidak sah. Memastikan perlindungan hak-hak migran, termasuk hak untuk bekerja, hak atas kesehatan dan keamanan, serta akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum yang sama dengan penduduk lokal. Mengadopsi kebijakan

yang inklusif dan non-diskriminatif dalam mengatur mobilitas penduduk, sehingga tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, etnis, agama, gender, atau status migran.

Pemberian identitas penduduk berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pendekatan dalam menyediakan dokumen identitas yang diakui secara hukum kepada setiap individu, dengan memperhatikan dan menghormati hak-hak asasi manusia mereka. Pemberian identitas penduduk harus dilakukan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, etnis, agama, gender, status migran, atau status sosial-ekonomi lainnya. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan dokumen identitas.

Dalam perwujudan hak asasi manusia, konsep yang diperhatikan adalah eksklusi sosial. Eksklusi merupakan proses peminggiran sosial terhadap beberapa kelompok yang didiskriminasikan atas dasar etnis, ras, agama, orientasi seksual, kasta, keturunan, gender, usia, kecacatan, HIV, kondisi kesehatan kronis (termasuk penyakit mental), fakir miskin, pengungsi, masyarakat adat dan masyarakat terpencil. Mereka juga dirugikan karena lokasi tempat tinggal tidak tersentuh oleh kegiatan pembangunan.



Poros penggerak eksklusi sosial meliputi:

1



Kerentanan yang berkaitan dengan siklus hidup, disabilitas, dan cedera atau sakit.

2



Kemampuan sumber daya manusia yang terbatas (*level* pendidikan, *skill*, dan kesehatan) menghalangi individu dari akses terhadap sumber pendapatan yang mencukupi dan berkelanjutan.

3



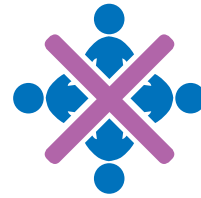
Ketidakcukupan *legal norm* (hukum) dan hak asasi, termasuk hak kepemilikan, kesetaraan gender, akses kepada aset dan pasar tenaga kerja, standar tenaga kerja yang wajar dan adil.

4



Ketidakmampuan kebijakan dan institusi publik untuk mempromosikan akses yang wajar dan inklusif ke aset produktif, sumber daya, kesempatan, termasuk akses ke tanah, keuangan, dan pasar (swasta).

5



Kegagalan untuk membangun sistem dan ukuran untuk menginstitutionalisasi inklusivitas dan keadilan akses pelayanan publik.

6



Pemerintahan yang buruk baik sistem maupun kebijakannya.

7



Norma informal dan praktik-praktik diskriminasi (gender, ras, etnis, dan seksualitas).

8



Kurangnya edukasi bagaimana intervensi yang efektif dalam mengatasi persoalan yang berkaitan dengan sosial dan kerentanan.

Eksklusi sosial merupakan isu kependudukan yang harus diperhatikan dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. Upaya menghilangkan eksklusi sosial adalah dengan kebijakan-kebijakan inklusif yang sesuai dengan kebutuhan serta menjamin tercapainya cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal atau terpinggirkan dalam proses pembangunan.



4.4

Pembangunan Berwawasan Bhinneka Tunggal Ika (Multikulturalisme)

Multikulturalisme memiliki akar kata kultural atau budaya, yang bila dilihat secara kesatuan adalah bermacam-macam budaya. Menurut Azra (2007), multikulturalisme adalah pandangan dunia yang diterjemahkan dalam berbagai kebudayaan dan menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman dan pluralisme yang ada dalam masyarakat.

Lebih lanjut Cholil (2008) menyatakan bahwa multikulturalisme merupakan kepercayaan bahwa kelompok etnik dan budaya yang berbeda dapat hidup berdampingan. Kedua pengertian ini apabila disimpulkan menyatakan bahwa multikulturalisme adalah keadaan dimana masyarakat yang berbeda dan plural dapat hidup secara damai dan saling menghormati.

Indonesia adalah negara multikultural yang terdiri dari berbagai kelompok suku, etnis, budaya dan agama. Menurut data hasil Supas 2015 Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di Tanah Air. Ulasan mengenai multikultural ini dituangkan dalam konsep multikulturalisme yang

tidak hanya berbicara keragaman, tetapi juga adanya persamaan dalam derajat atau kesederajatan.

Berbagai aspek terkait yang mendukung ideologi ini seperti politik dan demokrasi, keadilan, penegakan hukum, kesempatan bekerja dan berusaha, Hak Asasi Manusia, hak budaya, hak masyarakat dan golongan tertentu dan etika. Multikulturalisme bukan hanya pemahaman, tetapi juga suatu ideologi yang akan berpengaruh terhadap sudut pandang kebijakan dalam pembangunan. Hal ini tertuang jelas dalam ideologi Pancasila yang bila diterjemahkan lebih lanjut, prinsipnya adalah tidak ada kebijakan yang “*one size fit all*” atau sesuai untuk semua penduduk Indonesia.

Salah satu tujuan pembangunan kependudukan 2021-2045 adalah untuk membangun penduduk Indonesia yang majemuk, sehingga penduduk Indonesia menjadi penduduk sehat dan berpendidikan, dengan demikian penduduk dapat menikmati akses berkelanjutan ke taraf hidup yang layak dengan didukung oleh kemandirian ekonomi nasional, keanekaragaman

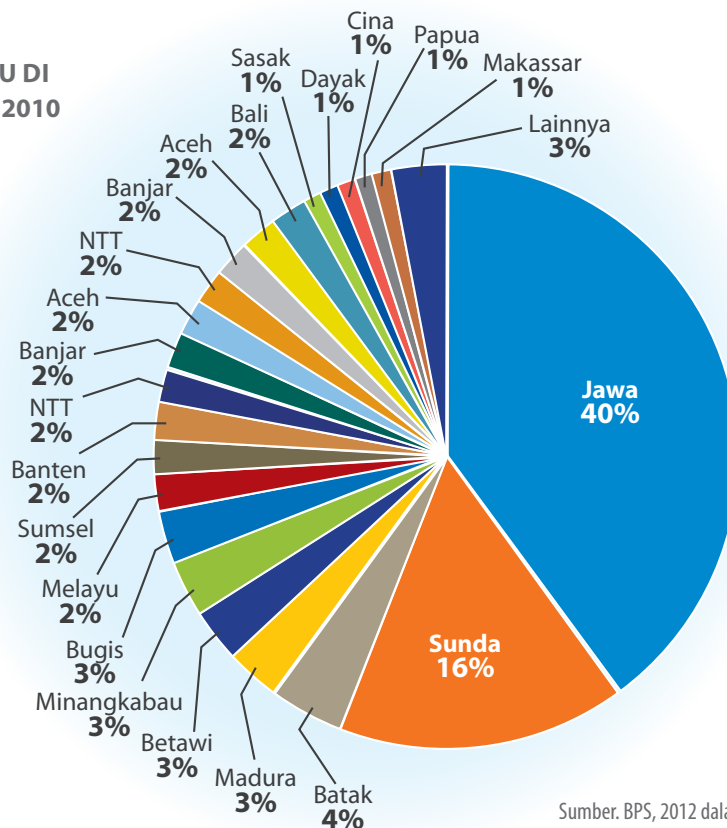
hayati, budaya dan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab untuk kepentingan generasi mendatang. Pembangunan berwawasan Bhinneka Tunggal Ika merupakan pembangunan yang berbasis penduduk sebagai satu kesatuan sosial dan budaya, yang memiliki arti bahwa masyarakat Indonesia yang majemuk dapat hidup berdampingan dengan tingkat kemajuan masyarakat yang merata, selaras, serasi dan seimbang. Penduduk Indonesia pada hakikatnya adalah satu, adapun corak ragam yang ada menggambarkan kekayaan sumber daya yang menjadi modal dan landasan pembangunan nasional yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan berwawasan Bhinneka Tunggal Ika memberikan arah pembangunan kependudukan yang

terintegrasi namun tetap menghargai perbedaan dan keanekaragaman yang ada seperti perbedaan suku, budaya, warna kulit, ideologi, bahasa dan adat istiadat. Dengan demikian pembangunan kependudukan yang pembangunan berwawasan Bhinneka Tunggal Ika sangat diperlukan.

- **Jumlah Persebaran Penduduk Menurut Suku Bangsa**

Indonesia adalah negara multikultural yang terdiri dari berbagai kelompok suku, etnis, budaya dan agama yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Laporan Sensus Penduduk 2010 melaporkan setidaknya ada 1.340 kelompok etnis yang berbeda di Indonesia, dengan lebih dari 30 suku bangsa memiliki lebih dari 1 juta penduduk (BPS, 2012).

RAGAM SUKU DI INDONESIA, 2010



Grafik 4.1
Ragam suku di
Indonesia, 2010

Sumber: BPS, 2012 dalam Cahyono et al. 2021.



Melalui kelompok etnis tersebut, penduduk Indonesia terikat pada pengelompokan lokal, kekerabatan maupun kedaerahan, dipengaruhi oleh nilai-nilai serta norma-norma kelompok yang diformalkan menjadi hukum adat (Ananta et al., 2015). Setiap etnis kelompok di Indonesia memiliki keunikan tradisi dan budaya yang berbeda. Grafik 4.1 memperlihatkan persentase populasi etnis berdasarkan urutan terbesar di Indonesia. Sekitar 40 persen penduduk Indonesia tercatat sebagai suku Jawa yang tersebar di seluruh Indonesia.

Laporan Sensus Penduduk 2010 melaporkan setidaknya ada 1.340 kelompok etnis yang berbeda di Indonesia, dengan lebih dari 30 suku bangsa memiliki lebih dari 1 juta penduduk (BPS, 2012). Grafik 4.1 memperlihatkan persentase populasi etnis berdasarkan urutan terbesar di Indonesia. Sekitar 40 persen penduduk Indonesia tercatat sebagai suku Jawa yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berikutnya adalah Suku Sunda sebesar 36,7 juta jiwa (15,5%), terbesar selanjutnya adalah Suku Batak dengan jumlah 8,5 juta jiwa atau sekitar 3,6%, selanjutnya adalah Suku Sulawesi dengan jumlah 7,6 juta jiwa atau 3,2%. Sementara suku bangsa lainnya hanya sekitar 0,1 hingga 2,73%. Sebaran penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, meskipun luas geografisnya hanya sekitar 7% dari seluruh wilayah Indonesia. Pulau Jawa dihuni oleh lebih kurang 56% penduduk Indonesia, disusul

berikutnya Pulau Sumatera dengan 21,7%, Pulau Sulawesi sebesar 7,4%, Pulau Kalimantan 6,2%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara 5,5% serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 3,2%.

Kemajuan teknologi yang semakin berkembang pada saat ini diringi oleh kemudahan di bidang transportasi mendorong terjadinya mobilitas penduduk, sehingga Suku Jawa tidak hanya dapat ditemui di Pulau Jawa tetapi juga dapat ditemui di pulau-pulau lainnya di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, suku yang berasal dari luar Pulau Jawa sudah dapat ditemui di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa suku yang ada di Indonesia tersebar secara heterogen dengan keanekaragaman yang cukup tinggi sehingga berimbang terhadap komposisi suku di suatu wilayah. Keanekaragaman suku bangsa dan budaya di suatu daerah dapat menguatkan kesadaran dan identitas nasionalisme. Keberagaman ini juga merupakan ciri atau identitas bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan bersama menjaga persatuan bangsa. Namun di sisi lain, perubahan komposisi suku ini kerap menjadi potensial konflik sosial, ekonomi, maupun politik. Masyarakat yang multikultural ini harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang tidak memihak pada golongan tertentu saja (kaum mayoritas), persamaan dan menghargai hak atas perbedaan kebudayaan harus dikedepankan.

- **Jumlah Persebaran Penduduk Menurut Agama**

Beragama dan berkeyakinan merupakan hak asasi manusia. Setiap orang bebas untuk memeluk agama-



nya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Hak beragama dan berkeyakinan ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 29 Ayat (2) UUD RI Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa pada bulan Juni 2021. Dari jumlah tersebut, penduduk yang beragama Islam sejumlah 86,88% (236,5 juta jiwa), sedangkan yang beragama Kristen sejumlah 7,5% atau sekitar 20 juta jiwa, beragama Katolik sejumlah 3,1% (8,4 juta jiwa, yang

SEBARAN SUKU DI TUJUH WILAYAH UTAMA DI INDONESIA, 2000 DAN 2010

WILAYAH	JAWA		SUNDA		MINANG		SASAK	
	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010
SUMATERA	12.425.981	15.239.275	997.961	1.231.888	4.934.770	5.799.001	-	9.225
JAWA DAN BALI	66.507.006	76.125.459	29.785.356	35.220.067	515.313	631.462	-	34.546
NUSA TENGGARA	87.136	133.427	4.573	6.463	2.363	4.225	-	3.035.688
KALIMANTAN	1.778.714	2.499.950	127.003	158.276	13.719	17.420	-	40.412
SULAWESI	567.591	772.426	41.993	57.411	7.061	5.150	-	46.365
MALUKU	74.763	122.064	3.456	7.049	611	2.730	-	508
PAPUA	211.663	344.419	17.053	20.536	1.308	2.725	-	3.035

WILAYAH	BALI		BATAK		BUGIS		BANJAR	
	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010
SUMATERA	NA	153.107	NA	7.302.330	244.430	348.272	216.581	472.366
JAWA DAN BALI	NA	3.407.457	NA	1.030.385	98.189	155.633	37.333	38.142
NUSA TENGGARA	NA	125.974	NA	4.804	33.610	42.446	993	1.283
KALIMANTAN	NA	29.907	NA	88.363	643.697	961.363	3.071.842	3.606.770
SULAWESI	NA	225.259	NA	15.287	3.911.782	4.687.190	7.456	8.773
MALUKU	NA	1.961	NA	2.371	18.974	46.053	253	315
PAPUA	NA	2.851	NA	23.429	59.604	128.743	366	492

WILAYAH	BETAWI		SUMSEL		MADURA		CINA	
	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010
SUMATERA	29.233	28.445	NA	1.397.351	37.980	44.079	NA	624.133
JAWA DAN BALI	4.998.330	6.753.205	NA	31.257	6.371.078	6.700.826	NA	1.481.767
NUSA TENGGARA	940	2.042	NA	225	2.734	3.692	NA	15.407
KALIMANTAN	5.754	8.963	NA	3.381	332.355	416.362	NA	409.338
SULAWESI	4.997	3.960	NA	461	9.436	6.596	NA	69.667
MALUKU	343	3.679	NA	145	1.383	1.938	NA	6.860
PAPUA	2.091	1.160	NA	737	2.596	4.842	NA	6.830



Tabel 4.1

Sebaran suku di tujuh wilayah utama di Indonesia tahun 2000 dan 2010

Sumber. BPS, 2012 dalam Cahyono et al. 2021.



beragama Hindu sekitar 1,7% atau 4,7 juta jiwa, dan yang beragama Budha sejumlah 0,8% atau lebih kurang 2 juta jiwa serta beragama Konghucu sejumlah 0,03% (73 ribu jiwa), selain itu ada juga penganut aliran kepercayaan lainnya sebesar 0,04% atau 102 ribu jiwa. Dengan demikian mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim.

Provinsi dengan penduduk muslim terbesar adalah Jawa Barat sebanyak 46,3 juta jiwa atau 97,3% dari total populasi, selanjutnya Jawa Timur dengan 39,9 juta jiwa atau 97,26% dari total populasi daerah tersebut, dan berikutnya adalah Provinsi Jawa Tengah dengan penduduk penganut agama Islam mencapai 36,2 juta jiwa atau setara dengan 97,21%, 30 provinsi lainnya mayoritas penduduknya adalah muslim sebesar 50% dari total penduduknya. Sementara itu, di empat provinsi, Islam menjadi agama minoritas atau di bawah 50% dari total populasi seperti di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 9,45%, Bali 10,07%, Papua 14,58% serta Sulawesi Utara 31,8%.

- **Jumlah Persebaran Penduduk Menurut Bahasa Daerah**

Indonesia juga memiliki Masyarakat Adat (*indigenous people*). Menurut Sabri (2015), masyarakat adat merupakan kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur di mana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman suatu daerah tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur (teritorial), tetapi juga terikat pada

hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat (genealogis).

Sebagai komponen pembentuk Republik Indonesia dan cermin dari kemajemukan Indonesia, Masyarakat Adat tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Diperkirakan sekitar 70 juta Masyarakat Adat terbagi menjadi 2.371 Komunitas Adat yang tersebar di 31 provinsi. Seluruh Komunitas Adat tersebut tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Sebaran Komunitas Adat terbanyak berada di Pulau Kalimantan dengan jumlah mencapai 772 Komunitas Adat. Hingga tahun 2018, luas wilayah adat yang sudah dipetakan mencapai 10,86 juta hektare.

Berdasarkan laporan dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berjudul Statistik Kebahasaan 2019, jumlah bahasa daerah di Indonesia yang telah terverifikasi adalah sebanyak 668 (berdasarkan dialektologi) dan ada 750 bahasa daerah merupakan akumulasi persebaran bahasa berdasarkan provinsi (menurut sosiolinguistik). Mengacu pada laporan tersebut, jumlah bahasa daerah di Indonesia dapat dihitung berdasarkan persebaran bahasa tersebut di tiap provinsi.

Papua menjadi provinsi memiliki bahasa daerah terbanyak yaitu 299 bahasa atau hampir separuh dari jumlah bahasa daerah yang tercatat di pusat data dan statistik Pendidikan



dan kebudayaan. Provinsi dengan jumlah bahasa terbanyak kedua adalah Papua Barat dengan 96 bahasa daerah dan berikutnya adalah Nusa Tenggara Timur dengan 69 bahasa daerah. Dari hasil laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah timur Indonesia memiliki banyak bahasa daerah dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Seperti dikutip dari laman resmi Kemendikbud.go.id bahwa bahasa-bahasa yang terdapat di wilayah timur tersebut seperti di Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat belum teridentifikasi semuanya, jadi bisa saja terjadi penambahan jumlah bahasa daerah di wilayah-wilayah tersebut.

Namun terdapat perbedaan jumlah bahasa daerah yang ada di Indonesia karena adanya beberapa penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lain dengan menggunakan indikator yang berbeda. Contohnya antara lain laporan dari *Summer Institute of Linguistics (SIL)* yang melaporkan bahwa jumlah bahasa di Indonesia adalah 719 bahasa daerah dan 707 di antaranya masih digunakan. *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (Unesco)* hanya mencatatkan sebanyak 143 bahasa daerah yang dimiliki Indonesia berdasarkan status vitalitas atau daya hidup bahasa.

- **Belajar dari Negara Maju**

Didunia terdapat banyak negara yang memiliki keberagaman suku budaya, adat istiadat, keagamaan tidak hanya negara Indonesia saja, negara maju seperti Amerika Serikat

yang telah lama dianggap sebagai salah satu negara adikuasa di dunia berdasarkan kekuatan ekonomi dan politiknya serta dikenal sebagai pusat inovasi dan bisnis. Membuktikan bahwa keberagaman yang tercipta tidak menjadi penghambat negara untuk maju. Negara yang memiliki semboyan “*In God We Trust*” tersebut dapat menjadi rumah bagi lebih dari 324 juta orang, yang menjadikannya negara ketiga terbesar di dunia berdasarkan populasi.

Amerika Serikat (AS) merupakan negara yang sangat multietnik, terdapat 31 kelompok keturunan yang masing-masingnya memiliki lebih dari satu juta anggota. Kulit putih Amerika adalah kelompok ras terbesar di AS, yang paling banyak adalah Jerman-Amerika, Irlandia-Amerika, dan Inggris-Amerika. Kulit hitam Amerika adalah kelompok ras minoritas terbesar dan kelompok keturunan terbesar ketiga, dengan persentase 12,6% dari total populasi. Di bawah AS ada Asia-Amerika sebagai kelompok ras minoritas terbesar kedua, yang paling banyak adalah keturunan Tionghoa-Amerika dan Filipina-Amerika.

Dalam segi bahasa, Biro Sensus AS memperkirakan bahwa ada lebih dari 300 bahasa yang dipakai di Amerika. Biro ini membagi bahasa tersebut menjadi beberapa kategori: Spanyol; bahasa Indo-Eropa lainnya, yang termasuk bahasa Jerman, bahasa Yiddish, bahasa Swedia, bahasa Prancis, bahasa Italia, bahasa Rusia, bahasa Polandia, bahasa Hindi, bahasa Punjabi, bahasa Yunani, sementara beberapa lainnya; bahasa orang-orang Asia dan Pulau Pasifik,



mencakup bahasa China, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Thailand, bahasa Tamil, dan lainnya. “Bahasa lainnya,” di sini termasuk kategori bahasa-bahasa yang tidak termasuk kedalam 3 kategori utama, seperti bahasa Hungaria, bahasa Arab, bahasa Yahudi, bahasa Afrika, dan bahasa penduduk resmi dari Amerika Utara, Tengah, dan Selatan.

Kemudian dalam segi keagamaan, hampir seluruh agama yang terkenal dianut oleh masyarakat Amerika Serikat, yang didirikan berdasarkan kebebasan beragama. Sebesar 71% dari penduduk Amerika adalah beragama Kristiani, berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh *Pew Research Center*, sebuah grup penelitian yang tidak berpartai, di tahun 2017. Penelitian ini juga menemukan bahwa 23% populasinya tidak memiliki agama, dan 6% terdiri dari agama non-Kristen. Jumlah penduduk yang tidak menganut agama apapun cenderung menurun. Berdasarkan *Pew Research Center*, kategori ini turun dari 16% di 2015 menjadi 13% di 2060.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang luas, kaya dan penuh kemajemukan yang memiliki ratusan juta penduduk berbilang kaum dan suku bangsa disebut negara multikultural. Masing-masing suku bangsa dan kelompok etnik tersebut memiliki latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda pula dan Perbedaan dalam kehidupan manusia merupakan

anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Dengan adanya keberagaman suku bangsa dan agama tersebut bukan menjadi suatu penghalang untuk mengintegrasikan perbedaan yang ada, tetapi dapat didorong menjadi modal utama yang akan menopang pembangunan nasional bagi penguatan ekonomi, politik dan kesejahteraan masyarakat.

Keragaman suku bangsa, agama dan kelompok etnik ini, jika tidak dirawat dan dikelola dengan baik justru akan disalahgunakan oleh sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan *chaos* di masyarakat. Gesekan-gesekan sosial, kegaduhan, pertikaian dan konflik dapat mengancam persatuan dan kesatuan, keutuhan dan bahkan disintegrasi bangsa. Semboyan negara Indonesia *Bhinneka Tunggal Ika* menjadi acuan utama untuk menyatukan perbedaan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah harus lebih meningkatkan kampanye kerukunan antarumat beragama untuk mengantisipasi terjadinya pertikaian dan konflik.

Sudah banyak negara dengan keberagaman yang ada tetapi tidak menjadi penghalang untuk maju, seperti Amerika Serikat bahkan mampu menjadi negara adidaya di dunia dengan segala keunikan dan keberagaman yang dimiliki. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dengan mengedepankan harmonisasi dan toleransi maka keberagaman yang dimiliki akan menjadi modal besar untuk kemajuan bangsa.

4.5

Pembangunan Berwawasan Global (Berbasis Responsif)

Sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, pembangunan kependudukan 2021-2045 perlu fokus pada pembangunan jangka panjang untuk mencapai pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan untuk kepentingan nasional, karena itu pembangunan kependudukan memerlukan strategi, paradigma dan visi yang responsif terhadap isu global maupun regional untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pembangunan kependudukan memerlukan identifikasi isu-isu strategis di dalam maupun di luar negeri, serta mengembangkan tanggapan kebijakan pembangunan yang tepat untuk mengatasinya. Untuk itu perlu perencanaan pembangunan yang strategis terhadap isu-isu global dan regional seperti globalisasi ekonomi, kerawanan pangan, perubahan iklim, efisiensi energi, energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, efisiensi sumber daya, pengendalian polusi, serta pengelolaan air, pertanian, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, bahkan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengimplementasikan agenda pencapaian target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030.

Arus globalisasi yang begitu pesat menyebabkan kemajuan teknologi

khususnya teknologi informasi dan komunikasi, sehingga memudahkan setiap orang di dunia untuk mengakses berbagai informasi tanpa mengenal waktu dan wilayah. Pengaruh globalisasi membuat pembangunan kependudukan juga harus berwawasan global. Jika pembangunan kependudukan masih berorientasi sempit dan tertutup, risikonya akan membuat Indonesia semakin tertinggal.

Pembangunan berwawasan global juga dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengefektifkan pelaksanaan pembangunan. Salah satunya adalah transformasi digital, implementasi transformasi digital dalam pembangunan sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan kependudukan seperti kemacetan, penumpukan sampah, penurunan kualitas air dan udara, hingga peningkatan angka kriminalitas. Transformasi digital juga memainkan peran yang signifikan dalam penyiapan SDM Indonesia yang berkualitas untuk Indonesia Emas 2045.

Transformasi digital adalah salah satu strategi untuk mengakselerasi pembangunan nasional serta Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan untuk



percepatan transformasi digital, antara lain pembangunan infrastruktur digital, integrasi data penduduk, penyiapan SDM yang memiliki literasi digital, penguatan ekonomi digital, dan dukungan regulasi untuk mendukung ekosistem digital. Hal tersebut perlu dilakukan guna menangkap peluang dan mengatasi tantangan global di era digital, dimana Indonesia membutuhkan jutaan talenta yang memiliki literasi digital untuk mensukseskan pembangunan nasional. Keberadaan SDM yang handal juga dapat mengoptimalkan pembangunan ekonomi digital di Indonesia.

Indonesia memiliki bonus demografi untuk mendukung pembentukan ekosistem digital yang berkelanjutan. Mayoritas penduduk Indonesia adalah Generasi Z dan Milenial berusia produktif yang memiliki tingkat adopsi digital yang tinggi. Kemajuan pesat transformasi digital di Indonesia juga memberikan peluang untuk mempercepat pencapaian TPB yang sudah menjadi komitmen pembangunan melalui penguatan akses informasi dan layanan yang tersedia bagi setiap penduduk, peningkatan konektivitas antarpenduduk dan institusi; serta efisiensi sumber daya dan peningkatan produktivitas ekonomi digital.

Guna meningkatkan kemampuan SDM di Indonesia, pemerintah telah melakukan sejumlah program untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mengembangkan strategi transformasi digital sebagai panduan dalam meningkatkan literasi digital yang diarahkan pada tiga sektor strategis

yaitu *digital governance*, *digital economy*, dan *digital society*.

Pada tataran implementasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bersama Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi, tengah menggelar program bertajuk Gerakan Nasional Literasi Digital yang memiliki empat pilar mendasar yaitu *Digital Ethics* (Etika Digital), *Digital Culture* (Budaya Digital), *Digital Skills* (Keterampilan Digital), dan *Digital Safety* (Keamanan Digital) sebagai berikut:

1. Etika digital

adalah kemampuan individu dalam menyadari, menyesuaikan diri dan menerapkan etika digital atau *netiquet* dalam saat berselancar di dunia digital. Contoh dari etika digital adalah tidak menyebarkan berita bohong dan tidak melakukan perundungan dunia maya.

2. Budaya digital

adalah merupakan hasil kreasi dan karya manusia yang berbasis teknologi internet. Budaya digital juga dapat tercermin lewat cara berinteraksi, berperilaku, berpikir dan berkomunikasi di dunia digital. Salah satu contoh budaya digital adalah aktivitas menggunakan media sosial hingga berbelanja *online*.

3. Keterampilan digital

adalah kemampuan untuk secara efektif, mengevaluasi dan membuat informasi dengan menggunakan berbagai teknologi digital. Hampir sama seperti budaya digital, salah satu keterampilan digital adalah menggunakan media sosial hingga menggunakan *platform* belanja *online*.



Gambar 4.2
Memberikan literasi dan mengasah keterampilan digital pada anak

Foto: Dok. BKKBN

4. Keamanan digital

Adalah aktivitas mengamankan kegiatan digital, salah satunya tercermin lewat penggunaan *password* hingga pemahaman mengenai OTP dan istilah *cyber security* lainnya. Tahun 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan literasi digital kepada 14.641.097 orang. Pada tahun 2022 juga menargetkan 5.500.000 orang mengikuti kegiatan literasi digital. Diharapkan tahun 2024 tercapai 50 juta orang yang mengikuti literasi di bidang digital.

Masyarakat digital, sebagai masyarakat abad 21 identik dengan interaksi masyarakat pengguna teknologi digital. Demikian halnya dengan penggunaan perangkat digital untuk aktivitas ekonomi, bisnis, perdagangan, dan sejenisnya.

Dunia digital telah ditumbuhi transaksi-transaksi bisnis dengan berbagai apli-

kasinya, tidak terkecuali produk lokal Indonesia. Dengan pesatnya perkembangan Internet di Indonesia seiring dengan penambahan infrastruktur dalam teknologi, kemudian membuat pelaku bisnis memiliki keluasaan dalam memilih suatu media dan format apa yang akan digunakan dalam penyampaian pesan terbaik kepada konsumennya.

Melalui pembangunan berwawasan global dengan memanfaatkan transformasi digital, diproyeksikan akan dapat meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto sebesar 1 persen selain itu diharapkan juga dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru dan jutaan talenta digital setiap tahunnya, sekaligus mewujudkan peradaban masyarakat baru yang berliterasi digital. Di masa mendatang, penduduk Indonesia diharapkan sudah memiliki indeks literasi digital yang tinggi. Target-target tersebut



akan dapat tercapai jika mendapat dukungan dan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan swasta, pencapaian TPB 2030 pun akan lebih cepat tercapai dengan kualitas yang tinggi.

Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur digital sebagai dasar terlaksananya transformasi digital nasional. Kemenkominfo terus berupaya untuk memperkuat jaringan fiber optik sebagai sumber dari konektivitas nasional. Pada saat ini terdapat 459.111 km jaringan fiber optik nasional yang digunakan untuk kebutuhan layanan *broadband* telekomunikasi. Pada tahun 2023 akhir, dua *High-Throughput Satellite* yaitu satelit Satria-1 dan satelit *Hot Back Up* yang memiliki kapasitas 300 Gbps akan diluncurkan sebagai upaya melayani konektivitas pada 150.000 titik layanan publik tambahan di Indonesia. Titik layanan publik tambahan tersebut di antaranya terdiri dari 93.900 titik sekolah, 47.900 titik kantor pemerintahan daerah, 3.700 titik fasilitas kesehatan, 3.900 titik kompleks layanan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta 600 titik fasilitas lainnya.

Pemerataan jaringan 4G (*Fourth Generation Technology*) di Indonesia dilakukan untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur BTS atau *Base Transceiver Station 4G* bagi desa dan kelurahan yang saat ini masih *blank spot*.

Banyak negara yang telah meningkatkan digitalisasinya di semua sektor kehidupan. Adanya transformasi digital ditandai dengan usaha untuk memindahkan aktivitas keseharian ke ruang digital. Terdapat tiga tahap transformasi digital,

pertama adalah digitasi yang ditandai dengan perubahan konten ke format digital dalam jaringan. Kedua adalah tahap digitalisasi yang ditandai dengan adanya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendapatkan manfaat yang lebih. Ketiga, transformasi digital dengan menggunakan informasi digital yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Sehingga adanya perubahan dalam cara beraktivitas, karena hal tersebut bukan lagi kesempatan melainkan sebuah keharusan.

Untuk mendorong akselerasi transformasi digital, peran infrastruktur yang merata sangatlah penting. Karena masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya transformasi digital jika infrastruktur tersedia secara merata, berkualitas, serta terjangkau.

Jika melihat pada perkembangan digital negara tetangga yaitu Singapura, nampak bahwa Singapura memiliki pembangunan digital yang lebih baik dari Indonesia. Berdasarkan *IMD World Digital Competitiveness Ranking 2021*, Singapura berada pada peringkat 5, sedangkan Indonesia berada pada posisi 53 dari 64 negara. Singapura membuktikan bahwa budaya digital yang ada pada masyarakatnya telah maju. Dalam memajukan perkembangan digital negaranya, Singapura memiliki strategi khusus di antaranya ada *accelerate* yaitu dengan meningkatkan produktivitas untuk mendapat keuntungan. Selanjutnya *compete* yaitu membentuk ekosistem budaya digital pada warga Singapura. Dan terakhir adalah *transform* yaitu pembinaan generasi muda untuk transformasi sistem kehidupan.

Blueprint
**Pembangunan
Kependudukan**
INDONESIA 2045

V

**ARAH KEBIJAKAN DAN
STRATEGI PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN MENUJU
INDONESIA EMAS 2045**





5.1

Visi dan Misi Pembangunan Kependudukan 2045

Tahun 2045, saat berusia 100 tahun, diproyeksikan Indonesia akan menjadi negara maju yang berdaulat, adil dan makmur. Berbekal sumber daya manusia yang unggul dan menguasai pengetahuan serta teknologi, Indonesia akan dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Untuk mewujudkannya, diperlukan partisipasi masyarakat, pembangunan dan pemerataan penduduk menjadi kuncinya. Visi Indonesia 2045 tidak hanya memberi gambaran mengenai wujud Indonesia pada tahun 2045 tetapi juga peta jalan yang mampu dan perlu dicapai pada tahun 2045.

Penyusunan visi melibatkan semua pemangku kebijakan di lingkungan eksekutif, yudikatif, dan legislatif; perguruan tinggi; generasi muda; serta berbagai lembaga profesi. Proses penyusunan visi diawali dengan identifikasi hasil pembangunan yang telah dicapai selama lebih dari 70 tahun Indonesia Merdeka serta pemahaman terhadap perubahan lingkungan global yang terjadi hingga tahun 2045. Tahap penting selanjutnya adalah menentukan bidang-bidang pembangunan pokok yang mempunyai potensi besar untuk didorong dan ditingkatkan guna mewujudkan Visi Indonesia 2045, yaitu Negara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Keseluruhan Visi Indonesia 2045 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dan demokratis,

memiliki daya saing yang tangguh dan unggul, modern dan inovatif serta mampu menjaga kelestarian dan keseimbangan alam dengan mempertahankan ikatan sosio-kultural secara berkesinambungan.

Tujuan pembangunan yang ingin dicapai adalah mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik serta merata, dengan sumber daya manusia berkualitas dengan memanfaatkan secara optimal potensi negara kepulauan dalam peningkatan perekonomian meningkat sebagai negara maju yang menjadi bagian dari 5 (lima) kekuatan ekonomi terbesar dunia, pemerataan yang berkeadilan di semua bidang pembangunan.

Dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045, pengembangan visi pembangunan kependudukan 2045 mengacu pada visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan Indonesia menuju tahun 2045 harus difokuskan pada 5 (lima) pilar; Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung dengan implementasi transformasi dengan mewujudkan:


- (1) Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
- (2) Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
- (3) Kestinambungan pembangunan. Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk keempat terbesar dunia perlu memperhatikan kecenderungan besar dunia (*global megatrend*) hingga tahun 2045, karena itu diperlukan arah pembangunan Indonesia yang inklusif sehingga mampu mengurangi kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat dan memperkecil kesenjangan antarwilayah, hingga

pemerataan infrastruktur disemua wilayah di Indonesia. Dengan demikian, kemiskinan ekstrem akan mampu dituntaskan hingga tahun 2045.

Pembangunan kependudukan merupakan bagian dari pilar Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bertujuan untuk membangun manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan tinggi, menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan dinaungi nilai-nilai etika. Kependudukan menjadi acuan penting dalam pembangunan, untuk menjaga keberlangsungan pembangunan serta menggapai tingkat kesejahteraan dengan menjaga kelestarian nilai-nilai budaya yang luhur dan tinggi di tengah kehidupan masyarakatnya.

Guna mempercepat pencapaian Visi Indonesia 2045, maka visi dan misi pembangunan kependudukan Indonesia 2045 sebagai berikut:

1 Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas,




4 Terjaganya nilai-nilai keluarga dan hubungan antargenerasi,




2 Terkelolanya urbanisasi dan migrasi penduduk,




5 Terintegrasinya data dan sistem *database* kependudukan,



3 Tercapainya perlindungan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan,



6 Tata kelola administrasi kependudukan yang mutakhir, akurat, dan *realtime*.





Pertama, penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas. Keberlangsungan pembangunan membutuhkan dukungan kuantitas dan kualitas penduduk. Secara kuantitas, perlu mengendalikan laju pertumbuhan terutama pertumbuhan penduduk alamiah. Selain itu, komposisi dan struktur penduduk perlu mendapat perhatian agar keberlangsungan pembangunan dimasa mendatang terus terjaga secara kontinyu. Kualitas penduduk menjadi syarat mutlak bagi pencapaian bonus demografi dan kemajuan suatu bangsa. Karena itu, peningkatan kualitas penduduk di masa mendatang sangat dibutuhkan untuk mendukung dan mendorong kemajuan bangsa Indonesia baik dalam lingkup regional maupun global demi terwujudnya cita-cita menjadi bangsa dan negara yang disegani di kancah pergaulan dunia.

Kedua, terkendalinya urbanisasi dan terkelolanya migrasi penduduk. Kemajuan pembangunan telah menumbuhkan kota-kota baru yang semakin besar di Indonesia. Proses urbanisasi seakan menjadi keharusan seiring dengan berkembangnya berbagai infrastruktur yang terjadi di berbagai wilayah selama ini. Keberlangsungan pembangunan Indonesia di masa mendatang masih membutuhkan keterlibatan masyarakat perdesaan yang mampu memproduksi berbagai komoditas kebutuhan pangan, sandang dan papan yang dibutuhkan seluruh penduduk Indonesia. Karena itu, pengaturan pertumbuhan perkotaan dalam konteks urbanisasi, sangat diperlukan dimasa mendatang. Selain itu, pemerataan distribusi penduduk perlu mendapat perhatian pemerintah di masa mendatang.

Penduduk yang mendiami Pulau Jawa sudah mencapai lebih dari 56 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Kondisi ini perlu dikelola dengan baik agar daya dukung dan daya tampungnya masih memadai dan memberikan kualitas hidup layak bagi masyarakat yang mendiaminya.

Ketiga, tercapainya perlindungan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan. Perlindungan sosial menjadi ciri kemajuan suatu bangsa. Perlindungan sosial yang komprehensif akan mampu memberikan jaminan bagi setiap penduduk sejak lahir hingga ajal menjemputnya. Keberlanjutan kehidupan generasi selanjutnya akan sangat dibutuhkan dalam mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Kondisi ini tidak boleh hanya dibebankan pada kepala keluarga yang berperan sebagai pencari nafkah bagi keluarganya. Ketika terjadi goncangan pada pencari nafkah, keberlanjutan keluarganya harus terus mampu melanjutkan kehidupannya secara normal dengan tetap memiliki akses terhadap berbagai kebutuhannya.

Keempat, terjaganya nilai-nilai keluarga dan hubungan antargenerasi. Keluarga adalah benteng dalam menjaga nilai-nilai kehidupan dan budaya suatu bangsa. Nilai-nilai luhur yang tertanam dalam kehidupan masyarakat harus terus terjaga kelestariannya melalui hubungan harmonis antargenerasi dalam keluarga. Karena itu, keutuhan sebuah keluarga perlu mendapat perhatian secara serius demi terjaganya proses pembangunan di masa mendatang. Keberlangsungan antara satu

generasi dengan generasi lain dalam lingkungan keluarga dipercaya sebagai cara yang paling efektif dalam menata keseimbangan ekonomi, sosial dan emosional individu maupun kelompok.

Kelima, terintegrasinya data dan sistem *database* kependudukan. Ciri lain kemajuan suatu bangsa adalah memiliki dukungan data yang valid dan terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. *Database* kependudukan saat ini masih perlu terus ditingkatkan, terutama dalam jangkauannya (*coverage*). Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 merupakan bukti yang mengarah pada integrasi data kependudukan antara Badan Pusat Statistik dan Dukcapil. Pada masa mendatang, integrasi ini harus terus ditingkatkan demi terciptanya pelayanan publik, perencanaan pembangunan, penganggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum yang lebih baik, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Keenam, tata kelola administrasi kependudukan yang mutakhir, akurat dan *real time*. Dukungan administrasi kependudukan sangat vital dalam proses pembangunan, terutama dalam menjalankan program-program pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

Salah satu contoh, pelaksanaan program bantuan pemerintah membutuhkan data mikro hingga tingkat individu yang akurat agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Karena itu, *updating* data secara digital perlu dipermudah agar masyarakat secara keseluruhan mampu untuk melakukannya secara mandiri. Dengan demikian, kejadian demografi di desa/kelurahan menjadi lebih akurat karena dilaporkan *real time* dan secara berjenjang catatan administrasi yang terdapat di kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional akan menjadi lebih baik. Kondisi ini perlu dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah.



5.2

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan serta memperhatikan kondisi aktual kependudukan nasional yang meliputi identifikasi faktor-faktor berpengaruh, tren perkembangan dan permasalahan utama (*key issues*) yang dihadapi dalam pengembangan kependudukan nasional hingga tahun 2045 ke depan, maka perlu ditentukan arah kebijakan pembangunan kependudukan tahun 2045. Arah kebijakan pembangunan kependudukan perlu memperhatikan paradigma kebijakan yang dikelompokkan berdasarkan lima pilar pembangunan kependudukan.

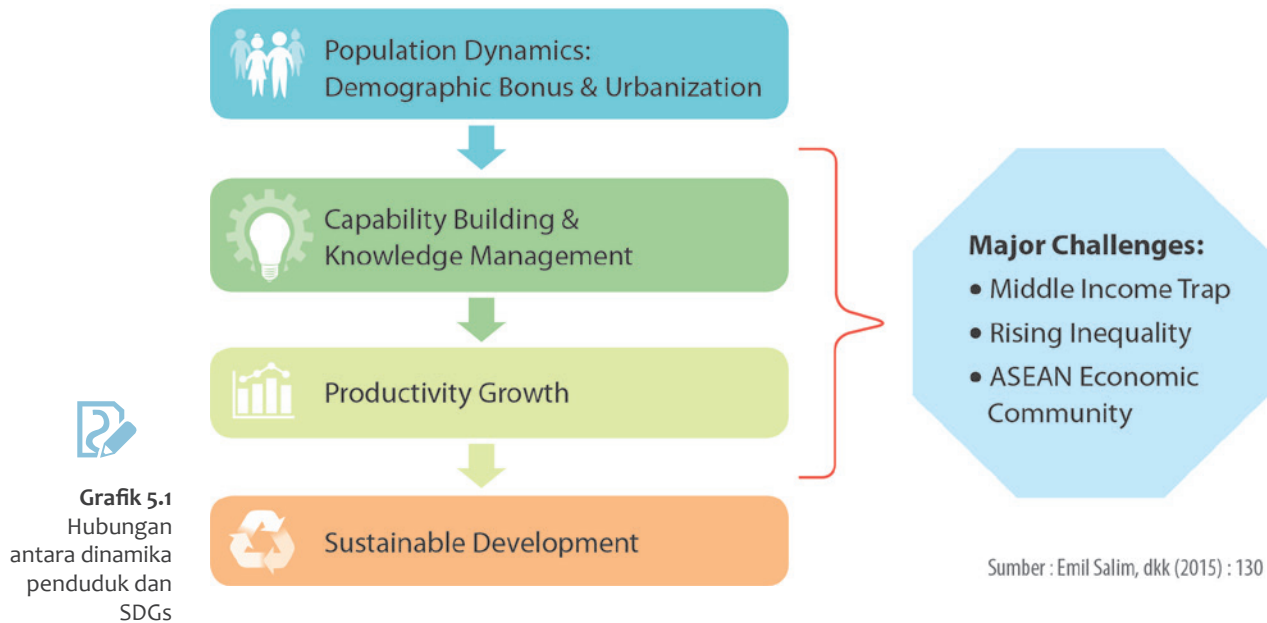
Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai dalam periode perencanaan. Arah kebijakan yang telah dirumuskan menjadi pedoman agar pembangunan lebih bersinergi dan mencapai target sasaran. Arah kebijakan dibuat sejalan dengan tujuan dan sasaran yang disusun. Interaksi antara sasaran atau wujud yang diinginkan dengan kondisi saat ini, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan guna mendapatkan gambaran yang ideal dan dapat diwujudkan.

Pembangunan Kependudukan Indonesia harus menjadi bagian integral dari

pembangunan nasional pada umumnya. Untuk itu, *Blueprint* Pembangunan Kependudukan Indonesia diarahkan untuk menciptakan kondisi kependudukan yang kondusif untuk pencapaian visi dan misi Indonesia Emas 2045. Untuk itu harus ada sinergi antara *Blueprint* dengan arah dan dimensi yang dicakup dalam pembangunan Indonesia Emas 2045.

Blueprint juga harus diarahkan untuk mengantisipasi dan merespon kondisi yang (mungkin) terjadi pada masa yang akan datang (tahun 2045). Untuk itu diperlukan perkiraan kondisi kependudukan dimasa yang akan datang. Emil Salim, dkk (2015) menyebutkan bahwa Indonesia di masa depan akan mengalami 3 mega *trend* demografis. *Pertama*, Indonesia akan berhadapan dengan jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang semakin melambat disertai dengan proses urbanisasi yang cepat. *Kedua*, Indonesia akan melanjutkan pencapaian bonus demografi yang dimulai tahun 80-an dan mencapai puncaknya pada tahun 2030. *Ketiga* adalah pegeseran pola dari mobilitas penduduk permanen ke non permanen. *Ketiga trend* ini akan memengaruhi Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

HUBUNGAN ANTARA DINAMIKA PENDUDUK DAN SDGs



Grafik 5.1
Hubungan
antara dinamika
penduduk dan
SDGs

Mempertahankan bonus demografi dan memanfaatkannya secara optimal adalah kata kunci dalam pembangunan kependudukan sampai tahun 2045. Jika hal ini disepakati sebagai kata kunci, maka pembangunan kependudukan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu periode 2020-2030 dan 2031-2045.

Fokus pada tahap pertama adalah menjaga momentum pencapaian bonus demografi dengan mengelola kuantitas penduduk dan memanfaatkannya agar memiliki dampak positif yang optimal. Tahap berikutnya adalah tahap ketika Indonesia secara nasional masuk ke tahap ke-2 bonus demografi dengan masalah aging sebagai masalah yang menonjol. Dalam fase ini tekanannya adalah dalam peningkatan kualitas dan pemanfaatan. Pada penjabarannya ada tiga isu besar yang harus menjadi perhatian.

Pertama, fakta bahwa terjadi disparitas kondisi kependudukan Indonesia. Untuk merespon ini maka pembangunan kependudukan harus mampu memberikan ruang yang cukup luas untuk mengembangkan kebijakan kependudukan yang bervariasi tergantung dari konteks lokal, sehingga mampu mengakomodasi *local wisdom*. Sejalan dengan desentralisasi, konteks tersebut terutama di tingkat kabupaten/kota.

Kedua adalah bukti bahwa Indonesia, sebagaimana negara lainnya di dunia, rentan terhadap *shock* dalam berbagai bentuk. Dalam skala nasional bahkan global, yaitu krisis ekonomi dan pandemik, selain krisis yang terkait dengan bencana alam. Dengan mendasarkan hal ini maka pembangunan kependudukan harus disusun dengan memasukkan perencanaan kontingensi (*contingency planning*) agar setiap *shock* tidak akan memengaruhi atau berdampak negatif yang minimal terhadap kinerja pembangunan kependudukan.



Ketiga adalah prinsip *good governance*. Pembangunan kependudukan harus melibatkan tiga *stakeholder* utama pembangunan, yaitu *state* (negara), *private* (swasta), dan *civil society* (masyarakat sipil). Dalam pembangunan kependudukan harus jelas kedudukan, peran, dan kontribusi masing-masing *stakeholder*, baik ketika masing-masing bertindak sendiri atau ketika saling berkolaborasi.

Selain itu RPJPN menyebutkan bahwa arah pembangunan SDM, diarahkan kepada 5 pilar sesuai yang diuraikan sebelumnya dan arah pembangunan kependudukan ke depan yang harus diterapkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran;

1. Penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas, pembangunan kependudukan dan keluarga ideal yang berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berwawasan kependudukan secara berkelanjutan. Hal tersebut diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas atau jumlah penduduk dalam kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang dan berkualitas, dengan sasaran untuk seimbangnya angka pertumbuhan penduduk.

Pencapaian sasaran ini dilakukan melalui beberapa strategi:

- a. Meningkatkan mutu dan jaringan pelayanan KB secara merata di seluruh wilayah.
- b. Meningkatkan optimalisasi perencanaan kependudukan dan integrasi dokumen *Blueprint* Pembangunan Kependudukan Indonesia ke dalam Dokumen Perencanaan Lintas K/L dan Pemerintah Daerah.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh pendidikan dan kesehatan, karena dengan pendidikan dan kesehatan merupakan faktor penting dalam mendukung produktivitas manusia, dengan sasaran sebagai berikut:

- Menurunnya tingkat kematian Ibu dan Anak.
- Menurunnya prevalensi *stunting*.
- Meningkatkan kualitas konsumsi pangan.
- Berkurangnya angka HIV/AIDS, TB dan penyakit menular.
- Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.
- Meningkatkan tenaga kerja yang berpendidikan dan siap kerja.
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- Meningkatkan kepesertaan Jaminan Sosial dengan sistem digital.
- Kapasitas dalam penanganan dampak perubahan iklim sudah tertata dengan baik.

Strategi untuk mencapai sasaran :

- Meningkatkan kesehatan ibu dan anak.
- Menurunkan *stunting* dengan intervensi sensitif dan spesifik yang terintegrasi meningkatkan gizi masyarakat dan kesadaran untuk hidup sehat didukung dengan perilaku dan lingkungan yang mendukung pola hidup sehat.
- Meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan serta pemerataan layanan pendidikan
- Peningkatan tenaga kerja berpendidikan dan kewirausahaan.

- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan peningkatan usia harapan hidup.
 - Menjaga keberlangsungan jaminan kesehatan nasional yang adil, merata dengan prinsip inklusivitas
 - Meningkatkan resiliensi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim secara fisik, sosial dan ekonomi.
 - Program Indonesia Sehat, yaitu pemberian bantuan pelayanan kesehatan gratis untuk seluruh penduduk.
 - Program pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi para calon pengantin dan Ibu hamil/menyusui, sebagai bentuk mengantisipasi status *stunting*.
 - Strategi nasional pemberantasan penyakit menular dan malaria.
3. Pembangunan Keluarga dan Perlindungan Sosial Berkelanjutan. Pembangunan keluarga bertujuan untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

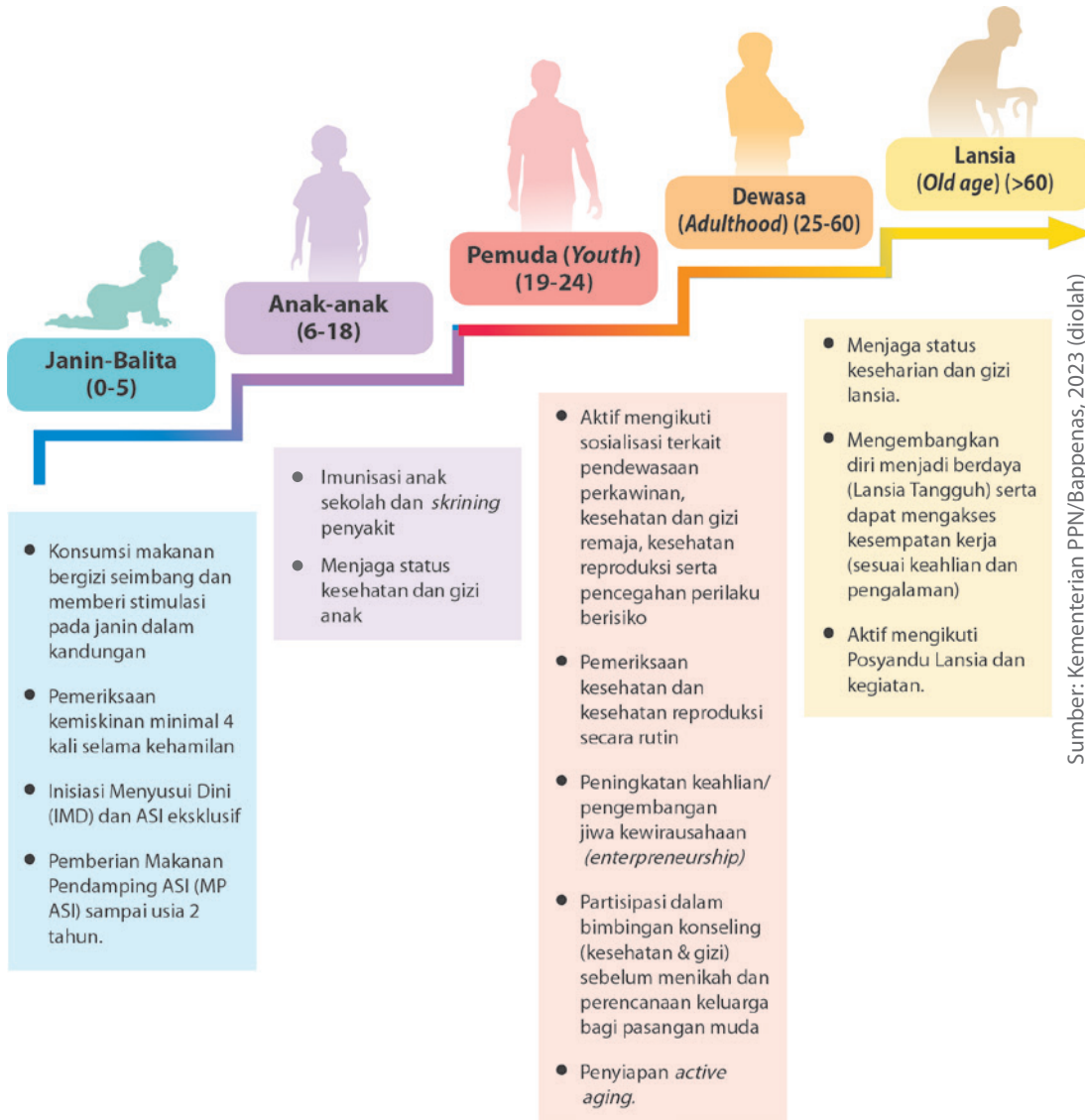
Pelaksanaan pembangunan keluarga seperti yang diamanatkan pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 – peningkatan kualitas hidup anak, remaja, lansia, pemberdayaan keluarga rentan, peningkatan kualitas lingkungan keluarga, peningkatan usaha mikro keluarga, bantuan kepada keluarga miskin secara lebih efektif, dan penghapusan kemiskinan khususnya bagi perempuan yang berstatus kepala keluarga.

Kebijakan pembangunan manusia dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, dimulai dari gagasan perencanaan dari tahap pra berkeluarga (perencanaan kehidupan berkeluarga), merencanakan keinginan untuk memiliki anak termasuk jumlah anak yang dikehendaki, proses kehamilan yang merupakan fase yang juga penting dalam proses tumbuh kembang anak, 1.000 Hari Pertama Kehidupan (periode yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun), pendidikan anak usia dini (pra sekolah) sampai dengan usia sekolah, remaja dengan berbagai pendekatannya dalam penyiapan generasi bangsa yang berkualitas menuju usia produktif/bekerja serta perhatian terhadap kelanjutusiaan (seluruh tahapan kehidupan maupun penduduk penyandang disabilitas).

4. Penataan Persebaran dan Pengarahannya Mobilitas Penduduk.

Penataan persebaran penduduk yang seimbang dilakukan dengan pengendalian urbanisasi dan migrasi. Yang menjadi sasaran adalah: I Pasar tenaga kerja yang bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi dan teknologi

- Optimalisasi pembangunan di daerah perdesaan.
- Pengelolaan mobilitas penduduk (baik antarwilayah, provinsi, kota dan negara) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan wilayah.
- Meningkatnya kapasitas masyarakat untuk menghadapi bencana dan percepatan efek setelah bencana.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 (diolah)



Grafik 5.2
Kebijakan pembangunan manusia dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif

Jaminan Kesehatan Nasional, pengendalian penyakit, bantuan gizi, bantuan sosial, asistensi dan rehabilitasi penyandang disabilitas

Sasaran ini dicapai dengan beberapa strategi:

- Menciptakan lapangan kerja untuk pemanfaatan bonus demografi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
- Peningkatan pembangunan infrastruktur di kawasan pedesaan untuk menjaga keseimbangan antara desa dan kota.
- Pengarahannya mobilitas penduduk melalui strategi perpindahan penduduk terencana.

- Mitigasi perpindahan penduduk akibat bencana.
- Penguatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan dan Database Kependudukan. Memperkuat sistem pendaftaran penduduk sebagai proses pendataan dan pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan. Memberdayakan penduduk agar mampu melaporkan peristiwa kependudukan dan meningkatkan

kualitas data kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Tujuan pembangunan kependudukan:

- a. Pertumbuhan Penduduk Seimbang, berupaya mempertahankan keseimbangan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, ditandai dengan TFR 2,0 dan NRR 1.
- b. Kualitas Penduduk Meningkat, pemenuhan layanan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sehingga SDM Indonesia dapat meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan karakter diri menjadi SDM produktif yang berkualitas.
- c. Keluarga Indonesia yang Kuat dan Resilien, penguatan ketahanan dan kelentingan keluarga melalui peningkatan partisipasi perempuan dan peningkatan ekonomi keluarga.
- d. Persebaran Penduduk yang Merata, pengelolaan persebaran penduduk dalam lingkup kabupaten/ kota maupun lintas daerah yang merata.
- e. Pencatatan Administrasi Kependudukan yang Lengkap dan Akurat, pengelolaan administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Dalam mewujudkan visi pembangunan kependudukan 2045 dengan mempertimbangkan perkembangan *mega-trend* kependudukan nasional dan global serta analisis situasi capaian kependudukan, maka Arah Kebijakan Pembangunan Kependudukan 2045 mencakup:

1. **Mempertahankan tingkat kelahiran pada angka *replacement level* secara nasional untuk mencegah terjadinya *population stagnation/decline* pada masa-masa mendatang.**

Angka kelahiran total (TFR) secara nasional telah mendekati angka *replacement level*, namun disparitas capaian TFR di tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih perlu diperhatikan. Provinsi dan kabupaten/ kota yang masih memiliki capaian TFR tinggi masih perlu menurunkan tingkat kelahirannya, demi perencanaan keluarga yang mengedepankan Pembangunan kualitas penduduk dan sumberdaya manusia di masa mendatang.

2. **Mengurangi disparitas capaian pembangunan kependudukan antarwilayah, provinsi maupun kabupaten/kota dan menguatkan kelembagaan dan menyiapkan rencana pengarahannya yang terintegrasi dengan dokumen pembangunan lain.**

Wilayah Indonesia yang luas seharusnya menjadi potensi dalam meningkatkan kesejahteraan. Setiap wilayah tersebut menjadi potensi ekonomi yang sangat besar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Kondisi penduduk yang terkonsentrasi beberapa wilayah saja akan menyebabkan terbelakangnya pengelolaan



sumberdaya alam di wilayah lainnya. Pemerintah perlu terus mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara merata di berbagai wilayah dan kepulauan sehingga menjadi daya tarik masyarakat dalam upaya mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Dukungan regulasi dan perlindungan hukum bagi masyarakat pendatang dan penduduk lokal harus menjadi perhatian terutama menciptakan kondisi yang sinergis secara sosial – kultural yang semakin heterogen.

3. Meningkatkan kesehatan reproduksi dengan mengurangi kehamilan berisiko baik terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat maupun terlalu sering.

Akses terhadap layanan ber-KB masih perlu terus ditingkatkan dalam upaya mendukung perencanaan pembangunan keluarga yang berkualitas. Kualitas layanan ini secara langsung akan mampu menekan angka *unmet need* dan mengurangi risiko kehamilan tak terencana. Menekan angka *stunting* guna mempersiapkan generasi mendatang yang lebih berkualitas. Prevalensi *stunting* dapat ditekan dengan mengurangi kehamilan berisiko (4 terlalu dan 3 terlambat). Sosialisasi dan advokasi mengenai *stunting* perlu terus dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar tentang *stunting*. Hal yang penting lagi dalam penekan angka

stunting adalah layanan terhadap pemeriksaan selama kehamilan. Akses masyarakat terhadap tempat layanan pemeriksaan kehamilan perlu menjadi perhatian khusus terutama di tingkat kabupaten/kota dan daerah-daerah yang terpencil.

4. Meningkatkan kualitas penduduk menuju tercapainya ketahanan demografi (*demographic resilience*).

Upaya pemerintah dalam wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dasar dan 12 tahun pendidikan dasar–menengah) perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas penduduk secara signifikan. Masyarakat perlu didorong untuk meningkatkan partisipasi pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Di lain pihak, ketersediaan sekolah negeri terutama sekolah menengah pertama dan menengah atas perlu dipenuhi.

Komposisi sekolah SLTP–SLTA negeri dan swasta setidaknya menjadi indikator dalam menentukan pembangunan infrastruktur pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Berbagai faktor lain seperti kecukupan ketersediaan guru bidang studi dan persebaran antar daerah harus menjadi perhatian dan didukung dengan strategi yang tepat agar ketersediaannya lebih merata. Keberadaan guru sangat penting dalam mendorong peningkatan

kualitas pendidikan yang selanjutnya akan menciptakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Indonesia.

5. Pemanfaatan bonus demografi dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Ketersediaan penduduk usia produktif yang sangat banyak perlu dioptimalkan pelibatannya dalam berbagai kegiatan ekonomi. Potensi sumberdaya alam yang melimpah menjadi faktor pendorong dalam penciptaan lapangan kerja dan sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan dukungan teknologi digital. Posisi indeks daya saing global belum menunjukkan peringkat yang menggembirakan. Daya saing tenaga kerja Indonesia masih kalah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Peningkatan daya saing ini sangat penting bukan hanya untuk menghadapi persaingan dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Indonesia. Tetapi indeks daya saing ini menjadi indikator bagi investor dalam melakukan pilihan investasi. Negara-negara yang memiliki indeks daya saing tinggi akan menjadi tujuan investasi sehingga mendorong berbagai aktifitas ekonomi dimasa mendatang. Kurangnya daya saing tenaga kerja akan berakibat lemahnya investasi yang masuk ke Indonesia, sehingga pada

gilirannya pertumbuhan ekonomi akan sulit tumbuh dan akan semakin terpuruk perkembangan ekonominya.

6. Mengantisipasi masuknya era *aging population* dengan berbagai kebijakan yang pro lansia.

Peningkatan jumlah dan proporsi penduduk lanjut usia merupakan wujud keberhasilan pembangunan kependudukan yang selama ini dilakukan pemerintah Indonesia. Peningkatan tersebut terjadi karena penduduknya semakin sehat hingga mencapai usia lanjut.

Stigma penduduk tua atau lanjut usia yang lemah, tidak berdaya dan bahkan seringkali dianggap sebagai beban perlu diubah. Penduduk lanjut usia sebenarnya masih mampu hidup produktif dengan berbekal kemampuan dan pengalaman selama hidupnya. Dengan dukungan kondisi kesehatan yang semakin membaik, tentu merupakan potensi yang sangat besar dalam menciptakan nilai tambah pendapatan negara dalam berbagai aktifitas ekonomi. Keterlibatan penduduk lanjut usia dalam pasar kerja bukan dilandasi oleh kekurangan dan keterbatasan secara ekonomi. Penduduk lansia memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Dibutuhkan strategi yang tepat dan dukungan



infrastruktur yang memadai dalam berbagai aspek kehidupan guna mendukung lansia agar tetap eksis secara ekonomi dan meningkatkan kemandirian penduduk lanjut usia.

7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan perluasan jaminan sosial.

Aspek kesehatan menjadi syarat utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dua hal penting dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pertama, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan. Untuk itu, pemerintah harus memperhatikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai sesuai konsentrasi penduduk di suatu wilayah. Ketersediaan tenaga kesehatan menjadi faktor pendukung utama dalam memberikan layanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, dukungan finansial masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan perlu terus ditingkatkan dengan upaya peningkatan daya beli masyarakat dan kepesertaan jaminan kesehatan secara adil dan merata. Disamping itu, munculnya berbagai penyakit dan penyebarannya yang cepat di tingkat masyarakat, membutuhkan dukungan dan penataan ketersediaan berbagai obat-obatan medis yang mampu menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Kedua, mendorong masyarakat

memiliki perilaku sehat dalam hidupnya. Perilaku makan, waktu istirahat dan keseimbangan olah raga fisik harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam upaya menjaga kesehatan. Konsumsi makanan yang sehat, tanpa pengawet, tidak mengandung gula berlebihan, karbohidrat berlebihan serta minyak perlu mendapat perhatian dalam menyadarkan masyarakat dalam menjaga hidup sehat. Meningkatkan jangkauan dan kualitas perlindungan sosial melalui peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bersifat wajib bagi seluruh masyarakat yang berada di Indonesia. Perkembangan jangkauan layanan kesehatan sudah menunjukkan perkembangan yang semakin membaik dan perlu ditingkatkan kualitasnya. Sementara jangkauan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan perlu terus didorong agar mampu memberikan jaminan secara memadai bagi seluruh tenaga kerja Indonesia, serta risiko-risiko yang muncul selama bekerja dan ketika memasuki hari tua.

8. Melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan dalam rangka mencapai kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Ketimpangan gender dalam berbagai bidang masih menjadi masalah di Indonesia, meskipun semakin mengecil. Di bidang pendidikan misalnya rata-rata lama sekolah perempuan masih lebih rendah meskipun partisipasi

perempuan dalam pendidikan semakin meningkat. Di bidang ketenagakerjaan, rendahnya partisipasi perempuan dalam pasar kerja masih muncul, bukan hanya masalah keterbatasan lapangan pekerjaan. Faktor sosial budaya seringkali lebih rumit daripada menciptakan peluang kerja. Dengan perkembangan teknologi digital dimana orang bisa bekerja kapan saja dan di mana saja menjadi potensi bagi pelibatan perempuan dalam pasar kerja di masa mendatang.

Di bidang politik, partisipasi perempuan juga masih jauh lebih kecil dibandingkan laki-laki. Ketertinggalan ini perlu mendapat perhatian yang lebih untuk mendorong kaum perempuan meningkatkan kapasitas dirinya. Berbagai faktor penghalang harus disingkirkan misalnya diskriminasi terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, eksploitasi terhadap perempuan dan anak perempuan, maupun faktor budaya yang menganggap perempuan nomor dua setelah laki-laki. Peran laki-laki dalam keluarga harus ditingkatkan sebagai mitra sejajar bagi perempuan.

9. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui penguatan kesiapan membangun keluarga dan peningkatan kapasitas dan keterampilan berkeluarga.

Meningkatkan pembangunan keluarga. Keluarga sebagai entitas sosial terkecil memiliki

peran yang sangat besar dalam proses pembangunan. Keluarga merupakan awal manusia lahir yang membutuhkan perencanaan, persiapan, dukungan, nilai dan norma yang akan mengikat dan menjadi karakter dari masing-masing individu yang ada dalam keluarga. Karena itu, terbentuknya keluarga membutuhkan perencanaan yang matang dan dukungan ekonomi dan mental yang tepat.

Usia pernikahan menjadi syarat minimum yang harus terus diupayakan agar keluarga yang terbentuk berada dalam posisi kesiapan mental yang memadai. Selain itu, dukungan ekonomi juga sangat penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi keluarga. Setidaknya salah satu atau kedua orang yang akan membentuk keluarga telah memiliki pendapatan secara mandiri. Bahkan, dukungan ini bisa ditingkatkan menjadi kecukupan dalam upaya pemenuhan kebutuhan yang akan dilaluinya. Perencanaan untuk memiliki anak dan keturunan juga menjadi bagian yang sangat penting. Masa kehamilan yang terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu banyak akan memberikan risiko yang besar dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan dan kebersamaan keluarga.

10. Meningkatkan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan melalui pengolahan sampah rumah tangga.



Kebutuhan pangan menjadi kebutuhan primer dalam kehidupan. Tanpa adanya ketersediaan pangan yang cukup, masyarakat akan terperosok dalam kelaparan yang akhirnya akan mendatangkan distabilitas dalam kehidupan masyarakat secara luas. Keterlibatan masyarakat dalam produksi pangan membutuhkan perhatian dan infrastruktur yang memadai. Penggunaan teknologi pertanian, bibit, dan manajemen pengelolaan sektor pertanian menjadi tantangan yang membutuhkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan di masa mendatang. Ketahanan pangan harus berbasis pada produksi dalam negeri dan tidak bergantung pada stok negara lain. Karena itu, pemerintah sangat perlu menciptakan strategi yang tepat dalam meningkatkan daya tarik kaum muda untuk berpartisipasi secara optimal dalam menciptakan dan meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia.

Menjaga kelestarian lingkungan dan mengatasi sampah. Kelestarian lingkungan seringkali dikontradiksikan dengan kemajuan ekonomi suatu wilayah. Seakan-akan kemajuan suatu wilayah akan selalu melahirkan kerusakan lingkungan. Sementara lingkungan sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung berbagai aktivitas dalam kehidupannya. Karena itu daya dukung dan daya tampung lingkungan perlu mendapat perhatian yang serius bagi pemerintah.

Berbagai perencanaan pembangunan harus diselaraskan dengan tersedia ruang terbuka hijau yang seimbang sesuai dengan rencana tata ruang wilayahnya. Selain itu, perkembangan penduduk yang semakin meningkat dan pengolahan pangan seringkali menghasilkan sampah rumah tangga yang semakin hari semakin besar. Setiap hari sampah rumah tangga akan semakin meningkat, sehingga perlu penanganan yang serius dalam pengelolaannya.

11. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan.

Mendorong integrasi data kependudukan berbasis data administrasi menuju satu data kependudukan Indonesia.

Arah kebijakan pembangunan kependudukan tersebut akan memperkuat 5 pilar pembangunan kependudukan sebagai bagian pengembangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Nasional selama ini. Kelima pilar untuk mencapai visi pembangunan kependudukan 2045 meliputi:

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk yang Berkelanjutan.

Jumlah kuantitas penduduk harus tetap terkendali agar mendukung perencanaan pembangunan berbagai aspek. Jumlah penduduk harus diselaraskan dengan daya dukung dan daya tampung wilayah. Pengendalian penduduk tidak hanya sebatas jumlah kuantitas semata, tetapi harus



- memperhatikan komposisi dan struktur penduduk di masa mendatang demi menjaga keberlanjutan partisipasi penduduk dalam pembangunan.
2. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.** Kualitas penduduk harus terus ditingkatkan hingga sejajar dengan negara-negara maju saat ini. Peningkatan kualitas ini merupakan syarat mutlak dalam pengembangan ekonomi di masa mendatang. Dalam persaingan global, kualitas sumberdaya manusia menjadi pertimbangan dalam berbagai aktivitas investasi yang akan menggerakkan perekonomian yang akan mengantarkan masyarakat menuju tingkat kesejahteraan yang diharapkan.
 3. **Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk.** Mobilitas penduduk selama ini lebih banyak dipengaruhi alasan ekonomi, karena itu pemerataan pengembangan ekonomi akan menjadi faktor penting dalam penataan persebaran penduduk. Aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah urbanisasi. Penduduk yang tinggal di perkotaan semakin mengalami peningkatan secara signifikan. Penataan dan perencanaan perkembangan urbanisasi perlu dikendalikan agar penduduk perkotaan dan penduduk di perdesaan saling bersinergi dalam pembangunan ekonomi di masa mendatang.
 4. **Pembangunan Keluarga dan Perlindungan Sosial Berkelanjutan.** Pembangunan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketahanan keluarga baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, agama serta berbagai dimensi lainnya akan sangat berpengaruh dalam kelangsungan pembangunan di masa mendatang. Perlindungan sosial yang komprehensif sangat tepat untuk segera ditingkatkan cakupannya agar semua keluarga Indonesia memiliki peran aktif dalam proses pembangunan.
 5. **Penguatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan dan Database Kependudukan.** Registrasi penduduk yang merupakan pencatatan administrasi dinamika kependudukan akan menjadi dasar penting dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek. Karena itu, data kependudukan yang berbasis *database* harus menjadi acuan kebijakan hingga tingkat desa dan kelurahan. Bahkan *updating* terhadap dinamika kependudukan terkait kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk harus bisa dilakukan di tingkat desa maupun kelurahan, bahkan bisa melibatkan RT/RW di semua lapisan masyarakat. Kondisi ini akan sangat ideal dan mendukung validitas data yang selama ini menjadi acuan perencanaan pembangunan nasional.



Arah kebijakan pembangunan kependudukan melalui penguatan lima pilar pembangunan kependudukan merupakan wujud nyata dan keseriusan pemerintah dalam menyambut 100 tahun Indonesia merdeka. Pada tahun 2045, kondisi kependudukan Indonesia setidaknya akan menampilkan 10 ciri wajah kependudukan Indonesia, yang:

1 Jumlah pertambahan dan persebaran penduduk yang proporsional sesuai kondisi daya tampung daya dukung wilayah.

2 Kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta energi (*basic needs*) tercukupi dan terpenuhi.



3 Infrastruktur sarana prasarana aktivitas dan mobilitas tersedia dengan baik.

4 Fasilitas pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan aktivitas sosial kemasyarakatan serta ekonomi, mudah untuk diakses.



5 Pola hidup bersih dan sehat yang ramah lingkungan terkondisi dengan baik.



6 Terkoneksi dan terlindungi dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi.

7 Berpenghidupan yang amanah, taat menjalankan perintah agama sesuai yang diyakininya, bermartabat, bersahabat dengan alam semesta, berperikemanusiaan, rukun, damai dan berbudaya.



8 Terlaksananya sistem hukum yang berkeadilan, sistem pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia yang handal, Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang solid.



9 Jiwa nasionalisme terhadap Bangsa Indonesia, terlaksana dengan baik.



10 Terwujud sebagai generasi emas era baru keluarga Indonesia maju.



5.3

Roadmap Pembangunan Kependudukan Menuju Indonesia Emas 2045

Peta Jalan (*milestone*) Pembangunan Kependudukan Indonesia 2025-2045, tidak terlepas dari tujuan nasional negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Agar pembangunan kependudukan dapat mendukung terwujudnya kondisi yang diinginkan, maka disusunlah *roadmap* (peta jalan) sampai dengan tahun 2045, yang terbagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu; tahun 2025, 2035 dan 2045.

Agar pembangunan kependudukan dapat mendukung pada tiap tahapan dengan periode sepuluh tahunan, dibuat untuk mengetahui sejauh mana sasaran pembangunan kependudukan telah berjalan secara sistematis dan terencana sehingga dapat diketahui sasaran-sasaran yang telah dicapai pada periode berikutnya, serta kebutuhan kebijakan strategis dan program yang perlu dilakukan secara tepat dan terukur

dalam rangka menjaga kesinambungan tahapan pembangunan kependudukan hingga menuju Indonesia emas tahun 2045. Pencapaian sasaran dapat digambarkan berdasarkan bukti yang akurat, terpercaya, terintegrasi dan termanfaatkan sebagai langkah penting dan strategis untuk akselerasi pembangunan kualitas sumber daya manusia secara terpadu, akuntabel, terukur, mandiri dan berkelanjutan.

Pada tataran operasional, pencapaian tujuan nasional dalam pembangunan kependudukan Indonesia dilakukan melalui:

- Mengikuti kondisi nilai sosial budaya Indonesia dari jangka menengah sampai dengan jangka panjang, yaitu masyarakat religius dengan tujuan utama meneruskan keturunan. Memeratakan capaian sasaran demografi seperti; angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) yang tinggi, persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) dan angka kelahiran kelompok usia 15-19 tahun (ASFR) yang semakin menurun



serta Median Usia Kawin Pertama (MUKP) seluruh wanita umur 25 tahun.

- Tahun 2035, pembangunan SDM diarahkan pada peningkatan kualitas, SDM unggul berdaya saing berdasarkan siklus hidup dengan memperhatikan kesinambungan sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga. Sasaran-sasaran kualitas penduduk telah dapat dicapai, baik yang mencakup pendidikan, kesehatan, ekonomi Iptek.

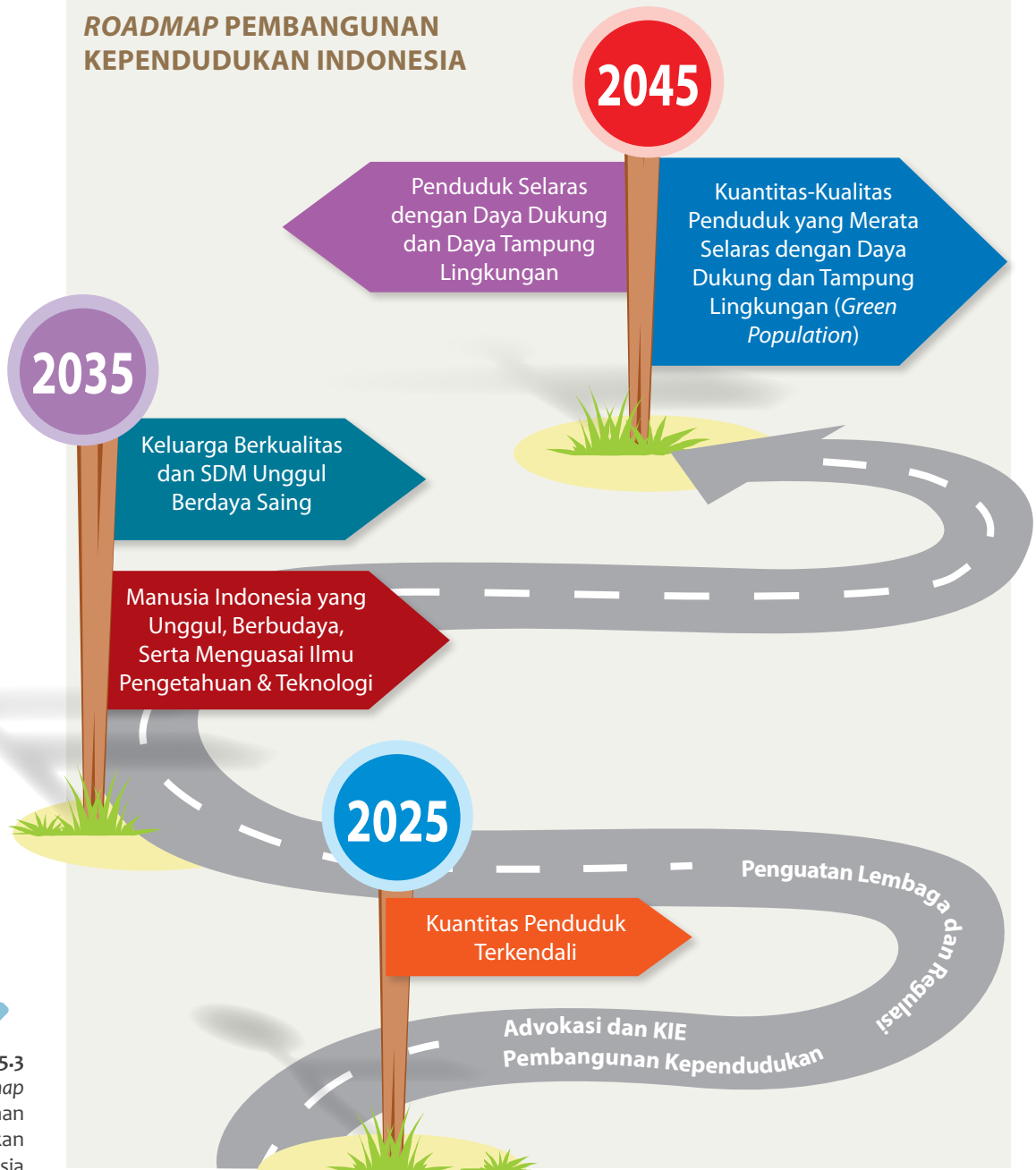
Di bidang kesehatan berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2045 dari hasil Sensus Penduduk 2020, UHH pada tahun 2045 ditargetkan mencapai 80 tahun, usia lama sekolah 12 tahun, penguasaan Iptek termasuk teknologi informasi, pengamalan terhadap agama yang dianut mampu beradaptasi dengan revolusi industri 5.0 mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur diwujudkan melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Indonesia akan mengalami perubahan struktur usia dengan persentase penduduk usia kerja yang lebih tinggi (15-64 tahun). Ini akan memberikan peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan Bonus Demografi hingga 2041.

Hingga pada periode tersebut dependensi rasio penduduk Indonesia masih berada pada persentase yang rendah yaitu < 50%.

- Tahun 2045, keselarasan antara kebijakan kependudukan dengan pelestarian lingkungan, diwujudkan dengan kuantitas, kualitas penduduk yang merata selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan (*green population*). Penduduk perlu lahan untuk berproduksi dan lingkungan yang sehat untuk menjaga kesehatan dan keberlangsungan hidupnya. Kebijakan kependudukan, lingkungan dan penghapusan kemiskinan harus terpadu dalam satu kebijakan yang komprehensif.

Diharapkan penduduk Indonesia yang unggul dan berdaya saing, sejahtera, maju, mandiri dan berbudaya secara berkelanjutan dapat terwujud. Pada periode akhir tahun 2045 sumber daya manusia yang ada dapat mendukung sepenuhnya tercapainya visi Indonesia 2045 yaitu negara Indonesia yang maju dan mandiri di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya menjadi negara sejahtera adil dan makmur.

ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN INDONESIA



Grafik 5.3
Roadmap
pembangunan
kependudukan
Indonesia

Peta jalan (*roadmap*) pembangunan kependudukan dipresentasikan melalui lima pilar pembangunan kependudukan, yaitu:

PILAR 1. PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK, menjelaskan perkembangan dan dinamika jumlah penduduk yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan tetap memperhatikan kesinambungan dan keberlanjutan komposisi dan struktur penduduk di masa mendatang.



PILAR 2. PENINGKATAN KUALITAS PENDUDUK, menyajikan rencana dan target pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di masa mendatang. Pembangunan kualitas penduduk harus memiliki kontribusi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia dan Indeks daya saing global sebagai wujud peran serta Indonesia dalam kiprah global. Peran teknologi dalam era digitalisasi merupakan aspek yang sedang menguat dan terus akan berkembang hingga masa mendatang. Penduduk Indonesia harus terus diupayakan dapat memiliki akses dalam berbagai perkembangan digital yang menjadi kecenderungan global di masa mendatang.

PILAR 3. PEMBANGUNAN KELUARGA, menyajikan rencana pembangunan keluarga sebagai unit terkecil dalam menyiapkan sumberdaya manusia unggul di masa mendatang. Pembentukan keluarga harus memiliki perencanaan yang matang dan didukung kemandirian ekonomi yang kuat serta dilandasi nilai-nilai budaya kearifan lokal yang selama ini menjadi dasar dan benteng kokoh bangsa Indonesia.

PILAR 4. PENATAAN PERSEBARAN DAN PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK, menyajikan perencanaan persebaran penduduk Indonesia yang lebih merata antar wilayah. Konsentrasi penduduk yang dominan di Pulau Jawa perlu

dikurangi dengan menciptakan kesempatan kerja dan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah di luar Jawa.

PILAR 5. PENINGKATAN TATA KELOLA DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN, menjelaskan pentingnya dukungan sistem administrasi pemerintah yang mencakup administrasi kependudukan. Berbagai kebijakan dan bantuan pemerintah harus berbasis administrasi kependudukan. Berbagai bencana alam, kemiskinan, dana bantuan sekolah, PKH dan lain sebagainya membutuhkan dukungan kelengkapan administrasi agar meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam mensukseskan program-programnya. Berbagai perencanaan akan lebih mudah jika berbasis data digital sehingga pembangunan akan berjalan lebih efektif dan efisien di masa mendatang.

Dalam kaitan ini, sangat penting dirumuskan rancangan induk (*Blueprint Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045*) yang berkaitan dengan kuantitas, kualitas, pembangunan keluarga, mobiltas dan tata kelola administrasi kependudukan sehingga tersusun *roadmap* dengan sasaran yang ingin dicapai pada kurun waktu 10 tahunan berbagai pilar kependudukan ini. Dimana tiap-tiap tahapan yang disusun dalam *roadmap* tergambar dalam indikator-indikator pembangunan kependudukan sebagai berikut.

5.3.1 Pilar Pengendalian Kuantitas Penduduk

Dinamika penduduk Indonesia bergantung pada pertumbuhan alamiah dan kondisi migrasi internasional. Tingkat migrasi internasional yang terjadi di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan kondisi jumlah penduduk saat ini, sehingga dinamika penduduk di masa mendatang sangat bergantung pada tingkat kelahiran dan pola kematian yang akan terjadi di masa mendatang. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, kebijakan pembangunan kependudukan di Indonesia didorong untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang, dimana TFR sebesar 2,0 dan NRR = 1.

Memperhatikan tingkat fertilitas saat ini yang sudah mendekati *replacement level* dan tren penurunannya dalam jangka panjang, TFR di Indonesia diperkirakan akan terus mengalami penurunan pada masa-masa yang diperkirakan akan terus menurun hingga mencapai 0,30 pada tahun 2045. Bahkan, pertumbuhan penduduk nol (*zero population growth*) diprediksi akan terjadi pada tahun 2070. Hal ini perlu direspon pemerintah dengan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana yang tepat untuk mempertahankan penduduk tumbuh seimbang dan menghindari pertumbuhan penduduk negatif setelah tahun 2070. TFR harus tetap dipertahankan secara nasional pada angka 2,0 dan NRR pada angka 1, agar stok penduduk usia produktif tetap terjaga dari waktu ke waktu dan pada gilirannya akan memperpanjang

periode bonus demografi di Indonesia. Dalam jangka panjang mempertahankan kondisi penduduk tumbuh seimbang agar dapat mencapai, mempertahankan dan memetik bonus demografi dengan tetap fokus menjaga komponen kependudukan dan meningkatkan kualitas penduduk berdasarkan siklus hidup guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Indonesia memiliki populasi yang semakin menua. Jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas telah meningkat dari 6,16 persen tahun 2020 menjadi 14,61 persen tahun 2045 (BPS, 2023). Lebih lanjut pada tahun 2045 diproyeksikan 1 dari 5 penduduk adalah lansia. Delapan provinsi telah memasuki *aging population*, dimana persentase lansia di provinsi tersebut telah melebihi 10%, yaitu DIY, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Bali, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Jawa Barat.

Namun, penting untuk diingat bahwa bonus demografi adalah peluang, bukan jaminan. Kesempatan atau peluang adalah momentum untuk dapat memberikan dorongan besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka pengangguran, menciptakan SDM yang berkualitas dan perkembangan sosial suatu negara jika dikelola dengan baik. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan dapat membentuk dinamika transisi demografi dan potensi bonus demografi suatu negara. Untuk dapat mengambil manfaat penuh dari bonus demografi, negara harus memiliki



kebijakan yang mendukung seperti investasi dalam pendidikan, pelatihan kerja, penciptaan lapangan kerja, serta penyediaan layanan kesehatan dan sosial yang memadai. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan menghadapi tantangan serta peluang yang muncul dari perubahan struktur usia penduduk. Beberapa kebijakan terkait bonus demografi di Indonesia meliputi:

- **Program Keluarga Berencana (KB):** Indonesia telah memiliki program KB yang telah berjalan sejak beberapa dekade. Program ini bertujuan untuk mengendalikan tingkat kelahiran dengan menyediakan informasi dan layanan terkait kesehatan reproduksi dan keluarga berencana kepada masyarakat. Program KB ini telah berkontribusi pada penurunan tingkat kelahiran di negara ini.
- **Peningkatan Akses Pendidikan:** Pendidikan merupakan faktor penting dalam mengoptimalkan bonus demografi. Dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas, baik formal maupun non-formal, Indonesia dapat menghasilkan angkatan kerja yang lebih terampil dan produktif.
- **Pemberdayaan Perempuan:** Kebijakan yang mendorong pemberdayaan perempuan, termasuk hak reproduksi dan akses terhadap pekerjaan, dapat berdampak positif pada tingkat kelahiran dan partisipasi ekonomi.
- **Pengembangan Lapangan Kerja dan Kewirausahaan:** Dengan memiliki bonus demografi yang besar, Indonesia memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan beragam.

Kebijakan yang mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta kewirausahaan dapat membantu memanfaatkan potensi ini.

- **Investasi dalam Pendidikan dan Keterampilan:** Peningkatan investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja dapat mempersiapkan angkatan kerja untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
- **Perencanaan Pensiun dan Pelayanan Kesehatan untuk Lansia:** Meskipun saat ini fokusnya pada bonus demografi, Indonesia juga perlu mempersiapkan infrastruktur dan kebijakan untuk menghadapi penuaan penduduk di masa depan. Ini termasuk perencanaan pensiun, program kesehatan, dan layanan sosial untuk lansia.
- **Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan:** Upaya untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dapat membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih stabil dan mendukung perkembangan penduduk tumbuh seimbang.
- **Infrastruktur dan Teknologi:** Investasi dalam infrastruktur dan teknologi dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produktivitas, yang penting untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi.

Bonus demografi memiliki periode terbatas, karena struktur usia penduduk suatu negara akan berubah seiring waktu. Jika suatu negara tidak mampu mengatasi tantangan yang muncul seiring penuaan penduduk, bonus demografi dapat berubah menjadi beban ekonomi. Tantangannya adalah sampai saat ini Indonesia masih memiliki beragam

permasalahan dari beberapa aspek:

- SDM tenaga kerja Indonesia masih sedikit yang berpendidikan menengah ke atas, akibatnya daya saing pun cukup rendah.
- Lapangan kerja masih sangat sedikit sehingga angka pengangguran di Indonesia saat ini masih cukup tinggi.

Oleh karena itu, pengelolaan bonus demografi memerlukan perencanaan dan kebijakan jangka panjang yang bijaksana. Karena itu pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai inisiatif untuk mengelola bonus demografi dengan bijaksana, termasuk melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan guna membentuk SDM yang siap menghadapi bonus demografi antara lain melalui:

1. Dukungan pembiayaan UMKM dari pemerintah berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya.
2. Generasi muda sebagai *agent of change* sudah sepatutnya memberikan pergerakan sederhana yang bisa dilakukan, yaitu belajar dan mengabdikan kepada masyarakat demi menyokong Indonesia emas.
3. Adanya kurikulum Merdeka Belajar, dimana fokusnya adalah aspek pengembangan kreativitas dan inovasi dalam studi permasalahan.
4. Adanya Kartu Prakerja dengan harapan masyarakat, menciptakan wirausaha sehingga terciptalah lapangan kerja. Namun, perlu diingat bahwa suksesnya implementasi kebijakan ini bergantung pada

kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional.

Di sisi lain, disparitas fertilitas antar wilayah menuntut adanya kebijakan kependudukan yang tidak seragam antarwilayah di Indonesia. Jika membuat sistem dinamik tidak hanya untuk level nasional namun hingga *level* provinsi dan kabupaten/kota. Harus ada upaya, level fertilitas itu menghasilkan sesuatu seperti nilai ekonomi. *Long Form* SP2020 mencatat TFR sebesar 2,18 yang berarti hanya sekitar 2 anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa hasil *Long Form* SP2020 menggambarkan kondisi fertilitas Indonesia yang menuju Replacement Level. Dalam lima puluh tahun terakhir terjadi penurunan angka fertilitas remaja (ASFR 15–19 tahun) yaitu dari 155 dari hasil SP1971 menjadi 26,64 kelahiran per 1000 perempuan umur 15-19 tahun dari hasil *Long Form* SP2020. Jumlah provinsi dengan ASFR 15-19 dan TFR di atas angka nasional lebih banyak dibandingkan yang berada di bawah angka nasional.

Selisih ASFR 15-19 antara provinsi tertinggi dan terendah cukup besar. ASFR 15–19 tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah (63,13), ASFR terendah terdapat di Provinsi DKI Jakarta (7,90). Terdapat 13 provinsi dengan ASFR 15-19 di bawah angka nasional dan 21 provinsi dengan ASFR 15-19 di atas angka nasional. ASFR (20- 24) meningkat tajam menjadi sekitar 98 kelahiran per 1.000 perempuan, puncak ASFR pada kelompok umur 25-29 tahun yaitu sebesar 130,62 kelahiran per 1.000 perempuan. Pada kelompok umur selanjutnya, ASFR menurun sebesar 17,89 kelahiran per 1.000 perempuan untuk umur 40-44 tahun hingga sebesar 2-3 kelahiran per 1.000 perempuan umur 45-49 tahun.



TFR di seluruh provinsi di Indonesia berada < 3, TFR tertinggi di Provinsi NTT (2,79) sementara TFR terendah terjadi DKI Jakarta (1,75). Beberapa daerah khususnya di Pulau Jawa dan Bali, serta sebagian Sulawesi, angka fertilitas sudah mencapai 2,0 atau bahkan lebih rendah. Di tingkat provinsi, 7 provinsi (20,6%) sudah mencapai 2,0 atau kurang dari itu, sementara itu masih ada 11 provinsi (32,4%) dengan TFR yang tinggi yaitu 2,4 atau lebih tinggi. Demikian juga di tingkat kabupaten/kota menunjukkan disparitas yang cukup lebar, dimana 19,6% kabupaten/kota telah memiliki TFR 2,0 atau kurang, sementara masih ada 36,2% masih memiliki TFR 2,4 ke atas. Secara umum, disparitas angka kelahiran total (TFR) di Kabupaten/Kota masih banyak yang $\geq 2,4$. Pemerintah perlu mengakselerasi penurunan persentase Kabupaten/Kota dengan TFR $\geq 2,4$ dari 36,2% tahun 2022 menjadi 20% pada tahun 2045.

Kebijakan menjaga TFR pada *replacement level* secara nasional, dapat ditempuh dengan mengurangi disparitas TFR antar provinsi dan kabupaten/kota. Daerah yang memiliki capaian TFR di atas *replacement level* perlu upaya terus menerus untuk mengurangi angka fertilitas hingga mendekati 2,0 dengan program keluarga berencana yang paripurna. Perlu didalami penyebab masih tingginya TFR tersebut apakah disebabkan akses dan keterjangkauan program KB yang rendah, kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, tingkat putus pakai yang tinggi, maupun karena faktor sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Upaya meningkatkan penggunaan kontrasepsi modern harus terus dilakukan hingga mencapai 63 pada tahun 2045, dibarengi dengan penurunan *unmet need* hingga 10 persen dan penurunan angka

putus pakai hingga 15 persen tahun 2045.

Pada daerah dengan tingkat fertilitas yang sudah mencapai 2,0 atau lebih rendah, program keluarga berencana lebih diarahkan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi dan melindungi hak-hak perempuan dengan mengurangi kehamilan berisiko baik terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat maupun terlalu sering. Kehamilan berisiko ini erat kaitannya dengan kematian ibu dan bayi yang saat ini menjadi salah satu konsen utama pemerintah untuk menurunkannya. Angka fertilitas remaja (15-19) tahun saat ini masih tinggi, mencapai 26,6 pada tahun 2022, demikian juga angka fertilitas pada wanita usia 40-44 tahun masih perlu diturunkan hingga angka 5 pada tahun 2045 (Tabel 5.1.).

Pada *era replacement level*, program keluarga berencana dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kualitas keluarga dan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik untuk menyongsong Indonesia emas tahun 2045. Dengan keikutsertaan dalam program KB, setiap keluarga akan memiliki kehidupan yang lebih sehat, pendidikan anak yang lebih terjamin, serta tingkat kesejahteraan yang meningkat.

Dari sisi kesehatan, program KB memperbaiki kesehatan reproduksi perempuan, menurunkan risiko kematian ibu dan bayi, dan menurunkan risiko kejadian *stunting*. Dari sisi ekonomi, kepesertaan KB mendorong meningkatnya produktivitas baik laki-laki maupun perempuan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Keluarga kecil juga mendukung pengasuhan dan pendidikan anak yang lebih baik didukung oleh adanya jarak kehamilan yang lebih baik.

No.	Indikator Pilar Kuantitas	2022 (Baseline)	ROADMAP		
			2025	2035	2045
1.	Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) per WUS usia 15-49 Tahun	2,18	2,11	2,02	1,97
2.	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR</i>)	59,4	60	62	63
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidakterpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	14,7	13	11,5	10
4.	Angka Putus Pakai KB	21,6	20	15	15
5.	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	26,6	23	16	10
6.	ASFR 40-44 Tahun	18	15	10	5

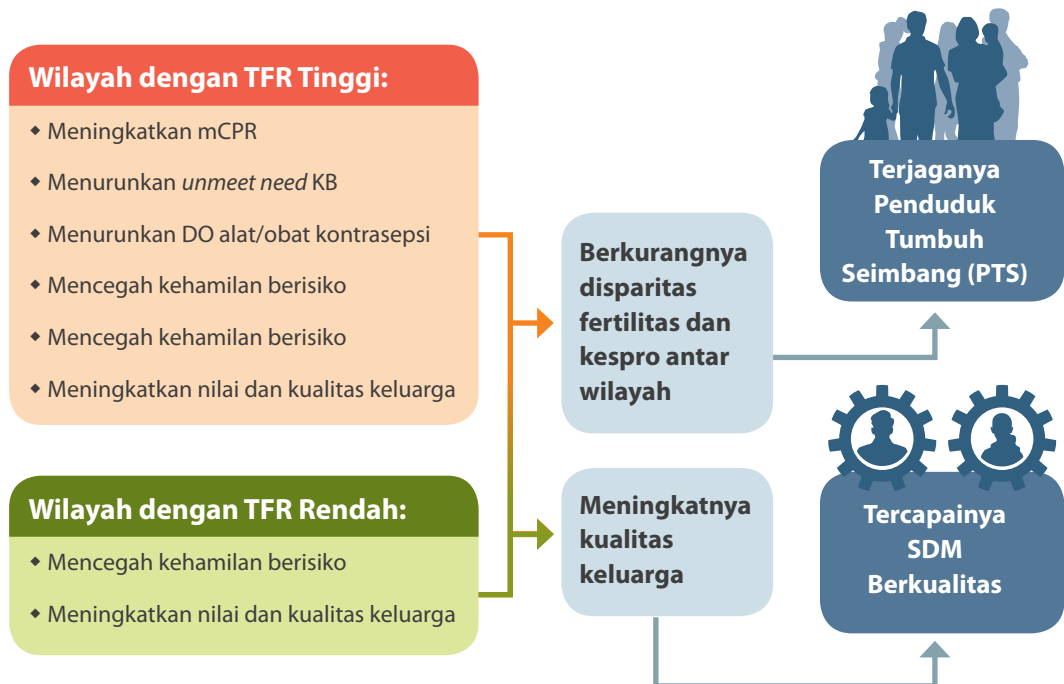


Tabel 5.1
Roadmap pengendalian kuantitas penduduk tahun 2022-2045

KETERANGAN:

1. Sumber LF SP2020
2. Skenario Moderat dan Optimis Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050

KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA DI ERA REPLACEMENT LEVEL



Grafik 5.4.
Kebijakan Keluarga Berencana di era replacement level



Grafik 5.5
Pentingnya menjaga TFR 2,0 dan NRR 1

5.3.2 Pilar Peningkatan Kualitas Penduduk

Peningkatan kualitas penduduk sangat penting dalam menuju Indonesia Emas tahun 2045 maka menyiapkan SDM Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) sangat penting untuk mengisi bonus demografi sebagai akibat dari capaian angka ketergantungan yang rendah. Ada tiga aspek penting yang harus menjadi perhatian dalam peningkatan kualitas penduduk, yaitu kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

A. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan menjadi indikator penting dalam pembangunan baik secara global maupun nasional. Dalam upaya mempercepat terwujudnya pendidikan yang merata dan berkualitas, mengurangi kesenjangan di masyarakat, pemerintah melakukan peningkatan akses masyarakat pada layanan pendidikan. Taraf pendidikan

rakyat Indonesia ditingkatkan untuk menciptakan manusia Indonesia yang unggul di tahun 2040-2045 yang merupakan perwujudan Indonesia Emas. Dengan strategi pembangunan pendidikan yaitu :

1. Kualitas dan layanan pendidikan merata.
2. Peran masyarakat dalam pembangunan pendidikan.
3. Profesionalisme guru, perubahan metode pembelajaran.
4. Budaya sekolah dan baca.
5. Pendidikan vokasi, *enterprenuership* dan karakter.

Roadmap peningkatan kualitas pendidikan disajikan pada tabel 5.2 yang menekankan pada tiga indikator penting dalam upaya peningkatan pendidikan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, salah satunya melalui peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pentingnya pembangunan SDM yang mampu menguasai Iptek guna mendukung pembangunan nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas dan sebagai salah satu negara maju di dunia pada tahun 2045. Kualitas SDM di era digitalisasi sangat penting, apabila populasi bertambah, makanan terancam berkurang, maka kebijakan kependudukan terkait ke berbagai aspek, termasuk pangan dan lain-lain. Menimbang potensi besar yang dimiliki, Indonesia harus bergerak maju menjadi salah satu pusat pengembangan Iptek di kawasan Asia dan dunia, terutama di bidang ilmu keteknikan, kemaritiman, biodiversitas, teknologi material, serta kebencanaan dan mitigasi bencana.

Pada tahun 2045 nanti, RLS Indonesia diharapkan telah mencapai 12,0 tahun. Kondisi ini memberikan jaminan bahwa angkatan kerja yang tersedia telah memiliki pendidikan minimal menengah atas (SLTA). Target capaian ini sangat realistis untuk dicapai dimasa mendatang. Namun, rata-rata lama sekolah hanyalah syarat minimum



Tabel 5.2
Roadmap peningkatan kualitas penduduk (pendidikan) tahun 2022-2045

Indikator Peningkatan Kualitas Penduduk (Pendidikan)	2022	ROADMAP		
		2025	2035	2045
Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 (tahun)	8,69 tahun	9,46 tahun	10,7 tahun	12,0 tahun
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	39,37%	33,94%	50%	60%
Angkatan Kerja Lulusan SMA Sederajat dan PT	44%	50%	70%	90%

Sumber:
Sumber: RPJPN 2025-2045



yang harus dipenuhi angkatan kerja dimasa mendatang. Kebutuhan tenaga kerja dalam pasar kerja tentu saja membutuhkan calon pekerja yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Kondisi perekonomian dimasa mendatang akan berbasis penggunaan teknologi digital.

Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu menjadi penggerak daya saing bangsa. Data *Global Competitiveness Index* menunjukkan, peringkat Indonesia masih rendah, terutama pada indikator kesiapan teknologi dan pilar inovasi dan kontribusi teknologi tinggi terhadap ekspor manufaktur. Kemudian sumber daya Iptek yang berorientasi kepada usur terapan dan juga pengembangan Iptek yang berkaitan dengan program pemerintah untuk berswasembada di sejumlah komoditi.

Dalam mendayagunakan SDM Iptek yang profesional, responsif terhadap dunia usaha industri, telah dilakukan persiapan antara lain membangun *data based* (keahlian, kepakaran, pengalaman kerja), membangun *network* dengan calon pengguna SDM, membangun kerja sama dengan *stakeholder*, magang industri, meningkatkan kualifikasi, meningkatkan kompetensi serta tindak lanjut *assesment* manajemen talenta dan *training* sesuai dengan kebutuhan segmen pasar.

Pendayagunaan SDM Iptek yang tepat disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran, yaitu: *Pertama*, adopsi dan penerapan Iptek. *Kedua*, peningkatan

kemampuan dan kemandirian Iptek. *Ketiga*, pengembangan teknologi berbasis maritim. *Keempat*, pengembangan dana inovasi. *Kelima*, pelembagaan *model triple helix* yang dapat dikembangkan menjadi *N-helix*, dan keenam, pengembangan Iptek berbasis budaya. Sehingga strategi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai fokus pada:

1. Adopsi dan Penerapan Iptek
2. Kemampuan dan Kemandirian Iptek
3. Pengembangan Dana Inovasi
4. Kerjasama Perguruan Tinggi, Swasta, dan Pemerintah.

Penguatan Iptek tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dengan memprioritaskan pengembangan teknologi sendiri (*indigenous technology*) yang didukung oleh SDM Iptek (peneliti dan perekayasa). Karena nanti tahun 2045 Indonesia diharapkan menguasai Iptek, seperti penggunaan robotik dan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence (AI)*. Kebijakan yang akan dibuat terkait kependudukan sangat kompleks sehingga butuh sistem dinamik. Kedepannya, kebijakan kependudukan berdasarkan saintifik yang dilakukan melalui Sistem prediksi penduduk (*population prediction system*) bisa dilakukan oleh AI (*artificial intelligence*). AI dapat membantu dalam memprediksi tren kependudukan dengan lebih akurat dan cepat. Kependudukan adalah salah satu faktor kunci dalam perencanaan pembangunan suatu negara. Prediksi kependudukan yang akurat sangat penting untuk perencanaan sumber daya, infrastruktur, dan kebijakan publik.

Selain bidang iptek, Indonesia juga membutuhkan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan seni, terutama berbasis budaya lokal. Kekayaan budaya lokal diharapkan memiliki daya tarik dalam pasar global yang memberikan nilai tambah dalam persaingan di tingkat global. Kondisi ini merupakan wujud nyata dan komitmen pemerintah dalam mengembangkan SDM unggul yang berkebudayaan tinggi, ditingkatkan melalui kapitalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan pengembangan etos kerja untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat kebudayaan dan peradaban dunia.

Dampak yang diharapkan dengan tercapainya peningkatan kualitas Pendidikan adalah tersedianya angkatan kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Angka partisipasi kasar (*gross enrollment ratio*) perguruan tinggi di Indonesia akan mencapai 60%. Hal ini menggambarkan bahwa fasilitas, kapasitas, aksesibilitas, serta keterlibatan masyarakat Indonesia terhadap pendidikan semakin baik, dalam hal ini yaitu pada jenjang perguruan tinggi. Tidak hanya di jenjang strata (S1, S2, maupun S3), namun penguatan pendidikan vokasi akan mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah sebagai implementasi orientasi *demand-driven* dalam rangka merespon dan memenuhi angkatan kerja di berbagai sektor industri maupun jasa dan pasar kerja global yang akan semakin kompetitif. Terciptanya

sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan tuntutan pembangunan, dimana dirinya memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lapangan pekerjaan.

Diproyeksikan pada tahun 2045 angka angkatan kerja lulusan pendidikan SMA sederajat dan perguruan tinggi akan mencapai 90 persen. Tingkat pengangguran alamiah (*natural unemployment*) akan berada pada tingkat 3 hingga 4 persen. Sebagaimana kita ketahui bahwa tingkat pengangguran alami adalah tingkat pengangguran minimum yang pasti terjadi dalam kondisi perekonomian yang berjalan baik dan sehat, dengan asumsi dasar tidak akan pernah terjadi tingkat pengangguran nol dalam sebuah perekonomian. Tingkat pengangguran alami dapat terjadi karena perpindahan atau pergerakan tenaga kerja dari satu bidang ke bidang lain, dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, baik secara sukarela ataupun tidak. Pengangguran alami termasuk di dalamnya adalah persiapan dan atau peralihan dari pencari kerja yang baru saja menyelesaikan pendidikannya (*fresh graduate*) untuk bersiap memperoleh pekerjaan.

Indonesia konsisten fokus meningkatkan kualitas pendidikan di antaranya melalui peningkatan kuantitas dan kualitas melalui jalur formal, informal dan non formal. Fokus utama dari pengembangan SDM adalah generasi muda usia produktif. Generasi produktif, berkualitas dan bisa bersaing dalam dunia global ditunjang oleh karakter yang kuat, membutuhkan peran pendidikan formal dari tingkat dini, dasar, menengah, tinggi hingga kedinasan.



Pendidikan formal melalui proses pembelajaran yang terstruktur dan jangka waktu relatif panjang, habituasi, serta ekosistem yang mendukung akan efektif sebagai media penanaman nilai-nilai baik pada diri anak didik yang terinternalisasi.

Selain itu juga dilakukan pendidikan informal yang sasarannya adalah keluarga dan hubungan sosial kemasyarakatan. Diharapkan sistem pendidikan melalui jalur ini akan memperkuat karakter generasi muda dalam menjalani perilaku di lingkungan masyarakat dan di dunia kerja. Disamping 2 (dua) jalur sistem pendidikan di atas, juga perlu diperkuat dengan pendidikan jalur non formal, yang dilakukan melalui swadaya masyarakat secara mandiri di bawah bimbingan pemerintah. Terutama Pendidikan yang berbasis pada pengembangan keterampilan.

Mengingat sekarang ini sudah masuk era globalisasi, dimana semangat nasionalisme kian memudar, perlu dilakukannya upaya untuk tetap menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada generasi muda, meningkatkan nilai-nilai luhur budaya sebagai sarana membangkitkan semangat nasionalisme, memupuk rasa kesatuan dan persatuan bangsa tanpa membedakan status sosial, perbedaan agama, ras, maupun budaya. Penting memupuk dan menanamkan paham nasionalisme dan nilai falsafah Pancasila pada setiap instansi pendidikan baik di tingkat sekolah dasar ataupun dalam lingkungan perguruan tinggi. Serta pendidikan yang lebih berorientasi kepada pembentukan karakter kebangsaan sudah seharusnya menjadi perhatian khusus dari pemerintah ataupun

lembaga terkait yang berfokus kepada pendidikan di Indonesia. Dengan karakter nasionalisme yang tertanam sejak dini dipastikan tidak akan ada lagi generasi yang apatis untuk peduli dan cinta tanah air Indonesia.

B. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Upaya peningkatan kualitas penduduk sangat erat kaitannya dengan peningkatan kualitas kesehatan. Salah satu bukti keberhasilan peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat Indonesia akan tergambar dalam capaian umur harapan hidup saat lahir, terbebas dari permasalahan gizi sejak 2025 dan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit semakin rendah. Tahun 2025-2029 merupakan perkuatan fondasi transformasi dengan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.

Indikator-indikator kualitas kesehatan manusia Indonesia merupakan salah satu aspek yang penting dalam penyusunan peta jalan (*road map*) menuju Indonesia Emas 2045 karena tujuan utama dari pembangunan adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati umur panjang, hidup sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Dalam *roadmap* yang disajikan pada tabel 5.3 pemerintah akan bertekad untuk mewujudkan capaian umur harapan hidup hingga mencapai 80 tahun. Guna mewujudkan target capaian ini maka dibutuhkan dukungan penanganan kesehatan yang kondusif dalam mendukung tercapainya umur harapan hidup.



Tabel 5.3
Roadmap
peningkatan
kualitas penduduk
(kesehatan) tahun
2022-2045

Indikator Kualitas Penduduk (Kesehatan)	2022	ROADMAP		
		2025	2035	2045
Usia Harapan Hidup Saat Lahir/ <i>Life Expectancy at Birth</i>	73.37	72.24	75.58	76.37
Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada Balita (%)	21.6	13.5	6.72	5.0
Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	302	274	179	76
Cakupan Kepersertaan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional (%)	86.55	98,00	99.00	99.50

Sumber:

1. LF SP2020

2. Penduduk Berkualitas Menuju Indonesia Emas Kebijakan Kependudukan Indonesia 2020-2050

Gangguan terhadap kondisi kesehatan yang dapat mengakibatkan kematian, akan berdampak terhadap keberlangsungan proses pembangunan yang akan dilakukan di masa mendatang. Pemerintah juga harus memiliki perhatian terhadap berbagai kondisi gangguan kesehatan yang tercermin melalui angka morbiditas yang muncul, baik karena endemik, pandemi maupun penyakit degeneratif yang mengalami perkembangan sangat signifikan dewasa ini. Sejalan dengan hal itu, angka tingkat kematian, kesakitan, dan kecacatan yang diakibatkan oleh penyakit di Indonesia pada tahun 2045 menjadi semakin rendah. Malaria tereliminasi di seluruh kabupaten/kota. Penyakit HIV/AIDS, tuberculosis, dan penyakit tidak menular lainnya menurun. Jumlah kasus TBC berdasarkan Global TB Report tahun 2022 terbanyak di dunia pada

kelompok usia produktif (usia 25 sampai 34 tahun), Indonesia sendiri terbanyak pada kelompok usia produktif usia 45 sampai 54 tahun, diproyeksikan pada tahun 2045 Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk menurun menjadi 76).

Angka kekurangan gizi pada balita/stunting juga semakin berkurang. Di tahun 2045 diproyeksikan menurun menjadi 5 persen. Hal ini terutama didukung dengan tingkat kesejahteraan keluarga dan juga kesadaran perilaku pola hidup sehat masyarakat yang semakin baik serta akses layanan kesehatan yang semakin luas dan bermutu. Sementara itu untuk cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional diharapkan meningkat sebesar 98 persen tahun 2025 dan tahun 2045 diproyeksikan meningkat menjadi 99 persen.



Strategi pembangunan di bidang kesehatan dalam Visi Indonesia 2045 menurut Bappenas fokus pada:

1. penguasaan teknologi kesehatan,
2. pemahaman perilaku hidup sehat,
3. pencegahan dan pengendalian penyakit yang responsif, serta
4. penyediaan fasilitas dan jaminan kesehatan nasional.

C. Peningkatan Ekonomi

Pembangunan ekonomi menjadi ujung tombak yang dapat dirasakan penduduk secara langsung melalui tingkat kesejahteraan yang dirasakan dalam kehidupannya. Karenaitu, pembangunan kualitas penduduk akan berkaitan erat dengan capaian pembangunan ekonomi itu sendiri. Perubahan struktur ekonomi dan kemajuan teknologi berpengaruh pada struktur tenaga kerja, untuk itu pasar tenaga kerja perlu bersifat fleksibel dan adaptif. Produktivitas

tenaga kerja ditingkatkan dan kemajuan teknologi dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Pengangguran terjaga pada tingkat *natural unemployment* (3-4 persen).

Tahapan Reformasi Ketenagakerjaan 2016 – 2025. Reformasi menuju pasar tenaga kerja yang fleksibel dan adaptif yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja melalui penguatan relevansi dengan kebutuhan industri.

2026 – 2035. Penguatan transisi lapangan kerja dan pelathan berbasis kompetensi, yaitu penguatan relevansi terutama di bidang keteknikan dan teknologi informasi.

2036 – 2045. Pemantapan sistem pelatihan dan sertifikasi di seluruh sektor serta transisi lapangan kerja, dengan Perluasan cakupan SJSN Ketenagakerjaan secara universal.

Indikator Kualitas Penduduk (Ekonomi)	2022	ROADMAP		
		2025	2035	2045
Pertumbuhan Ekonomi	5,88	6,15	7,08	8,00
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,56	5,0	4,56	4,0
Tingkat Kemiskinan	12,35	11,08	7,72	5,38
Indeks gini	0,43	0,42	0,39	0,36
Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,27	1,87	0,98	0,02
Pengeluaran per Kapita	14.208	14.502	15.526	16.623
“Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)”	28,08	43,19	70,32	85,00



Tabel 5.4
Roadmap peningkatan kualitas penduduk (ekonomi) tahun 2022-2045

Sumber: RPJPN 2025-2045

Di tengah target dan perencanaan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan dipertahankan pada angka 8 persen pada tahun 2045, maka membutuhkan partisipasi angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja yang diperkirakan tahun 2045 sebesar 78% (laki-laki 90% dan untuk perempuan 65%) yang selaras dengan kemajuan kualitas penduduknya. Ketidak sesuai rancangan pembangunan dengan *skill* yang dimiliki angkatan kerja, akan mengakibatkan meningkatnya pengangguran. Angka pengangguran terbuka mencerminkan adanya gap antara kebutuhan dan permintaan tenaga kerja.

Pemerintah berkomitmen menekan angka pengangguran hingga 4,33 pada tahun 2045. Dengan besarnya angkatan kerja – diperkirakan 197,2 juta orang pada tahun 2045– yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, maka diharapkan setiap penduduk akan mampu mencapai tingkat produktivitasnya yang memadai.

Dengan tingginya tingkat pendidikan di masa mendatang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi perkapita yang diperoleh penduduk untuk dapat memenuhi kebutuhannya secara merata. Diharapkan Indonesia pada tahun 2045 tidak mengalami

middle income trap dimana kondisi pertumbuhan ekonomi tinggi namun hanya disangga oleh sejumlah kalangan penduduk menengah berpenghasilan tinggi yang tidak bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat secara luas. Dengan kata lain, ekonomi tumbuh secara merata di seluruh tingkatan lapisan masyarakat.

Faktor pendapatan ini menjadi tolak ukur kemajuan peradaban suatu negara, dilihat dari pekerjaan yang dilakukan serta jumlah penghasilan yang berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi negara. Melalui faktor pendapatan tiap penduduk dapat meningkatkan peradaban negara itu sendiri akan kemampuannya memenuhi kebutuhan, sehingga terlihat jelas kualitas penduduknya dalam membangun perekonomian negara. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas penduduk (ekonomi), ada 6 (enam) strategi besar sebagai *game changer* transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan, yaitu :

1. SDM berdaya saing,
2. transformasi digital,
3. integrasi ekonomi domestik,
4. produktivitas sektor ekonomi,
5. ekonomi hijau, dan
6. pemindahan ibu kota negara (IKN).

5.3.3 Pilar Pembangunan Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil komunitas masyarakat yang memiliki gambaran struktur sosial kemasyarakatan. Keluarga merupakan aset penting dalam memajukan peradaban sosial

budaya suatu bangsa. Pembangunan keluarga bertujuan mencapai kondisi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan damai serta tangguh menghadapi dinamika perubahan yang berlangsung



dengan sangat cepat. Terwujudnya ketahanan keluarga diharapkan dapat membangun kesadaran dan sekaligus menjadi sandaran bagi kelangsungan berkehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, damai, berkualitas dan sejahtera bagi semua anggota keluarga.

Tujuan kependudukan tidak hanya ditentukan dari angka. Terutama dimensi keluarga, bagaimana menanamkan nilai keluarga di generasi muda. Intervensi tidak hanya pada individunya saja namun juga harus berkaitan dengan keluarga. Kebijakan terkait kependudukan harus memperhatikan dua sisi/aspek, yakni anak-anak dan lansia. Sehingga dalam Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga ada siklus hidup dari lahir hingga lansia.

Konsep keluarga sudah mulai terjadi degradasi moral/nilai maknanya telah mencapai taraf yang mengkhawatirkan. Komunikasi antar anggota keluarga yang merupakan ikatan antargenerasi akan mengalami perubahan terutama dengan berkembangnya teknologi informasi yang berlangsung dengan cepat. Permasalahan kualitas keluarga antara lain perkawinan tanpa perencanaan, belum ada keseimbangan peran antara ibu dan ayah dalam keluarga (pengasuhan anak, pengambilan keputusan bersama, dan lain-lain) merupakan tanggung jawab semua termasuk keluarga, kualitas hidup lansia, kerentanan keluarga dan tingginya jumlah keluarga miskin dan rentan. Keluarga merupakan lembaga masyarakat pertama dan paling utama yang menjadi tempat penanaman nilai terhadap individu/keluarga. Keluarga berperan meminimalisir degradasi moral/nilai yaitu dengan penyadaran, penanaman, dan pengembangan nilai

dan norma, ideologi, regulasi yang terdapat di dalam masyarakat.

Peta Jalan Pembangunan Kualitas Keluarga Menuju Keluarga Berkualitas ini sudah masuk dalam RPJPN. Menuju 2045, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan keluarga sampai level daerah sesuai Visi Indonesia 2045. Digunakan sebagai target pembangunan dan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan keluarga melalui program/kegiatan yang dibutuhkan oleh keluarga di daerah sesuai dengan permasalahan yang ditemukan, peta jalan pembangunan keluarga menuju keluarga berkualitas adalah sebagai berikut:

- **Tahun 2025**, setiap anggota keluarga menjalankan fungsinya serta memiliki kesempatan dan kemampuan untuk mengembangkan potensi dirinya dan keluarganya untuk mewujudkan keluarga yang berketahanan dan sejahtera serta memelihara nilai luhur bangsa. Setiap anggota keluarga menjalankan fungsinya serta memiliki kesempatan dan kemampuan optimal untuk mengembangkan potensi dirinya dan keluarganya untuk mewujudkan keluarga yang berketahanan dan sejahtera serta memelihara nilai luhur bangsa.
- **Tahun 2035**, keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik/materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan



Tabel 5.5
Roadmap
pembangunan
keluarga 2022-
2045

No.	Indikator Pembangunan Keluarga	2022	ROADMAP		
			2025	2035	2045
1.	Rumah layak huni (%)	60,66	65,0	80,0	95,0
2.	Lansia Mandiri (%)	32,5	35,5	45,0	60,0
3.	MUKP (tahun)	20	21,2	22,3	23,7
4.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)	56,07	64,0	74,0	80,0

Sumber data :Proyeksi Parameter Bangsa Kencana, 2023

keluarganya untuk hidup harmonisdalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin termasuk memelihara nilai luhur bangsa.

- **Tahun 2045**, keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik/ materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri, keluarga dan lingkungannya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin termasuk memelihara nilai luhur bangsa

Untuk menjamin implementasi pembangunan keluarga komprehensif dan integratif sebagai program prioritas nasional dan bersifat multi sektor, maka *roadmap* pembangunan keluarga 2022-2045 dengan pokok-pokok kegiatan yang dapat dilakukan seperti pada tabel 5.5.

Salah satu kebutuhan dasar masyarakat adalah rumah layak huni, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),

pada tahun 2022 persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni di Indonesia sebesar 60,66% dan diharapkan pada tahun 2045 sebesar 95 persentase rumah tangga di Indonesia menempati rumah yang layak huni. Upaya peningkatan kelayakan hunian perlu memperhatikan banyak aspek yang berkaitan dengan paradigma masyarakat Indonesia terhadap rumah hunian. Secara sosial budaya rumah memiliki ikatan nilai-nilai yang mengatur setiap individu di dalamnya.

Secara ekonomi, rumah masih dipahami sebagai bagian dari aset yang akan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Tentu saja kondisi ini mensyaratkan bahwa keluarga memiliki kemandirian ekonomi agar memiliki kemampuan memiliki aset, bukan hanya sebagai hunian tetapi sebagai kepemilikan. Perkembangan di negara-negara maju seperti Jepang misalnya, mengalami kondisi yang perlu dijadikan pembelajaran. Akibat perubahan demografi yang mengarah pada *aging population*, akhirnya banyak rumah-rumah kosong setelah penghuninya



meninggal. Sementara anaknya sebagai penerus memiliki kehidupan sendiri yang berada di wilayah lain dan tidak mungkin melanjutkan kehidupan di daerah asalnya.

Di Indonesia sendiri hampir tiga dari sepuluh (29,52 %) rumah tangga dihuni oleh lansia dan tiga dari lima (59,21%) lansia tersebut adalah kepala keluarga. Tahun 2045 nanti Indonesia menjadi negara maju dan menua, jumlah lansia sekitar 63 juta jiwa (19,9%) naik 4 kali lipat dari tahun 2010 ke tahun 2045, Usia harapan hidup diproyeksikan 80,0 tahun atau 1 dari 5 penduduk adalah lansia, bagaimana para lansia menjadi mandiri, sehat, aktif dan produktif tentunya harus dimulai sejak dini berdasarkan siklus kehidupannya. Kebijakan yang dilakukan adalah kebijakan yang *pro active aging*, memetik bonus demografi dan pemberdayaan lansia harus dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

Ancaman pembangunan keluarga mengalami benturan yang signifikan ketika terjadi perceraian. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mengantisipasi dan menekan kasus-kasus perceraian:

Pertama, meningkatkan komunikasi yang saling terbuka dalam keluarga. Akses informasi seringkali muncul sebagai pisau bermata dua. Satu sisi informasi menjadi faktor yang menguatkan ikatan keluarga dengan beragamnya fenomena yang muncul dalam kehidupan sosial masyarakat dipahami dengan positif, maka ikatan emosional dalam rumah tangga juga positif. Di sisi lain, kemudahan mengakses informasi memunculkan

harapan baru di tengah kejenuhan dan rutinitas dalam keluarga. Jika kondisi ini muncul dan dimanfaatkan pihak ketiga, maka dapat menjadi ancaman yang akan memunculkan disharmonis keluarga.

Kedua, perencanaan dalam pembentukan keluarga. Peningkatan usia kawin pertama akan menjadi faktor penting dalam melakukan pembangunan keluarga. Keutuhan dan kedewasaan keluarga sangat erat kaitannya dengan ketangguhan keluarga. Pendewasaan usia kawin, bukan hanya menggeser umur usia kawin semata, tetapi harus dibarengi dengan persiapan yang matang sebelum memasuki masa-masa berkeluarga. Usia ideal menikah menurut BKKBN adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Kemandirian ekonomi akan menjadi bagian penting sebagai pertimbangan seseorang yang akan berkeluarga. Selain itu, keputusan keluarga untuk memiliki anak dan berapa jumlahnya perlu persiapan dan perencanaan yang matang, agar anak-anak yang akan lahir berkualitas dan tentunya dua anak lebih sehat.

Lansia merupakan tahap akhir dari fase kehidupan manusia yang pasti akan kita hadapi semua. Meningkatnya teknologi dan sarana kesehatan memengaruhi tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat hingga meningkatkan usia harapan hidup, dimana pada tahun 2045 diproyeksikan usia harapan hidup menjadi 76,37 tahun. Banyaknya jumlah lansia tidak lah menjadi beban jika kita memberi perhatian bagi para lansia agar mampu menjadi lansia yang mandiri sehingga tidak menjadi beban bagi diri

sendiri, keluarga dan negara. Penduduk lansia ini harus dijaga agar tetap sehat dan apabila masih mampu berkontribusi secara ekonomi, bukan tidak mungkin Indonesia kembali mengalami bonus demografi tahap kedua (*second phase of demographic dividend*).

Strategi yang harus disiapkan adalah strategi yang bersifat komprehensif, mengatur seluruh aspek kehidupan lansia mulai dari kesehatan hingga perekonomian. Terdapat lima strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk mendukung kehidupan lansia yang bermartabat di masa mendatang.

1. Memperpanjang usia pensiun dari kondisi saat ini, yaitu pensiun pada usia 58 tahun. Hal ini diperlukan agar para pekerja dapat mempersiapkan masa lansianya dengan lebih baik, dari aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan lainnya. Namun demikian, pemerintah perlu memperhatikan efek dari memperpanjang usia pensiun bagi pekerja muda. Tantangan dari kebijakan memperpanjang usia pensiun adalah sulitnya angkatan kerja muda untuk masuk ke dalam dunia kerja. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya pekerja usia lanjut yang lebih berpengalaman menghambat masuknya angkatan kerja muda ke dunia kerja.
2. Memperluas kesempatan kerja yang lebih spesifik, terpilah jenis pekerjaan untuk tenaga kerja muda dan tenaga kerj lansia. Selain untuk memperkecil efek dari kebijakan memperpanjang usia pensiun pekerja, strategi ini juga

untuk memastikan pembagian jenis pekerjaan yang jelas antara pekerja muda dan lansia.

3. Memastikan para penduduk produktif menjaga pola konsumsi berkesinambungan sehingga menjadi lebih sehat saat memasuki usia lansia. Pemerintah perlu mempromosikan pola hidup sehat. Selain itu, mempromosikan hidup sehat sejak muda berarti mengurangi risiko terjangkit penyakit kronis saat tua, sehingga pengeluaran untuk kesehatan di masa lansia dapat ditekan dan digunakan untuk investasi kepada SDM yang lebih muda.
4. Memastikan Usia Harapan Hidup Sehat (UHHS) juga meningkat. Dengan memastikan UHHS meningkat, pemerintah juga memonitor berapa banyak lansia yang memerlukan bantuan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Selain itu, indikator UHHS juga berguna dalam menghitung potensi tingkat produktivitas dari lansia, sampai usia berapa lansia dapat bekerja secara optimal sebelum harus berhenti karena masalah kesehatan. Dengan demikian, potensi penerimaan dari aset yang ditabung melalui instrument investasi juga dapat dihitung.
5. Memastikan tabungan, investasi, maupun akumulasi aset lainnya dari penduduk dapat dimanfaatkan untuk perekonomian dan memacu bonus demografi kedua. Selain itu, perlu dipastikan agar jaminan sosial



juga melindungi lansia, baik dalam hal kesehatan maupun jaminan di hari tua. Kedua jaminan tersebut untuk memastikan para pekerja dapat menabung aset pada masa produktifnya dengan percaya diri, sehingga akumulasi aset para pekerja menjadi lebih besar.

Pemerintah sekarang ini telah menyiapkan agar SDM lansia bisa mandiri, sejahtera, dan bermartabat di usia senjanya, dengan penyiapan investasi lapangan kerja yang produktif sejak dini kepada generasi muda. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan, yang menjadi payung hukum dalam koordinasi lintas sektor dalam menjalankan program-program kelanjutusiaan.

Upaya mewujudkan visi Stranas Kelanjutusiaan dan membuat lansia mandiri dan sejahtera salah satunya adalah dengan mewujudkan ketahanan keluarga lansia. Keluarga harus diberikan pemahaman mengenai pentingnya dalam mendampingi dan merawat lansia serta memberdayakan lansia di Indonesia, untuk lansia yang tidak potensial, diharapkan keluarga juga memahami cara perawatan lansia jangka panjang (LTC=Long Term Care).

Merujuk amanat Undang-undang No.52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, cita-cita yang ingin diraih adalah terwujudnya keluarga berkualitas. Lima ciri keluarga berkualitas adalah (1) dibentuk atas ikatan perkawinan yang sah, (2) sejahtera, sehat, maju dan mandiri, (3) memiliki jumlah anak yang ideal, (4) berwawasan ke depan,

(5) bertanggungjawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sehingga dalam upaya mewujudkan pembangunan keluarga ini maka strategi yang dilakukan adalah:

1. Merencanakan perkawinan dengan membangun keluarga berdasarkan perkawinan yang sah, melalui kesadaran masyarakat untuk melangsungkan perkawinan minimal usia 25 tahun baik laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan.
2. Edukasi kepada calon pasangan mengenai prinsip-prinsip dasar berkeluarga, mengelola keluarga, termasuk keseimbangan peran antara suami-istri dalam keluarga (pengasuhan anak, pengambilan keputusan bersama, merencanakan jumlah anak yang akan dilahirkan).
3. Membangun keluarga dengan jumlah anak ideal melalui perencanaan keluarga dengan pemakaian kontrasepsi untuk mengatur jarak kehamilan, edukasi pentingnya pendewasaan usia perkawinan pertama.
4. Meningkatkan kualitas perlindungan bagi perempuan dan anak.
5. Peningkatan kualitas remaja dan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga.
6. Keseimbangan peran antara suami istri dalam keluarga (pengasuhan anak, pengambilan keputusan bersama dan sebagainya).

5.3.4 Pilar Mobilitas dan Penataan Persebaran Penduduk

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Pemerintah menetapkan kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk dan/atau penyebaran penduduk untuk mencapai persebaran penduduk yang optimal, didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Dengan kata lain persebaran penduduk yang proporsional, sehingga tidak ada lagi penumpukan penduduk/kepadatan penduduk di satu wilayah melebihi kemampuan daya dukungnya, sehingga dapat menyebabkan lingkungan tidak sehat, kumuh dan tidak nyaman. Pertimbangan ini sudah terdapat di dalam beberapa peraturan seperti, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPHLP).

Berdasarkan hasil *Long Form* SP 2020 angka migrasi internasional sebesar -0,11 per 1.000 penduduk, artinya lebih banyak penduduk Indonesia yang keluar negeri daripada yang masuk ke wilayah Indonesia pada periode pendataan. Pada proyeksi penduduk 2020-2045 jumlah migrasi internasional dianggap konstan. Perbedaan Nilai

NMR disebabkan bertambahnya jumlah penduduk, sedangkan jumlah migrasi internasional dianggap konstan.

Hal ini juga terjadi pada migrasi internal, semakin ke depan, mobilitas penduduk baik migrasi keluar maupun masuk dan migrasi antar negara dan provinsi tidak akan bisa dibatasi, oleh karena itu agar migrasi penduduk tersebut tidak berdampak negatif atau menciptakan masalah baru bagi daerah asal maupun tujuan dan sebaliknya menjadi benefit atau menguntungkan kedua belah pihak. Maka persebaran antar wilayah, kepadatan penduduk di perkotaan perlu upaya nyata yang harus dilakukan yaitu dengan menata perpindahan penduduk melalui peraturan-peraturan kependudukan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, antar-kelompok, pendapatan serta kelompok rentan, terdapat 3 indikator yang ditetapkan sebagai pengukur keberhasilan serta sebagai alat pemantauan dan evaluasi RPJPN 2025-2045. Dua indikator di antaranya adalah sebagai berikut:

INDIKATOR PERSEBARAN PENDUDUK



Tabel 5.6
Indikator
Persebaran
Penduduk

Indikator	Baseline 2022	Target 2045
Indeks Williamson	0.778	0.750
Kontribusi KTI terhadap PDM (persen)*	21,5	28,5

Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

* Bersifat Sementara



Ketimpangan wilayah adalah ukuran ketidakmerataan pembangunan yang terjadi dalam sebuah wilayah, diukur dengan menggunakan perhitungan indeks Williamson. Indeks Williamson besarnya antara nol dan satu. Semakin kecil angka yang dihasilkan menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil pula atau dapat dikatakan makin merata. Tetapi jika angka yang didapat mendekati satu maka ketimpangan semakin lebar. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator persebaran penduduk menurut perhitungan indeks Williamson, diharapkan tingkat ketimpangan wilayah di Indonesia menurun sebesar 0,028 menjadi 0,750 pada Tahun 2045 dari *baseline* tahun 2022 yang sebesar 0,778. Lalu pada indikator selanjutnya Pemerintah menargetkan peningkatan kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) dalam produk domestik bruto (PDB) dari 21,5% di tahun 2022 ditargetkan naik menjadi 28,5% pada tahun 2045.

Peninjauan ulang terhadap peraturan-peraturan tersebut, termasuk implementasinya merupakan upaya awal yang perlu dilakukan, arus migrasi masuk menuju kota-kota besar perlu diarahkan pada pola migrasi non permanen yang terampil dan memiliki potensi untuk bersaing di sektor-sektor tersier. Kebijakan yang dikembangkan tidak bisa dilakukan secara langsung, tetapi dengan cara tidak langsung melalui berbagai sektor yang terkait erat dengan aspek migrasi penduduk.

Perencanaan mobilitas penduduk hendaknya memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2007, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka diperlukan upaya penataan ruang dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam penataan ruang wilayah.

Hubungan antara pola pergerakan dan distribusi penduduk sangat terkait dengan proses pembangunan. Selama ini, alasan utama perpindahan penduduk dikaitkan dengan faktor ekonomi dan lapangan kerja. Langkahlangkah untuk mengatur distribusi ini terutama berfokus pada mengurangi jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Jawa dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa.

Rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang telah dicanangkan oleh pemerintah memiliki dampak positif yang akan mendukung pengaturan dan keseimbangan penduduk di Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, yang menjadi lokasi pembangunan IKN. Migrasi menuju wilayah IKN tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, terutama DKI Jakarta dan daerah sekitarnya, melainkan juga diharapkan dari kota-kota lain seperti Makassar dan Banjarmasin serta daerah-daerah lain yang mengalami kepadatan penduduk, sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang untuk bermigrasi ke tempat yang baru.

IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, serta mempercepat Transformasi Ekonomi Indonesia. IKN dibangun dengan iden-titas nasional, perencanaan dan pelak sanaannya berdasarkan



kebijakan pembangunan kawasan atas kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing kawasan, mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan tantangan yang ada di kawasan tersebut.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur nampaknya akan segera dilakukan pada tahun 2024 setelah Rancangan Undang-Undang tentang IKN telah disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang (UU). Mengacu pada Buku Saku Pemindahan IKN (Bappenas, 2021), di dalamnya dijelaskan mengenai Tahapan menuju 2045 Tahapan perwujudan IKN:

- **Periode 2020-2024, Pemindahan tahap awal KIKN (Kawasan Ibukota Negara).** Tahapan yang dilakukan: Membangun infrastruktur utama (misal Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR) dan perumahan di area utama KIKN, pemindahan ASN tahap awal (misal TNI, Polri, MPR), infrastruktur dasar yang utama selesai dibangun dan beroperasi (misal air, energi, rail) untuk 500 ribu penduduk di tahap awal, Presiden pindah ke IKN sebelum 16 Agustus 2024 dan merayakan Peringatan Hari Kemerdekaan RI di IKN pada tanggal 17 Agustus 2024.
- **Periode 2025-2035. Membangun IKN sebagai Area Inti yang Tangguh.** Di fase ini dilakukan: mengembangkan fase kota berikutnya (misal, pusat inovasi dan ekonomi); menyelesaikan

pemindahan pusat pemerintahan IKN, mengembangkan sektor-sektor ekonomi prioritas; menerapkan sistem insentif untuk sektor-sektor ekonomi prioritas; mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

- **Periode 2035-2045. Membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem 3 kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan Timur.** Dalam fase ini: Memperluas pengembangan kota dan menyelesaikan konektivitas antar dan dalam kota, Destinasi FDI No.1 untuk sektor-sektor ekonomi prioritas di Indonesia, 5 besar destinasi utama di Asia Tenggara bagi talenta global, mendorong jaringan utilitas yang berkelanjutan dengan mengimplementasikan *enablers* ekonomi sirkuler, mengembangkan pusat inovasi dan pengembangan talenta.
- **Periode 2045 Onwards. Mengokohkan reputasi sebagai “Kota Dunia untuk Semua”,** dalam fase ini: Menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing, 10 besar *livable city* di dunia, mencapai net zero-carbon emission dan 100% energi terbarukan pada kapasitas terpasang – kota pertama di dunia dengan jumlah penduduk >1 juta jiwa yang akan mencapai target ini.

Migrasi dan mobilitas penduduk antar provinsi akan menjadi aspek yang sangat penting dan menarik ketika melakukan pembangunan kependudukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tentu saja, perhatian pemerintah dalam melakukan penataan dan pengarahannya



penduduk adalah memberikan jaminan bahwa setiap potensi ekonomi yang terdapat di semua wilayah Indonesia adalah untuk mendukung kesejahteraan rakyat Indonesia.

Demikian juga untuk wilayah asal para migran, harus tetap terjaga struktur dan komposisi penduduknya sehingga tetap akan mampu melakukan proses pembangunan yang maksimal.

Urbanisasi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dan seakan tak terpisahkan ketika membahas permasalahan mobilitas dan migrasi. Penduduk perkotaan saat ini telah mencapai lebih dari 57 persen. Artinya, sebanyak 57 persen penduduk Indonesia telah mendiami wilayah perkotaan dan hanya 43 persen yang tinggal di perdesaan. Perencanaan pembangunan membutuhkan keseimbangan antara jumlah penduduk yang mendiami wilayah perkotaan dan penduduk yang tinggal di perdesaan.

Jika selama ini penduduk menuju perkotaan disebabkan faktor terbatasnya kesempatan kerja di perdesaan, maka selayaknya pemerintah membangun dari wilayah perdesaan. Perdesaan banyak memiliki komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat perkotaan, sementara di perkotaan memiliki keterbatasan dalam memproduksi semua kebutuhan. Sinergitas ini harus dijumpai dengan dukungan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan wilayah perkotaan dan perdesaan.

Selayaknya, semua wilayah di Indonesia di masa depan harus terkoneksi antar

satu dengan yang lainnya. Sehingga isu-isu daerah terpencil dan terisolasi bahkan terlupakan dalam proses pembangunan tidak muncul.

Pendataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Pembangunan pusat pertumbuhan wilayah baru atau mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang yang inklusif.
2. Penyediaan kesempatan kerja dan pemberian bantuan permodalan dan serta prasarana/sarana produksi.
3. Fasilitasi lahan dan perumahan yang terintegrasi dengan wilayah sekitarnya dalam satu kawasan pengembangan yang layak huni.
4. Tersedianya peluang usaha dan peningkatan kreativitas bagi UKM dengan dukungan pemasaran berbasis teknologi informasi
5. Meningkatkan kapasitas SDM, kelembagaan, dan kolaborasi para pihak dalam pengembangan ekonomi lokal di kawasan perdesaan
6. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan dasar, ekonomi (layanan keuangan), dan konektivitas di kawasan perdesaan
7. Meningkatkan kemudahan akses dan kualitas pelayanan dasar di wilayah perdesaan
8. Mengembangkan komoditas unggulan lokal dan mendorong industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan
9. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan BUMDes dalam mengembangkan komoditas unggulan dan teknologi pertanian di perdesaan.

Salah satu tujuan pemerintah Indonesia dalam percepatan pembangunan ekonomi yang merata adalah melalui terobosan yang dilakukan melalui pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di berbagai wilayah Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, istilah ini merujuk pada kawasan dengan batas tertentu di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dan diatur khusus guna mendukung perkembangan ekonomi melalui berbagai kebijakan, insentif fiskal, regulasi bisnis yang fleksibel, serta infrastruktur yang terintegrasi, dengan tujuan mendorong investasi, pertumbuhan industri, dan ekspor.

Ada beberapa manfaat dari adanya Kawasan Ekonomi Khusus, di antaranya yaitu:

1. Terdapat potensi kemunculan banyak peluang kerja, yang dapat mengurangi tingkat pengangguran dan menyerap tenaga kerja.
2. Dengan menyerap tenaga kerja, akan terjadi peningkatan pendapatan per kapita yang pada gilirannya akan meningkatkan daya beli masyarakat.
3. Peningkatan daya beli masyarakat akan memberikan dorongan pada aktivitas sektor riil lainnya, seperti perdagangan barang dan layanan.
4. Adopsi kawasan ekonomi khusus ini akan memungkinkan beragam kegiatan industri dan perdagangan, termasuk produk perkebunan, kerajinan, perikanan, dan pertanian.
5. Dengan perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang semakin pesat, diharapkan akan merangsang pertumbuhan sektor jasa pendukung lainnya yang akan berfungsi sebagai tempat usaha bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah KEK tersebut.

5.3.5 Pilar Tata Kelola Administrasi Kependudukan dan *Database* Kependudukan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam pembangunan kependudukan administrasi kependudukan sebagai suatu sistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara. Tujuan utama Undang-Undang ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan menjamin akurasi data, sehingga pemberian perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan publik dalam bentuk

penerbitan dokumen kependudukan (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil) dapat terpenuhi.

Tersusunnya sistem *database* kependudukan diharapkan dapat diperoleh data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan dan dapat digunakan sebagai data dasar dalam perencanaan dan bahan pengambilan keputusan secara cepat atau menjadi bagian dari sistem pendukung keputusan (*Decision Support System*).



No.	Indikator Tata Kelola Administrasi Kependudukan dan Database Kependudukan	2022	ROADMAP		
			2025	2035	2045
1.	Desa/Kelurahan Memiliki Database Kependudukan (%)	1,25	5.0 *	25.0 *	55.0 *
2.	Kartu Identitas Anak / KIA untuk Anak (%)	50	75	90	100
3.	Kepemilikan Akta Kelahiran Balita (%)	81.3	85 *	95 *	100 *



Tabel 5.7
Roadmap tata kelola administrasi kependudukan dan database kependudukan tahun 2022-2045

Sumber data :

1. Jumlah Desa Cantik tahun 2022, BPS, 2022* diproyeksi dari jumlah desa cantik tahun 2022.
2. Disdukcapil, 2023
3. Susenas, 2022* diproyeksikan

Penguatan *database* kependudukan sangatlah penting, karena dengan terdatanya semua penduduk memudahkan pemerintah melakukan intervensi kebijakan yang tepat sasaran dan memudahkan pelayanan publik. Tentunya kelengkapan dokumen kependudukan (*adminduk*) sangat berguna menetapkan keabsahan identitas (KTP elektronik untuk dewasa dan Kartu Identitas Anak/KIA untuk anak), perlindungan status hak-hak sipil penduduk, menyediakan data dan informasi kependudukan nasional, dalam upaya mewujudkan tertib *adminduk* secara nasional dan terpaduan menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor lainnya.

Untuk meningkatkan layanan dasar bagi masyarakat dan menjamin keseluruhan program pembangunan tepat sasaran maka perlu didukung dengan ketersediaan *roadmap* tata kelola administrasi kependudukan dan *database*

kependudukan seperti yang disajikan pada tabel 5.7.

Sistem digital telah mengalami lonjakan kemajuan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun belakangan ini. Data-data hingga desa tersaji dalam bentuk informasi yang dikemas dalam kecermatan dalam angka. Di tingkat desa dan kelurahan masih butuh pengembangan agar memiliki data digital yang berbentuk *database*. *Database* ditingkat desa dan kelurahan ini harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem *database* Dukcapil. *Updating database* dapat dilakukan lebih cepat melalui dinamika yang muncul di tingkat desa/kelurahan bahkan bisa sampai *level* RW/RT. Ada dua manfaat yang dapat dirasakan, yaitu verifikasi data secara *defacto* terhadap data digital disetiap wilayah. Bahkan, jika melibatkan RT/RW maka setiap masyarakat akan menjadi bagian

dalam upaya meningkatkan validitas data kependudukan nasional. Kejadian kematian dan kelahiran dengan sangat mudah untuk dilakukan *updating*, sehingga informasi data kependudukan bisa dilakukan secara *real time* dan *by name by address*.

Manfaat lainnya adalah memudahkan pelaksanaan program bantuan sosial yang menempatkan penduduk sebagai sasaran. Dengan ketersediaan data digital tersebut dapat diketahui secara pasti sasaran yang diinginkan pemerintah. Sehingga pelaksanaan program akan lebih efektif dan efisien serta mengurangi penyalanggunaan program bantuan ditingkat yang lebih rendah.

Cakupan pelayanan e-KTP hingga tahun 2020 telah mencapai 99,21 persen. Program ini perlu diikuti dengan layanan kartu identitas anak. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, adalah identitas yang wajib dimiliki setiap anak agar bisa mengakses pelayanan publik secara mandiri. Dengan kartu ini, memudahkan anak ketika ingin daftar sekolah, ikut kepesertaan BPJS, hingga pembukaan rekening bank.

KIA ini terbagi menjadi dua golongan, yaitu untuk anak umur 0-5 tahun dan 5-17 tahun dan dapat dimiliki mulai umur 0-17 tahun. KIA anak usia 0-5 tahun dibuatkan bersamaan dengan akta kelahiran yang didaftarkan di Dukcapil bersamaan dengan Kartu Keluarga orangtua. Pada tahun 2022, sudah hampir 50% anak

sudah memiliki KIA dan tahun 2045 diproyeksikan seluruh anak berusia 0-17 tahun sudah memiliki KIA.

Layanan kartu identitas anak ini perlu dikaitkan juga dengan dokumen akte lahir. Dokumen ini sangat penting sebagai bagian dari aspek legalitas yang merupakan hak setiap warga negara. Seluruh indikator ini harusnya menjadi bagian yang sangat penting dalam meningkatkan validitas data-data kependudukan di Indonesia. Ketika bayi lahir, mereka akan tercatat melalui akte lahir. Selanjutnya, ketika akan memasuki Pendidikan usia dini, mereka telah dilengkapi dengan kartu identitas anak hingga usia menginjak usia 17 tahun. Setelah usia di atas 17 tahun, perlu digantikan dengan diterbitkannya e-KTP sebagai dokumen resmi mereka.

Penataan Administrasi Kependudukan sangat penting perannya dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum, komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah perlu terus dimantapkan, dan perlu adanya dukungan politis untuk menciptakan kondisi kondusif secara nasional. Strategi yang dilakukan dalam penataan administrasi kependudukan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu:

- a. penataan dan pengelolaan *database* kependudukan; dan
- b. penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.
- c. memperkuat sistem pendaftaran penduduk sebagai proses pendataan dan pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan



- d. memberdayakan penduduk agar mampu melaporkan peristiwa kependudukan.
- e. meningkatkan kualitas data kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota menjadi Satu Data Kependudukan.
- f. perluasan jangkauan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri.
- g. percepatan kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.
- h. pengembangan dan peningkatan ketersediaan Statistik Hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- i. penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antarkementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan dalam layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pengembangan Statistik Hayati.



Daftar Pustaka

- Adha, L. H., Asyhadie, Z., & Kusuma, R. (2020). Industrial Digitalization and Its Impact on Labor and Employment Relationships in Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, Publisher Magister of Law, Faculty of Law Mataram University, V(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.49>
- Adioetomo, SA. (2018). *Buku Memetik Bonus Demografi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ananta, A. & Arifin, E. N. (2014). Emerging patterns of Indonesia's international migration. *Malaysian Journal of Economic Studies*, 51(1), 29-41. <https://mjes.um.edu.my/index.php/MJES/article/view/2817>
- Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia. (2020). *Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Capai 196,7 Juta*. Diakses pada 1 Juli 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/11/jumlah-penggunainternet-di-indonesia-capai-1967-juta>
- Azra, Azyumardi. (2007). *Identitas dan Krisis Budaya : Membangun Multikulturalisme Indonesia*. <https://kongresbud.budpar.go.id>.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2023). *Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2022. Penilaian Indeks Risiko Bencana Tahun 2022 - BNPB*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2016). *Profil Penduduk Indonesia Hasil Supas 2015*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2021*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2018). *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2018*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan RI, USAID. (2018). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2017*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2019*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). *Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2019*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2020*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2021*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Indeks Pembangunan Manusia 2021*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik Pemuda Indonesia 2021*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Tahun), 2019-2021*. Diakses pada 1 Juli 2022. <https://www.bps.go.id/indicator/40/501/1/angka-harapan-hidup-ahhmenurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>



- Badan Pusat Statistik (BPS), 2023. Profil Kemiskinan di Indonesia, Maret 2023, Jakarta, BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2023. Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, Hasil Sensus Penduduk 2020. Jakarta, BPS.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2023. Strategi Kebijakan TFR Asimetris Menuju Penduduk Tumbuh Seimbang. Jakarta, BKKBN 2023.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2023. Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2023 (PK23). Diseminasi Nasional Pemutakhiran Pendataan Keluarga dan Verifikasi, validasi Data Keluarga Berisiko Stunting Tahun 2023.
- Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2021). *Berita Resmi Statistik: Hasil Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, UNFPA. (2023). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050: Hasil Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: BPS.
- Bakhtiar, Y. (2020). Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menjadi Alasan Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19. *Legitimasi*, 9(2), 281–294.
- Badan Pusat Statistik (BPS). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kementerian Kesehatan RI, ORC Macro Calverton. (2013).
- Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012. Jakarta: BPS. Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, UNFPA. (2018). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 Hasil SUPAS 2015 (Edisi Revisi)*. Jakarta: BPS.
- Baert, K., Van Huffel, X., Jacxsens, L., Berkvens, D., Diricks, H., Huyghebaert, A., & Uyttendaele, M. (2012). *Measuring the perceived pressure and stakeholders' response that may impact the status of the safety of the food chain in Belgium*. *Food research international*, 48(1), 257-264.
- Barham, T. (2011). A healthier start: The effect of conditional cash transfers on neonatal and infant mortality in rural Mexico. *Journal of Development Economics*. 94(1), 74-85.
- Beal T, Tumilowicz A, Sutrisna A, Izwardy D, Neufeld LM. (2018). A review of child stunting determinants in Indonesia. *Matern Child Nutr*. 2018 Oct;14(4):e12617. <https://doi.org/10.1111/mcn.12617>.
- Cameron, L., Contreras Suarez, D., & Cornwell, K. (2019). Understanding the determinants of maternal mortality: An observational study using the Indonesian Population Census. *PloS one*, 14(6), e0217386.
- Cholil, Suhadi. (2018). Resonansi Dialog Agama dan Budaya: dari Kebebasan Beragama, Pendidikan Multikultural, sampai RUU Anti Pornografi. Center for Religious & Cross-Cultural Studies, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2008.
- Czaika, M., & de Haas, H. (2014). The globalization of migration: Has the world become more migratory. *International Migration Review*, 48(2), 283-323. <https://doi.org/10.1111/imre.12095>
- Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). (2022). Sistem Monitoring dan Evaluasi Jaminan Sosial (SISMONEV). <http://sismonev.djsn.go.id/>.



- Fuady, Ahmad Helmy. (2018). *Teknologi Digital dan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia*. Diakses pada 1 Juli 2022.
<http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipks/article/view/803/529>
- Hayes, A., & Setyonaluri, D. (2015). *Taking advantage of the demographic dividend in Indonesia. A Brief Introduction to Theory and Practice*. Jakarta: United Nation Population Fund (UNFPA).
- IMD World. (2021). *IMD World Digital Competitiveness Ranking 2021*. Diakses pada 1 Juli 2022.
<https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness-ranking/>
- IPCC. (2021). *5 Temuan Besar dari Laporan Iklim IPCC 2021*. Diakses pada 1 Juli 2022.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/11/jumlah-penggunainternet-di-indonesia-capai-1967-juta>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2023). *Penduduk Berkualitas Menuju Indonesia Emas: Kebijakan Kependudukan Indonesia 2020–2050*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2015). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2015*. Jakarta: KemenPPPA
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Indonesia Tahun 2020*. Jakarta: KemenPPPA.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2019). *Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Mengentaskan Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2016). *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta: KemenPPPA.
- Kementerian Perencanaan Nasional/Bappenas. (2022). *Diskusi pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045*. Jakarta: Bappenas.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014. *Riset Kesehatan Dasar 2013*. Jakarta, Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019. *Riset Kesehatan Dasar 2018*. Jakarta, Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Buku Saku: Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kominfo. (2017). *Indonesia Darurat Tenaga Programmer*. Diakses pada 1 Juli 2022 Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo.go.id)
- Kidd, S., Gelders, B., Rahayu, S.K., Larasati, D., Huda, K., & Siyaranamual, M. (2017). *Perlindungan Sosial bagi Penduduk Lanjut Usia di Indonesia*. Jakarta: TNP2K.
- Malamassam, A., Romdiati, H., Noveria, M., & Setiawan, B. (2016). *Migrasi penduduk usia muda dan modal manusia*. Pusat Penelitian Kependudukan - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.



- Mason, A., Lee, R., & Jiang, J. X. (2016). Demographic dividends, human capital, and saving. *The Journal of the Economics of Aging*, 7, 106–122. <https://doi.org/10.1016/j.jeoa.2016.02.004>
- Muhidin, S. 2014. Migration Patterns People of the Move Regional Dynamics in a Decentralized Indonesia (2014).
- Nasution, Prayogi, Mirsya, & Nasution. (2017). Analisis pengaruh bauran pemasaran terhadap volume penjualan. *Jurnal Riset Sains Manajemen Volume 1, Nomor 1*, 2017.
- Neri, A. C., Dupin, P., & Sánchez, L. E. (2016). A pressure–state–response approach to cumulative impact assessment. *Journal of Cleaner Production*, 126, 288–298.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 Tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik.
- Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.
- Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan
- Perumal, N., Bassani, D.G. and Roth, D.E. (2018). Use and misuse of stunting as a measure of child health. *The Journal of nutrition*, 148(3), pp.311–315.
- Rogers, P. P., Jalal, K. F., & Boyd, J. A. (2012). *An introduction to sustainable development*. Oxfordshire: Routledge.
- Sabri, Mohammad Nizar. (2015). Masyarakat Adat Merupakan Kesatuan Masyarakat yang Tetap dan Teratur. Diakses pada 1 Juli 2022. <https://www.neliti.com/publications/35325/masyarakat-adat-merupakan-kesatuan-masyarakat-yang-tetap-dan-teratur>
- Sanders. (2011). Development, Evaluation, and Multinational Dissemination of the Triple P-Positive Parenting Program. *Annual Review of Clinical Psychology*. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032511-143104>.



- Shostak, S. (2013). *Exposed science: Genes, the environment, and the politics of population health*. California: University of California Press.
- Smeru Research Institute. (2021). *Situasi Kemiskinan selama Pandemi*. Diakses pada 1 Juli 2022.
<https://smeru.or.id/id/article-id/situasi-kemiskinan-selama-pandemi>
- Thiede, B. C. and Gray, C. L. (2017). Heterogeneous climate effects on human migration in Indonesia. *Population and Environment* 39(2), 147–172
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2020). *Situasi Lansia di Indonesia dan Akses terhadap Program Perlindungan Sosial: Analisis Data Sekunder*. Jakarta: TNP2K.
- Tosepu, R., Effendy, D.S. and Ahmad, L.O.A.I., 2020. The first confirmed cases of COVID-19 in Indonesian citizens. *Public Health of Indonesia*, 6 (2), pp.70-71.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045*. Diakses pada 15 Agustus 2023.
<https://drive.google.com/file/d/1R4qezewihYoCR6omKKjgEfnCcEok2GbQ/view>
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPHLP).
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). *World Population Aging 2019: Highlights (ST/ESA/SER.A/430)*.
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2019). *World Population Prospects 2019: Highlights (ST/ESA/SER.A/423)*.
- United Nations Population Fund (UNFPA). (1995). *Programme of Action: Adopted at the International Conference on Population and Development, Cairo, 5-13 September 1994*. New York: UNFPA.
- United States Census Bureau. (2022). *Census Bureau Releases New Report on Aging in Asia*. Diakses pada 1 Juli 2022.
<https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2022/aging-in-asia.html>
- Wijayanti, U. T. (2021). Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 14(1), 14–26. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>.
- World Health Organization. (2019). *Trends in maternal mortality 2000 to 2017: estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United Nations Population Division*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2022). *Global Tuberculosis Report 2022*. Diakses pada 1 Juli 2022.
<https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022>



© Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Tahun 2024
Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk



Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Tahun 2024